

**Kementerian Perindustrian
Republik Indonesia**

**Proyek Pengembangan IKM
melalui
Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia**

Laporan Akhir Proyek

Juni 2016

Japan International Cooperation Agency (JICA)

**KRI International Corp.
UNICO International Corporation**

IL
JR
16-042

**Kementerian Perindustrian
Republik Indonesia**

**Proyek Pengembangan IKM
melalui
Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia**

Laporan Akhir Proyek

Juni 2016

Japan International Cooperation Agency (JICA)

**KRI International Corp.
UNICO International Corporation**

Wilayah/ Industri Sasaran Proyek

Wilayah	Industri Sasaran	
Kab. Samosir di Provinsi Sumatera Utara	Industri fesyen <i>Ulos</i> (kain tenun dari <i>Batak</i>)	
	 <p data-bbox="518 589 941 616">Kunjungan pemasaran ke pembeli potensial</p>	 <p data-bbox="1125 589 1284 616">Contoh produk</p>
Kab. Tegal di Provinsi Jawa Tengah	Industri logam (komponen kapal)	
	 <p data-bbox="587 940 882 967">Konsultasi teknis prototipe</p>	 <p data-bbox="997 940 1412 967">Produk tersertifikasi dikirim ke pembeli</p>
Kota Palu dan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah	Industri pengolahan kakao	Industri mebel rotan
	 <p data-bbox="590 1292 869 1319">Uji produksi olahan kakao</p>	 <p data-bbox="1013 1292 1396 1319">Kunjungan audit proses manufaktur</p>
Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat	Industri pengolahan aloe	
	 <p data-bbox="590 1644 869 1671">Pameran promosi produk</p>	 <p data-bbox="1053 1644 1348 1671">Workshop pengolahan aloe</p>
Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur	Industri alas kaki	
	 <p data-bbox="563 1995 906 2022">Workshop pembuatan alas kaki</p>	 <p data-bbox="986 1995 1428 2022">Desainer ternama tertarik dengan produk</p>

Proyek Pengembangan IKM
melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia
Laporan Akhir Proyek

Daftar Isi

Wilayah/ Industri Sasaran pada Proyek

I. Informasi Umum Proyek

I.1	Negara	1
I.2	Nama Proyek	1
I.3	Durasi Proyek	1
I.4	Latar Belakang	1
I.5	Tujuan Umum dan Tujuan Proyek	2
I.5-1	Tujuan Proyek	2
I.5-2	Output dan Kegiatan yang Diharapkan dalam Proyek	3
I.6	Lembaga Pelaksana (<i>Counterparts</i>)	3
I.7	Informasi Proyek Lainnya (fase dan industri sasaran)	4

II. Hasil Proyek

II.1	Hasil Proyek	5
II.1-1	Input dari Pihak Jepang	5
(1)	Mobilisasi tenaga ahli	5
(2)	Biaya lokal	5
(3)	Pengadaan perlengkapan kantor	5
(4)	Pelatihan (studi banding) di Jepang	6
(5)	Kesempatan pelatihan lain di Jepang selama Proyek	6
II.1-2	Input dari Pihak Indonesia	7
(1)	Counterpart (C/P)	7
(2)	Pembiayaan lokal	8
(3)	Kantor dan fasilitas lain untuk Proyek	8
II.1-3	Kegiatan Proyek	8
(1)	Kegiatan untuk Output-1	8
(2)	Kegiatan untuk Output-2	10
(3)	Kegiatan untuk Output-3	13
(4)	Kegiatan umum	15
II.2	Pencapaian Proyek	16
II.2-1	Output dan Indikator	16
(1)	Pencapaian Output-1	16
(2)	Pencapaian Output-2	18
(3)	Pencapaian Output-3	19
II.2-2	Pencapaian Tujuan Proyek dan indikator	20
II.3	Modifikasi PDM	21
II.4	Lainnya	22
II.4-1	Hasil terkait Lingkungan dan Sosial	22
II.4-2	Hasil terkait Gender/ Perdamaian/ Pengurangan Kemiskinan	22

III. Hasil Review Bersama

III.1	Hasil <i>Review</i> berdasarkan Kriteria Evaluasi DAC	23
III.1-1	Relevansi	23
III.1-2	Efektivitas	23
III.1-3	Efisiensi	24

III.1-4 Dampak.....	25
III.1-5 Keberlanjutan.....	26
III.2 Faktor Kunci yang Mempengaruhi Implementasi dan Hasil.....	27
III.2-1 Faktor Pendukung.....	27
III.2-2 Faktor Penghambat.....	27
III.3 Evaluasi Hasil Manajemen Resiko Proyek.....	28
III.4 Pelajaran.....	28
IV. Untuk Pencapaian Tujuan Umum setelah Proyek Selesai	
IV.1 Prospek untuk Mencapai Tujuan Umum.....	30
IV.1-1 Tujuan Umum-1.....	30
IV.1-2 Tujuan Umum-2.....	30
IV.2 Rekomendasi bagi Pihak Indonesia untuk Mencapai Tujuan Umum.....	31
IV.3 Rencana Monitoring sejak Akhir Proyek hingga Evaluasi Ex-Post.....	31

Lampiran-1: <i>Record of Discussions</i>	
Lampiran-2: Matriks Desain Proyek (PDM; awal dan revisi)	
Lampiran-3: Revisi Rencana Operasional (yang direncanakan dan aktual)	
Lampiran-4: Berita acara serah terima barang kantor	
Lampiran-5: Rencana studi banding ke Jepang dan daftar peserta	
Lampiran-6: Daftar counterpart yang terlibat dalam Unit Pelaksana Proyek (PIU) dan Kelompok Kerja Daerah (Pokja)	
Lampiran-7: Rencana Aksi Industri Lokal dan industri sasaran awal	
Lampiran-8: Rincian output/ pencapaian fasilitasi Rencana Aksi Industri Lokal oleh wilayah/ industri sasaran	
Lampiran-9: Surat penawaran mengenai penerapan model fasilitasi SMIDeP	
Lampiran-10: Daftar Disperindag Provinsi yang berminat untuk berpartisipasi dalam tahap penerapan model fasilitasi SMIDeP berbasis petunjuk	
Lampiran-11: Surat permohonan konfirmasi kesediaan sebagai calon sasaran penerapan model fasilitasi SMIDeP (kepada pemerintah daerah yang berminat)	
Lampiran-12: <i>Minutes of Meeting</i> dari Komite Koordinasi Bersama (JCC; pertama, kedua, ketiga) dan mid-term monitoring	
Lampiran-13: <i>Minutes of Meeting</i> dari Komite Koordinasi Bersama (JCC) terakhir	
Lampiran-14: Daftar produk (Petunjuk, Buku Panduan)	

Kepada Country Representative, Kantor JICA Indonesia,
c.c. Departemen Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik JICA

LAPORAN AKHIR PROYEK

Nama Proyek: Proyek Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia

Durasi Proyek: April 2013 - April 2016



Nama: Roy Sjanipar

**Jabatan: Sekretaris Direktorat Jenderal
Industri Kecil Menengah,
Kementerian Perindustrian**



Nama: Taro Tsubogo

**Jabatan: Chief Advisor/ Pengembangan
IKM**

Tanggal Penyerahan: April 2016

LAPORAN AKHIR PROYEK

I. Informasi Umum Proyek

I.1 Negara

Republik Indonesia

I.2 Nama Proyek

Proyek Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia

I.3 Durasi Proyek

Rencana : dari April 2013 sampai Februari 2016

Aktual : dari April 2014 sampai April 2016

Durasi proyek diperpanjang selama satu bulan, karena salah satu kegiatan Proyek, seminar nasional, dilaksanakan mengikuti jadwal *counterpart* untuk menyelenggarakan rapat koordinasi nasional Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Kementerian Perindustrian.

I.4 Latar Belakang

Indonesia telah mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional lima tahunan, berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025). Mengikuti landasan kebijakan pembangunan tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA, 2010-2014) untuk mempromosikan kluster industri dan pengembangan industri lokal yang didukung oleh Peraturan Presiden No. 28, 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional yang diterbitkan pada bulan Mei 2008 sebagai pedoman untuk pengembangan industri, termasuk pengembangan industri kecil dan menengah (IKM).

Kebijakan dasar Kemenperin untuk pengembangan perindustrian terdiri dari dua pilar berikut: i) Pendekatan *Top-down* (pengembangan kluster industri), di mana Kemenperin memilih industri - industri prospektif dan memimpin perencanaan dan penerapan rencana aksi; dan ii) Pendekatan *Bottom-up* (industri prioritas/ pengembangan kompetensi inti), di mana pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota mengidentifikasi sumber daya lokal, serta menyusun dan menerapkan rencana aksi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya dan komersialisasinya.

Di bawah kebijakan dan program tersebut, JICA melakukan studi rencana induk berjudul “Penguatan Kluster (SENTRA) IKM (2009-2010)” berdasarkan permintaan Pemerintah Indonesia. Studi ini merekomendasikan pengembangan IKM (kluster) yang efektif melalui, i) pendirian sistem pengembangan IKM tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat daerah dengan cara yang tepat, ii) diseminasi konsep pengembangan kluster, dan iii) penempatan fasilitator praktis.

Ketersediaan dukungan/ layanan untuk pengembangan IKM juga disampaikan dalam studi ini; pemerintah pusat/ daerah dan penyedia layanan lainnya menawarkan berbagai dukungan/ layanan bagi IKM. Di sisi lain, hasil studi mengindikasikan bahwa dukungan secara umum direncanakan dan diimplementasikan berdasarkan pertimbangan dan prosedur dari sisi penyedia. Kemudian, IKM sebagai

penerima manfaat dukungan tidak mengenali apa dan kapan dukungan tersedia, mengakibatkan infleksibilitas penyediaan layanan terhadap kebutuhan IKM.

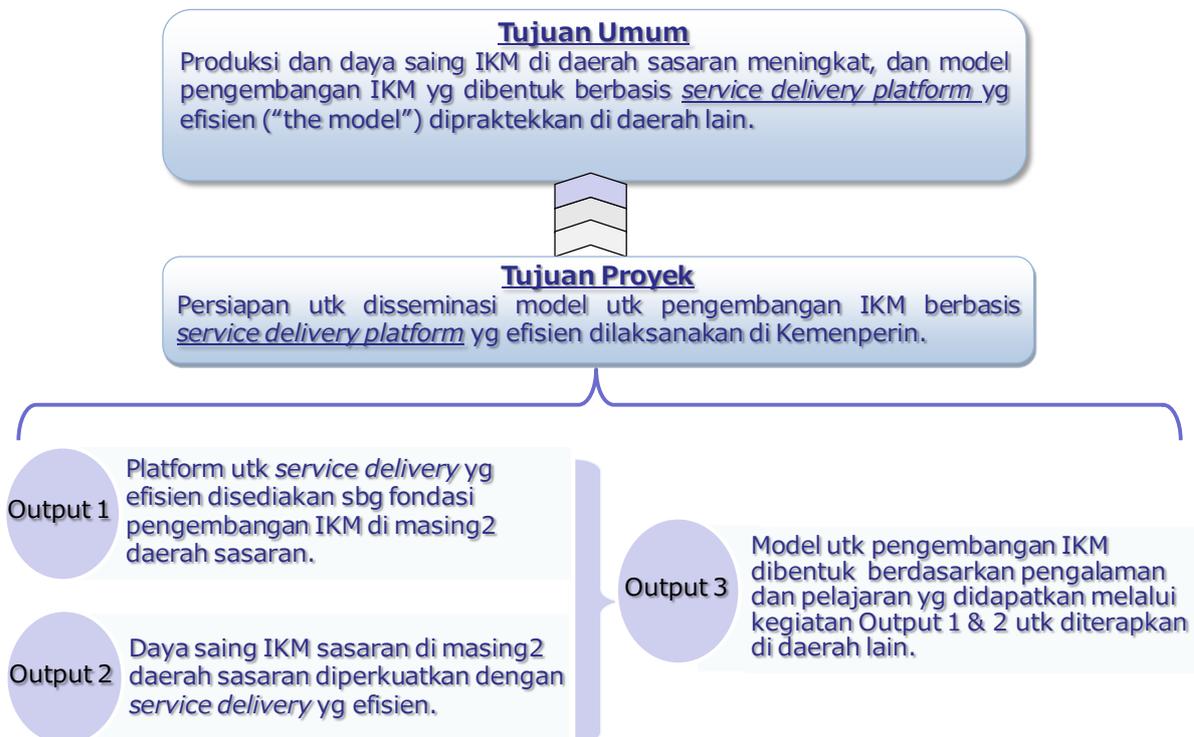
Dengan kata lain, dukungan untuk IKM mengalami masalah dalam hal penyediaan. Permintaan dari IKM untuk dukungan tumbuh, membutuhkan diskusi, persiapan dan pengadaan dukungan yang sesuai oleh penyedia layanan terkait kebutuhan IKM. Sehingga, perbaikan dan peningkatan mekanisme penyediaan layanan tersebut dianggap penting. Dalam situasi ini, Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Jepang untuk menyediakan proyek kerja sama teknis dengan Kementerian Perindustrian sebagai *counterpart* utama. Catatan Diskusi¹ (R/D) telah disetujui bersama pada bulan Desember 2012 untuk mencapai tujuan-tujuan yang dideskripsikan berikut.

I.5 Tujuan Umum dan Tujuan Proyek

I.5-1 Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan IKM/ industri lokal di industri/ wilayah sasaran melalui peningkatan dan penguatan mekanisme untuk berdiskusi, menyiapkan dan menyediakan dukungan/ layanan secara efisien (platform penyediaan layanan). Selain itu, pengembangan IKM/ industri lokal melalui platform akan dijadikan sebagai "model kerja" di wilayah lain, berdasarkan pelajaran/ pengalaman di industri dan wilayah sasaran.

Tujuan umum dan output yang diharapkan dari Proyek ini adalah sebagai berikut:



Gambar I.5.1 Tujuan Proyek

¹ Lihat Lampiran 1 untuk R/D

¹ Lihat Lampiran 2 untuk PDM awal dan revisi.

I.5-2 Output dan Kegiatan yang Diharapkan dalam Proyek

Sesuai dengan output yang diharapkan pada Proyek, kegiatan Proyek dirangkum sebagai berikut. Kedua Project Design Matrix² (PDM) dengan indikator terverifikasi yang asli dan revisi disampaikan dalam lampiran.

Tabel I.5.1 Kegiatan proyek untuk setiap output

No.	Kegiatan
Output-1: Pembentukan platform bagi pengembangan industri lokal	
Platform penyediaan layanan yang efisien disusun sebagai dasar pengembangan IKM di setiap wilayah sasaran.	
1-1:	Membentuk Unit Pelaksana Proyek (PIU) yang diorganisir oleh Ditjen IKM di Kemenperin untuk mengelola Proyek secara keseluruhan.
1-2:	Membentuk POKJA di setiap wilayah sasaran guna mengkoordinasikan kegiatan pengembangan IKM dalam mengelola Proyek secara keseluruhan.
1-3:	Meninjau dan memetakan lembaga dan layanan pengembangan IKM yang tersedia saat ini oleh berbagai wadah dan penyedia layanan di setiap wilayah sasaran.
1-4:	Menetapkan sistem untuk memastikan penyediaan layanan yang efisien bagi IKM.
1-5:	Menugaskan dan melatih pegawai penanggung jawab di pemerintah daerah yang memfasilitasi layanan oleh lembaga pemerintah daerah/ pusat dan penyedia layanan swasta untuk IKM.
1-6:	Membuat Direktori Layanan (<i>web</i>) untuk memperkenalkan layanan dukungan IKM oleh lembaga pemerintah dan swasta.
1-7:	Memfasilitasi dan mendukung kegiatan POKJA di setiap wilayah sasaran. * <i>Dianggap sama dengan kegiatan 2-4 untuk Output-2.</i>
1-8:	Memantau situasi penyediaan layanan di setiap wilayah sasaran.
Output-2: Pengoperasian platform bagi pengembangan industri lokal	
Daya saing IKM sasaran di setiap wilayah sasaran diperkuat dengan penyediaan layanan yang efisien.	
2-1:	Melaksanakan rapat POKJA rutin di setiap wilayah sasaran.
2-2:	Menganalisis permasalahan dan kebutuhan rantai nilai serta hubungan industri dari IKM sasaran di setiap wilayah sasaran.
2-3:	Mengidentifikasi tujuan, tugas dan kegiatan pengembangan IKM sasaran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas.
2-4:	Melaksanakan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme penyediaan layanan yang telah ditingkatkan.
2-5:	Menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan IKM sasaran oleh POKJA di setiap wilayah.
Output-3: Pembuatan model pengembangan IKM	
Model pengembangan IKM dibuat berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan untuk Output-1 dan 2 agar dapat diaplikasikan ke wilayah lain.	
3-1:	Menganalisis dan mengevaluasi pengalaman yang diperoleh melalui Kegiatan dibawah Output-1 dan 2 di tiap wilayah.
3-2:	Mengidentifikasi konten dan faktor-faktor yang membentuk model agar dapat diadaptasikan ke wilayah lain.
3-3:	Mengembangkan panduan sebagai materi referensi bagi wilayah lain guna mereplikasi dan melaksanakan model
3-4:	Menyelenggarakan lokakarya guna mensosialisasikan model tersebut kepada pemangku kepentingan lain.
3-5:	Memfasilitasi pengaturan anggaran yang diperlukan sebagaimana juga memformulasikan program guna merespon adanya kemungkinan permintaan dari pemerintah provinsi lain diluar wilayah sasaran.

I.6 Lembaga Pelaksana (*Counterparts*)

Lembaga-lembaga pelaksana, termasuk Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian sebagai *counterpart* utama pada tingkat pusat, dan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota (khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi & UMKM) sebagai *counterparts* utama di tingkat regional (di wilayah sasaran).

I.7 Informasi Proyek Lainnya (fase dan industri sasaran)

Proyek ini terbagi menjadi Fase I (April 2013 - Juli 2014) dan Fase II (September 2014 - Maret 2016). Dalam Fase I, struktur pelaksana Proyek telah dibentuk (pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan penempatan fasilitator untuk POKJA) untuk industri/ wilayah sasaran, dengan kegiatan/ layanan dukungan yang tersedia bagi pengembangan IKM telah disurvei. Sebagai hasilnya, platform penyedia layanan (dalam konteks Proyek ini adalah platform bagi pengembangan industri lokal) telah dibentuk untuk industri sasaran Fase I.

Kemudian, Tim Tenaga Ahli mendukung POKJA dalam menjalankan diagnosis bagi industri sasaran, merumuskan Rencana Aksi, dan memulai pelaksanaan/ pengawasan Rencana Aksi melalui pengoperasian dan penggunaan platform.

Tabel I.7.1 Wilayah/ industri sasaran dalam pelaksanaan Fase I

Wilayah/ Provinsi	Industri, Kabupaten/ Kota	Posisi Kebijakan
Wilayah I: Sumatera Utara	Industri fesyen <i>Ulos</i> (kain tenun khas <i>Batak</i>) Kabupaten Samosir	Ditetapkan sebagai klaster industri prioritas dalam sektor fesyen (oleh Ditjen IKM Kemenperin) dan kompetensi inti daerah (oleh Kabupaten Samosir).
Wilayah II: Jawa Tengah	Industri logam berfokus pada komponen kapal Kabupaten Tegal	Ditetapkan sebagai kompetensi inti daerah (oleh Kabupaten Tegal) <i>* Di antara beragam produk logam di kabupaten ini, Kemenperin dan Tim Tenaga Ahli mempertimbangkan relevansinya untuk fokus pada satu yang memiliki posisi kebijakan yang kuat oleh pemerintah daerah.</i>
Wilayah III: Sulawesi Tengah	Industri pengolahan kakao, Industri mebel rotan Tidak ada kab/kota tertentu, tapi difokuskan di Kota Palu dan kabupaten sekitarnya	Pengolahan kakao: Ditetapkan sebagai industri unggulan provinsi (oleh Sulawesi Tengah). Rotan: Ditetapkan sebagai kompetensi inti daerah (oleh Kota Palu) dan didukung sebagai industri prioritas melalui surat keputusan gubernur.

Keterangan: Industri atau komoditas unggulan ditetapkan sebagai industri unggulan daerah oleh pemerintah provinsi dan sebagai kompetensi inti oleh kabupaten/ kota. Kebijakan Industri Nasional (Mei 2008) membutuhkan setiap pemerintah daerah untuk merancang dan mempersiapkan/ melaksanakan Peta Panduan untuk pengembangan industri dengan pendekatan *bottom-up*.

Di Fase II, POKJA/ fasilitator terus mengoperasikan dan memperkuat platform, dengan demikian memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi untuk industri sasaran dari Fase I. Pada awal Fase II, industri/ wilayah sasaran tersebut untuk pembentukan dan pengoperasian platform ditambahkan berdasarkan rekomendasi dari Ditjen IKM. Untuk industri/ wilayah sasaran baru, kegiatan Proyek yang dipraktekkan dalam paruh pertama Fase I akan diulangi. Sementara itu, direktori layanan telah diperbarui (untuk mencakup wilayah tambahan) dan diperbaiki lebih lanjut.

Tabel I.7.2 Wilayah/ industri tambahan pada Fase II

Wilayah/Provinsi	Industri, Kabupaten/ Kota	Posisi Kebijakan
Wilayah I: Kalimantan Barat	Industri pengolahan aloevera Kota Pontianak	Ditetapkan sebagai komoditas sasaran dari program One-Village One-Product (OVOP) (oleh Ditjen IKM dari Kemenperin)
Wilayah II: Jawa Timur	Industri alaskaki Kota Mojokerto	Ditetapkan sebagai kompetensi inti daerah (oleh Kota Mojokerto)

Pada paruh akhir Fase II, hasil kegiatan Proyek dievaluasi. Berdasarkan pelajaran yang dipelajari dari evaluasi, petunjuk teknis sebagai referensi model kerja untuk pengembangan IKM (industri lokal) akan dibuat. Tim Tenaga Ahli akan membantu Kemenperin menyebarkan model ini ke wilayah lain.

II. Hasil Proyek

II.1 Hasil Proyek

II.1-1 Input dari Pihak Jepang

(1) Mobilisasi tenaga ahli

Jumlah total waktu penugasan Tenaga Ahli mencapai sebesar 49.94 bulan selama Fase I. Pada Fase II, waktu penugasan sebesar 51.33 bulan dialokasikan kepada Tenaga Ahli. Tenaga Ahli telah dimobilisasi secara fleksibel sesuai dengan jadwal kegiatan Proyek. Seperti yang ditunjukkan pada tabel perbandingan untuk penugasan tenaga ahli (Rencana Operasi yang telah direvisi³).

Chief Advisor dan Koordinator Proyek mendukung kegiatan PIU termasuk dalam pembuatan model kerja dan penyiapan petunjuk teknis untuk fasilitasi industri lokal. Sementara itu, aktivitas POKJA difasilitasi dan dibimbing oleh masing-masing tenaga ahli yang bertanggung jawab untuk setiap wilayah (dibagi kedalam Wilayah I: Sumatera/ Kalimantan, Wilayah II: Jawa/ Bali, dan Wilayah III: Wilayah Timur). Kemudian, konsultan lokal (yang juga mendampingi aktivitas PIU dan POKJA/ fasilitator) ditempatkan di setiap tempat kerja daerah/ industri sasaran dalam rangka semakin memperkuat pendampingan ke/ komunikasi dengan C/P terkait, dan didukung oleh konsultan nasional yang bertempat di kantor pusat.

(2) Biaya lokal (penting dalam kegiatan Proyek)

Selain Tenaga Ahli, input lain dari Tim Tenaga Ahli termasuk pada biaya operasional lokal untuk membiayai kegiatan fasilitasi untuk pengembangan industri sasaran di lapangan. Biaya operasional lokal selama Fase I yang ditanggung oleh Tim Tenaga Ahli adalah sebesar JPY 17.2 juta (tidak termasuk sub-kontrak survei profil lembaga dukungan senilai JPY 4.0 juta).

Di antara biaya operasional lokal selama Fase I (sebagian besar merupakan biaya konsultan nasional/ lokal, sewa mobil, perjalanan dengan pesawat/ kereta api), dukungan anggaran untuk kegiatan dukungan yang difasilitasi oleh POKJA bernilai JPY 1.7 juta untuk seluruh industri sasaran.

Biaya operasional lokal selama Fase II diestimasi mencapai JPY 26.1 juta, meningkat dari Fase I karena adanya tambahan wilayah/ industri sasaran. Dari total biaya tersebut, JPY 1.8 juta akan dialokasikan sebagai dukungan anggaran untuk mendukung kegiatan dukungan yang difasilitasi oleh POKJA.

(3) Pengadaan perlengkapan kantor (penting dalam kegiatan Proyek)

Pengadaan perlengkapan kantor berikut dilakukan sesuai rencana awal pada Fase I⁴. Tidak ada pengadaan perlengkapan kantor yang dijadwalkan selama periode Fase II.

Tabel II.1.1 Pengadaan Perlengkapan Proyek

Nama	Tipe/Merek	Jumlah	Keterangan
Komputer desktop MS Office	Lenovo H520-3216	2 unit	Dalam kondisi yang baik.
Printer laser warna	Canon Laser Shot LBP9100Cdn	1 unit	Idem
Mesin fotokopi multi-fungsi	Ricoh Aficio MP2000L2	1 unit	Idem
Mesin tel/fax	Panasonic, KX-FT503CX-W	1 unit	Idem
Printer multi-fungsi	Canon MP237	1 unit	Idem (Wil. I)
Printer multi-fungsi	Epson L210	1 unit	Idem (Wil. II)
Printer multi-fungsi	Canon MG3170	1 unit	Idem (Wil. III)

Keterangan: Daftar ini tidak termasuk barang habis pakai.

³ Lihat Lampiran-3 revisi Rencana Operasi.

⁴ Perlengkapan ini dialihkan ke Ditjen IKM setelah Proyek selesai melalui Memo Pengalihan Perlengkapan pada Lampiran 4.

(4) Pelatihan (studi banding) di Jepang

Tim Tenaga Ahli telah mengatur pelatihan untuk *counterpart* dalam mempelajari kebijakan dan program dukungan untuk industri lokal/ IKM di Jepang selama dua minggu tanggal 13-24 Januari 2014. Misi pelatihan (studi banding) dipimpin oleh Sekretariat Ditjen IKM yang terdiri dari 14 anggota⁵ dari PIU dan POKJA.

Peserta mengunjungi i) Prefektur Ehime untuk belajar mengenai kebijakan dan program dukungan untuk industri lokal/ IKM, ii) *Organization for SME & Regional Innovation* (SMRJ) di Tokyo untuk mempelajari program nasional dan peran dalam pengembangan industri regional, dan iii) belajar metode *regional/ product branding*, seperti yang ditunjukkan pada rencana perjalanan dibawah. Pelatihan ini pada khususnya bertujuan untuk mempelajari skema dukungan yang dipersiapkan oleh pemerintah Jepang dan SMRJ, dan bagaimana mereka dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan IKM/ industri lokal.

Tabel II.1.2 Rencana Perjalanan (ringkasan)

Hari	Lembaga/ tempat yang dikunjungi	Kota
Hari 1	Kantor Pusat JICA (<i>courtesy visit</i>)	Tokyo
Hari 2	Pemerintah Provinsi Ehime, Departemen Ekonomi dan Tenaga Kerja	Ehime
Hari 3	Yayasan Pengembangan Industri Lokal Ehime, Pusat Ristek Industri Ehime, Univ. Ehime	
Hari 4	Pusat Pengembangan Industri Lokal Imabari, Asosiasi Industri Towel Imabari, Asosiasi yang terkait industri komponen kapal	
Hari 5	Pusat Perdagangan Produk Agro (Fresh Park KaRaRi), Museum Kerajinan Tekstil	
Hari 6	Hari kosong	
Hari 7	SMRJ	Tokyo
Hari 8	Kuliah mengenai <i>product/regional branding</i>	
Hari 9	Toko Antenna Ehime, Toko untuk produk khas lokal	
Hari 10	Kantor Pusat JICA (pelaporan), Kedutaan Besar Indonesian (Atase Perindustrian) di Tokyo	

(5) Kesempatan pelatihan lain di Jepang selama Proyek

Sejak dimulainya Proyek, JICA telah menyediakan delapan (8) kesempatan pelatihan di Jepang pada topik terkait pengembangan IKM dan fasilitasi berikut. Ditjen IKM dan Direktorat Jenderal Kemenperin telah menominasi dan mengirim staf mereka maupun staf pemerintah daerah di wilayah sasaran untuk kesempatan ini.

Tabel II.1.3 Daftar kesempatan pelatihan JICA yang telah dihadiri

Nama Pelatihan	Periode	Jumlah Peserta	Institusi Pelatihan
Kebijakan Pengembangan UKM	Aug. ~ Sep. '14	2	JICA Kansai
Dukungan Keuangan dan Teknis untuk Promosi UKM	Oct. ~ Nov. '14	2	JICA Kansai
Pengembangan dan Promosi UKM	Nov. '14	14	JICA Shikoku
<i>Merchandize Branding/Marketing</i> dengan Menggunakan Sumber Daya Lokal	Nov. ~ Des. '14	1	JICA Chubu
Manajemen Korporat Praktis untuk Perbaikan Produktivitas melalui metode KAIZEN/ Pengendalian Mutu	Jan. ~ Mar. '15	1	JICA Tokyo
Memperkuat BDS untuk Promosi Industri	Jan. ~ Feb. '15	2	JICA Chubu
Kebijakan Pengembangan UKM	Feb. ~ Mar. '15	2	JICA Shikoku
<i>Merchandize Branding/ Pemasaran</i> dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal	Jul.~Aug. '15	1	JICA Okinawa

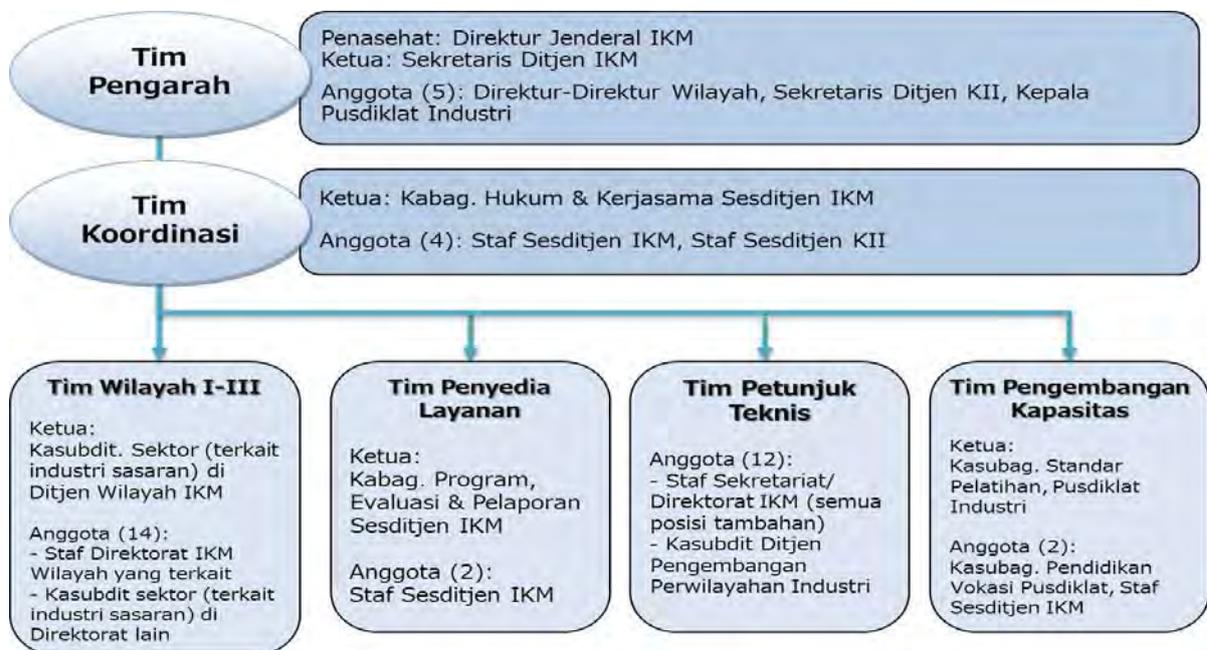
⁵ Lihat lampiran-5 untuk rencana perjalanan dan daftar peserta. Peserta termasuk dua observator yang partisipasinya dibiayai oleh Ditjen IKM. Dua observator bergabung sebagai bagian dari pelatihan terutama di Ehime dari 14-18 Januari.

II.1-2 Input dari Pihak Indonesia

(1) Counterpart (C/P)

Komite Koordinasi Bersama (JCC) terdiri dari Ditjen IKM sebagai anggota inti, Direktorat Jenderal yang terkait di Kemenperin dan Kementerian terkait, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Bank Indonesia (BI).

Unit Pelaksana Proyek (PIU), yang sebagian besar terdiri dari pegawai Ditjen IKM, dibentuk sebagai C/P pada tingkat pusat dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Ditjen IKM di bulan Juni 2013. Tim Tenaga Ahli menyarankan PIU terdiri dari satu tim untuk setiap wilayah sasaran dan kegiatan utama (direktori layanan, pengembangan kapasitas) dibawah pengawasan Ditjen IKM dan Direktur setiap wilayah. PIU kemudian direvisi dengan penerbitan SK dari Ditjen IKM di bulan Mei 2015 sehingga tim kerja untuk salah satu kegiatan proyek (pembentukan model kerja/ petunjuk teknis untuk pengembangan industri lokal) itu baru dirumuskan. Struktur dan anggota dari PIU yang ditunjukkan dibawah ini melibatkan 37 C/P selama Proyek berjalan.



Gambar II.1.1 Struktur Revisi PIU-Kemenperin

Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota (terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UMKM), asosiasi industri terkait, lembaga keuangan, universitas dan lembaga layanan yang terkait (lembaga dukungan) membentuk POKJA untuk setiap industri sasaran sebagai C/P daerah. Dalam proyek ini, enam (6) POKJA telah dibentuk untuk industri sasaran Fase I dan II dengan penerbitan SK dari setiap kepala pemerintah daerah. Secara keseluruhan, 82 C/P daerah sebagian besar telah ikut serta selama Proyek berlangsung.

Kedua POKJA untuk industri pengolahan kakao dan mebel rotan di Sulawesi Tengah secara resmi dibentuk sebagai kelompok kerja dibawah Tim Koordinator untuk Pengembangan Industri Lokal yang sebelumnya sudah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi pada tahun 2012 (yang terdiri dari 14 pegawai).

Daftar C/Ps yang terlibat dalam PIU dan POKJA dapat dilihat pada Lampiran⁶.

⁶ Lihat Lampiran-6 untuk daftar C/Ps dalam PIU dan POKJA.

(2) Pembiayaan lokal (penting untuk mobilisasi C/P pada Proyek)

Terkecuali biaya perjalanan jika C/P daerah diundang untuk menjalani pelatihan fasilitasi di Jakarta, seluruh biaya perjalanan dan honorarium untuk mobilisasi C/P ditanggung oleh pihak Indonesia. Perlu dicatat bahwa sebagian besar kegiatan dukungan yang difasilitasi POKJA untuk industri sasaran telah dibiayai oleh pihak Indonesia, kecuali untuk kegiatan dukungan yang dijadwalkan pada tahap awal fasilitasi (berbagi dengan dana dari Tim Tenaga Ahli, tetapi untuk sebagian kecil).

(3) Kantor dan fasilitas lain untuk Proyek

Proyek berlokasi di kantor pusat dan lima kantor daerah di wilayah sasaran Proyek. Kantor pusat berlokasi di Ditjen IKM, yang merupakan kantor sebagian besar anggota PIU. Setiap kantor daerah diatur dalam premis Dinas Perindustrian & Perdagangan, yang memimpin POKJA.

II.1-3 Kegiatan Proyek

C/P bersama dengan Tim Tenaga Ahli telah bekerja sama di kegiatan Proyek untuk Output-1: Persiapan platform penyediaan layanan (pembentukan platform untuk pengembangan industri lokal), Output-2: Memperkuat daya saing IKM sasaran melalui penyediaan layanan (pengoperasian platform untuk pengembangan industri lokal) dan Output 3: Pembentukan model pengembangan IKM (industri lokal) berdasarkan pengalaman dan pelajaran dari Output-1 dan Output-2, yang telah dilaksanakan melalui analisa/ evaluasi pendekatan SMIDeP oleh POKJA mengenai pendekatan SMIDeP untuk fasilitasi industri lokal.

Semua kegiatan yang dijadwalkan untuk Output-1 sampai Output-3 telah dilaksanakan (kecuali untuk kegiatan 2-5: Menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan IKM sasaran oleh POKJA di setiap wilayah, pada industri/ wilayah sasaran tambahan sejak fase II). Status pelaksanaan kegiatan proyek disampaikan berikut.

(1) Kegiatan untuk Output-1

Status pelaksanaan untuk setiap kegiatan Output-1 dijelaskan dengan rinci dibawah ini. Berdasarkan tujuan, struktur, langkah/ metode, dan informasi Proyek, yang mengharuskan C/P untuk mengoperasikan platform dengan efektif, telah dipersiapkan untuk wilayah/ industri sasaran pada Fase I maupun II.

Tabel II.1.4 Status pelaksanaan kegiatan untuk Output-1

Output-1: Pembentukan platform bagi pengembangan industri lokal		
Platform penyediaan layanan yang efisien disusun sebagai dasar pengembangan IKM di setiap wilayah sasaran.		
No.	Kegiatan	Ringkasan kemajuan
1-1:	Membentuk Unit Pelaksana Proyek (PIU) yang diorganisir oleh Ditjen IKM di Kemenperin untuk mengelola Proyek secara keseluruhan.	Sebuah Surat Keputusan (SK) dikeluarkan tentang pembentukan PIU oleh Ditjen IKM di bulan Juni 2013, yang terdiri atas tim penasehat, koordinasi, dukungan arsip (Tim Wilayah untuk masing-masing 3 wilayah), direktori layanan, dan pengembangan kapasitas. Pada Mei 2015, Ditjen IKM telah merevisi SK untuk i) menambah anggota Tim Wilayah PIU dalam merespon wilayah/ industri sasaran tambahan sementara melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan industri terfokus, dan ii) untuk membentuk Tim Petunjuk baru yang meliputi anggota PIU pada tingkat pegawai yang lama dan staf Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri (Ditjen PPI) yang bertanggung jawab pada persiapan fasilitasi rencana pengembangan industri regional.

1-2:	Membentuk POKJA di setiap wilayah sasaran guna mengkoordinasikan kegiatan pengembangan IKM dalam mengelola Proyek secara keseluruhan.	POKJA dibentuk masing-masing untuk enam industri sasaran di lima wilayah melalui penerbitan SK oleh kepala daerah, yang menetapkan POKJA dipimpin oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di setiap wilayah, mengangkat satu fasilitator (dari tenaga penyuluh lapangan atau konsultan diagnosis IKM) dan melibatkan lembaga dukungan terkait kepada industri sasaran. Sejak Maret sampai April 2014, keanggotaan POKJA untuk industri fesyen Ulos di Kabupaten Samosir dan industri rotan di Provinsi Sulawesi Tengah telah direvisi guna memastikan dukungan yang efektif bagi industri sasaran dan keterkaitan dengan institusi pendukung.
1-3:	Meninjau dan memetakan lembaga dan layanan pengembangan IKM yang tersedia saat ini oleh berbagai wadah dan penyedia layanan di setiap wilayah sasaran.	Peninjauan/ pemetaan terhadap kebijakan/ program yang ada dan lembaga dukungan yang terkait dengan pengembangan IKM di tingkat pusat dan daerah telah dilaksanakan oleh konsultan lokal terpilih dan selesai pada awal Desember 2013 yang meliputi wilayah sasaran Fase I (lembaga dukungan di Povinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah). Pekerjaan yang sama untuk wilayah sasaran Fase II telah dilaksanakan pada bulan Desember 2014 dengan mendampingi POKJA yang baru dibentuk yang kemudian diselesaikan pada bulan Februari 2015.
1-4:	Menetapkan sistem untuk memastikan penyediaan layanan yang efisien bagi IKM.	Sistem penyediaan layanan yang efisien bagi IKM, dengan kata lain <i>platform</i> bagi pengembangan industri lokal, telah disusun untuk wilayah/ industri sasaran dari Fase I dan II dalam beberapa hal berikut; <ul style="list-style-type: none"> - Struktur operasional <i>platform</i> telah tersusun (dalam bentuk PIU dan POKJA pada setiap industri sasaran), - Langkah/ metode pengembangan industri lokal telah dipelajari (melalui pelatihan fasilitasi) oleh POKJA dan PIU pada tingkat pegawai, - Dukungan sumber informasi telah disiapkan (melalui data profil lembaga dukungan). <i>Platform</i> bagi pengembangan industri lokal untuk setiap industri telah beroperasi selama Proyek berjalan guna memberikan dukungan lebih baik dengan bimbingan/ saran Tim Tenaga Ahli di lapangan.
1-5:	Menugaskan dan melatih pegawai penanggung jawab di pemerintah daerah yang memfasilitasi layanan oleh lembaga pemerintah daerah/ pusat dan penyedia layanan swasta untuk IKM.	Pegawai yang bertanggung jawab ditugaskan sebagaimana dilaporkan dalam kegiatan 1-1 & 1-2, termasuk fasilitator yang diangkat di setiap POKJA untuk industri sasaran. Para C/P di tingkat kerja (pegawai Tim Wilayah dari PIU dan Disperindag di POKJA, fasilitator yang ditempatkan di POKJA) telah menerima petunjuk praktis melalui keikutsertaan dalam pelatihan fasilitasi yang dilaksanakan selama tanggal 3-5 Juli 2013 (untuk industri sasaran Fase I) dan selama tanggal 17-19 November 2014 (untuk industri sasaran Fase II).
1-6:	Membuat Direktori Layanan (<i>web</i>) untuk memperkenalkan layanan dukungan IKM oleh lembaga pemerintah dan swasta.	Direktori penyedia layanan (dalam bentuk buku), yang mencakup data lembaga dukungan baik di tingkat pusat maupun wilayah (3 wilayah sasaran) telah disusun berdasarkan hasil survei yang disub-kontrakkan, dan didistribusikan kepada Tim Wilayah dari PIU dan POKJA di industri sasaran Fase I. Ditjen IKM dan Tim Tenaga Ahli telah mencapai kesepakatan bahwa profil lembaga dukungan yang telah dikumpulkan akan dibuatkan database dari aspek i) berbagi pengetahuan diantara Ditjen IKM dan pemerintah daerah dan ii) perluasan cakupan data/ wilayah di masa mendatang. Versi demo database direktori telah disiapkan dan kemudian diperbaiki dalam hal kegunaannya pada bulan Mei 2015 dengan mengakomodasi data profil lembaga dukungan di wilayah tambahan di Fase II. Meskipun begitu, sejak Ditjen IKM memutuskan untuk mengganti sistem operasional website yang merupakan wadah mengunggah database direktori, sehingga sistem pemograman database direktori dapat disesuaikan. Kemudian, Ditjen IKM menunjuk teknisi pemograman untuk menyesuaikan sistem ini, dan hampir selesai di bulan November 2015 termasuk database direktori.

1-7:	Memfasilitasi dan mendukung kegiatan POKJA di setiap wilayah sasaran.	Ditjen IKM (setiap direktorat wilayah) telah mendukung dalam mengamankan anggaran untuk bagian kegiatan dukungan yang diusulkan oleh POKJA secara umum, meskipun terkadang mengamati perencanaan/ pengadaan tanpa konsultasi sebelumnya dengan POKJA. Diantara Tim Wilayah dari PIU untuk setiap wilayah sasaran, dimana untuk Samosir (Wilayah I) telah dianggap lebih aktif dalam membantu POKJA memfasilitasi kegiatan dukungan dan datang pada rapat POKJA. Hal ini sebagian karena industri fesyen ulos di Samosir dirancang oleh program yang ditangani langsung oleh Ditjen IKM (pengembangan klaster industri). Tim Wilayah telah diharapkan dapat memperkuat bimbingan/ saran di lapangan kepada POKJA demi memastikan dan mempercepat kemajuan/ pencapaian kegiatan fasilitasi oleh POKJA, meskipun pengembangan industri lokal diartikan sebagai tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Peran ini belum sepenuhnya dilakukan oleh Tim Wilayah (kecuali pada kasus Samosir) dan dianggap belum optimal.
1-8:	Memantau situasi penyediaan layanan di setiap wilayah sasaran.	PIU (Tim Wilayah) secara periodik memonitor situasi penyediaan layanan (misalkan kemajuan penyusunan/ pelaksanaan Rencana Aksi Industri Lokal) yang difasilitasi oleh POKJA. Sejauh ini PIU telah mengadakan dua rapat-bersama dengan POKJA dan Ditjen IKM telah menyelenggarakan dua kali JCC guna memonitor kemajuan dan mencari tahu permasalahan dalam fasilitasi pengembangan industri lokal untuk industri sasaran di setiap POKJA.

(2) Kegiatan untuk Output-2

Status pelaksanaan untuk setiap kegiatan Output-2 dijelaskan dengan rinci dibawah ini. Masing-masing POKJA untuk industri sasaran Fase I dan II telah menyelesaikan diagnosis industri untuk industri sasaran mereka dan menyusun Rencana Aksi (LIAP) awal sesuai dengan langkah dan metode yang dipelajari dari pelatihan fasilitasi. Selanjutnya, beberapa kegiatan dukungan telah diberikan sesuai dengan jadwal yang diasumsikan pada awalnya untuk tiga dari empat industri sasaran, dalam rangka mewujudkan ‘Tantangan Aksi’ yang ditetapkan oleh POKJA melalui konsultasi dengan pelaku industri sasaran.

POKJA untuk industri sasaran Fase II telah menyelesaikan diagnosis industri dan perencanaan Rencana Aksi melalui pertemuan POKJA/ *focus group discussion* (FGD) dengan industri sasaran dibawah bimbingan Tim Tenaga Ahli dan Ditjen IKM. Kedua POKJA yang baru terbentuk telah memulai fasilitasi pelaksanaan kegiatan dukungan yang telah diusulkan pada Rencana Aksi mereka. Meskipun begitu, evaluasi terminal (kegiatan 2-5) masih belum tercapai selama Proyek karena POKJA menyadari bahwa Rencana Aksi industri sasaran tambahan baru difasilitasi setengah jalan.

Tabel II.1.5 Status pelaksanaan kegiatan untuk Output-2

Output-2: Pengoperasian platform bagi pengembangan industri lokal		
Daya saing IKM sasaran di setiap wilayah sasaran diperkuat dengan penyediaan layanan yang efisien.		
No.	Kegiatan	Ringkasan kemajuan
2-1:	Melaksanakan rapat POKJA rutin di setiap wilayah sasaran.	Rapat POKJA telah dilaksanakan sekali dalam 2 bulan guna menyelesaikan tugas (diagnosa industry, perencanaan Rencana Aksi, fasilitasi/pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi) atau juga dilaksanakan sewaktu-waktu ketika terdapat topik khusus. Rapat ini umumnya diadakan dengan fasilitasi Tim Tenaga Ahli psda kasus POKJA komponen kapal di Tegal dan industri fesyen ulos di Samosir. Meskipun begitu, POKJA lain telah mengadakan rapat secara mandiri guna berbagi kemajuan/ permasalahan dan membahas langkah-langkahnya, kecuali pada proses fasilitasi awal.

2-2:	Menganalisis permasalahan dan kebutuhan rantai nilai serta hubungan industri dari IKM sasaran di setiap wilayah sasaran.	Setelah pelatihan fasilitasi yang meliputi diagnosis industri melalui analisis pemangku kepentingan/ analisa rantai pasok untuk mengidentifikasi permasalahan/ hambatan, setiap POKJA untuk industri sasaran melaksanakan kerja diagnosis melalui kunjungan lapangan ke IKM dan rapat POKJA, sambil review/ konfirmasi hasil penyusunan diagnosis yang dibuat di pelatihan fasilitasi. Pekerjaan diagnosis dilakukan oleh POKJA, didampingi oleh Tim Tenaga Ahli, pada awal Sep. 2013 untuk industri sasaran fase I dan di bulan Desember 2014 untuk industri fase II. Berdasarkan diagnosis ini, baik POKJA maupun industri sasaran telah mengidentifikasi permasalahan/ hambatan yang harus diatasi dan berbagi ide tentang tindakan dan dukungan apa yang dapat diajukan pada langkah penyusunan Rencana Aksi.
2-3:	Mengidentifikasi tujuan, tugas dan kegiatan pengembangan IKM sasaran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas.	<p>POKJA bersama dengan Tim Wilayah di PIU menyusun Rencana Aksi sesuai dengan metode yang dipelajari dalam pelatihan fasilitasi dan hasil diagnosis. Rencana Aksi yang terdiri atas 'tantangan aksi', IKM sasaran⁷, aksi mereka sendiri (seperti pengembangan produk baru/ lebih baik, pemasaran/ promosi ke pasar/ pembeli potensial) dan kegiatan dukungan yang diajukan oleh anggota POKJA/ lembaga dukungan. Pada saat POKJA menyusun kegiatan dukungan, mereka diingatkan mengenai hal-hal berikut ini;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan semua kegiatan dukungan dari pemangku kepentingan yang telah dianggarkan atau sedang diajukan berdasarkan masalah/ kebutuhan yang dihadapi IKM melalui proses diagnosis, - Menyaring kegiatan dukungan yang memiliki hubungan masuk akal dengan tantangan aksi, - Mengidentifikasi lembaga dukungan yang masuk akal dan melakukan konsultasi dengan mereka terlebih dahulu terkait kemungkinan kerjasama, dan - Memastikan pengaturan waktu/ rangkaian yang baik diantara kegiatan dukungan yang diajukan. <p>Telah diamati secara umum bahwa POKJA kurang memperhatikan poin-poin tersebut di atas (yaitu kurang perhatian terhadap implikasi anggaran/ rangkaian kegiatan dukungan yang diajukan) ketika menyusun Rencana Aksi awal (September 2013). Namun, POKJA telah lebih memperhatikan aspek-aspek tersebut ketika POKJA merevisi Rencana Aksi tersebut (mulai dari 2014 dan seterusnya). Rencana Aksi telah diperbaiki secara periodik pada rapat POKJA dengan menyesuaikan kemajuan/ pencapaian.</p> <p>POKJA industri di Fase II telah melaksanakan FGD dengan IKM dan kunjungan lapangan ke IKM dalam rangka mengulas hasil draf Rencana Aksi yang dibuat pada bulan Feb. 2015. Sejak pelajaran dari persiapan Rencana Aksi oleh POKJA dari Fase I telah ditekankan pada pelatihan fasilitasi untuk anggota POKJA di Fase II, draf Rencana Aksi awal telah diperbaiki setidaknya pada implikasi anggaran. Namun, POKJA Fase II masih memiliki kesusahan dalam menetapkan tujuan yang dapat diukur dengan objektif. Rencana Aksi kemudian diperbaiki pada rapat POKJA yang diadakan pada bulan Nov./Des. 2015 sesuai dengan kemajuan/ pencapaian sejauh ini.</p>
2-4:	Melaksanakan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme penyediaan layanan yang telah ditingkatkan.	<p>Tim Tenaga Ahli telah memberikan bimbingan/ saran pada setiap POKJA sehingga kegiatan dukungan yang diusulkan Rencana Aksi dirancang, difasilitasi dan didukung dengan lebih baik dalam rangka memastikan output yang diharapkan.</p> <p>Rencana Aksi dari 3 industri telah dilaksanakan sebagaimana awalnya diasumsikan, kecuali untuk industri furnitur rotan di Kota Palu yang</p>

⁷ Lihat Lampiran-7 untuk Rencana Aksi dan industri sasaran awal.

		<p>mebutuhkan proses lebih panjang dalam mengidentifikasi tindakan dan dukungan yang diberikan kepada IKM sasaran pada tahap awal. Namun, setiap POKJA telah difasilitasi dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan dukungan yang diusulkan, setidaknya dalam hal jumlah kegiatan dukungan yang dilaksanakan. Diantara semua POKJA, POKJA untuk industri pengolahan kakao/ komponen kapal telah mengoperasikan dan menggunakan platform pengembangan industri lokal dalam memfasilitasi kegiatan dukungan.</p> <p>POKJA untuk industri komponen kapal secara aktif merevisi penggunaan program yang telah dianggarkan dan mendekati pemerintah pusat/provinsi agar dapat membiayai dukungan tambahan yang diperlukan guna mendukung IKM-IKM menjawab tantangan aksi. POKJA juga aktif dalam berjejaring dan melakukan pendekatan dengan lembaga dukungan diluar lembaga dalam bidang industri, dan berhasil memfasilitasi penyediaan dukungan dari lembaga dukungan teknis.</p> <p>Sedangkan untuk industri pengolahan kakao, produsen sasaran telah aktif berbagi kebutuhan dan permasalahan, yang mana berubah sesuai kemajuan/ pencapaian Rencana Aksi, dengan POKJA melalui rapat rutin. POKJA kemudian merespon kebutuhan/ permasalahan yang disampaikan produsen sasaran dan merevisi Rencana Aksi secara periodic dalam rangka mengusulkan/ menganggarkan kegiatan dukungan tambahan, dan memfasilitasi identifikasi lembaga dukungan potensial yang dapat merespon kebutuhan/ permasalahan tersebut.</p> <p>POKJA untuk industri fesyen ulos juga telah aktif dalam mencari dukungan CSR dari pihak luar untuk melengkapi keterbatasan anggaran pemerintah, meskipun maih diharapkan unuk memperkuat arahan dalam tujuan utama Rencana Aksi (dukungan pengembangan pasar pada khususnya), dan komunikasi dengan produsen sasaran untuk mendiskusikan solusi bersama.</p> <p>Kedua POKJA pada industri Fase II telah memulai kegiatan ini: fasilitasi penerapan Rencana Aksi dengan menyediakan kegiatan dukungan. POKJA untuk industri alas kaki di Mojokerto telah mulai pengadaan beberapa kegiatan dukungan penting, dan telah memfasilitasi banyak kegiatan dukungan dengan memanfaatkan sumber daya dukungan lembaga seperti universitas lokal, pusat litbang dan supplier bahan baku produksi untuk mencapai tujuan utama. Hal ini dapat dianggap sebagai kasus baik dalam pemanfaatan platform ini.</p> <p>Di sisi lain, POKJA industri pengolahan aloevera di Pontianak masih cukup lambat dalam memfasilitasi kegiatan dukungan yang diusulkan, dan baru mencapai kemajuan nyata di bulan Nov. 2015 dimana POKJA dan IKM sasaran dapat mereview Rencana Aksi awal dan mengusulkan/ merevisi kegiatan dukungan / tindakan IKM sendiri untuk mencapai tantangan aksi.</p>
2-5:	Menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan IKM sasaran oleh POKJA di setiap wilayah.	<p>Setiap POKJA untuk industri fase I melakukan evaluasi terminal mengenai pencapaian fasilitasi Rencana Aksi selama 2 tahun terakhir di bulan Sep. atau Nov. 2015. Untuk mempersiapkan evaluasi terminal ini, Tim Tenaga Ahli membimbing setiap POKJA untuk menyiapkan dan melaksanakan survey wawancara dengan kuisioner kepada IKM/ produsen sasaran yang terlibat dalam Rencana Aksi. Survey ini dirancang untuk menunjukkan berapa IKM/ produsen sasaran yang berhasil mencapai tantangan aksi, dan hasil penting fasilitasi lainnya sesuai dengan PDM.</p> <p>Kesimpulan dari evaluasi yang dilakukan POKJA dinyatakan secara singkat sebagai berikut dan selanjutnya dijelaskan secara detail pada bagian Pencapaian Proyek;</p> <ul style="list-style-type: none"> - POKJA industri komponen kapal/ pengolahan kakao mereview tujuan keseluruhan Rencana Aksi (tantangan aksi) telah dicapai oleh IKM/ produsen sasaran, dan memutuskan untuk memperpanjang

		<p>fasilitasi sesuai dengan Rencana Aksi yang telah direvisi (peningkatan lebih lanjut dalam kasus keberhasilan IKM/ produsen) dengan tetap menjaga kerangka fasilitasi yang ada, seperti POKJA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - POKJA untuk mebel rotan, yang mengakui bahwa tujuan keseluruhan masih belum tercapai dalam hal jumlah kasus keberhasilan IKM, juga memutuskan untuk terus memfasilitasi Rencana Aksi namun akan melakukan reorganisasi POKJA. - POKJA untuk fesyen ulos tampak puas dengan pencapaian (transaksi yang dibuat dengan saluran penjualan/ pembeli yang dimaksud) dan pembentukan koperasi usaha bersama, meskipun nilai dan skala transaksi masih terbatas. Fasilitasi melalui kerangka yang ada, seperti POKJA dari lembaga antar sektor, mungkin berhenti, namun Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi wajib menindaklanjuti Rencana Aksi. <p>Adapun fasilitasi Rencana Aksi untuk industri fase II, evaluasi terminal tidak dilakukan karena POKJA mengakui bahwa pelaksanaan fasilitasi masih setengah jalan.</p>
--	--	--

(3) Kegiatan untuk Output - 3

Kegiatan - kegiatan Output-3: penciptaan model pengembangan IKM/ industri lokal berdasarkan pengalaman dan pelajaran dari Output-1 dan -2 yang dimulai sejak Mei 2015. Tim Tenaga Ahli memulai kegiatan dengan pembentukan tim petunjuk yang bertanggung jawab terhadap Output-3, yang terdiri dari 10 C/P anggota PIU di tingkat kerja dan staf dari Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (Ditjen PPI)⁸.

Sebagai salah satu output penting dari Proyek, model kerja (yang dipaparkan lebih rinci dalam petunjuk teknis) disiapkan dengan tujuan meningkatkan praktik fasilitasi pengembangan industri lokal yang dijalankan saat ini oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, paparan terperinci mengenai peningkatan praktik - praktik tersebut dalam petunjuk teknis dijelaskan dan disosialisasikan kepada pemerintah daerah lainnya melalui penyelenggaraan seminar.

Tabel II.1.5 Status pelaksanaan kegiatan untuk Output-3

Output-3:Penciptaan model untuk pengembangan IKM		
Model pengembangan IKM/ industri lokal dibuat berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh saat melakukan kegiatan - kegiatan terkait Output-1 dan -2, agar dapat diaplikasikan di daerah lain.		
No.	Aktivitas	Ringkasan kemajuan
3-1:	Menganalisis dan mengevaluasi pengalaman yang diperoleh dari kegiatan - kegiatan terkait Output-1 dan -2 di setiap daerah.	Kuesioner bagi POKJA disiapkan oleh tim petunjuk dan Tim Tenaga Ahli pada bulan Mei 2015 guna mengkaji tingkat efektivitas/kelayakan penerapan pendekatan SMIDeP dalam fasilitasi industri lokal. POKJA kemudian diminta untuk memberikan ulasan/ komentar mengenai pendekatan fasilitasi yang dipraktikkan selama 2 tahun terakhir, dalam hal i) pelaksanaan persiapan, ii) perancangan Rencana Aksi, iii) fasilitasi/ monitoring Rencana Aksi. Pada bulan Juni 2015. Tim Tenaga Ahli dan tim petunjuk mengkaji jawaban hasil kuesioner POKJA, sebagai masukan untuk medesain model kerja/ petunjuk teknis (kegiatan 3-2).
3-2:	Identifikasi konten dan faktor - faktor untuk membuat model, yang dapat diadaptasi di daerah lain.	Tim Tenaga Ahli dan tim petunjuk telah membahas, bahwa elemen - elemen penyusun model kerja meliputi i) pelaksanaan persiapan (yang terdiri dari POKJA/ fasilitator di daerah), ii) tahapan/ metode fasilitasi industri lokal (terdiri dari diagnosis, perencanaan, penerapan, monitoring/ evaluasi rencana aksi), dan iii) informasi sumber dukungan (termasuk direktori lembaga dukungan). Berdasarkan hasil evaluasi di atas, poin - poin untuk peningkatan praktik fasilitasi industri lokal (pelajaran dan praktik baik yang diobservasi selama pembentukan/ pengoperasian platform) diambil dan dikategorikan

⁸ Ditjen PPI bertanggung jawab terhadap fasilitasi pengembangan wilayah yang direncanakan oleh pemerintah daerah, termasuk kompetensi inti daerah dan industri unggulan provinsi (d/h), dan rencana induk pengembangan industri daerah (saat ini).

		menjadi tiga elemen tersebut untuk memastikan tingkat efektivitas/kelayakan penerapan model kerja.																
3-3:	Membuat petunjuk teknis sebagai materi referensi bagi daerah lain untuk mereplikasi dan menerapkan model.	<p>Fasilitasi industri lokal dengan pendekatan SMIDeP mengungkapkan praktik baik, tips, dan pembelajaran, baik dari kasus sukses maupun tidak sukses dari wilayah - wilayah sasaran. Poin - poin tersebut diungkapkan dalam proses persiapan petunjuk teknis untuk fasilitasi industri lokal. Selain itu, Tim Tenaga Ahli memperoleh opini dan umpan balik dari C/Ps melalui i) evaluasi pendekatan SMIDeP oleh POKJA di wilayah sasaran, ii) wawancara para anggota PIU, dan iii) mengorganisasikan serangkaian pertemuan diskusi dengan tim petunjuk. Petunjuk teknis disusun menurut elemen - elemen yang sama dengan model kerja, yaitu: i) struktur fasilitasi (pelaksanaan persiapan), ii) fasilitasi pelaksanaan (tahapan/ metode fasilitasi industri lokal, dan iii) informasi sumber dukungan, dan disiapkan sebagai dokumen referensial (atas dasar sukarela), khususnya bagi staff pelaksana pemerintah daerah (juga staff pelaksana Ditjen IKM). Petunjuk teknis didraf pertama kali oleh Tim Tenaga Ahli pada bulan September 2015. Draft ini kemudian dikaji oleh tim petunjuk dan direvisi berdasarkan komentar yang diperoleh, paralel dengan diskusi intermiten dengan tim petunjuk dan Direktur Proyek/ Manajer mengenai i) diseminasi kepada pemerintah daerah, ii) posisi/ pemanfaatannya dalam program Ditjen IKM, dan iii) kemungkinan insentif bagi pemerintah daerah yang memanfaatkannya.</p>																
3-4:	Menyelenggarakan lokakarya untuk mensosialisasikan model kepada para pemangku kepentingan lainnya.	<p>Kegiatan ini terdiri dari dua sub-kegiatan, yaitu:</p> <p><u>Seminar regional</u> untuk diseminasi pengalaman/ pencapaian fasilitasi industri lokal dengan pendekatan SMIDeP. Seminar regional, berfokus pada industri-industri sasaran di fase I, diselenggarakan untuk i) berbagi pendekatan fasilitasi, ii) berbagi faktor-faktor kunci (pelajaran dan praktik baik yang diobservasi selama fasilitasi) dari kasus sukses, dan iii) mengusulkan Kemenperin (Ditjen IKM dan direktorat terkait) untuk memperluas model dukungan yang sama kepada daerah lain yang memiliki industri lokal sejenis atau berpotensi untuk pengembangan industri tersebut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fokus</th> <th>Undangan</th> <th>Tgl/ Tempat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seminar Wilayah I</td> <td>Fasilitasi industri fesyen ulos di Samosir</td> <td>Pemerintah Provinsi/ Kabupaten yang memiliki potensi untuk pengembangan industri fesyen (menggunakan kain tradisional)</td> <td>17 Nov. Medan</td> </tr> <tr> <td>Seminar Wilayah II</td> <td>Fasilitasi industri komponen kapal di Tegal in Tegal</td> <td>Pemerintah Provinsi/ Kabupaten yang memiliki industri pengerjaan logam, BKI, asosiasi produsen komponen kapal</td> <td>30 Nov. Jakarta, Kementerian Perindustrian</td> </tr> <tr> <td>Seminar Wilayah III</td> <td>Fasilitasi industri pengolahan kakao di Sulawesi Tengah</td> <td>Pemerintah Provinsi/ Kabupaten yang memiliki industri pengolahan kakao atau potensi untuk pengembangannya</td> <td>17 Nov. Palu</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seluruh seminar regional dirancang dan diatur oleh Ditjen IKM, sedangkan Tim Tenaga Ahli dan perwakilan dari masing - masing POKJA menjelaskan pendekatan SMIDeP dan kasus sukses fasilitasi. Petunjuk teknis juga diinformasikan kepada pemerintah daerah yang diundang.</p> <p><u>Seminar Nasional</u> untuk diseminasi model fasilitasi SMIDeP dan petunjuk teknis. Tim Tenaga Ahli telah diberikan sesi presentasi untuk memperkenalkan petunjuk teknis guna menyebarluaskan/ berbagi model fasilitasi SMIDeP untuk pengembangan industri lokal dan pengalaman fasilitasi di lapangan, pada rapat koordinasi nasional Ditjen IKM bulan Februari di Bengkulu.</p> <p>Ditjen IKM kemudian mengumumkan kepada seluruh pemerintah daerah di seminar, jika pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi industri prioritas mereka mengikuti petunjuk fasilitasi, maka Ditjen IKM berniat akan mengarahkan program dukungan dengan cara yang terfokus dan intensif ke beberapa sasaran daerah / industri .</p>		Fokus	Undangan	Tgl/ Tempat	Seminar Wilayah I	Fasilitasi industri fesyen ulos di Samosir	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten yang memiliki potensi untuk pengembangan industri fesyen (menggunakan kain tradisional)	17 Nov. Medan	Seminar Wilayah II	Fasilitasi industri komponen kapal di Tegal in Tegal	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten yang memiliki industri pengerjaan logam, BKI, asosiasi produsen komponen kapal	30 Nov. Jakarta, Kementerian Perindustrian	Seminar Wilayah III	Fasilitasi industri pengolahan kakao di Sulawesi Tengah	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten yang memiliki industri pengolahan kakao atau potensi untuk pengembangannya	17 Nov. Palu
	Fokus	Undangan	Tgl/ Tempat															
Seminar Wilayah I	Fasilitasi industri fesyen ulos di Samosir	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten yang memiliki potensi untuk pengembangan industri fesyen (menggunakan kain tradisional)	17 Nov. Medan															
Seminar Wilayah II	Fasilitasi industri komponen kapal di Tegal in Tegal	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten yang memiliki industri pengerjaan logam, BKI, asosiasi produsen komponen kapal	30 Nov. Jakarta, Kementerian Perindustrian															
Seminar Wilayah III	Fasilitasi industri pengolahan kakao di Sulawesi Tengah	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten yang memiliki industri pengolahan kakao atau potensi untuk pengembangannya	17 Nov. Palu															

<p>3-5:</p>	<p>Memfasilitasi pengaturan anggaran yang diperlukan serta menyusun program untuk merespon kemungkinan permohonan dari pemerintah provinsi lain di luar wilayah sasaran.</p>	<p><u>Kelanjutan dua model dukungan yang sukses</u> Di antara industri - industri sasaran, industri komponen kapal dan pengolahan kakao dianggap sebagai kasus sukses fasilitasi di rapat Komite Koordinasi Bersama ketiga. Menanggapi ini, Kemenperin mulai mempertimbangkan pengaturan yang diperlukan untuk mereplikasi model dukungan yang difasilitasi pada industri - industri sasaran Proyek. Di industri komponen kapal, tiga pihak terkait (Kemenperin, BKI) memasuki MoU untuk program percepatan sertifikasi komponen skala nasional guna meningkatkan jumlah komponen bersertifikat dan meningkatkan konten lokal galangan kapal. Tim Tenaga Ahli menyarankan agar proses fasilitasi berdasarkan pada petunjuk teknis dan konten / anggaran dari setiap dukungan yang diberikan, agar Kemenperin dapat mengatur persiapan yang diperlukan untuk keberlanjutan program tersebut. Di industri pengolahan kakao, Tim Tenaga Ahli dibantu Kemenperin menyelenggarakan rapat koordinasi antara Ditjen IKM dan Ditjen IA untuk memastikan keberlanjutan model dukungan yang telah dilakukan di Sulawesi Tengah ke daerah lain, dan menyarankan pembagian tugas di antara kedua belah pihak dan pentingnya dukungan perencanaan kepada pemerintah daerah. <u>Kelanjutan model fasilitasi berbasis petunjuk teknis</u> Menindaklanjuti pengumuman Ditjen IKM (pada seminar nasional di Bengkulu) mengenai kelanjutan model fasilitasi SMIDeP ke daerah lain, Ditjen IKM telah mengeluarkan surat resmi pada Maret 2016 terkait pengumuman⁹ tersebut yang memuat syarat/ kondisi yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yang berminat berpartisipasi dalam tahap lanjutan. Tim Tenaga Ahli telah menyarankan Ditjen IKM untuk mempersiapkan syarat/ kondisi, dan merekomendasikan aksi penting kepada Ditjen IKM termasuk penyusunan tim fasilitasi, penganggaran, pengadaan insentif dan peningkatan kapasitas ke pemerintah daerah sasaran, untuk perluasan model fasilitasi. Tim Tenaga Ahli kemudian membantu Ditjen IKM dalam melakukan sesi konsultasi kepada pemerintah daerah yang telah merespon surat dengan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam tahap lanjutan model fasilitasi, dimana model fasilitasi dan petunjuk teknis dijelaskan melalui konsultasi bersamaan dengan bimbingan persiapan yang dibutuhkan dan diatur oleh pihak pemerintah daerah, menggunakan kesempatan pada rapat koordinasi nasional pada bulan Maret 2016 di Aceh. Menindaklanjuti hasil sesi konsultasi, kandidat pemerintah daerah yang terdaftar untuk tahap lanjutan, Tim Tenaga Ahli juga menyarankan Ditjen IKM mengenai i) seleksi pemerintah daerah sasaran, ii) estimasi anggaran untuk bimbingan (termasuk peningkatan kapasitas)/ monitoring oleh Ditjen IKM selama proses fasilitasi, dan iii) kemungkinan dukungan anggaran untuk usulan kegiatan dukungan oleh pemerintah daerah terpilih dan penempatan fasilitator mereka.</p>
-------------	--	--

(4) Kegiatan umum

Tim Tenaga Ahli bekerja sama dengan C/P telah menyelenggarakan kegiatan - kegiatan umum berikut dalam Proyek. Kegiatan tersebut termasuk a) Komite Koordinasi Bersama (JCC) dan rapat bersama antara PIU dan POKJA, b) laporan dan PR, serta c) pelatihan C/P (studi banding) di Jepang.

Tabel II.1.6 Kegiatan umum dalam Proyek

Kegiatan Umum		Penjelasan Singkat
a) JCC dan rapat bersama antara PIU dan POKJA	JCC	Yang pertama diselenggarakan pada bulan April 2013, untuk menjelaskan kegiatan Proyek selama Fase I dan meminta C/P untuk melakukan pengaturan yang diperlukan. Yang kedua diselenggarakan di akhir Fase I pada bulan Juli 2014, untuk menjelaskan dan membahas kemajuan kegiatan Proyek secara keseluruhan, kemajuan spesifik, serta pencapaian Rencana Aksi dari tiap POKJA, dan kemungkinan pencapaian hasil jangka menengah (<i>outcome</i>) Proyek, serta menjelaskan jadwal dan kegiatan di Fase II.

⁹ Lihat Lampiran-9 untuk surat tersebut.

		<p>Yang ketiga diselenggarakan di pertengahan Fase II pada bulan Juni 2015, untuk menjelaskan dan mendiskusikan kemajuan kegiatan Proyek secara keseluruhan, kemajuan spesifik, dan pencapaian Rencana Aksi dari tiap POKJA, dan kemungkinan pencapaian hasil jangka menengah (outcome) Proyek, dan menjelaskan jadwal kegiatan untuk Output-3 pada jangka waktu yang tersisa.</p> <p>Yang terakhir diselenggarakan di akhir Fase II pada bulan Maret 2016, untuk menjelaskan pencapaian Proyek secara keseluruhan yang berfokus pada keberlanjutan diseminasi/ kelanjutan model fasilitasi melalui petunjuk teknis untuk fasilitasi pengembangan industri lokal, dan membahas tindakan-tindakan/ inisiatif yang diperlukan oleh Ditjen IKM.</p>
	Rapat bersama antara PIU dan POKJA ¹⁰	Diselenggarakan dua kali, pada bulan Oktober 2014 dan Maret 2014 (dipimpin oleh Direktur Jenderal atau perwakilannya) untuk berbagi kemajuan dan membahas perubahan/ saran terkait kegiatan Proyek di antara C/Ps yang paling terkait.
b) Laporan dan PR	Rencana Kerja (Ver.0 &1)	Ver. 0 disampaikan pada bulan Maret 2013, menerangkan rencana operasional kegiatan Proyek yang mencakup Fase I secara keseluruhan, kemudian direvisi menjadi Ver. 1 pada bulan Mei 2013 setelah mendapat kepastian tentang wilayah/ industri sasaran.
	Laporan Kemajuan (Ver.1)	Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan kemajuan Proyek hingga akhir Maret 2014.
	Rencana Kerja (Ver.2)	Disampaikan pada bulan Maret 2014, mendokumentasikan kegiatan dan kemajuan Proyek, dan merevisi Ver.1.
	Laporan Akhir Proyek (Ver. 1)	Mendokumentasikan kegiatan dan kemajuan Proyek secara keseluruhan, dan menelaah pencapaian output-output Proyek hingga akhir Juli 2014.
	Rencana Kerja (Ver.3)	Disampaikan pada bulan September 2014, menerangkan rencana operasional kegiatan Proyek yang mencakup Fase II secara keseluruhan, menjelaskan wilayah/ industri sasaran tambahan.
	Lembar Monitoring (Ver.0)	Disampaikan di bulan Januari 2015 pada pengenalan sistem monitoring baru JICA, mendokumentasikan seluruh kegiatan dan kemajuan Proyek hingga akhir Desember 2015 dan merevisi PDM selama misi monitoring jangka menengah.
	Lembar Monitoring (Ver.1)	Disampaikan pada bulan Juni 2015, mendokumentasikan kegiatan dan kemajuan Proyek hingga akhir Juni 2015.
	Laporan Akhir Proyek (Ver. 2)	Mendokumentasikan seluruh kegiatan Proyek, pencapaian dari output/ tujuan Proyek, melaporkan hasil kajian Proyek dengan pembelajaran, prospek realisasi tujuan umum pada akhir Februari 2016.
	Media PR	Menerbitkan brosur Proyek, buletin (10 edisi yang diterbitkan tiap 3 bulan) , dan pengkinian situs proyek kerja sama teknis JICA.
c) Pelatihan C/P (studi banding) di Jepang	Pelatihan C/P dilaksanakan di Prefektur Ehime/ Tokyo pada 12-24 Januari 2014, agar C/P dapat belajar mengenai kebijakan IKM pada level nasional dan regional, program dukungan. Total, 14 orang termasuk dua peserta dengan biaya mandiri (Sesdijen IKM) berpartisipasi pada pelatihan tersebut.	

II.2 Pencapaian Proyek

II.2-1 Output dan Indikator

(1) Pencapaian Output-1

Pencapaian output-1: pembentukan platform untuk pengembangan IKM/ industri lokal di tiap wilayah/ industri sasaran dikaji menggunakan indikator-indikator terverifikasi berikut berdasarkan PDM (versi revisi), dan dianggap memuaskan karena output (dan platform pengembangan industri local sebagai hasilnya) disusun sesuai asumsi.

¹⁰ JCC melibatkan beberapa kementerian lain dan KADIN, sedangkan rapat bersama fokus pada C/P di Kemenperin dan Disperindag.

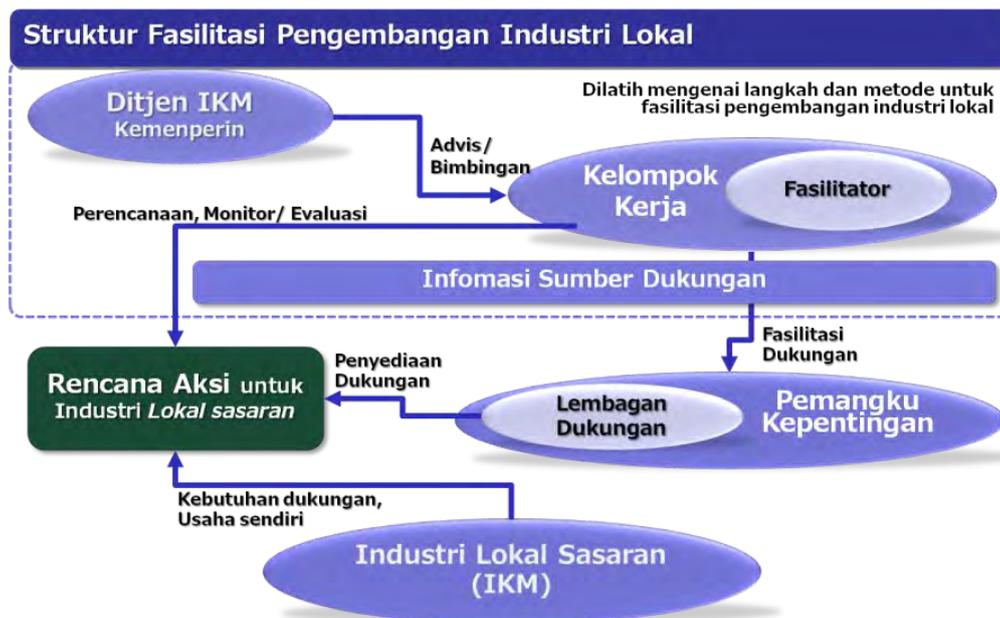
Tabel II.2.1 Pencapaian output-1

Output-1: Pembentukan platform pengembangan industri lokal		
Platform untuk penyediaan layanan yang efisien dipersiapkan sebagai landasan pengembangan IKM di tiap wilayah sasaran.		
No.	Indikator terverifikasi	Pencapaian
1-1:	Kelompok Kerja dirumuskan di wilayah/ industri sasaran dan fasilitator yang mampu ditugaskan untuk mempersiapkan Rencana Aksi dan memfasilitasi pelaksanaannya.	POKJA dirumuskan di ke-6 industri sasaran di 5 wilayah (Fase I dan II) melalui penerbitan SK oleh kepala pemerintah daerah, dipimpin oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masing - masing wilayah dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, dan menunjuk fasilitator, untuk menyiapkan Rencana Aksi dan memfasilitasi pelaksanaannya.
1-2:	Direktori berbasis situs (<i>web</i>), yang dapat dimutakhirkan secara berkala oleh Ditjen IKM, dibuat agar dapat dimanfaatkan oleh para staf Ditjen IKM dan Dinas.	Direktori lembaga dukungan telah disiapkan dan diunggah pada bulan Mei 2015 (di situs lama Ditjen IKM) dan pada Desember 2015 (di situs baru, seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan), mencakup data profil lembaga dukungan (72) di wilayah sasaran (5 provinsi)/ di tingkat pusat, sehingga direktori tersedia bagi staf Ditjen IKM/ pemerintah daerah. Sekretariat Ditjen IKM disarankan untuk membahas secara internal terkait pengaturan kerja untuk pengkinian/ perluasan (data/ cakupan wilayah) direktori secara berkesinambungan setelah proses restrukturisasi Ditjen IKM selesai pada bulan April 2016.



Dipahami pula, bahwa salah satu hasil kegiatan untuk Output-1, mekanisme penyediaan layanan bagi IKM/ industri lokal yang efisien (misalkan, platform pengembangan industri lokal) dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Penyusunan struktur pengoperasian platform (dalam bentuk POKJA/ fasilitator di setiap industri sasaran, didukung oleh PIU/ Tim Wilayah),
- Mempelajari tahapan/ metode fasilitasi industri lokal oleh POKJA dan anggota PIU di tingkat pelaksana,
- Melengkapi informasi sumber dukungan (data profil lembaga dukungan di setiap wilayah)



Gambar II.2.1 Struktur platform pengembangan industri lokal

Platform untuk pengembangan industri lokal pada masing - masing wilayah/ industri di Fase I dan Fase II telah beroperasi selama berlangsungnya Proyek untuk penyediaan dukungan yang lebih baik melalui

bimbingan/ saran dari Tim Tenaga Ahli di lapangan.

(2) Pencapaian Output-2

Pencapaian output-2: pengoperasian platform untuk pengembangan IKM/ industri lokal di tiap wilayah/ industri sasaran (daya saing IKM sasaran di setiap wilayah sasaran diperkuat melalui penyediaan layanan yang efisien) dikaji menggunakan indikator-indikator terverifikasi berikut berdasarkan PDM (versi revisi), dan dianaggap cukup memuaskan karena output telah diwujudkan (khususnya pada jumlah kegiatan dukungan yang difasilitasi POKJA, kepuasan oleh IKM/ produsen sasaran dengan kegiatan dukungan, dan hasil yang dicapai dari fasilitasi POKJA setidaknya untuk industri sasaran fase I).

Tabel II.2.2 Pencapaian Output-2

Output-2: Pengoperasian platform untuk pengoperasian pengembangan industri lokal		
Daya saing IKM sasaran di setiap wilayah sasaran diperkuat melalui penyediaan layanan yang efisien.		
No.	Indikator terverifikasi	Pencapaian
2-1:	Jumlah rapat POKJA yang diselenggarakan.	Hingga laporan ini disampaikan, 66 rapat POKJA telah diselenggarakan oleh POKJA, baik industri sasaran di Fase I maupun Fase II untuk melaksanakan tugas yang diberikan (diagnosis industri, perencanaan Rencana Aksi, fasilitasi/ monitoring pelaksanaan Rencana Aksi) atau sesekali jika terdapat topik khusus. Walaupun pada kasus POKJA industri komponen kapal/ fesyen ulos sering kali rapat difasilitasi oleh Tim Tenaga Ahli, tetapi POKJA lainnya menyelenggarakan rapat secara sukarela untuk berbagi/ membahas kemajuan, isu, dan ukuran. Lihat detail untuk masing - masing industri sasaran di Lampiran-8.
2-2:	Jumlah kegiatan dukungan/ layanan yang difasilitasi dari usulan dukungan/ layanan dalam Rencana Aksi.	Hingga laporan ini disampaikan, 183 kegiatan dukungan layanan telah difasilitasi oleh POKJA dan disiapkan untuk industri sasaran (lihat detail untuk masing - masing industri sasaran di Lampiran-8). Mayoritas usulan dukungan Rencana Aksi industri - industri sasaran Fase I sudah terlaksana, sedangkan Rencana Aksi industri - industri sasaran Fase II baru dimulai pada bulan Maret 2015 dengan beberapa kegiatan dukungan kunci dan difasilitasi dengan amat baik pada kasus industri alas kaki. Pihak Indonesia mendanai sebagai besar kegiatan dukungan yang diusulkan, sementara Tim Tenaga Ahli membantu sebagian kecil pembiayaan kegiatan dukungan yang tidak dianggarkan namun harus dilaksanakan pada tahap awal pelaksanaan. Sebagian besar kegiatan dukungan yang pembiayaannya diasumsikan berasal dari "lini perindustrian/perdagangan" termasuk Kemenperin (Ditjen IKM, Ditjen terkait lainnya) dan Dinas Perindag Provinsi atau Kabupaten/ Kota dapat dengan mudah dianggarkan dan difasilitasi pelaksanaannya. POKJA secara umum dapat memanfaatkan sumber dukungan seperti instruktur, <i>trainer</i> , konsultan secara memadai dengan menggunakan pengetahuan mereka sendiri atau bertanya pada Dinas provinsi atau Ditjen IKM. Di sisi lain, usulan kegiatan dukungan yang pembiayaannya diasumsikan berasal dari lembaga dukungan di luar "lini perindustrian/ perdagangan", seperti Dinas Pariwisata (fesyen ulos), Dinas Perkebunan/ Litbang pertanian (pengolahan kakao) dan lembaga keuangan belum dapat difasilitasi seperti yang diharapkan. Beberapa lembaga tersebut secara resmi tergabung dalam POKJA; akan tetapi komitmen mereka untuk menyediakan dukungan tergolong lemah. Ketua POKJA diharapkan untuk aktif mendekati lembaga - lembaga tersebut untuk memfasilitasi dukungan yang belum terlaksana. Lihat detail untuk masing-masing industri sasaran di Lampiran-8.
2-3:	Jumlah IKM/ produsen yang telah menerima/ memanfaatkan kegiatan dukungan/ layanan yang difasilitasi.	Hingga laporan ini disampaikan, sekitar 40 IKM (dari industri komponen kapal), 28 produsen (bisnis pengolahan kakao/ mebel rotan skala mikro), dan 80 produsen (pengrajin individual fesyen ulos) telah menerima/ memanfaatkan kegiatan dukungan / layanan (paling tidak satu kali) yang difasilitasi oleh masing - masing POKJA industri sasaran Fase I. Akan tetapi, IKM/ produsen sasaran yang menjadi fokus dan terlibat dalam Rencana Aksi tersebut masih

		<p>terbatas pada 12 IKM, 21 produsen, 20 produsen/ pengrajin.</p> <p>Pada industri Fase II, jumlah IKM yang menerima/ memanfaatkan kegiatan/ layanan dukungan (paling tidak satu kali) sejauh ini berjumlah 21 (pengolahan aloe) dan 30 (alas kaki). Mereka juga merupakan IKM sasaran yang menjadi fokus dan telah terlibat dalam tantangan untuk tujuan utama dari Rencana Aksi.</p> <p>Lihat detail untuk masing-masing industri sasaran di Lampiran-8.</p>
2-4:	Tingkat kepuasan (mayoritas IKM sasaran) terhadap kegiatan dukungan/ layanan yang difasilitasi.	Lihat detail untuk masing - masing industri sasaran di Lampiran-8.
2-5:	<p>Hasil (perubahan positif) dari aksi yang dilakukan oleh IKM sasaran/ produsen terhadap aspek -aspek yang relevan termasuk berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan prototipe atau produksi produk baru/ modifikasi, dan diversifikasi produk, - Perbaikan berdasarkan komentar dari pengguna/ konsumen, - Perluasan/ diversifikasi pasar dan saluran penjualan, serta pengembangan pasar/ pembeli baru, - Kinerja manajemen (penjualan, karyawan), dan, - Pencapaian relevan lainnya (kelembagaan, kewirausahaan, akses keuangan, dan aspek lainnya) 	Lihat detail untuk masing - masing industri sasaran di Lampiran-8.

(3) Pencapaian Output-3

Pencapaian output-3: pembuatan model untuk pengembangan IKM/ industri lokal berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari Output-1 dan Output-2 dikaji menggunakan indikator-indikator terverifikasi berikut berdasarkan PDM (versi revisi), dan dianggap cukup memuaskan karena output (baik petunjuk teknis untuk model fasilitasi pengembangan industri lokal, dan seminar sosialisasi untuk model ini yang diatur oleh Ditjen IKM) terwujud sesuai asumsi.

Tabel II.2.3 Pencapaian Output-3

Output-3: Penciptaan model pengembangan IKM																												
Model untuk pengembangan IKM/ industri lokal dibuat berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh melalui kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan terkait Output-1 dan -2 agar dapat diaplikasikan di daerah lain.																												
No.	Indikator terverifikasi	Pencapaian																										
3-1:	Pembuatan petunjuk teknis sebagai materi referensi untuk model yang baru dibuat untuk mengembangkan IKM	<p>Petunjuk teknis dibuat setelah model kerja, melalui serangkaian diskusi dengan tim petunjuk di Ditjen IKM, seperti dijelaskan pada seksi sebelumnya. Berikut adalah daftar isi dari petunjuk teknis:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bab</th> <th>Seksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bab 1</td> <td>1.1 Latar Belakang dan <i>Rationale</i></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Pendahuluan</td> <td>1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Petunjuk</td> </tr> <tr> <td>1.3 Definisi dan Pengertian</td> </tr> <tr> <td>Bab 2</td> <td>2.1 Platform Pengembangan Industri Lokal</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Struktur</td> <td>2.2 Perumusan Kelompok Kerja</td> </tr> <tr> <td>Fasilitasi</td> <td>2.3 Penempatan Fasilitator</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Bab 3</td> <td>3.1 Langkah Keseluruhan Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal</td> </tr> <tr> <td>Fasilitasi</td> <td>3.2 Diagnosis Industri</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Bab 4</td> <td>3.3 Penyusunan Rencana Aksi</td> </tr> <tr> <td>3.4 Pelaksanaan Rencana Aksi</td> </tr> <tr> <td>3.5 Monitoring, Evaluasi dan Laporan Rencana Aksi</td> </tr> <tr> <td>4.1 Sumber Dukungan untuk Pengembangan Industri Lokal</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Informasi Sumber Dukungan</td> <td>4.2 Survei Profil Lembaga Dukungan Daerah</td> </tr> <tr> <td>4.3 Fasilitasi dan Skema Pembiayaan yang tersedia bagi Pemerintah Daerah</td> </tr> <tr> <td>Petunjuk (dengan versi singkat) disiapkan sebagai dokumen referensi bersifat sukarela, terutama bagi staf pelaksana pemerintah daerah.</td> </tr> </tbody> </table>	Bab	Seksi	Bab 1	1.1 Latar Belakang dan <i>Rationale</i>	Pendahuluan	1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Petunjuk	1.3 Definisi dan Pengertian	Bab 2	2.1 Platform Pengembangan Industri Lokal	Struktur	2.2 Perumusan Kelompok Kerja	Fasilitasi	2.3 Penempatan Fasilitator	Bab 3	3.1 Langkah Keseluruhan Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal	Fasilitasi	3.2 Diagnosis Industri	Bab 4	3.3 Penyusunan Rencana Aksi	3.4 Pelaksanaan Rencana Aksi	3.5 Monitoring, Evaluasi dan Laporan Rencana Aksi	4.1 Sumber Dukungan untuk Pengembangan Industri Lokal	Informasi Sumber Dukungan	4.2 Survei Profil Lembaga Dukungan Daerah	4.3 Fasilitasi dan Skema Pembiayaan yang tersedia bagi Pemerintah Daerah	Petunjuk (dengan versi singkat) disiapkan sebagai dokumen referensi bersifat sukarela, terutama bagi staf pelaksana pemerintah daerah.
Bab	Seksi																											
Bab 1	1.1 Latar Belakang dan <i>Rationale</i>																											
Pendahuluan	1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Petunjuk																											
	1.3 Definisi dan Pengertian																											
	Bab 2	2.1 Platform Pengembangan Industri Lokal																										
Struktur	2.2 Perumusan Kelompok Kerja																											
	Fasilitasi	2.3 Penempatan Fasilitator																										
Bab 3	3.1 Langkah Keseluruhan Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal																											
	Fasilitasi	3.2 Diagnosis Industri																										
Bab 4	3.3 Penyusunan Rencana Aksi																											
	3.4 Pelaksanaan Rencana Aksi																											
	3.5 Monitoring, Evaluasi dan Laporan Rencana Aksi																											
	4.1 Sumber Dukungan untuk Pengembangan Industri Lokal																											
Informasi Sumber Dukungan	4.2 Survei Profil Lembaga Dukungan Daerah																											
	4.3 Fasilitasi dan Skema Pembiayaan yang tersedia bagi Pemerintah Daerah																											
	Petunjuk (dengan versi singkat) disiapkan sebagai dokumen referensi bersifat sukarela, terutama bagi staf pelaksana pemerintah daerah.																											
3-2:	Lokakarya sosialisasi diselenggarakan oleh Kemenperin	Seperti yang dijelaskan pada seksi sebelumnya, untuk mendiseminasi model kerja dan petunjuk teknis fasilitasi industri lokal ke daerah lain serta kasus sukses fasilitasi industri lokal, baik seminar regional (3 lokasi) maupun nasional seminar (2 kali) telah diselenggarakan oleh Ditjen IKM bekerja sama																										

	<p>dengan Tim Tenaga Ahli.</p> <p><u>Seminar Regional</u>: Seminar wilayah II menyoroti kasus sukses fasilitasi industri komponen kapal di Tegal, dan memastikan konsensus di antara para peserta untuk memperluas fasilitasi serupa di daerah lain di bawah program baru yang dirumuskan untuk akselerasi sertifikasi komponen. Seminar wilayah III menyoroti kasus sukses industri pengolahan kakao. Seminar ini, yang diselenggarakan bersama oleh dua Ditjen di IKM (IKM dan industri agro), juga tercapai konsensus antara dua Ditjen untuk mengaplikasikan model dukungan yang dilakukan di Sulawesi Tengah ke daerah lain.</p> <p><u>Seminar Nasional</u>: Dua (2) kali kesempatan untuk persiapan perluasan model fasilitasi SMIDeP ke wilayah lain telah diatur oleh Ditjen IKM dengan menggunakan rapat koordinasi nasional, yang mengundang seluruh Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi. Melalui kesempatan ini, Ditjen IKM bersama dengan Tim Tenaga Ahli dapat menjelaskan model fasilitasi SMIDeP dan keunggulan mengikuti model berdasarkan petunjuk dengan mengutip kasus sukses SMIDeP.</p>
--	---

II.2-2 Pencapaian Tujuan Proyek dan Indikator

Pencapaian tujuan Proyek di akhir Proyek ditinjau berdasarkan tiga (3) indikator berikut sesuai dengan PDM (versi revisi). Tujuan Proyek terkait dengan i) posisi dan pemanfaatan petunjuk teknis, ii) persiapan oleh Ditjen-IKM untuk melanjutkan model fasilitasi pengembangan industri lokal berbasis petunjuk, dan iii) jumlah kasus sukses (IKM / produsen yang mencapai tujuan utama dari Rencana Aksi sebagai hasil dari fasilitasi POKJA) di industri - industri sasaran.

Tabel II.2.4 Pencapaian Tujuan Proyek

Tujuan Proyek: Persiapan perluasan model pengembangan IKM (industri lokal) berdasarkan platform penyediaan layanan yang efisien (untuk fasilitasi industri lokal) diatur di Kemenperin.		
No.	Indikator terverifikasi	Pencapaian
1.	Adopsi resmi petunjuk yang telah dibuat untuk pengembangan IKM oleh Kemenperin.	<p>Model SMIDeP dan petunjuk untuk fasilitasi pengembangan industri lokal telah diadopsi oleh Ditjen IKM dan diumumkan melalui surat resmi untuk tahap lanjutan ke pemerintah daerah lainnya (bagi yang tertarik mengikuti model/ petunjuk), dan petunjuk sebagai dokumen referensial (atas dasar sukarela) terutama bagi staf pelaksana pemerintah daerah juga telah diakui oleh Direktur Jenderal IKM dengan tanda tangan beliau untuk distribusi awal melalui rapat koordinasi nasional dengan seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat provinsi.</p> <p>Pada rapat koordinasi Ditjen IKM telah membuat daftar 14 kandidat Pemda (Dinas Perindag Provinsi), yang berminat untuk berpartisipasi dalam tahap perluasan model fasilitasi berbasis petunjuk¹¹.</p> <p>Kemudian, Ditjen IKM telah menerbitkan surat¹² lainnya bagi Dinas Perindag Provinsi yang berminat guna mengonfirmasi komitmen mereka (untuk menyiapkan struktur fasilitasi, anggaran daerah yang diperlukan untuk proses fasilitasi) dan industri/ daerah mereka (mis.: kabupaten/ kota di provinsi) untuk difasilitasi melalui surat tanggapan dari masing-masing Kepala Dinas.</p> <p>Pada saat pelaporan, lima (5) Disperindag Provinsi¹³ telah memberikan tanggapan ke Ditjen IKM melalui surat konfirmasi komitmen untuk berpartisipasi dalam tahap perluasan model fasilitasi berbasis petunjuk.</p>
2.	Pengaturan penganggaran dan organisasi Kemenperin untuk memperluas model yang dibuat ke daerah lain.	<p><u>Kelanjutan model fasilitasi berbasis petunjuk</u></p> <p>Dalam kelanjutan model fasilitasi SMIDeP ke daerah lain, Ditjen IKM telah berkomitmen kepada pengaturan untuk persiapan berikut;</p> <p>Pertama, Ditjen IKM sedang memfinalisasi daftar kandidat pemerintah daerah yang berkomitmen dalam tahap lanjutan, dan proses/metode seleksi untuk</p>

¹¹ Lihat Lampiran-10 untuk daftar Dinas provinsi, yang telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam tahap lanjutan..

¹² Lihat Lampiran-11 untuk surat tersebut.

¹³ Termasuk Disperindag Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur dan Papua.

		<p>mengidentifikasi pemerintah daerah/ industri sasaran, dengan memperhatikan kapasitas organisasional dan anggaran.</p> <p>Kedua, Direktur Jenderal IKM telah memberi instruksi untuk mempersiapkan tim di Ditjen IKM sebagai <i>focal point</i> untuk perluasan model, yang akan menentukan staf yang bertanggung jawab dalam i) koordinasi keseluruhan, ii) penjelasan petunjuk dengan cerita sukses SMIDeP, dan iii) bimbingan dan monitoring kepada pemerintah daerah/ industri.</p> <p>Ketiga, Direktur Jenderal IKM telah meminta Sekretariat untuk mempersiapkan anggaran (untuk tahun anggaran 2017) untuk tahap lanjutan model fasilitasi, termasuk biaya perjalanan/ rapat dengan tujuan bimbingan/ monitoring terhadap beberapa pemerintah daerah sasaran, dan mempertimbangkan kemungkinan sebagian dana untuk membiayai usulan kegiatan dukungan oleh pemerintah daerah selama proses fasilitasi.</p> <p><u>Kelanjutan dua model dukungan sukses</u></p> <p>Selain model fasilitasi berbasis petunjuk teknis, yang akan dipeluas, terlepas dari kemiripan wilayah/ sektor, dua model dukungan (sebagai paket dukungan) dapat dilanjutkan baik industri komponen kapal maupun industri pengolahan kakao di daerah lain yang telah diakui oleh Kemenperin (dalam bentuk MoU antara para pemangku kepentingan pada kasus komponen kapal, dan pernyataan resmi dari Menteri pada kasus industri pengolahan kakao).</p> <p>Untuk industri komponen, model dukungan diakui dalam bentuk MoU mengenai program akselerasi sertifikasi komponen, di mana 3 pihak (Kemenperin, BKI, asosiasi) mempersiapkan rencana aksi untuk tujuan tersebut, dan Kemenperin mengamankan anggaran yang diperlukan (tidak memerlukan pengaturan organisasi tertentu di Kemenperin).</p> <p>Untuk industri pengolahan kakao, model dukungan juga diakui melalui pernyataan Menteri (pada November 2015) yang berharap kasus ini dapat memotivasi daerah lain. Menanggapi hal tersebut, baik Ditjen IA dan -IKM telah membahas pembagian tugas dan cakupan wilayah yang akan diperluas (tidak memerlukan pengaturan organisasi tertentu di Kemenperin).</p>										
3.	Jumlah kasus sukses (IKM / produsen yang merealisasikan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Industri Lokal)	<p>Sebagai kasus sukses fasilitasi industri lokal Proyek di wilayah sasaran, berikut jumlah IKM / produsen yang telah mencapai tantangan aksi (tujuan utama) yang ditetapkan dalam Rencana Aksi dari masing-masing industri sasaran;</p> <table border="1" data-bbox="657 1265 1428 1724"> <thead> <tr> <th>Industri sasaran</th> <th>Jumlah IKM/ produsen yang telah mencapai tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Industri fesyen ulos</td> <td>20 produsen tergabung dalam koperasi produsen yang baru didirikan dan telah mulai serta terus bertransaksi dengan pembeli / saluran penjualan untuk turis/ pasar lokal untuk produk kerajinan.</td> </tr> <tr> <td>Industri komponen kapal</td> <td>4 IKM telah menerima sertifikasi BKI (untuk 7 komponen) dan mulai bertransaksi dengan galangan kapal / industri dan telah mendapat permintaan transaksi untuk tahun-tahun berikutnya.</td> </tr> <tr> <td>Industri pengolahan kakao</td> <td>16 produsen telah mulai dan terus bertransaksi dengan pembeli / saluran penjualan di pasar segmen modern untuk produk cokelat.</td> </tr> <tr> <td>Industri mebel rotan</td> <td>Tidak teramati. Meskipun, 5 IKM baru-baru ini telah mampu memproduksi sesuai dengan standar praktik manufaktur lokal yang ditetapkan oleh POKJA, transaksi nyata dengan pembeli / pengguna di segmen lokal modern belum dilaporkan.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan: Terkait industri sasaran Fase II (pengolahan aloe / alas kaki), pencapaian tujuan utama tidak direview, karena POKJA mengakui bahwa pelaksanaan Rencana Aksi baru setengah jalan difasilitasi.</p>	Industri sasaran	Jumlah IKM/ produsen yang telah mencapai tujuan	Industri fesyen ulos	20 produsen tergabung dalam koperasi produsen yang baru didirikan dan telah mulai serta terus bertransaksi dengan pembeli / saluran penjualan untuk turis/ pasar lokal untuk produk kerajinan.	Industri komponen kapal	4 IKM telah menerima sertifikasi BKI (untuk 7 komponen) dan mulai bertransaksi dengan galangan kapal / industri dan telah mendapat permintaan transaksi untuk tahun-tahun berikutnya.	Industri pengolahan kakao	16 produsen telah mulai dan terus bertransaksi dengan pembeli / saluran penjualan di pasar segmen modern untuk produk cokelat.	Industri mebel rotan	Tidak teramati. Meskipun, 5 IKM baru-baru ini telah mampu memproduksi sesuai dengan standar praktik manufaktur lokal yang ditetapkan oleh POKJA, transaksi nyata dengan pembeli / pengguna di segmen lokal modern belum dilaporkan.
Industri sasaran	Jumlah IKM/ produsen yang telah mencapai tujuan											
Industri fesyen ulos	20 produsen tergabung dalam koperasi produsen yang baru didirikan dan telah mulai serta terus bertransaksi dengan pembeli / saluran penjualan untuk turis/ pasar lokal untuk produk kerajinan.											
Industri komponen kapal	4 IKM telah menerima sertifikasi BKI (untuk 7 komponen) dan mulai bertransaksi dengan galangan kapal / industri dan telah mendapat permintaan transaksi untuk tahun-tahun berikutnya.											
Industri pengolahan kakao	16 produsen telah mulai dan terus bertransaksi dengan pembeli / saluran penjualan di pasar segmen modern untuk produk cokelat.											
Industri mebel rotan	Tidak teramati. Meskipun, 5 IKM baru-baru ini telah mampu memproduksi sesuai dengan standar praktik manufaktur lokal yang ditetapkan oleh POKJA, transaksi nyata dengan pembeli / pengguna di segmen lokal modern belum dilaporkan.											

II.3 Modifikasi PDM

PDM Proyek direvisi sekali saat monitoring jangka menengah JICA pada bulan Februari 2015. Modifikasi di PDM dibuat sebagai berikut, agar indikator-indikator dari tujuan dan output Proyek dapat disesuaikan atau diparafrasakan secara logis terhadap konten aktual kegiatan-kegiatan Proyek yang diakui oleh C/Ps. Ringkasan naratif dari tujuan/ output Proyek serta kegiatan tidak dimodifikasi.

Tabel II.3.1 Modifikasi yang dilakukan dalam PDM

No.	Awal	Modifikasi
Indikator terverifikasi untuk tujuan Proyek		
1.	Adopsi resmi petunjuk dibuat untuk pengembangan IKM oleh Kemenperin.	Sama
2.	Pengaturan anggaran dan organisasi Kemenperin untuk memperluas model yang dibuat ke daerah lain.	Sama
3.	xx (jumlah) perusahaan swasta yang memanfaatkan layanan pengembangan dan layanan konsultasi organisasi pendukung meningkat xx%.	Jumlah kasus sukses (IKM/ produsen yang merealisasikan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Industri Lokal).
4.	Kepuasan perusahaan swasta yang mengambil layanan dukungan.	Dihilangkan tetapi dijadikan sebagai salah satu indikator output.
Indikator terverifikasi untuk output		
Output-1: Pembentukan platform untuk pengembangan industri lokal		
1-1:	Perumusan POKJA untuk mengkoordinasikan penyedia layanan dan IKM di antara para pemangku kepentingan pengembangan IKM di masing-masing wilayah sasaran.	Perumusan POKJA (dan penempatan fasilitator) di wilayah/ industri sasaran.
1-2:	Pengembangan direktori (berbasis kertas dan berbasis situs) sebagai layanan bagi IKM.	Persiapan dan ketersediaan (staf Ditjen IKM) direktori penyediaan layanan (berbasis database).
Output-2: Pengoperasian platform untuk pengembangan industri lokal		
2-1:	Sebagian besar IKM mengakui peningkatan pelayanan.	Jumlah rapat POKJA yang diselenggarakan.
2-2:	Sebagian besar IKM yang menggunakan layanan yang disediakan puas.	Jumlah kegiatan/ layanan dukungan yang difasilitasi dari usulan dukungan/ layanan dalam Rencana Aksi.
2-3:	Perubahan positif yang teramati di IKM antara lain penjualan produk, diversifikasi pasar, hubungan keterkaitan di antara/ dalam IKM dan lain-lain.	Jumlah IKM/ produsen yang telah menerima/ memanfaatkan kegiatan/ layanan dukungan yang difasilitasi.
2-4:	Realisasi petunjuk sebagai bahan referensi untuk model yang baru dibuat untuk mengembangkan IKM.	Kepuasan (oleh sebagian besar IKM sasaran) terhadap kegiatan/ layanan dukungan yang difasilitasi.
2-5:		Hasil (perubahan positif) akibat aksi yang dilakukan oleh IKM/ produsen sasaran dalam aspek-aspek yang relevan.
Output-3: Pembuatan model pengembangan IKM		
3-1:	Realisasi petunjuk sebagai bahan referensi untuk model yang baru dibuat untuk mengembangkan IKM.	Sama
3-2:	Lokakarya sosialisasi diselenggarakan oleh Kemenperin.	Sama

II.4 Lainnya

II.4-1 Hasil terkait Lingkungan dan Sosial

Tidak berlaku di Proyek ini.

II.4-2 Hasil terkait Gender/ Perdamaian/ Pengurangan Kemiskinan

Tidak ada perhatian atau pendekatan khusus yang telah dilakukan dalam Proyek terkait isu-isu ini, meskipun dua industri sasaran (industri fesyen ulos di Samosir dan industri pengolahan kakao di Palu) dari 6 industri sasaran, sebagian besar terdiri dari produsen/ pengusaha wanita. Dipahami juga bahwa Rencana Aksi industri fesyen ulos di Samosir memiliki karakteristik sebagai dukungan peningkatan pendapatan bagi para wirausahawati desa.

III. Hasil Review Bersama

III.1 Hasil Review berdasarkan Kriteria Evaluasi DAC

Hasil *review* di akhir Proyek berdasarkan kriteria evaluasi DAC (5 kriteria yang mencakup: i) relevansi, ii) efektivitas, iii) efisiensi, iv) dampak dan v) keberlanjutan) dirangkum di bawah ini.

III.1-1 Relevansi

Relevansi dianggap “tinggi”. Rencana Strategis (RENSTRA, 2010-2014) untuk mempromosikan kluster industri dan pengembangan industri lokal sejalan dengan "Peraturan Presiden No.28, 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional" berubah saat berlangsungnya Proyek, dan digantikan dengan yang baru, RENSTRA (2015-2019) yang dipersiapkan untuk mengikuti Undang-Undang Perindustrian yang baru diberlakukan dan rencana induk industri nasional jangka panjang yang disebut RIPIN (sampai 2035).

RENSTRA baru berdasarkan RIPIN mempertahankan arah kebijakan yang sama seperti sebelumnya di bidang IKM/ pengembangan industri lokal, yang mengharapkan IKM untuk memainkan peran penting dalam memperkuat struktur industri nasional (dalam rantai pasok industri strategis nasional), serta mengukuhkan kembali peran Kemenperin sebagai pendukung kuat pemerintah daerah (melalui pendekatan *bottom-up* terkait pengembangan IKM/ industri lokal). RENSTRA menetapkan sasaran pembangunan seperti penguatan kelembagaan *sentra*¹⁴ industri dan Unit Pelayanan Teknis, bisnis start-up, pengembangan produk, dengan memampukan Ditjen IKM (berdasarkan UU Perindustrian) untuk menyediakan rentang fasilitasi yang lebih luas (pilihan dukungan) untuk mengakomodasi berbagai masalah/ kebutuhan yang dimiliki oleh IKM/ industri lokal dengan lebih baik, dan mendukung kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, keberadaan dan peran IKM di Indonesia tetap besar dari segi jumlah total unit usaha dari industri nasional (90% per 2013) dan total tenaga kerja di sektor industri non-migas (65.4% per 2013)¹⁵. Kontribusi IKM terhadap PDB di sektor industri mencapai 34,3% pada akhir tahun 2013. Masalah yang sering dihadapi IKM tetap sama, seperti akses keuangan, pekerja terampil, kualitas bahan baku, dukungan teknis berkualitas, pasar dan pembeli potensial yang buruk atau terbatas. Dalam hal ini, mekanisme yang bisa diterapkan secara efektif dan efisien menjawab masalah/ kebutuhan yang dimiliki oleh IKM/ industri lokal secara terus-menerus menjadi agenda di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, Proyek ini bertujuan meningkatkan mekanisme penyediaan layanan (misalkan, fasilitasi industri lokal) yang tetap relevan dan signifikan dengan kebijakan saat ini dan di masa mendatang.

III.1-2 Efektivitas

Efektivitas dianggap “tinggi”. Pertama, Proyek telah mencapai output (-1 dan -2) sesuai asumsi dengan mewujudkan salah satu tujuan Proyek, kasus sukses fasilitasi industri lokal berdasarkan pendekatan yang ditunjukkan oleh Proyek: yaitu, pembentukan platform (output-1) dan pengoperasian/ pemanfaatan platform (output-2) di wilayah/ industri sasaran. Selanjutnya, Proyek telah menyusun sebuah model fasilitasi dalam bentuk petunjuk teknis (output-3) berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari kegiatan-kegiatan untuk output-1 dan -2. Model fasilitasi berbasis petunjuk teknis diadopsi oleh Ditjen

¹⁴ Didefinisikan sebagai pusat produksi lokal dengan jumlah usaha lebih dari lima pada area tertentu. Dilaporkan terdapat sekitar 8-9,000 yang terkonsentrasi di Pulau Jawa.

¹⁵ Menurut 'Industry Fact and Figure 2015', Kementerian Perindustrian.

IKM dan diumumkan melalui surat resmi untuk perluasan ke pemerintah daerah lain (yang berminat untuk menggunakan model/ petunjuk teknis) sesuai tujuan Proyek. Proyek juga telah berhasil mendukung Kemenperin untuk memperoleh model pendukung bagi industri tertentu (industri pendukung: komponen kapal, dan industri yang berbasis ketersediaan sumber daya lokal: pengolahan kakao), yang dapat diterapkan di daerah lain.

Oleh karena itu, Proyek ini memandang bahwa output dan kegiatan yang diperlukan dirancang secara holistik dengan logis, dan telah disesuaikan (bila konten atau maksud dari kegiatan dirasa kurang dipahami C/Ps). Penyesuaian kegiatan Proyek tersebut dibuat agar selaras dengan konteks aktual sistem administrasi Indonesia terkait IKM/ pengembangan industri lokal, dan mencerminkan hasil diskusi dengan C/Ps di tingkat pusat/ daerah. Kegiatan yang berhubungan dengan direktori layanan adalah salah satu contohnya¹⁶, di mana isi dan maksud disesuaikan dengan hasil observasi di lapangan dan kondisi aktual dari perencanaan dan penyediaan layanan dukungan untuk pengembangan IKM/ industri lokal.

III.1-3 Efisiensi

Efisiensi dianggap “moderat”. Proyek ini dianggap telah dijalankan secara efisien, walaupun tidak menyeluruh. Guna mewujudkan mobilisasi input yang efisien, Proyek ini diharapkan memanfaatkan dengan baik: i) sumber daya dukungan dari pihak Indonesia, ii) aset kerja sama teknis JICA terdahulu, ketika C/Ps terlibat dalam kegiatan dari pengoperasian platform untuk fasilitasi industri sasaran.

Mobilisasi sumber dukungan oleh pihak Indonesia: Hampir semua kegiatan dukungan untuk industri sasaran dimobilisasi dari sumber dukungan Indonesia (seperti instruktur/ tenaga ahli untuk pelatihan/ bimbingan teknis, peluang pameran/ pameran dagang, laboratorium uji, dll), kecuali seorang tenaga ahli Jepang untuk bimbingan teknis pengenalan 3S. Walaupun, ada dana kegiatan dukungan yang dibantu oleh Tim Tenaga Ahli (tapi hanya sebagian kecil) terutama pada tahap awal. Karena POKJA menghadapi kesulitan untuk memfasilitasi lembaga pendukung yang bertanggung jawab untuk mengamankan/ memobilisasi anggaran yang diperlukan secara cepat atau tepat waktu.

Tim Tenaga Ahli kemudian merespon kebutuhan berbagi biaya (*cost-sharing*) yang muncul pada periode "penyiapan anggaran" dan kegiatan yang tak terduga/ terjadwal (berdasarkan review kemajuan kegiatan fasilitasi). Lembaga pemerintah/ lembaga dukungan publik tidak memiliki dana yang bersifat fleksibel untuk membiayai kegiatan dukungan, kecuali pembiayaan untuk kegiatan dukungan kecuali merevisi penggunaan anggaran yang sudah dianggarkan (tetapi masih membutuhkan persetujuan DPRD).

Perlu dicatat, bahwa aksi mandiri oleh IKM/ produsen sasaran (misalnya, biaya perjalanan untuk pemasaran, bahan baku untuk mempersiapkan prototipe pada pengembangan produk) hampir tidak dapat dibiayai oleh pihak pemerintah, sehingga membutuhkan dukungan dana dari Tim Tenaga Ahli di banyak kasus, meskipun jumlahnya relatif kecil.

Mobilisasi aset kerja sama teknis JICA terdahulu: Di antara aset tersebut, Tim Tenaga Ahli bermaksud untuk memobilisasi konsultan manajemen IKM (*shindan-shi*), layanan pengiriman desainer untuk pengembangan produk ekspor yang diperkenalkan ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor

¹⁶ Direktori layanan yang sebelumnya dipersiapkan dalam bentuk brosur untuk mencakup layanan yang tersedia bagi IKM sebagai referensi mereka. Namun, pengamatan di lapangan melalui kegiatan Proyek menunjukkan bahwa direktori lebih bermanfaat jika mencantumkan lembaga dukungan untuk pengembangan IKM sebagai referensi pihak pemerintah, dan jika diunggah di *website* dalam bentuk database.

Nasional (Ditjen PEN) di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Layanan pengiriman desainer oleh Ditjen PEN dimobilisasi oleh salah satu POKJA (untuk mebel rotan).

Proyek menyarankan agar masing-masing pemerintah daerah untuk menempatkan konsultan manajemen IKM sebagai fasilitator dalam POKJA; Namun, 3 dari total 6 POKJA tidak dapat mengangkat mereka karena tidak ada konsultan IKM yang ditempatkan. Tim Tenaga Ahli memandang bahwa konsultan IKM yang termobilisasi dalam Proyek relatif mampu dan termotivasi sebagai fasilitator terutama dalam memastikan komunikasi antara POKJA dan IKM/ produsen. Di antara POKJA, salah satunya POKJA mebel rotan telah mendemonstrasikan cara yang direkomendasikan untuk memanfaatkan konsultan IKM, di mana mereka dikerahkan untuk mengawasi dan mengaudit kepatuhan produsen mebel rotan dalam menjalankan SOP yang ditujukan untuk mebel buatan lokal.

Proyek telah mengubah kontrak untuk menambah total biaya Proyek dan memperpanjang periode saat mendekati akhir, dalam rangka menjawab kebutuhan C/P dengan lebih baik. Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan antara biaya dan periode Proyek asli dan aktual.

Tabel III.1.1 Perbandingan antara biaya dan periode Proyek asli dan aktual

	Periode Proyek	Biaya Proyek (Tim Tenaga Ahli)	Keterangan
Fase I			
Asli	Maret 2013 ~ Juli 2014	JPY 169 juta	Sebagai hasil dari dana tidak terpakai.
Aktual	Maret 2013 ~ Juli 2014	JPY 163 juta	
Fase II			
Asli	September 2014 ~ April 2016	JPY 174 juta	Diubah untuk memperpanjang mobilisasi Tenaga Ahli.
Aktual	September 2014 ~ April 2016	JPY 180 juta (est.)	

Baik biaya maupun periode Proyek untuk fase II diubah untuk memperpanjang mobilisasi Tenaga Ahli untuk salah satu kegiatan Output-3 (3-5: Fasilitasi pengaturan anggaran yang dibutuhkan dan menyusun program untuk merespon kemungkinan permintaan dari pemerintah provinsi lain di luar wilayah sasaran), contohnya, melalui partisipasi dalam sesi konsultasi (dijadwalkan setelah periode akhir proyek yang diasumsikan di awal) untuk menjelaskan model fasilitasi dan petunjuk dengan lebih detail kepada pemerintah daerah yang tertarik. Perubahan ini dianggap signifikan untuk menindaklanjuti tujuan Proyek: Pengaturan persiapan untuk perluasan model fasilitasi ke wilayah lain, sehingga memastikan prospek dalam mencapai tujuan umum.

III.1-4 Dampak

Dampak dianggap “high”. Proyek menentukan dua tujuan umum untuk dicapai setelah Proyek selesai, salah satunya adalah “memperbanyak wilayah (pemerintah daerah) yang memilih model yang telah dibuat dan meningkatkan layanan pengembangan IKM. Dalam hal ini, Ditjen IKM telah berkomitmen untuk memperluas model fasilitasi SMIDeP berbasis petunjuk teknis ke daerah lain melalui seluruh Dinas Perindustrian & Perdagangan tingkat provinsi, yang diikuti dengan penerbitan surat yang meresmikan komitmen tersebut.

Kemudian, Ditjen IKM mengatur sesi konsultasi kepada pemerintah daerah yang tertarik pada model fasilitasi (untuk penjelasan petunjuk fasilitasi industri lokal lebih lanjut secara konsultatif dan membimbing persiapan yang dibutuhkan untuk perancangan oleh pihak pemerintah daerah) pada rapat koordinasi nasional pada bulan April 2016 di Aceh, untuk mengidentifikasi pemerintah daerah (Dinas

Perindustrian & Perdagangan tingkat provinsi) yang berniat dalam berkomitmen partisipasi di tahap perluasan model fasilitasi SMIDeP berbasis petunjuk.

Ditjen IKM telah memperoleh daftar 14 Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi yang sudah merespon surat tersebut serta berminat untuk berpartisipasi pada tahap perluasan. Ditjen IKM sedang memfinalisasi daftar pemerintah daerah yang berkomitmen terhadap tahap perluasan, dengan menerbitkan surat lainnya bagi para pemerintah yang berminat guna mengonfirmasi komitmen mereka (yaitu, untuk memilih model yang telah dibuat untuk meningkatkan layanan pengembangan IKM) dan industri/ daerah mereka (yaitu, kabupaten/kota di provinsi) untuk difasilitasi melalui surat balasan dari masing - masing kepala Dinas. Pada saat pelaporan, lima (5) Disperindag provinsi telah merespon ke Ditjen IKM melalui surat konfirmasi komitmen untuk berpartisipasi dalam tahap perluasan model fasilitasi (beberapa pemerintah daerah mungkin dipilih sebagai sasaran pada tahap awal dari mereka yang telah berkomitmen melalui surat balasan). Dalam persiapan perluasan model fasilitasi ke daerah-daerah terpilih, Ditjen IKM telah juga membahas metode seleksi dan pengaturan yang diperlukan dalam aspek organisasional (personalia) dan anggaran.

Selain itu, Proyek juga telah berhasil menunjukkan model dukungan yang dapat diperluas untuk industri-industri tertentu (industri komponen kapal dan industri pengolahan kakao) yang diakui oleh Kemenperin. Adapun bagi industri komponen kapal, Kemenperin, dalam MoU dengan pihak-pihak terkait, bermaksud mempeluas program dukungan serupa (untuk akselerasi sertifikasi komponen kapal) ke daerah lain yang memiliki industri pengerjaan logam di tahun 2016. Sedangkan bagi industri pengolahan kakao, Provinsi Lampung dan Sulawesi Barat telah menunjukkan minat untuk mengikuti model dukungan, mengharapakan bimbingan dan penyediaan dukungan dari Kemenperin.

III.1-5 Keberlanjutan

Keberlanjutan secara keseluruhan dianggap “moderat untuk sementara”, tetapi tergantung pada tingkat kesiapan Ditjen IKM untuk memperluas model fasilitasi berbasis petunjuk kepada pemerintah daerah lain. Proyek ini melakukan *review* keberlanjutan untuk perluasan model fasilitasi ke wilayah lain di tingkat Ditjen IKM dalam beberapa aspek berikut;

Aspek kebijakan/ kelembagaan: dianggap tinggi, karena Ditjen IKM telah mengumumkan komitmennya untuk memperluas model fasilitasi berbasis petunjuk ke wilayah lain, melalui penerbitan surat resmi mengenai perluasan model, yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya.

Aspek organisasi: dianggap moderat, namun tergantung pada tingkat kesiapan terhadap salah satu rekomendasi yang dibuat untuk Ditjen IKM: penyusunan Tim Fasilitasi yang ditugaskan untuk koordinasi dan bimbingan/ monitoring secara keseluruhan selama tahap lanjutan model fasilitasi. Pada saat laporan ini ditulis, Direktur Jenderal IKM telah menginstruksikan persiapan tim di Ditjen IKM sebagai *focal point* untuk perluasan model, dan akan menunjuk staf yang bertanggung jawab untuk i) koordinasi keseluruhan, ii) penjelasan petunjuk kasus sukses SMIDeP, dan iii) bimbingan dan monitoring ke pemerintah daerah/ industri. Pengaturan organisasional diperlukan, agar ada staf Ditjen IKM (beberapa ditunjuk/ditugaskan) yang disiapkan secara khusus untuk mengalokasikan waktu dan anggaran guna melakukan tugas - tugas di atas.

Aspek teknis: dianggap moderat, namun tergantung pada tingkat komitmen terhadap salah satu rekomendasi yang dibuat untuk Ditjen IKM: pelatihan fasilitasi, yang akan dilakukan untuk menambah

jumlah staf Ditjen IKM yang memiliki pengetahuan dan keahlian membimbing terkait model fasilitasi dan petunjuk.

Aspek keuangan: dianggap moderat, karena Ditjen IKM telah meminta Sekretariat untuk mempersiapkan anggaran (tahun anggaran 2017) untuk tahap perluasan model fasilitasi, termasuk biaya perjalanan/ rapat dengan tujuan bimbingan/ monitoring kepada beberapa pemerintah daerah yang terfokus, dan mempertimbangkan kemungkinan sejumlah anggaran tertentu untuk membiayai usulan kegiatan dukungan dari pemerintah daerah sasaran selama proses fasilitasi.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan Proyek, Ditjen IKM juga diharapkan untuk: i) meneruskan perluasan model fasilitasi kepada pemerintah daerah lain yang telah berkomitmen, dengan memperkuat kemampuannya dalam melakukan bimbingan/ monitoring, dan ii) mendiseminasi model beserta petunjuk ke pemerintah daerah lainnya melalui berbagai kesempatan yang relevan, dengan mengindikasikan insentif (dukungan alokasi anggaran secara terfokus dan intensif) guna meningkatkan animo pemerintah daerah untuk mengikuti model berbasis petunjuk. Dalam hal ini, Tim Tenaga Ahli telah menyusun rekomendasi aksi bagi Ditjen IKM, yang akan dijelaskan kemudian.

Di tingkat wilayah sasaran (POKJA, khususnya Dinas Perindag)

POKJA di wilayah sasaran Proyek (kecuali untuk industri fesyen ulos di Samosir) telah menyatakan bahwa fasilitasi industri sasaran mereka akan dilanjutkan dengan mempertahankan (atau merevisi) struktur fasilitasi yang sudah terbentuk (yaitu, POKJA dengan fasilitator) dan mengikuti praktik-praktik yang telah dilaksanakan di SMIDeP untuk meningkatkan kasus sukses IKM (wilayah Fase I) atau mewujudkan kasus sukses (wilayah Fase II).

Selain itu, seluruh industri sasaran akan tetap menjadi unggulan di masing-masing daerah (mengingat Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah akan disiapkan untuk beberapa tahun mendatang), sehingga beragam dukungan/ layanan yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat terus diakses. Meskipun begitu, pemerintah daerah (melalui Pokja/ fasilitator) di industri sasaran diharapkan untuk terus memperkuat peran monitoring/ review fasilitasi industri lokal. Dengan perhatian lebih dalam aspek ini, tingginya keberlanjutan di tingkat wilayah sasaran dapat dipastikan.

III.2 Faktor Kunci yang Mempengaruhi Implementasi dan Hasil (*Outcome*)

III.2-1 Faktor Pendukung

Tidak ada faktor khusus yang secara positif mempengaruhi pelaksanaan/ hasil Proyek, kecuali satu pencapaian yaitu keputusan mengenai perluasan model dukungan untuk industri komponen kapal yang terwujud dengan MoU akselerasi sertifikasi komponen skala nasional. MoU ini juga direalisasikan sebagai respon terhadap visi pemerintah terbaru, yaitu "Bangsa Maritim" yang mempercepat pembangunan kelas galangan kapal domestik dengan konten komponen lokal yang lebih tinggi.

III.2-2 Faktor Penghambat

Tidak ada yang terobservasi secara khusus selama berlangsungnya Proyek, seperti yang telah dijelaskan pada bagian selanjutnya.

III.3 Evaluasi Hasil Manajemen Resiko Proyek

Keterangan berikut dicatat dalam PDM, sebagai asumsi risiko penting yang dapat mempengaruhi kemajuan dan pencapaian output / tujuan proyek. Tabel di bawah ini menyatakan perubahan dalam situasi masing-masing asumsi risiko.

Table III.3.1 Asumsi penting dalam PDM

No.	Asumsi penting dalam PDM	Perubahan asumsi selama berlangsungnya Proyek
Di tingkat Output		
1.	Kondisi ekonomi industri sasaran tidak memburuk.	Tidak ada penurunan luar biasa yang teramati selama berlangsungnya Proyek.
2.	IKM kontinu melanjutkan kegiatan ekonominya di wilayah sasaran.	IKM / produsen yang aktif terlibat dalam kegiatan proyek telah melanjutkan kegiatan ekonomi mereka selama periode tersebut.
3.	Rencana Strategis Ditjen IKM di Kemenperin berkelanjutan.	RENSTRA (2010-2014) digantikan dengan yang baru (2015-2019) mengikuti Undang-Undang Perindustrian dan RIPIN (sampai 2035). RENSTRA baru secara alami tidak mempengaruhi kegiatan proyek selama periode tersebut. Silakan juga merujuk ke seksi III.1-1 Relevansi Proyek.
Di tingkat Proyek		
4.	Kebijakan pemerintah untuk promosi IKM tidak berubah.	Silakan merujuk ke no. 3 dan seksi III.1-1 Relevansi Proyek.

Seperti yang terlihat di atas, asumsi-asumsi risiko tidak memberikan perubahan yang mempengaruhi kemajuan dan pencapaian output/ tujuan proyek, meskipun risiko tersebut berada di luar lingkup kontrol manajemen tenaga ahli. Risiko tertentu lainnya yang mungkin mempengaruhi Proyek tidak teramati atau belum dilaporkan selama berlangsungnya Proyek.

III.4 Pelajaran

Proyek telah mengkaji pelajaran-pelajaran kunci berikut untuk meningkatkan praktik fasilitasi pengembangan IKM/ industri lokal berdasarkan pengalaman di lapangan di wilayah sasaran. Perlu dicatat, bahwa pelajaran-pelajaran ini sepatutnya terefleksikan dalam penyusunan petunjuk teknis untuk fasilitasi industri lokal.

Pelajaran Kunci	Penjelasan
Berbagi Satu Rencana Aksi untuk Satu Industri Lokal antar para pemangku kepentingan	Pengembangan industri lokal harus difasilitasi berdasarkan satu rencana aksi dan mengarah pada satu tujuan bersama antar para pemangku kepentingan terkait. Hal ini merupakan titik kritis yang harus diingat pada saat masing-masing pemerintah daerah memfasilitasi industri - industri prioritasnya.
Menetapkan tujuan yang jelas, spesifik dan terukur dalam Rencana Aksi	Hal ini merupakan poin terpenting dalam perumusan rencana aksi pengembangan industri lokal. Kecuali, tujuan yang terukur ditentukan dengan jelas, rencana aksi tidak akan bermakna, atau berakhir sebagai kegiatan dari rencana tanpa tujuan, yang sering terobservasi dalam proses perencanaan oleh pemerintah daerah, dan kemudian tidak dapat ditinjau pencapaiannya. Pemerintah daerah harus menetapkan tujuan umum rencana aksi melalui konsultasi dengan industri sasaran mengenai kebutuhan-kebutuhan atau ide-ide arah pengembangan di masa depan, misalnya, menanyakan "Produk Apa yang harus dikembangkan atau ditingkatkan bagi" Pasar/ Segmen Konsumen yang Mana". Tujuan harus didefinisikan secara spesifik, terukur secara obyektif, menantang namun realistis.
Kunjungan belajar untuk perencanaan rencana aksi yang lebih baik	Disarankan untuk mengadakan kunjungan belajar selama proses perencanaan rencana aksi. IKM cenderung memiliki sedikit gagasan tentang arah pengembangan, sehingga menghadapi kesulitan dalam menyuarakan tujuan spesifik dari rencana aksi. Dalam hal ini, kunjungan belajar ke industri sejenis yang lebih mumpuni (studi banding) atau pasar potensial (studi pasar), yang dapat mengekspos IKM pada ide-ide inovatif, teknologi terbaru dan kebutuhan pasar / persyaratan, direkomendasikan. Dengan demikian, IKM bisa memperoleh perbandingan atau pengetahuan / informasi yang berharga, sebagai masukan

	yang berharga untuk menetapkan tujuan dan perencanaan dukungan.
Identifikasi IKM - IKM sasaran yang ingin terlibat dalam rencana aksi	Tidak semua IKM di industri sasaran perlu terlibat dalam rencana aksi. Rencana aksi sebaiknya fokus pada IKM, atau kelompok (kelompok-kelompok) IKM, yang menunjukkan kesediaan untuk mewujudkan rencana aksi dan menggunakan sumber daya mereka sendiri / waktu untuk aksi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, setidaknya satu atau beberapa IKM unggulan (berpotensi) perlu diidentifikasi di industri sasaran, yang dapat memimpin dan mengkoordinasikan IKM lain.
Keterlibatan awal para pemangku kepentingan yang paling berpengaruh	Disarankan bagi pemerintah daerah (Dinas Perindustrian & Perdagangan) untuk melibatkan para pemangku kepentingan yang paling berpengaruh (tidak hanya Dinas) dari tahap awal fasilitasi, yaitu, perencanaan rencana aksi. Pemangku kepentingan yang berpengaruh tersebut termasuk mereka yang menyediakan wawasan pasar, dan lembaga teknis yang memberikan panduan tentang isu-isu standar/ sertifikasi yang diperlukan untuk pengembangan pasar. Poin kunci adalah bahwa rencana aksi harus dirumuskan dengan berorientasi pada pasar (misalnya, dengan melibatkan pelaku pasar seperti pembeli/ agen dalam proses perencanaan, menentukan pasar/ segmen konsumen khusus, atau saluran penjualan yang dikembangkan), dan terdiri dari kegiatan-kegiatan dukungan yang diperlukan untuk mengisi kesenjangan teknis yang dihadapi oleh industri sasaran.
Optimisasi peran fasilitator dalam fasilitasi industri lokal	Fasilitator harus menjalankan perannya untuk menjembatani dukungan yang diperlukan IKM kepada kelompok kerja, dan memfasilitasi kelompok kerja untuk membahas, merumuskan, melaksanakan dan monitoring/ mereview rencana aksi. Untuk mengoptimalkan peran fasilitator tersebut, pemerintah daerah (Dinas Perindustrian & Perdagangan) dapat menetapkan banyak fasilitator dengan kombinasi senior yang berpengalaman (untuk fasilitasi kepada kelompok/ lembaga pendukung kerja terkait) dengan junior yang masih kurang berpengalaman (untuk komunikasi dengan IKM dan monitoring di lapangan), sehingga mereka dapat saling melengkapi. Penempatan fasilitator secara jamak dapat juga mempertimbangkan kombinasi staf Dinas dengan sumber daya privat eksternal. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengatur kondisi yang memungkinkan fasilitator untuk mengaktifkan dan mempertahankan observasi lapangan dan komunikasi dengan IKM sasaran, misalnya, melalui penugasan pemantauan kinerja IKM sasaran, yang membuat fasilitator berkunjung ke IKM secara rutin.
Mengakomodasi praktik 'Trial-&Error' dalam rencana aksi	Peluang pemasaran dukungan/ promosi harus dijadwalkan secara selang-seling selama rencana aksi, sehingga IKM dengan tantangan pengembangan produk dapat menerima umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut (atau diversifikasi) secara <i>trial-&error</i> . Praktik tersebut dapat memberikan umpan balik yang berharga dan dapat terus memotivasi IKM dalam percobaan pengembangan produk, dan bahkan membawa hasil nyata dalam waktu singkat.
Ketersediaan dana fleksibel yang dialokasikan untuk rencana aksi	Sebagian besar kegiatan dukungan yang diusulkan dalam rencana aksi mengandalkan anggaran pemerintah untuk pelaksanaannya, yang harus diajukan sebelumnya dan pada periode waktu tertentu untuk pencairan. Proses penganggaran/ pencairan seperti ini terkadang menyebabkan kesulitan untuk menjawab kebutuhan/ masalah yang dimiliki IKM secara tepat waktu, terutama kebutuhan/masalah muncul sejalan dengan kemajuan rencana aksi, atau perubahan lingkungan bisnis. Pemerintah masih bisa merevisi penggunaan anggaran, tetapi menghadapi kesulitan dalam merevisi secara fleksibel dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengenalan dana dukungan (yaitu, dalam bentuk dana paket), yang dapat dialokasikan untuk tujuan melaksanakan rencana aksi secara keseluruhan, dapat disarankan.
Pentingnya aksi mandiri oleh industri sasaran yang berkomitmen kuat	Rencana aksi tidak boleh hanya dapat terdiri dari kegiatan dukungan saja, tetapi juga harus memiliki aksi yang harus dilakukan oleh industri sasaran, karena IKM sendiri adalah aktor utama dalam pengembangan usaha. Dengan demikian, pihak IKM juga harus berkomitmen untuk menyatakan (dalam rencana aksi) dan mengambil aksi mereka sendiri yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan biaya sendiri, seperti upaya pengembangan produk atau promosi, formulasi atau penguatan sistem kolaborasi mereka. Tindakan tersebut sendiri dapat dimulai dengan sejumlah kecil IKM, bahkan jika pada mulanya banyak yang bersikap 'wait-&-see'.
Pentingnya monitoring dan review secara berkala	Tugas monitoring/ review perlu diberikan lebih ditekankan, dan dilakukan dengan cara yang berorientasi pada tujuan dan berkala, karena upaya monitoring bertujuan untuk mengungkapkan faktor yang mendorong atau menghambat kemajuan, berbagi

	kemajuan/ pencapaian di antara para pemangku kepentingan, dan mereview isi rencana aksi, dapat mempengaruhi kinerja rencana aksi. Selain pertemuan formal, kesempatan komunikasi informal dengan IKM dapat diakui sebagai saluran pemantauan, terutama untuk mengamati perubahan kondisi industri sasaran dan situasi bisnisnya.
--	--

IV. Untuk Pencapaian Tujuan Umum setelah Proyek Selesai

IV.1 Prospek untuk Mencapai Tujuan Umum

Tim Tenaga Ahli dan C/Ps dari Ditjen IKM berbagi prospek - prospek berikut terkait pencapaian tujuan umum saat Proyek selesai.

IV.1-1 Tujuan Umum-1: Peningkatan omset dan saluran pemasaran IKM di wilayah sasaran

Prospek untuk mencapai tujuan umum dianggap memungkinkan. POKJA di wilayah sasaran telah menyatakan bahwa fasilitasi industri sasaran mereka akan terus berlanjut dengan mempertahankan (atau merevisi) struktur fasilitasi yang telah terbentuk (yaitu, POKJA dengan fasilitator) dan mengikuti praktik-praktik yang telah dipelajari dari SMIDeP untuk lebih meningkatkan kasus sukses IKM (wilayah Fase I) atau merealisasikan kasus sukses (wilayah Fase II).

Selain itu, seluruh industri sasaran akan tetap menjadi unggulan di masing-masing daerah, sehingga besar kemungkinan untuk dapat terus mengakses berbagai dukungan/ layanan yang akan disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, kontinuitas pertumbuhan dalam kinerja operasional (peningkatan omset, perluasan pasar) IKM/ produsen di daerah sasaran dipandang cukup besar, kecuali perekonomian daerah menghadapi kesulitan atau melambat.

Namun perlu dicatat, bahwa cukup sulit untuk mengumpulkan data kuantitatif kinerja operasional IKM di daerah industri sasaran, mengingat pemerintah daerah tidak terlalu sering mensurvei data seperti omset dan pasar (pembeli, saluran penjualan) untuk industrinya secara keseluruhan. Bahkan jika ditanyakan kepada IKM yang difasilitasi secara individual, banyak IKM di daerah sasaran yang tidak mencatat omset atau pembeli/ saluran penjualan secara memadai, karena pembukuan/ manajemen pelanggan jarang dipraktikkan. Oleh karena itu, hal yang paling memungkinkan diperoleh adalah kecenderungan kinerja operasional secara kualitatif dari IKM yang difasilitasi.

IV.1-2 Tujuan Umum-2: Meningkatkan jumlah daerah yang memanfaatkan model fasilitasi dan meningkatkan dukungan IKM

Seperti dinyatakan sebelumnya, Ditjen IKM sedang memfinalisasi daftar pemerintah daerah yang berkomitmen terhadap tahap perluasan, dengan menerbitkan surat kepada 14 pemda yang berminat dalam rangka mengonfirmasi komitmen mereka untuk mengadopsi model fasilitasi berbasis petunjuk (yaitu, memilih model yang dibuat untuk meningkatkan layanan pengembangan IKM), dan sejauh ini telah menerima surat konfirmasi komitmen dari lima (5) Disperindag provinsi (beberapa pemerintah daerah yang mungkin dipilih sebagai sasaran pada tahap awal dari mereka yang telah berkomitmen melalui surat balasan). Oleh karena itu, **prospek untuk mencapai tujuan umum juga dianggap “memungkinkan”**. Kemungkinan untuk mencapai tujuan umum ini dapat juga dipastikan dari arah kebijakan IKM berikut;

Undang-Undang Perindustrian yang baru dianggap sebagai 'pendorong' untuk diseminasi (oleh Ditjen IKM) dan referensi/ pemanfaatan (oleh pemerintah daerah) petunjuk teknis fasilitasi industri lokal. Hal ini terutama karena Undang-Undang ini memandang peningkatan pengalihan tanggung jawab/ akuntabilitas pengembangan IKM/ industri lokal ke pemerintah daerah, serta menegaskan kembali peran pemerintah pusat sebagai pendukung kuat daerah (melalui pendekatan *bottom-up*).

Hal ini dapat menimbulkan perhatian (dari Ditjen IKM) dan ketidaksiapan (dari pemerintah daerah) akibat peningkatan tanggung jawab/ akuntabilitas ke daerah, sehingga pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan dan memperkuat kapabilitasnya dalam memastikan fasilitasi industri lokal yang berorientasi pada hasil, dan pengetahuan/ aksesibilitas pemanfaatan berbagai dukungan/ layanan yang tersedia baik di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini, petunjuk teknis, sebagai referensi untuk meningkatkan praktik fasilitasi industri lokal, menjadi bernilai bagi pemerintah daerah.

IV.2 Rekomendasi bagi Pihak Indonesia untuk Mencapai Tujuan Umum

Ditjen IKM direkomendasikan untuk sebaiknya: i) melanjutkan perluasan model fasilitasi berbasis petunjuk (bagi pemerintah daerah lain) sesuai skenario perluasan model dengan memperkuat kemampuannya dalam melakukan bimbingan/ monitoring, dan ii) mendiseminasi model di antara pemerintah daerah lain melalui acara-acara terkait. Dalam hal ini, akan lebih memotivasi jika insentif bagi pemerintah daerah yang mengikuti model fasilitasi sesuai dengan petunjuk diindikasikan secara jelas oleh Ditjen IKM.

Aksi yang direkomendasikan dengan rinci ke Ditjen IKM untuk memastikan perluasan dan diseminasi model fasilitasi berbasis petunjuk sesuai perkembangan disusun dalam Berita Acara Diskusi (*Minutes of Meeting*) yang dilakukan di JCC final yang digelar pada bulan Maret 2016 (lihat Lampiran-13).

IV.3 Rencana Monitoring sejak Akhir Proyek hingga Evaluasi *Ex-Post*

Kegiatan monitoring setelah Proyek selesai dan evaluasi *ex-post* akan dijadwalkan dan dilaksanakan oleh Kantor JICA Indonesia melalui konsultasi dengan Kantor JICA Pusat.

Lampiran-1:
Record of Discussions

RECORD OF DISCUSSIONS

BETWEEN

**DIRECTORATE GENERAL OF SMALL AND MEDIUM INDUSTRY
MINISTRY OF INDUSTRY
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

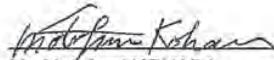
AND

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

ON

**THE PROJECT ON SMALL AND MEDIUM INDUSTRY (SMI)
DEVELOPMENT BASED ON IMPROVED SERVICE DELIVERY
IN INDONESIA**

Jakarta, 7 December 2012


Mr. Mofumi KOHARA
Chief Representative
Indonesia Office
Japan International Cooperation Agency


Ms. Euis Saedah
Director General of Small and
Medium Industry
Ministry of Industry
Republic of Indonesia

Based on the minutes of meeting on the 2nd Detailed Planning Survey on the Project on Small and Medium Industry (SMI) Development Based on Improved Service Delivery in Indonesia (hereinafter referred to as "the Project") signed on 15th June between Ministry of Industry (hereinafter referred to as "MOI") and the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA"), JICA held a series of discussions with MOI and relevant organizations to develop a detailed plan of the Project.

Both parties agreed the details of the Project and main points discussed as described in the Appendix 1 and the Appendix 2.

Both parties also agreed that MOI, the counterpart to JICA, will be responsible for the implementation of the Project in cooperation with JICA, coordinate with other relevant organizations and ensure that the self-reliant operation of the Project is sustained during and after the implementation period in order to contribute toward social and economic development of Indonesia.

The Project will be implemented within the framework of the Colombo Plan Technical Cooperation Scheme.

Appendix 1: Project Description
Appendix 2: Main Points Discussed



PROJECT DESCRIPTION

I. BACKGROUND

Indonesia has been strongly promoting industrial development with special attention to Small and Medium Enterprise (hereinafter referred to as "SME") development, which has been further encouraged by "Regulation of the President No.28, 2008 on the National Industrial Policy".

Based on the strategy designated by the Regulation, the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "GOI") has endeavored to accelerate industrial development through upgrading and strengthening the value-chains of industries and increasing the added values in the value-chain through establishing core-competence of local industries. In concrete, taking so-called "Top-Down Approach", 35 priority industries have been selected and promoted with the initiative of MOI whereas the Provincial and District/City Governments are required to take the responsibility of the local industry development through so-called "Bottom-Up Approach" with the budget support from MOI.

JICA's support to the area of SME development has been organized and streamlined after "Policy Recommendation for SME Promotion in Republic of Indonesia" was disseminated in 2000 proposing the comprehensive approach to SME development. Subsequently, JICA has provided supports to various areas of SME development in partnership with MOI. SME Management Consultant (SHINDAN-SHI) system was established in 2006 through the Project on Human Resource Development for SMEs. In the recent years, JICA undertook "Cooperation for Strengthening Clusters (SENTRA) of Small and Medium Industries" (the Master Plan Study) from 2009 to 2010 which produced the Master Plan comprising the proposed action programs for industrial cluster development and the guideline for cluster development. In the meantime, JICA has been implementing the projects to reinforce various governmental institutions for SME development and industrial cluster development including "Technical Cooperation Project for Facilitation of Local Industry Development in South Sulawesi Province" and "The Capacity Development for Supporting Industry Development: Credit Guarantee System".

However, it was widely observed that the efforts of industrial development both Top-Down by MOI and Bottom-Up by the local governments are yet to be streamlined where the policy measures may not be utilized fully to incur the maximum impact.

In the situation, MOI requested JICA for the assistance to reinforce the capacity of MOI and other relevant institutions to increase the effectiveness of the on-going efforts for industrial cluster development. In response to the request of the GOI, the Project will be formulated by GOI and JICA jointly.

II. OUTLINE OF THE PROJECT

Details of the Project are described in the Logical Framework (Project Design Matrix: PDM) (Annex 1) and the tentative Plan of Operations (Annex 2).

1. Title of the Project

The Project on Small and Medium Industry (SMI) Development based on Improved Service Delivery in Indonesia

2. Overall Goal

SMIs in the target regions will increase the production and competitiveness and the established model for SMI development based on the efficient service delivery platform ("the model") will be also practiced in other regions.

3. Project Purpose

Preparation for expansion of the model for SMI development based on the efficient service delivery platform is arranged in MOI.

4. Outputs

- i) Platform for efficient service delivery is prepared as a base of SMI development in each target region.
- ii) Competitiveness of target SMIs in each target region are strengthened with efficient service delivery.
- iii) The model for SMI development is established based upon experience and lessons obtained through activities performed under Outputs 1 and 2 to be applicable to other regions.

5. Activities

- i-1) Set up the project implementation unit organized by DG of SMI in MOI for overall management of the Project.
- i-2) In each target region, formulate Local Working Group to coordinate the activities for SMI development for overall management of the Project.
- i-3) Review and map the currently available institutions and services for SMIs development by various entities and service providers in each target region.
- i-4) Establish the system to ensure efficient service delivery for SMIs.
- i-5) Assign and train staff in charge at the local government who facilitate services by local and central governmental institutions and private service providers for SMIs. (Special attention shall be paid for the SHINDAN-SHIs.)
- i-6) Develop a Service Directory (paper based and web based) to introduce SMI support services by government and private institutions.
- i-7) Facilitate and support activities of Local Working Group in each target region.
- i-8) Monitor situation of service delivery in each target region.
- ii-1) Conduct regular meetings of Local Working Group in each target region.
- ii-2) Analyze issue and needs of value chain and industrial linkage in target SMIs in each region (considering the target SMI's type such as local resource-based industry and supporting industry).
- ii-3) Identify the goals, tasks, and activities for the development of the target

- SIMs based on the result of the analysis done above.
- ii-4) Implement the identified activities by using improved service delivery mechanism.
 - ii-5) Analyze and evaluate the result of activities for development of target SIMs by Local Working Groups in each region.
- iii-1) Analyze and evaluate the experience which is acquired through Activities under Output 1 and 2 in each region.
 - iii-2) Identify contents and factors to constitute the model, which is adaptable to other regions.
 - iii-3) Develop the guideline as reference materials for other regions to replicate and implement the model.
 - iii-4) Organize workshop to socialize the model for other stakeholders.
 - iii-5) Facilitate the necessary budgetary arrangement as well as formulate program to respond to the possible requests from other provincial governments out of target areas.

6. Input

(1) Input by JICA side

- (a) Dispatch of Experts
 - Chief Advisor
 - Experts on Local Industry development
 - Expert on Supporting Industry development
 - Expert on SMI Service Delivery
 - Project Coordinator
- * Other short-term experts are dispatched based on necessity.
- (b) Counterpart Training in Japan
- (c) Telecommunications for international and local calls expenses necessary for the implementation of the Project
- (d) Local consultants for the activity in 5.i.3 and 5 ii.2 and secretaries of JICA experts

Input other than indicated above will be determined through mutual consultations between JICA and the GOI during the implementation of the Project, as necessary.

(2) Input by the Indonesian side

- GOI will take necessary measures to provide at its own expense:
- (a) Services of Indonesian side's counterpart personnel and administrative personnel as referred to in II-7;
 - (b) Suitable office space with necessary equipment;
 - (c) Supply or replacement of equipment, tools, spare parts and any other materials necessary for the implementation of the Project other than the equipment provided by JICA;
 - (d) Information as well as support in obtaining medical service;
 - (e) Credentials or identification cards;
 - (f) Available data (including maps and photographs) and information related to the Project; and
 - (g) Running expenses (electricity) necessary for the implementation of the

Project.

7. Implementation Structure

The Project organization chart is given in the Annex 3. The roles and assignments of relevant organizations are as follows:

(1) The Indonesian side

- (a) Project Director
 - Director General of Small and Medium Industry, MOI
- (b) Deputy Project Director
 - Secretary of Directorate General of Small and Medium Industry (hereinafter referred to as "DG of SMI"), MOI
- (c) Project Managers
 - Director of Small and Medium Industry Region I, DG of SMI, MOI
 - Director of Small and Medium Industry Region II, DG of SMI, MOI
 - Director of Small and Medium Industry Region III, DG of SMI, MOI
- (d) Assignment of personal of MOI
- (e) Assignment of personal from related organizations for Working Groups

(2) JICA side

The JICA experts will give necessary technical guidance, advice and recommendations to Indonesian side on any matters pertaining to the implementation of the Project.

(3) Joint Coordinating Committee

Joint Coordinating Committee (hereinafter referred to as "JCC") will be established in order to facilitate inter-organizational coordination. JCC will be held at least once a year and whenever deems it necessary. JCC will approve an annual work plan, review overall progress, conduct monitoring and evaluation of the Project, and exchange opinions on major issues that arise during the implementation of the Project. A list of proposed members of JCC is shown in the Annex 4.

8. Project Site(s) and Beneficiaries

Central Java, Central Sulawesi, One province from Sumatra/Kalimantan
SIMs in target regions

9. Duration

36 months from 2013

10. Reports

- MOI and JICA experts will jointly prepare the following reports in English.
- (1) Progress Report on semiannual basis until the project completion
 - (2) Project Completion Report at the time of project completion

11. Environmental and Social Considerations

MOI agreed to abide by 'JICA Guidelines for Environmental and Social Considerations' in order to ensure that appropriate considerations will be made for the environmental and social impacts of the Project.

III. UNDERTAKINGS OF MOI AND GOI

1. GOI will take necessary measures to:

- (1) ensure that the technologies and knowledge acquired by the Indonesia nationals as a result of Japanese technical cooperation contributes to the economic and social development of Indonesia, and that the knowledge and experience acquired by the personnel of Indonesia from technical training as well as the equipment provided by JICA will be utilized effectively in the implementation of the Project; and
- (2) grant tax exemptions to the JICA experts referred to in II-6 (1) above, which are no less favorable than those granted to experts of third countries performing similar missions in Indonesia under the Colombo Plan Technical Cooperation Scheme.

IV. EVALUATION

JICA and the MOI will jointly conduct the following evaluations and reviews.

1. Mid-term review at the middle of the cooperation term
2. Terminal evaluation during the last six (6) months of the cooperation term

JICA will conduct the following evaluations and surveys to mainly verify sustainability and impact of the Project and draw lessons. The MOI is required to provide necessary support for them.

1. Ex-post evaluation three (3) years after the project completion, in principle
2. Follow-up surveys on necessity basis

V. PROMOTION OF PUBLIC SUPPORT

For the purpose of promoting support for the Project, MOI will take appropriate measures to make the Project widely known to the people of Indonesia.

VI. MUTUAL CONSULTATION

JICA and MOI will consult each other whenever any major issues arise in the course of Project implementation.

VII. AMENDMENTS

The record of discussions may be amended by the minutes of meetings between JICA and MOI.

The minutes of meetings will be signed by authorized persons of each side who may be different from the signers of the record of discussions.

- Annex 1 Logical Framework (Project Design Matrix: PDM)
- Annex 2 Tentative Plan of Operations
- Annex 3 Project Organization Chart
- Annex 4 A List of Proposed Members of Joint Coordinating Committee/Steering Committee
- Annex 5 A List of Proposed Members of Local Working Group



Appendix 2

Main Points Discussed

1. Both sides confirmed that the Project is categorized as "Goods / Services" stipulated in Article 42 (1) c of Government Regulation No. 10/2011.
2. In accordance with Regulation of Minister of Finance No. 191/ PMK.05/2011, MOI shall submit BAST (handover delivery certificate of goods/services) to the Ministry of Finance of Indonesia. In order to secure the accuracy of BAST, JICA Indonesia Office will provide MOI with data on semester basis as follows.
 - Goods: name and price (in effective currency) per item of equipment handed over during last six months
 - Services: total expenditure (in effective currency) of last six months for expert, training and mission
3. MOI will make and sign BAST based on the data provided by JICA and after obtaining JICA's confirmation, submit to the Ministry of Finance.
4. Both sides agreed that the target province / districts / cities as well as target industries in region I will be identified in approximately few months from the commencement of the project by DG of SMI and JICA.

Tentative Project Design Matrix (PDM) :

Name of the Project: Project on Small and Medium Industry (SMI) Development based on Improved Service Delivery

Duration : from 2013 for three (3) years

Date: 1 November 2012

Target Area: Central Java, Central Sulawesi, One province from Sumatra/Kalimantan

Target Group : SMIs in target regions

PDM ver.0.1

NARRATIVE SUMMARY	OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS	MEANS OF VERIFICATIONS	IMPORTANT ASSUMPTIONS
<p>OVERALL GOAL</p> <p>SMIs in the target regions will increase the production and competitiveness and the established model for SMI development based on the efficient service delivery platform ("the model") will be also practiced in other regions.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Turnover and market channel of SMIs in target regions are increased. 2 Number of regions which opt the established model and improve SMI development service are increased. 	<p>Statistical data of Province, District/City and KADIN(DA)</p> <p>Data of MOI</p>	<p>Local governments which adapt the model continue to support SMIs in those regions.</p>
<p>PROJECT PURPOSE</p> <p>Preparation for expansion of the model for SMI development based on the efficient service delivery platform is arranged in MOI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Official adoption of developed guideline for SMI development by MOI. 2 Budgetary and organizational arrangement of MOI to expand the established model to other regions. 3 xx private firms utilized the development services and consultation services in supporting organizations are increased xx%. 4 Satisfaction of private firms which take support service. 	<p>Official document and statement of MOI</p> <p>Official document and statement of MOI</p>	<p>Government policy for promotion of SMIs is not changed.</p>
<p>OUTPUTS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Platform for efficient service delivery is prepared as a base of SMI development in each target region. 2 Competitiveness of target SMIs in each target region are strengthened with efficient service delivery. 3 The model for SMI development is established based upon experience and lessons obtained through activities performed under Outputs 1 and 2 to be applicable to other regions. 	<ol style="list-style-type: none"> 1-1 Formulation of Local Working Group to coordinate service providers and SMIs among stakeholders on SMI development services in each target region. 1-2 Development of the directory (paper based and web based) of services for SMIs. 2-1 Most of SMIs recognize improvement of service delivery. 2-2 Most of SMIs which used delivered services are satisfied. 2-3 Positive changes are observed among SMIs such as sales of products, diversification of market, linkages among/within SMIs and etc. 3-1 The guideline as reference materials for the newly established model to develop SMIs in the country is materialized. 3-2 Socialization workshop is organized by MOI. 	<p>Project documents</p> <p>Project documents, Printed directory, Web site</p> <p>Result of questionnaire survey done by the Project</p> <p>Result of questionnaire survey done by the Project</p> <p>Project documents, result of questionnaire survey done by the Project</p> <p>Project documents, Guideline</p> <p>Project documents</p>	<p>Economic conditions of target industries are not deteriorated.</p> <p>SMIs continue their economic activity in target regions.</p> <p>Strategic Plan of DG of SMI in MOI is sustained.</p>

ACTIVITIES	INPUTS	
<p>[Preparation of efficient service delivery platform]</p> <p>1-1 Set up the project implementation unit organized by DG of SMI in MOI for overall management of the Project.</p> <p>1-2 In each target region, formulate Local Working Group to coordinate the activities for SMI development for overall management of the Project.</p> <p>1-3 Review and map the currently available institutions and services for SMIs development by various entities and service providers in each target region.</p> <p>1-4 Establish the system to ensure efficient service delivery for SMIs.</p> <p>1-5 Assign and train staff in charge at the local government who facilitate services by local and central governmental institutions and private service providers for SMIs. (Special attention shall be paid for the SHINDAN-SHIs.)</p> <p>1-6 Develop a Service Directory (paper based and web based) to introduce SMI support services by government and private institutions.</p> <p>1-7 Facilitate and support activities of Local Working Group in each target region.</p> <p>1-8 Monitor situation of service delivery in each target region.</p>	<p>Indonesian side:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appropriate number of counterpart personnel in MOI - Local cost necessary for counterpart in the project activities - Office space for the Project and facilities <p>Japanese side:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Japanese experts for required sectors - Local cost expenditure for the project activities - Training of counterpart personnel in Japan - Provision of equipment necessary for the project activities 	
<p>[Strengthening of SMIs]</p> <p>2-1 Conduct regular meetings of Local Working Group in each target region.</p> <p>2-2 Analyze issue and needs of value chain and industrial linkage in target SMIs in each target region (considering the target SMI's type such as local resource-based industry and supporting industry).</p> <p>2-3 Identify the goals, tasks, and activities for the development of the target SMIs based on the result of the analysis done above.</p> <p>2-4 Implement the identified activities by using improved service delivery mechanism.</p> <p>2-5 Analyze and evaluate the result of activities for development of target SMIs by Local Working Groups in each region.</p>		<p>PRECONDITIONS</p> <p>Provincial and District/City governments in model regions accept the Project.</p>
<p>[Establishing a model for SMI development]</p> <p>3-1 Analyze and evaluate the experience which is acquired through Activities under Output 1 and 2 in each region.</p> <p>3-2 Identify contents and factors to constitute the model, which is adaptable to other regions.</p> <p>3-3 Develop the guideline as reference materials for other regions to replicate and implement the model.</p> <p>3-4 Organize workshop to socialize the model for other stakeholders.</p> <p>3-5 Facilitate the necessary budgetary arrangement as well as formulate program to respond to the possible requests from other provincial governments out of target areas.</p>		

Note) SMI: Small and Medium Industry, MOI: Ministry of Industry, DG: Directorate General

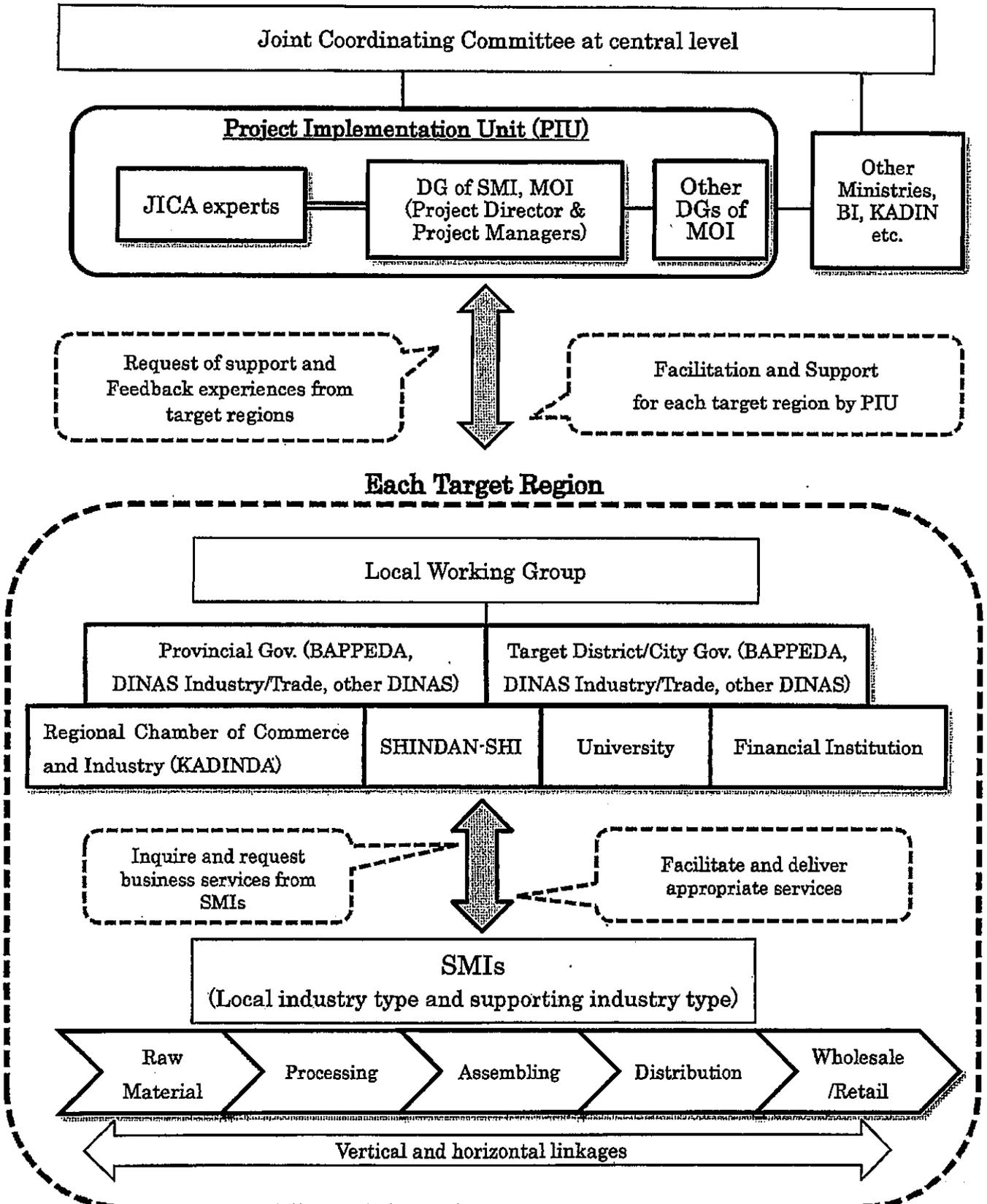
Tentative Plan of Operations (PO)

Project Title: Project on Small and Medium Industry (SMI) Development based on Improved Service Delivery

Date: 1 November 2012
PO Ver.0.1

ACTIVITIES	SCHEDULE											
	Year 1				Year 2				Year 3			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
(Preparation of efficient service delivery platform)												
1-1 Set up the project implementation unit organized by DG of SMI in MCI for overall management of the Project.	_____											
1-2 In each target region, formulate Local Working Group to coordinate the activities for SMI development for overall management of the Project.	_____											
1-3 Review and map the currently available institutions and services for SMIs development by various entities and service providers in each target region.	_____											
1-4 Establish the system to ensure efficient service delivery for SMIs.	_____											
1-5 Assign and train staff in charge at the local government who facilitate services by local and central governmental institutions and private service providers for SMIs. (Special attention shall be paid for the SHINDAN-SHIs.)	_____											
1-6 Develop a Service Directory (paper based and web based) to introduce SMI support services by government and private institutions.	_____											
1-7 Facilitate and support activities of Local Working Group in each target region.	_____											
1-8 Monitor situation of service delivery and performance of SMIs in each target region.	_____											
(Strengthening of SMEs)												
2-1 Conduct regular meetings of Local Working Group in each target region.	_____											
2-2 Analyze issue and needs of value chain and industrial linkage in target SMIs in each target region (considering the target SMI's type such as local resource-based industry and supporting industry).	_____											
2-3 Identify the goals, tasks, and activities for the development of the target SMIs based on the result of the analysis done above.	_____											
2-4 Implement the identified activities by using improved service delivery mechanism.	_____											
2-5 Analyze and evaluate the result of activities for development of target sectors by Local Working Groups in each region.	_____											
(Establishing a model for SMI development)												
3-1 Analyze and evaluate the experience which is acquired through Activities under Output 1 and 2 in each region.	_____											
3-2 Identify contents and factors to constitute the model, which is adaptable to other regions.	_____											
3-3 Develop the guideline as reference materials for other regions to replicate and implement the model.	_____											
3-4 Organize workshop to disseminate the model for other stakeholders.	_____											
3-5 Facilitate the necessary budgetary arrangement as well as formulate program to respond to the possible requests from other provincial governments out of target areas.	_____											

Organizational Chart of the Project



Handwritten mark

Handwritten mark

ANNEX 4

A List of Proposed Members of Joint Coordinating Committee

I. Indonesian Side

1. Ministry of Industry (MOI)

- Director General of Small and Medium Industry (Chair)
- Representative(s) of Directorate General of International Industrial Cooperation
- Representative(s) of Directorate General of Manufacturing Based Industry
- Representative(s) of Directorate General of Agro Based Industry
- Representative(s) of Directorate General of Leading Industry Based on High Technology

2. Other Ministries and Public Institutions

- National Development Planning Agency (BAPPENAS)
- Ministry of Cooperatives and SMEs
- Ministry of Trade
- Ministry of Finance
- Bank Indonesia (BI)

3. Local Working Group

- Representative of each local working group

4. Private Sectors

- Chamber of Commerce and Industry of Indonesia (KADIN)
- Relevant Associations

II. Japanese Side

- JICA Expert Team
- JICA Indonesia Office
- Embassy of Japan (Observer)

ANNEX 5

A List of Proposed Members of Local Working Group (Example)

I. Indonesian Side

1. Provincial Government

- Regional Development Planning Board (BAPPEDA)
- Industry and Trade Office (Dinas)
- Other related offices if necessary

2. District/City Government

- Regional Development Planning Board (BAPPEDA)
- Industry and Trade Office (Dinas)
- Other related offices if necessary

3. Other Public Institutions and Individual

- Bank Indonesia Regional Office
- University
- SHINDAN-SHI

4. Private Sectors and Other Financial Institution

- Regional Chamber of Commerce and Industry (KADINDA)
- Regional Bank
- Cooperatives

II. Japanese Side

- JICA Expert Team
- JICA Indonesia Office

Note) Name of the member organization and membership will vary according to the organizational structure of each Province/District/City.

Lampiran-2:
Matriks Desain Proyek (PDM; awal dan revisi)

Matriks Desain Proyek (PDM)

Nama Proyek: Proyek Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Melalui Peningkatan Penyediaan Layanan
Wilayah Sasaran: Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara

Durasi: Sejak 2013 selama tiga tahun.
Kelompok Sasaran: IKM diwilayah sasaran dan pemerintah yang mendukung IKM tersebut

Tanggal: 1 November 2012
PDM ver. 01

PENJELASAN NARASI	INDIKATOR YANG DAPAT DIUKUR SECARA OBYEKTIF	SARANA VERIFIKASI	ASUMSI PENTING
TUJUAN KESELURUHAN IKM diwilayah sasaran akan meningkat produksi dan daya saingnya serta terbentuknya model pengembangan IKM melalui platform penyediaan layanan yang efisien (Model) untuk kemudian dipraktekkan diwilayah lain.	1 Penjualan dan saluran pasar bagi IKM diwilayah sasaran meningkat. 2 Jumlah wilayah yang memilih menggunakan Model dan meningkatkan layanan pengembangan IKM meningkat.	Data statistic dari Provinsi, Kab./ Kota, dan KADIN(DA). Data dari Kemenperin.	Pemerintah daerah yang mengadaptasi Model secara kontinu mendukung IKM diwilayahnya.
TUJUAN PROYEK Persiapan untuk perluasan model pengembangan IKM melalui penyediaan layanan yang efisien dilaksanakan di Kemenperin.	1 Adopsi resmi oleh Kemenperin atas panduan pengembangan IKM yang telah disusun. 2 Pengaturan anggaran dan organisasi Kemenperin guna memperluas model yang telah dibentuk ke wilayah lain. 3 xx usaha swasta yang memanfaatkan layanan pengembangan dan jasa konsultasi dalam mendukung organisasi meningkat xx%. 4 Kepuasan usaha swasta yang menggunakan layanan dukungan.	Dokumen dan pernyataan resmi dari Kemenperin. Dokumen dan pernyataan resmi dari Kemenperin.	Kebijakan pemerintah guna mempermosikan IKM tidak berubah.
OUTPUT 1 Platform untuk penyediaan layanan yang efisien disusun sebagai dasar pengembangan IKM di setiap wilayah sasaran. 2 Daya saing IKM sasaran di setiap wilayah sasaran diperkuat dengan penyediaan layanan yang efisien. 3 Model pengembangan IKM dibentuk berdasarkan pada pengalaman dan pelajaran yang diperoleh melalui kegiatan Output-1 dan -2 untuk dapat diterapkan ke wilayah lain.	1-1 Pembentukan POKJA guna mengkoordinasikan diantara IKM dan penyedia layanan serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pengembangan IKM di tiap wilayah sasaran. 1-2 Penyusunan direktori (baik cetak maupun berbasis <i>web</i>) layanan bagi IKM. 2-1 Mayoritas IKM mengenali peningkatan penyediaan layanan. 2-2 Mayoritas IKM yang memanfaatkan layanan yang disediakan terpuaskan. 2-3 Perubahan positif tampak diantara IKM, misalkan penjualan produk, diversifikasi pasar, hubungan antar/ dengan IKM, dsb. 3-1 Panduan sebagai materi referensi bagi model pengembangan IKM baru di Indonesia yang dibentuk tersusun. 3-2 Lokakarya sosialisasi diselenggarakan oleh Kemenperin.	Dokumen Proyek. Dokumen Proyek, direktori versi cetak, situs web. Hasil survei kuestioner yang diselesaikan oleh proyek. Hasil survei kuestioner yang diselesaikan oleh proyek. Dokumen proyek, hasil survei kuestioner yang diselesaikan oleh proyek. Dokumen proyek, panduan. Dokumen proyek.	Kondisi ekonomi industri sasaran tidak memburuk. IKM-IKM melanjutkan kegiatan ekonomi mereka di wilayah sasaran. Berkelanjutannya rencana strategis Ditjen IKM di Kemenperin.
KEGIATAN [Pembentukan platform penyediaan layanan yang efisien] 1-1 Membentuk Unit Pelaksana Proyek (PIU) yang diorganisir oleh Ditjen IKM, Kemenperin untuk mengelola Proyek secara keseluruhan. 1-2 Membentuk POKJA di setiap wilayah sasaran untuk mengkoordinasikan kegiatan pengembangan IKM dalam mengelola Proyek secara keseluruhan. 1-3 Meninjau dan memetakan lembaga dan layanan pengembangan IKM yang tersedia saat ini oleh berbagai wadah dan penyedia layanan di setiap wilayah sasaran. 1-4 Menetapkan sistem untuk memastikan penyediaan layanan yang efisien bagi IKM. 1-5 Menugaskan dan melatih staf penanggung jawab di pemerintah daerah yang memfasilitasi layanan oleh lembaga pemerintah daerah dan pusat serta penyedia layanan swasta untuk IKM (perhatian harus diberikan kepada <i>Shindan-shi</i>). 1-6 Membuat Direktori Layanan (dalam bentuk buku/ <i>web</i>) untuk memperkenalkan layanan dukungan bagi IKM oleh lembaga pemerintah dan swasta. 1-7 Memfasilitasi dan mendukung kegiatan POKJA di setiap wilayah sasaran. 1-8 Memantau situasi penyediaan layanan di setiap wilayah sasaran. [Penguatan IKM: pengoperasian platform] 2-1 Melaksanakan rapat POKJA rutin di setiap wilayah sasaran. 2-2 Menganalisis permasalahan dan kebutuhan rantai-nilai serta hubungan industri dari IKM sasaran di setiap wilayah sasaran (mempertimbangkan jenis IKM sasaran seperti industri berbasis sumber daya lokal dan industri pendukung). 2-3 Mengidentifikasi tujuan, tugas, dan kegiatan pengembangan IKM sasaran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas. 2-4 Melaksanakan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme penyediaan layanan yang telah ditingkatkan. 2-5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan IKM sasaran oleh POKJA di setiap wilayah. [Penetapan model pengembangan IKM] 3-1 Menganalisis dan mengevaluasi pengalaman yang diperoleh melalui Kegiatan Output-1 dan -2 di setiap wilayah. 3-2 Mengidentifikasi isi dan faktor yang akan membangun model tersebut, yang dapat diadaptasikan di wilayah lain. 3-3 Membuat pedoman sebagai bahan acuan bagi wilayah lain untuk mereplikasi dan menerapkan model tersebut. 3-4 Menyenggarakan lokakarya untuk mensosialisasikan model tersebut kepada para pemangku kepentingan lainnya. 3-5 Memfasilitasi penyusunan anggaran yang diperlukan serta merumuskan program untuk merespon kemungkinan permintaan dari pemerintah provinsi lain di luar wilayah sasaran.	INPUT Pihak Indonesian: - Jumlah personel <i>counterpart</i> di Kemenperin yang mencukupi. - Biaya pengeluaran lokal yang diperlukan bagi <i>counterpart</i> dalam kegiatan proyek. - Ruang kantor dan fasilitasnya bagi Proyek. Pihak Jepang: - Tenaga ahli dari Jepang bagi sektor yang dibutuhkan. - Biaya pengeluaran lokal bagi kegiatan proyek. - Pelatihan ke Jepang bagi personel <i>counterpart</i> . - Pengadaan peralatan yang diperlukan bagi kegiatan proyek.		PRE-KONDISI Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam wilayah model menerima Proyek.

Catatan) IKM: Industri Kecil dan Menengah, Kemenperin: Kementerian Perindustrian, Ditjen: Direktorat Jenderal

Lembar Monitoring Proyek I (Revisi Matriks Desain Proyek: PDM)

Nama Proyek: Proyek Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Melalui Peningkatan Penyediaan Layanan
Wilayah Sasaran: Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat

Durasi: Sejak 2013 selama tiga tahun.

Kelompok Sasaran: IKM di wilayah sasaran dan pegawai pemerintah yang mendukung IKM tersebut

Tanggal: Akhir April 2016

PDM ver. 01

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIUKUR SECARA OBYEKTIF	SARANA VERIFIKASI	ASUMSI PENTING	PENCAPAIAN	KETERANGAN
TUJUAN UMUM IKM di wilayah sasaran akan meningkat produksi dan daya saingnya serta terciptanya model pengembangan IKM melalui platform penyediaan layanan yang efisien ("model") yang akan dipraktikkan di wilayah lain.	1. Penjualan dan saluran pemasaran IKM di wilayah sasaran meningkat.	Data statistik dari Provinsi, Kab./ Kota, dan KADIN(DA).	Pemerintah daerah yang mengadaptasi model secara kontinu mendukung IKM diwilayahnya.	Akan direview setelah Proyek usai.	
	2. Jumlah wilayah yang memilih menggunakan model dan meningkatkan layanan pengembangan IKM bertambah.	Data dari Kemenperin.		Idem.	
TUJUAN PROYEK (REVISI) Persiapan perluasan model pengembangan IKM melalui penyediaan layanan yang efisien dilaksanakan di Kemenperin.	1. Adopsi resmi oleh Kemenperin atas petunjuk teknis pengembangan IKM yang telah disusun.	Dokumen dan pernyataan resmi dari Kemenperin.	Kebijakan pemerintah guna mempermosikan IKM tidak berubah.	Model SMIDeP dan petunjuk untuk fasilitasi pengembangan industri lokal telah diadopsi oleh Ditjen IKM dan diumumkan melalui surat resmi untuk tahap lanjutan ke pemerintah daerah lainnya (bagi yang tertarik mengikuti model/ petunjuk), dan petunjuk sebagai dokumen referensial (atas dasar sukarela) terutama bagi staf pelaksana pemerintah daerah juga telah diakui oleh Direktur Jenderal IKM dengan tanda tangan beliau untuk distribusi awal melalui rapat koordinasi nasional dengan seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan teingkat provinsi.	Ditjen IKM telah mendaftarkan 14 kandidat Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi, yang berminat untuk berpartisipasi dalam tahap lanjutan model fasilitasi berbasis petunjuk. 5 Dinas telah memberikan tanggapan ke Ditjen IKM melalui surat konfirmasi komitmen.
	2. Pengaturan anggaran dan organisasi Kemenperin guna memperluas model yang telah dibentuk ke wilayah lain.	Dokumen dan pernyataan resmi dari Kemenperin.		Pertama, Ditjen IKM sedang memfinalisasi daftar kandidat berkomitmen dalam tahap lanjutan, dan metode seleksi untuk mengidentifikasi pemerintah daerah/ industri sasaran, dengan memperhatikan kapasitas organisasional dan anggaran. Kedua, Direktur Jenderal IKM telah memberi instruksi untuk mempersiapkan tim di Ditjen IKM sebagai <i>focal point</i> untuk perluasan model. Ketiga, Dirjen IKM telah meminta Sekretariat untuk mempersiapkan anggaran (tahun anggaran 2017) untuk tahap lanjutan model fasilitasi, termasuk biaya perjalanan/ rapat dengan tujuan bimbingan/ monitoring terhadap beberapa pemerintah daerah sasaran, dan mempertimbangkan kemungkinan sebagian dana untuk membiayai usulan kegiatan dukungan oleh pemerintah daerah selama proses fasilitasi.	Selain model fasilitasi berbasis petunjuk teknis, akan dilanjutkan pula dua model dukungan (dalam bentuk paket dukungan), yaitu industri komponen kapal dan industri pengolahan kakao di daerah lain yang telah ditetapkan dalam MoU (dalam bentuk MoU antar para pemangku kepentingan pada kasus komponen kapal dan pernyataan resmi Menteri pada kasus industri pengolahan kakao).
	3. Jumlah kasus sukses (IKM/ produsen yang mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi)	Dokumen proyek		Berikut jumlah IKM/ produsen yang telah mencapai tantangan aksi (tujuan utama): 20 produsen di industri Ulos fesyen, 4 IKM di industri komponen kapal, 16 produsen di industri pengolahan kakao dan tidak ada untuk industri mebel rotan.	Terkait industri sasaran fase II, pencapaian tujuan utama tidak ditinjau karena pelaksanaan Rencana Aksi baru setengah jalan difasilitasi.
OUTPUT (REVISI) 1. Platform untuk penyediaan layanan yang efisien disusun sebagai dasar pengembangan IKM di setiap wilayah sasaran.	1-1 Kelompok Kerja dibentuk di tiap wilayah/industri sasaran, dan fasilitator yang handal ditugaskan untuk menyusun Rencana Aksi dan memfasilitasi implementasinya.	Dokumen proyek	Kondisi ekonomi industri sasaran tidak memburuk.	POKJA dibentuk di masing-masing 6 industri sasaran di 5 wilayah (dari fase I dan II) melalui penerbitan SK oleh kepala pemerintah daerah, dan dipimpin/ dimotori oleh Disperindag di setiap wilayah, serta melibatkan para pemangku kepentingan terkait dan fasilitator yang ditunjuk untuk menyiapkan Rencana Aksi dan memfasilitasi pelaksanaannya.	
	1-2 Direktori penyedia layanan bagi IKM berbasis situs dapat dimutakhirkan secara berkala oleh Ditjen IKM telah tersedia untuk digunakan oleh staf Ditjen IKM dan Dinas.	Dokumen proyek dan database direktori (di situs).		Direktori lembaga dukungan telah disiapkan dan diunggah pada bulan Mei 2015 (di situs lama Ditjen IKM) dan Desember 2015 (di situs baru), yang meliputi data profil lembaga dukungan (72), baik di wilayah sasaran (5 provinsi)/ di tingkat pusat, sehingga direktori tersedia bagi para staf Ditjen IKM/ pemerintah daerah.	Sekretariat Ditjen IKM disarankan untuk membahas secara internal terkait pengaturan kerja untuk pengkinian/ perluasan direktori setelah restrukturisasi Ditjen IKM selesai pada April 2016.
2. Daya saing IKM sasaran di setiap wilayah sasaran diperkuat melalui penyediaan layanan yang efisien.	2-1 Jumlah rapat POKJA yang telah diselenggarakan.	Dokumen proyek	IKM-IKM melanjutkan kegiatan ekonomi mereka di wilayah sasaran.	66 kali rapat POKJA telah diselenggarakan oleh POKJA, baik untuk industri sasaran fase I dan II guna melakukan tugas-tugas yang diberikan (diagnosis industri, perencanaan Rencana Aksi, fasilitasi/ monitoring pelaksanaan Rencana Aksi) atau jika ada topik khusus.	Walaupun mayoritas rapat difasilitasi oleh Tim Tenaga Ahli pada kasus Pokja komponen kapal di Tegal dan Ulos fesyen, namun POKJA lainnya telah menyelenggarakan rapat secara sukarela.
	2-2 Jumlah kegiatan dukungan/ layanan yang telah difasilitasi dalam dukungan/ layanan yang diusulkan dalam Rencana Aksi.	Idem.		183 kegiatan dukungan/ layanan telah difasilitasi oleh POKJA (lihat rincian lengkap untuk masing-masing industri sasaran pada <u>Lampiran-8</u>). Mayoritas usulan dukungan pada Rencana Aksi industri fase I telah terlaksana, sedangkan Rencana Aksi industri fase II baru dimulai pada Maret 2015 dan berfokus pada beberapa kegiatan dukungan kunci. Pihak Indonesia telah membiayai sebagian besar usulan kegiatan dukungan.	Kegiatan dukungan yang diusulkan/ diajukan ke instansi - instansi selain perindustrian/ perdagangan belum dapat difasilitasi sesuai harapan. Beberapa instansi tersebut merupakan anggota POKJA, namun komitmen mereka untuk memberikan dukungan terbilang lemah.
	2-3 Jumlah IKM/ produsen yang telah menerima/ memanfaatkan kegiatan dukungan/ layanan yang difasilitasi.	Idem.		Sekitar 40 IKM (industri komponen kapal), 28 produsen (usaha mikro pengolahan kakao/ mebel rotan), dan 80 produsen (pengrajin individual ulos fesyen) telah menerima/ memanfaatkan kegiatan dukungan/ layanan setidaknya sekali. Namun, IKM sasaran/ produsen yang menjadi fokus dan telah terlibat dalam Rencana Aksi terbatas pada 12 IKM, 21 produsen, 20 produsen di masing-masing industri. Dalam industri fase II, jumlah IKM yang menerima/ memanfaatkan kegiatan dukungan/ layanan (setidaknya	

				sekali) sejauh ini sebanyak 21 (pengolahan lidah buaya) dan 30 (alas kaki). Mereka juga dianggap sebagai IKM sasaran yang menjadi fokus dan telah terlibat dalam Rencana Aksi.	
	2-4 Tingkat kepuasan (oleh sebagian besar sasaran IKM/ produsen) terhadap kegiatan dukungan/ layanan yang telah difasilitasi.	Dokumen proyek dan hasil survei kuesioner		Lihat rincian lengkap untuk setiap industri sasaran di Lampiran-8 .	
	2-5 Hasil (perubahan positif) terhadap aksi yang dilakukan oleh IKM/ produsen sasaran pada aspek yang relevan antara berikut ini; - Persiapan prototipe atau produksi produk baru/ ditingkatkan, dan diversifikasi produk - Peningkatan dalam komentar dari pengguna/ konsumen, - Penguatan hubungan keterpautan di antara IKM/ pemangku kepentingan terkait,	Idem - Perluasan dan diversifikasi pasar dan saluran penjualan, serta pengembangan pasar/ pembeli baru, - Kinerja manajemen (penjualan, jumlah karyawan), dan - Pencapaian lain yang relevan (pada aspek kelembagaan, kewirausahaan, akses keuangan, dan lainnya).		Lihat rincian lengkap untuk setiap industri sasaran di Lampiran-8 .	
3. Model pengembangan IKM dibuat berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh melalui kegiatan Output-1 dan -2 agar dapat diterapkan di wilayah lain.	3-1 Petunjuk teknis sebagai materi referensi dari model pengembangan IKM di Indonesia yang baru disusun tersedia.	Dokumen proyek dan petunjuk teknis	Berkelanjutannya rencana strategis Ditjen IKM di Kemenperin.	Petunjuk teknis dibuat setelah model kerja, melalui serangkaian diskusi dengan tim petunjuk teknis di Ditjen IKM. Petunjuk teknis (dengan versi singkat) dipersiapkan sebagai dokumen referensial bersifat sukarela, terutama bagi staf pelaksana di pemerintah daerah.	
	3-2 Lokakarya sosialisasi diselenggarakan oleh Kemenperin.	Dokumen proyek		Seminar regional diselenggarakan oleh Ditjen IKM di setiap wilayah sasaran fase I, dan Tim Tenaga Ahli dan perwakilan dari masing-masing POKJA berbagi mengenai pendekatan, pengalaman/ pencapaian, dan praktik baik/ pelajaran SMIDeP. Dua (2) kali kesempatan untuk seminar nasional diselenggarakan oleh Ditjen IKM dengan memanfaatkan rapat koordinasi nasional yang mengundang seluruh Disperindag Provinsi. Melalui kesempatan ini, Ditjen IKM bersama dengan Tim Tenaga Ahli dapat menjelaskan model fasilitasi SMIDeP dan keunggulan mengikuti model berdasarkan petunjuk dengan mengutip kasus sukses SMIDeP.	Pada seminar industri komponen kapal dikonfirmasi konsensus untuk melanjutkan fasilitasi serupa di bawah program baru untuk akselerasi sertifikasi komponen. Pada seminar industri pengolahan kakao telah dicapai konsensus antara dua Dirjen untuk mengaplikasikan model dukungan yang telah dilakukan di Sulteng ke daerah lain.
KEGIATAN [Pembentukan platform penyediaan layanan yang efisien] 1-1 Membentuk Unit Pelaksana Proyek (PIU) yang diorganisir oleh Ditjen IKM, Kemenperin untuk mengelola Proyek secara keseluruhan. 1-2 Membentuk POKJA di setiap wilayah sasaran untuk mengkoordinasikan kegiatan pengembangan IKM dalam mengelola Proyek secara keseluruhan. 1-3 Meninjau dan memetakan lembaga dan layanan pengembangan IKM yang tersedia saat ini oleh berbagai wadah dan penyedia layanan di setiap wilayah sasaran. 1-4 Menetapkan sistem untuk memastikan penyediaan layanan yang efisien bagi IKM. 1-5 Menugaskan dan melatih staf penanggung jawab di pemerintah daerah yang memfasilitasi layanan oleh lembaga pemerintah daerah dan pusat serta penyedia layanan swasta untuk IKM (perhatian harus diberikan kepada <i>Shindan-shi</i>). 1-6 Membuat Direktori Layanan (dalam bentuk buku/ <i>web</i>) untuk memperkenalkan layanan dukungan bagi IKM oleh lembaga pemerintah dan swasta. 1-7 Memfasilitasi dan mendukung kegiatan POKJA di setiap wilayah sasaran. 1-8 Memantau situasi penyediaan layanan di setiap wilayah sasaran. [Penguatan IKM] 2-1 Melaksanakan rapat POKJA rutin di setiap wilayah sasaran. 2-2 Menganalisis permasalahan dan kebutuhan rantai-nilai serta hubungan industri dari IKM sasaran di setiap wilayah sasaran (mempertimbangkan jenis IKM sasaran seperti industri berbasis sumber daya lokal dan industri pendukung). 2-3 Mengidentifikasi tujuan, tugas, dan kegiatan pengembangan IKM sasaran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas. 2-4 Melaksanakan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme penyediaan layanan yang telah ditingkatkan. 2-5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan IKM sasaran oleh POKJA di setiap wilayah. [Pembuatan model pengembangan IKM] 3-1 Menganalisis dan mengevaluasi pengalaman yang diperoleh melalui Kegiatan Output-1 dan -2 di setiap wilayah. 3-2 Mengidentifikasi isi dan faktor yang akan membangun model tersebut, yang dapat diadaptasikan di wilayah lain. 3-3 Membuat pedoman sebagai bahan acuan bagi wilayah lain untuk mereplikasi dan menerapkan model tersebut. 3-4 Menyelenggarakan lokakarya untuk mensosialisasikan model tersebut kepada para pemangku kepentingan lainnya. 3-5 Memfasilitasi penyusunan anggaran yang diperlukan serta merumuskan program untuk merespon kemungkinan permintaan dari pemerintah provinsi lain di luar wilayah sasaran.	INPUT Pihak Indonesia: - Jumlah personel <i>counterpart</i> di Kemenperin memadai - Biaya pengeluaran lokal yang diperlukan bagi <i>counterpart</i> dalam kegiatan proyek. - Ruang kantor dan fasilitasnya bagi Proyek. Pihak Jepang: - Tenaga ahli Jepang di sektor yang dibutuhkan. - Biaya pengeluaran lokal bagi kegiatan proyek. - Pelatihan ke Jepang bagi personel <i>counterpart</i> . - Pengadaan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan proyek.	PRAKONDISI Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam wilayah model menerima Proyek. <Masalah dan penyelesaiannya>			

Catatan) IKM: Industri Kecil dan Menengah, Kemenperin: Kementerian Perindustrian, Ditjen: Direktorat Jenderal

Lampiran-3:
Revisi Rencana Operasional (yang direncanakan dan aktual)

Project Monitoring Sheet II (Revision of Plan of Operation)

Version 2

Dated April 2016

Project Title: Project on Small and Medium Industry Development Based on Improved Service Delivery in Indonesia

													Monitoring							
Inputs	Plan	2013				2014				2015				2016		Remarks	Issue	Solution		
	Actual	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II					
Expert																				
Taro Tsubogo (Chief Advisor/ SMI Development (1))	Plan																			
	Actual																			
Keisuke Sugiyama (Deputy Chief Advisor/ Region I (Local Industry Development))	Plan																			
	Actual																			
Takuya Okada (SMI Development (2)/ Region II (Supporting Industry Development) (1))	Plan																			
	Actual																			
Hirofumi Hara (Region II (Supporting Industry Development) (2)/ SMI Service Delivery (2))	Plan																			
	Actual																			
Yoko Tanaka (Region III (Local Industry Development))	Plan																			
	Actual																			
Ahmad Subagyo (Financial Access)	Plan																			
	Actual																			
Yoichi Yamazaki (SMI Service Delivery (1))	Plan																			
	Actual																			
Izumi Ogawa (Project Coordinator/ SMI Development Assistant)	Plan																			
	Actual																			
Equipment																				
Computer	Plan																			
	Actual																			
Photocopier	Plan																			
	Actual																			
Laser printer	Plan																			
	Actual																			
Training in Japan																				
Counterpart Training on SMI Support Policy and Measures	Plan																			
	Actual																			
12 participants completed the training while 2 Mol officials participated as observers.																				
Activities	Plan	2013				2014				2015				2016		Responsible Organization		Achievements	Issue & Countermeasures	
Sub-Activities	Actual	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	GoI	JICA			
Output 1: Preparation of platform for efficient service delivery for SMI development																				
1.1 Set up PIU by DG-SMI in Mol for overall management of the Project	Plan																	GoI/ JICA	Already established PIU with a decision letter (SK) of DG-SMI, comprising of the teams of advisor, coordination, region (for field support), support directory and capacity building. Revised SK to i) add the region team members, and ii) newly establish the guideline team.	N/A
	Actual																			
1.2 In each target region, formulate LWG to coordinate the activities for SMI development for overall management of the Project	Plan																	GoI/ JICA	Already formulated each of 6 target industries in 5 regions, having Dinas Industry & Trade in each region lead LWG, appointing facilitators and involving the concerned support institutions.	N/A
	Actual																			
1.3 Review and map the currently available institutions and services for SMI development by various entities and service providers in each target region	Plan																	GoI/ JICA	Already reviewed and profiled the service providers/ support institutions in the target regions of both Phase I and II together with those at central level.	N/A
	Actual																			
1.4 Establish the system to ensure efficient service delivery for SMIs	Plan																	GoI/ JICA	Formulated the system for efficient service delivery (platform for local industry development) for the target industries of both Phase I and II.	N/A
	Actual																			
1.5 Assign and train staff in charge at the local government who facilitate services by local/ central governmental institutions and private service providers for SMIs	Plan																	GoI/ JICA	Already assigned the staffs in charge including facilitators, and trained CIPs at the working level through facilitation training for both Phase I and II.	N/A
	Actual																			
1.6 Develop a Service Directory (paper based and web based) to introduce SMI support services by government and private institutions	Plan																	GoI/ JICA	Uploaded at the new website of the DG-SMI in Nov. 2015, accommodating the profile data of support institutions in every target region (5 provinces) and central level.	N/A
	Actual																			
1.7 Facilitate and support LWG activities in each target region	Plan																	GoI/ JICA	Among the Region Teams, that for Samosir has been deemed more active in assisting LWG to facilitate the better support activities through providing the guidance/advice and attending LWG meetings.	N/A
	Actual																			
1.8 Monitor situation of service delivery in each target region	Plan																	GoI/ JICA	Region Teams of PIU periodically monitor the situation of support delivery (progress of Local Industry Action Plan) by LWGs through the JCC/ joint-meeting with LWG in order to figure out achievement and issues of facilitation of LWGs.	N/A
	Actual																			
Output 2: Strengthening of competitiveness of target SMIs with efficient service delivery																				
2.1 Conduct regular LWG meetings in each target region	Plan																	GoI/ JICA	Has been held once in 2 months for performing the assigned tasks (industry diagnosis, planning of the LIAP, facilitation/ monitoring of the LIAP implementation) or occasionally when special topics arise.	N/A
	Actual																			
2.2 Analyze issue and needs of value chain and industrial linkage in target SMIs in each target region	Plan																	GoI/ JICA	Already conducted thru field visit/ LWG meeting both for the Phase I and II industries, bringing the idea of what actions/ supports to be proposed at the next step of the Local Industry Action Plan (LIAP).	N/A
	Actual																			
2.3 Identify the goals, tasks, and activities for the development of the target SMIs based on the result of the analysis done above	Plan																	GoI/ JICA	Already prepared the LIAP both for the Phase I and II industries, consisting of challenge action, target SMIs and support activities proposed by LWG, and revised according to the progress/ necessity (for the Phase I industries).	N/A
	Actual																			
2.4 Implement the identified activities by using improved service delivery mechanism	Plan																	GoI/ JICA	A majority of the proposed supports/ services in the LIAP has been already conducted for the Phase I industries, and LWGs for the Phase II industries have been also facilitating the support activities since March 2015. LWGs for cacao/ ship-parts have been ideally and effectively utilizing the platform, in terms of the achievements.	N/A
	Actual																			
2.5 Analyze and evaluate the result of activities for development of target SMIs by LWG in each region	Plan																	GoI/ JICA	The evaluation meetings for the Phase I industries were conducted, reviewing the achievements and results of the questionnaire interview survey to the target SMIs conducted by each LWG beforehand.	N/A
	Actual																			
Output 3: Establishment of model for SMI development based on experience/ lessons learned through activities under Outputs																				
3.1 Analyze and evaluate the experience which is acquired through Activities under Outputs 1 and 2 in each region	Plan																	GoI/ JICA	The guideline team and the Expert Team reviewed the efficacy/ practicability of SMIDeP approach thru the questionnaire to LWGs, and analysed the answers to the questionnaire in order to provide the inputs for design of work model/ technical guideline.	N/A
	Actual																			
3.2 Identify contents and factors to constitute the model, which is adaptable to other regions	Plan																	GoI/ JICA	The Expert Team and the guideline team both discussed that the composing elements of the work model include i) implementation set-up, ii) steps/ method for local industry facilitation, and iii) support resources information.	N/A
	Actual																			
3.3 Develop the guideline as reference materials for other regions to replicate and implement the model	Plan																	GoI/ JICA	The guideline was firstly drafted by the Expert Team in Sep. 2015. This was then reviewed among the guideline team, and revised upon their comments, in parallel to the intermittent discussion on the position/ usage of the guideline with the guideline team.	N/A
	Actual																			
3.4 Organize workshop to socialize the model for other stakeholders	Plan																	GoI/ JICA	Seminars for dissemination of local industry facilitation by SMIDeP approach were conducted both at regional level (the target 3 provinces for the Phase I) and national level with the participants from all provincial Dinas Industry & Trade.	N/A
	Actual																			
3.5 Facilitate the necessary budgetary arrangement as well as formulate program to respond to the possible requests from other provincial governments out of target areas	Plan																	GoI/ JICA	DG-SMI has issued a letter to officialise the announcement at the national meeting at Bengkulu concerning the extension of a facilitation model of the SMIDeP based on the guideline to other regions, with the terms/ conditions to be met by the regional governments willing to participate in the extension stage. The Expert Team has then assisted DG-SMI in conducting a consultative session to those regional gov. which responded to the letter, using an occasion of the national meeting in Mar. 2016.	N/A
	Actual																			
Duration / Phasing																				
	Plan																			
	Actual																			
Monitoring Plan	Plan	2013				2014				2015				2016		Remarks	Issue	Solution		
	Actual	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II					
Monitoring																				
Joint Coordination Committee/ PIU-LWG Joint Meeting	Plan																		PIU-LWG Joint Meeting is added to reinforce progress sharing between central and regional gov.	N/A
	Actual																			
Set-up the Detailed Plan of Operation	Plan																		None	N/A
	Actual																			
Submission of Monitoring Sheet	Plan																		Introduced the monitoring system since the mission below, thus submitting the periodic monitoring sheet.	N/A
	Actual																			
Monitoring Mission from Japan	Plan																		Has been done in the mid of January 2015.	N/A
	Actual																			
Joint Monitoring	Plan																		None	N/A
	Actual																			
Post Monitoring	Plan																		To be scheduled.	N/A
	Actual																			
Reports/Documents																				
Work Plan	Plan																		Ver. 4 has been cancelled at the time of the contract for Phase II.	N/A
	Actual																			
Progress Report/ Monitoring Sheet	Plan																		Monitoring Sheets are to be prepared as Progress Report.	N/A
	Actual																			
Project Completion Report	Plan																		None	N/A
	Actual																			
Public Relations																				
Website (JICA technical cooperation project website)	Plan																		None	N/A
	Actual																			
Newsletter	Plan																		None	N/A
	Actual																			

Lampiran-4:
Berita acara serah terima barang kantor



**The Project on Small & Medium Industry (SMI) Development
Based on Improved Service Delivery in Indonesia**

Kementerian Perindustrian, Lt. 14 Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12950
'c/o: Setditjen Industri Kecil dan Menengah) Telp. (021) 525 3782



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG INVENTARIS KANTOR

Pada hari ini tanggal 22 bulan April tahun dua ribu enam belas bertempat di gedung kantor Kementerian Perindustrian, Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taro Tsubogo
Jabatan : *Chief Advisor*, Tim Tenaga Ahli JICA
Proyek Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**

Nama : Usman
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian & Umum
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Menyepakati hal-hal berikut:

Pihak Kesatu telah menyerahkan peralatan kantor sebagaimana terlampir, yang digunakan selama pelaksanaan “Proyek Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan”, dalam keadaan baik dan masih dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional kantor sehari-hari.

Pihak Kedua telah menerima peralatan kantor dimaksud dalam keadaan baik dan masih dapat dipergunakan dari Pihak Kesatu. Terhitung mulai tanggal penyerahan, peralatan kantor tersebut menjadi milik dan tercatat pada buku inventaris Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian, sehingga peralatan kantor tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Pihak Kedua.

Pihak Kesatu
Chief Advisor
Tim Tenaga Ahli JICA
(yang menyerahkan)

Taro Tsubogo

Pihak Kedua
Kepala Bagian Kepegawaian & Umum
Kementerian Perindustrian
(yang menerima)

Usman

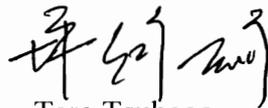
Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal IKM
Kementerian Perindustrian

Roy Siaripar

Daftar Peralatan Ditransfer

No	Peralatan	Merek	Jumlah	Kondisi	Catatan
1	Komputer <i>Desktop</i>	Lenovo H520-3216	2 units	Baik	Termasuk Windows/ Microsoft Office
2	<i>Laser printer</i> (warna)	Canon Laser Shot LBP9100Cdn	1 unit	Baik	Termasuk ink cartridge
3	Mesin Fotokopi (multi-fungsi)	Ricoh Aficio MP2000L2	1 unit	Baik	Termasuk ink cartridge
4	Telepon/ Mesin Fax	Panasonic KX-FP701	1 unit	Baik	

Pihak Kesatu
(yang menyerahkan)


Taro Tsubogo

Pihak Kedua
(yang menerima)


Usman

Mengetahui


Roy Siaripar

Lampiran-5:
Rencana studi banding ke Jepang dan daftar peserta

Course Name : Counterpart Training for the Project on Small and Medium Industry Development Based on Improved Service Delivery in Indonesia

Participants : 14 persons (Indonesian nationals only)

Country : Indonesia

Training Period : Sunday, 12 January 2014 – Friday, 24 January 2014

Training Itinerary

Date	Activities	Purposes	Place of stay
12 Jan. (Sun)	Late night: Departure from Jakarta International Airport	JL726	On the plane
13 Jan. (Mon: holiday)	Morning: Arrival at Narita, and moving to hotel in Tokyo	Check-in at Hotel Sunroute Plaza Shinjuku	Sunroute Plaza Shinjuku Tokyo
14 Jan. (Tue)	9:00-12:00: TIC Lunch 14:00-15:00: Private Sector Development Div. 1, Industrial Dev. and Public Policy Dept., JICA Evening: Moving from Haneda Airport to Matsuyama Airport	- Briefing by JICA briefing staff - Courtesy call and a report on the project activities JL1469: 17:30-18:55 Check in at Hotel Tokyu-Inn Matsuyama	Tokyu-Inn Matsuyama
15 Jan. (Wed)	10:00-10:30: International Affairs Div., Economic and Labor Dept., Ehime Prefectural Govt. 10:30-12:00: Industrial Policy Div., Economic and Labor Dept. Lunch (in the office or nearby) 13:00-15:00: Management Support Div./ Industry Creation Div., Economic and Labor Dept. 15:30-17:00: Marketing Bureau/ Tourism and Local Products Div., Economic and Labor Dept.	- Courtesy call - To learn about prefectural policies on economic/ industrial development, especially important programs on support to local industries/ SMIs, and a one-stop support system (a support desk and a supporter system) - To learn about support activities for the existing local industries/ SMIs (on product development, market development, and finance) including the followings, support for the creation of new industries, and cooperation with the central government for these support activities * Program for enhancing utilization of local resources, fund support for agriculture-commerce-industry collaboration. - Learn about basic policy for local specialty product promotion and programs, including branding, promotion facility development, and making supporter system, and their implementation	Ditto
16 Jan. (Thu)	9:00-11:00: Ehime Industrial Promotion Foundation Lunch (at the Techno Plaza Ehime) 12:30-14:30: Ehime Institute of Industrial Technology (Food Industry Technology Center) 17:00~: Ehime University	- To learn about overview of the foundation's activities, support activities including the followings and their success cases * Ehime Regional Business Creation Fund/ SME Challenge Fund (a subsidy scheme to create new business and explore new markets) and business matching service - To learn about overview of the institute's activities (especially the Food Technology Center), facilities and equipment, contents of R&D support including the followings, and development and dissemination of general-purpose technology * R&D support through industry-academia-government collaboration, technical consultation, seeds/ needs matching service - Reception party with Indonesian students	Ditto
17 Jan. (Fri)	09:00-10:00: Imabari Local Industrial Promotion Center 10:20-12:00: Shikoku Towel Industry Association and a facility tour of the	- To learn about overview of the center's activities, support activities to local industries (ship parts and towels/ textiles), and its outcomes and issues - To learn about overview of the association's activities, background of the establishment, contents of joint activities,	Imabari International Hotel Imabari

	<p>Texport Imabari</p> <p>Lunch (nearby)</p> <p>13:00-14:00: Visit to an association member company</p> <p>15:00-16:00: Onishi Shipbuilding-related Industry Cooperative</p> <p>16:30-17:00: Visit to the cooperative member company (one or two)</p>	<p>efforts for branding, coordination with the government support, etc.</p> <p>- To visit and interview SMI of towel manufacturer</p> <p>- To learn about overview of the cooperative's activities, background of the establishment, contents of joint activities, efforts for market development, coordination with the government support, etc.</p> <p>- To visit and interview SMI of ship components</p>	
18 Jan. (Sat)	<p>09:30-12:30: Uchiko Fresh Park KaRaRi (Direct promotion facility of agricultural processed products)</p> <p>14:00-15:30: Iyo Textile (Pattern Folk) Craft Museum</p> <p>Afternoon: Moving from Matsuyama to Haneda Airport</p>	<p>- To learn about the direct promotion facility of agricultural processed products, its management system, and efforts of product development and quality improvement through market/ customer tests at the shop</p> <p>- To learn about measures to promote traditional textile crafts (artifacts) and cases of product development utilizing traditional textile</p> <p>JL1472: 17:05-18:35</p> <p>Re-check in at Hotel Sunroute Plaza Shinjuku</p>	Sunroute Plaza Shinjuku Tokyo
19 Jan. (Sun)	Holiday		Ditto
20 Jan. (Mon)	<p>Morning: Self-study</p> <p>13:30-15:30: Organization for Small and Medium Enterprises and Regional Innovation (SMRJ)</p>	<p>- To review learning and check its outcomes</p> <p>- To learn about overview of national programs and support measures on local economic and industrial development, including program for enhancing utilization of local resources, fund support for agriculture-commerce-industry collaboration, overview and outcomes of support for market development and fund schemes (SME Challenge Fund, etc.), and cooperation with local governments, etc.</p>	Ditto
21 Jan. (Tue)	10:00-16:00: Hitonomori Co. Ltd. at KRI International Corp.	- To learn about product and regional branding strategy and cases study of regional branding in Japan	Ditto
22 Jan. (Wed)	<p>10:00-12:00: Antenna shop of Ehime, <i>Setouchi-Shunsaikan</i></p> <p>13:30-14:30: KITTE, Marunouchi, Tokyo Station</p> <p>15:30-: KRI International Corp.</p>	<p>- To visit an antenna shop and learn about its management system, cooperation with the local government and product suppliers, selection of products to be displayed, and outcomes</p> <p>- To visit a facility for promotion of local specialty products and learn about its facility layout</p> <p>- To discuss and share the results of training</p>	Ditto
23 Jan. (Thu)	<p>10:00-11:00 Training evaluation (at JICA)</p> <p>14:00-15:30 Embassy of Indonesia in Tokyo</p>	<p>- To present the training results and feedbacks to the project activity</p> <p>- To report the training results</p>	Ditto
24 Jan. (Fri)	<p>Morning: Moving from Shinjuku to Narita Airport</p> <p>Arrival at Jakarta International Airport</p>	JL725	Return to Indonesia

List of Participants for the Comparative Study to Japan

No.	Classification	Name	Position
1	Central Government The Ministry of Industry	Bayu Fajar Nugroho	Head of Cooperation Sub-division, Legal & Cooperation Division, Secretariat General of DG-SMI
2		Lismaniar Siagian	Head of Sub-directorate of Metal, Transportation Equipment, Creative & Tele-communication Industries, Directorate for SMI Region I of DG-SMI
3		Satrio Pratomo	Staff, Textile Industry Section, Sub-directorate of Craft & Textile Industries, Directorate for SMI Region I of DG-SMI
4		Eripson Mangasi H. Sinaga	Head of Metal Industry Section, Sub-directorate of Metal, Transportation Equipment, Creative & Tele-communication Industries, Directorate SMI Region II of DG-SMI
5		Manosetta Satria Srigama	Staff, Metal Industry Section, Sub-directorate of Metal, Transportation Equipment, Creative & Tele-communication Industries, Directorate SMI Region II of DG-SMI
6		Dwi Yogo Pamudji	Head of Chemical & Building Material Industries, Sub-directorate of Food, Chemical, & Building Material Industries, Directorate SMI Region III of DG-SMI
7		Flori Indrasanti	Staff, Evaluation & Reporting Section, Sub-directorate of Program, Evaluation & Reporting, Directorate SMI Region III of DG-SMI
8	Local Working Group Region-I	Sumitro M. Simbolon	Head of Industry Division, Dinas Cooperative, Industry & Trade of Samosir Regency
9	Local Working Group Region-II	Abdul Honi	Head of Dinas Industry & Trade of Tegal Regency
10		Amin Thoyib Mustofa	Functional staff, Dinas Industry & Trade of Tegal Regency
11	Local Working Group Region-III	Bambang Andry Mustanto	Head of Agro, Fishery and Chemical Industries Section, Industry Division, Dinas Cooperatives, SMEs, Industry & Trade of Central Sulawesi Province
12		Evyana Marwati Bangkel	Head of Forestry, Building Material and Craft Industry Section, Industry Division, Dinas Cooperatives, SMEs, Industry & Trade of Central Sulawesi Province

Observers (self-financed participants)

13	Central Government The Ministry of Industry	Busharmaidi	Secretary to DG-SMI
14		Dodi Widodo	Head of Program, Evaluation & Reporting Division, Secretariat of DG-SMI

Lampiran-6:
Daftar counterpart yang terlibat dalam Unit Pelaksana Proyek (PIU)
dan Kelompok Kerja Daerah (Pokja)

Daftar *Counterparts* (C/Ps) yang terlibat dalam PIU dan POKJA**Unit Implementasi Proyek (PIU)**

Anggota Tim Supervisi Supervising Team

Posisi	Nama	Lembaga
Advisor	Euis Saedah	Director General for SMI
Ketua	Busharmaidi	Secretary for DG-SMI
Anggota	Reisend Emil Panjaitan	Director of SMI Region I
	Roy Sianipar	Director of SMI Region II
	Endang Suwartini	Director of SMI Region III
	Riris Marhadi	Secretary for Directorate General of International Industry Cooperation (DG-IIC)
	Mujiyono	Head of Industry Training Institute (Pusdiklat)

Anggota Tim Koordinasi

Posisi	Nama	Lembaga
Ketua	Janu Suryanto	Head of Legal & Cooperation Division, Secretariat of DG-SMI
Anggota	Kastoro	Head of Foreign Aid Division, Secretariat of DG-IIC
	Bayu Fajar Nugroho	Head of Cooperation Section, Secretariat of DG-SMI
	Eko Agus Nugroho	Head of Technical Assistance Administration Section, Secretariat of DG-IIC
	Indra Akbar Dilana	Staff of Secretariat of DG-SMI

Anggota Tim Wilayah I

Posisi	Nama	Lembaga
Ketua	Lismaniar Siagian	Sub-director of Craft and Textile Industry, Directorate of SMI Region I
Anggota	Nurhayanti Gobel	Sub-director of Food, Chemical and Building Material Industry, Directorate of SMI Region I
	Kris Sasono Ngudi Wibowo	Head of Program Section, Directorate of SMI Region I
	Multizamiati Nizam	Head of Textile Industry Section, Directorate of SMI Region I
	Bhakti Widiasari Ikaningtyas	Head of Food Industry Section, Directorate of SMI Region I
	Satrio Pratomo	Staff of Craft Industry Section, Directorate of SMI Region I

Anggota Tim Wilayah II

Posisi	Nama	Lembaga
Ketua	Darmanto	Sub-director of Metal Product, Transportation, Creative and Telematics Industry, Directorate of SMI Region II
Anggota	Ismodian	Sub-director of Craft and Textile Industry, Directorate of SMI Region II
	Asrin Naholo	Sub-director of Offshore Structure and Components Industry, Directorate of Maritime, Aerospace and Defence Equipment Industry
	Budi Hartono	Head of Program Section, Directorate of SMI Region II
	Eripson Mangasi H. Sinaga	Head of Metal Product and Transportation Industry Section, Directorate of SMI Region II
	Ciska Farida Ariany	Section of Textile Industry, Directorate of SMI Region II
	Manosetta Satri Srigama	Staff of Metal Product and Transportation Industry Section, Directorate of SMI Region II

Anggota Tim Wilayah III

Posisi	Nama	Lembaga
Ketua	Musnidar	Sub-director of Food Industry, Directorate of SMI Region III
Anggota	Edi Suhendera	Head of Program Section, Directorate of SMI Region III
	Sunandar	Head of Food Industry Section, Directorate of SMI Region III
	Dwiyogo Pamudji	Head of Chemical and Building Material Industry, Directorate of SMI Region III
	Sukma Paramita Dewi	Staff of Food Industry Section, Directorate of SMI Region III

Anggota Tim Direktori

Posisi	Nama	Lembaga
Ketua	Dody Widodo	Head of Program, Evaluation & Report Division, Secretariat of DG-SMI
Anggota	Tri Harsono	Head of Data and Information Section, Secretariat of DG-SMI
	Parentina Meinawaty	Staff of Data and Information

Anggota Tim Petunjuk Teknis

Posisi	Nama	Lembaga
Ketua	Janu Suryanto	Head of Legal & Cooperation Division, Secretariat of DG-SMI
Anggota	Bayu Fajar Nugroho	Head of Cooperation Section, Secretariat of DG-SMI
	Eripson Mangasi H. Sinaga	Head of Metal Product and Transportation Industry Section, Directorate of SMI Region II
	Heru Kustanto	Head of Program, Evaluation and Reporting, Secretariat of Directorate General of Regional Development
	Sri Yunianti	Sub-director of Regency/City Core Competence Industry, Directorate of Industrial Facilitation Development Region II
	Indra Akbar Dilana	Staff of Secretariat of DG-SMI
	Angga Walea Yudha	Staff of Secretariat of DG-SMI
	Satrio Pratomo	Staff of Craft Industry Section, Directorate of SMI Region I
	Manosetta Satri Srigama	Staff of Metal Product and Transportation Industry Section, Directorate of SMI Region II
	Sukma Paramita Dewi	Staff of Food Industry Section, Directorate of SMI Region III
	Siti Nurkomariah	Staff of Chemical and Building Material Industry Section, Directorate of SMI Region III

Anggota Tim *Capacity Building*

Posisi	Nama	Lembaga
Ketua	Mayerfin	Head of Training Standard Sub-division, Pusdiklat
Anggota	Setia Diarta	Head of Vocational Training Sub-division, Pusdiklat
	Ni Wayan Yuni Widayanti	Head of Extension Officer Section, Pusdiklat

Kelompok Kerja (POKJA)

Anggota POKJA untuk Industri Fesyen *Ulos* di Kabupaten Samosir:

Posisi	Nama	Lembaga
Ketua	Hotraja Sitanggung	Ketua Diskoperindag Samosir
Wakil Ketua	Ombang Siboro	Ketua Dispersenibut Samosir
Sekretaris	Sumitro Mardi Simbolon	Kepala Bidang Industri, Diskoperindag Samosir
Anggota (Fasilitator)	Yani Pane	Kepala Bidang Industri, Disperindag Sumatera Utara
	Marudut Tua Sitingjak	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Samosir
	R Arthe M Simbolon	Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda), Samosir
	Herdon Simbolon	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Samosir
	Greycy M. Simbolon	Tenaga Penyuluh Lapangan, Diskoperindag Samosir
	Mangasi Situmorang	Koperasi Kredit (Credit Union) Dame Samosir
	Rolika Manik	Kelompok produsen <i>Ulos</i>
	Tigor Siahaan	Sekolah Kejuruan Lauputi, Toba Samosir
	Sihol Simbolon	Bank Sumatera Utara
	Lince Nainggolan	Konsultan NGO

Anggota POKJA untuk industri komponen kapal di Kabupaten Tegal:

Posisi	Nama	Lembaga
Ketua	Abdul Honi	Ketua Disperindag Tegal
Wakil Ketua	Arifin, SE	Kepala Bidang Industri, Disperindag Tegal
Sekretaris	Edy Suharno, ST	Kepala Seksi Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA), Bidang Industri, Disperindag Tegal
Anggota (Fasilitator)	Mukti Sarjono	Kepala Bidang Industri, Disperindag Jawa Tengah
	Abdullah AN	Anggota Kadinda
	Sutardi	Kepala Cabang Tegal, BI
	Munadi, S. Sos	Bappeda Tegal
	Amin Totib, ST	Pegawai, UPL, Disperindag Tegal
	Syaeful Bahri, ST	Konsultan Diagnosis IKM, Disperindag Tegal

Anggota POKJA untuk industri pengolahan kakao di Provinsi Sulawesi Tengah:

Posisi	Nama	Lembaga
Ketua	Bambang Musthofa	Kepala Seksi Industri Agro, Hasil Kelautan dan Kimia, Bidang Industri, Diskumperindag Prov.
Sekretaris/fasilitator	Yiska Elvis L	Konsultan Diagnosis IKM, Diskumperindag Prov.

Anggota	Muslimin	Universitas Tadulako
	Yuslam	Kepala Bidang Industri Kecil, Disperindagkop Palu
	Toni Sawolino	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah
	Toni Mangitung	Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO)

Anggota POKJA untuk industri mebel rotan di Provinsi Sulawesi Tengah:

Posisi	Nama	Lembaga
Ketua	Evyana Marwati B	Kepala Seksi Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Kerajinan, Bidang Industri, Diskumperindag Province
Sekretaris/fasilitator	Syarifudin	Konsultan Diagnosis IKM, Disperindagkop Palu
Anggota	Jeremia Tapusa	Kepala Bidang Industri, Disperindagkop Palu
	Alfred Nobel Lamandasa	Tenaga Penyuluh Lapangan, Diskumperindag Province
	Mahmud Laga	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi Balai Pemantauan, Pemanfaatan Hutan ProduksiWil. XIV Palu
	Suaza Arsal	ASMINDO

Anggota POKJA untuk industri pengolahan aloevera di Kota Pontianak:

Posisi	Nama	Lembaga
Ketua	Specified job position	Head of Disperindag West Kalimantan
Wakil Ketua	Ditto	Secretary of Disperindag West Kalimantan
Sekretaris	Ditto	Head of Chemical, Agro & Forestry Product Industries Division, Disperindag West Kalimantan
Anggota	Ditto	Head of Agricultural Product Processing & Marketing Division, Dinas Food Crop Agriculture & Horticulture West Kalimantan
	Ditto	Head of Empowerment of MSMEs & Cooperatives Division, Dinas MSEM & Cooperatives West Kalimantan
	Ditto	Head of Training Unit-SMI, Disperindag West Kalimantan
	Ditto	Head of Industry Division, Dinas Industry, Trade, SMEs & Cooperatives Pontianak
	Ditto	Head of Agriculture & Forestry Division, Dinas Agriculture, Fishery & Forestry Pontianak
	Ditto	Head of Technical Service Development Section, Baristand Pontianak
	Ditto	Head of Development, Monitoring, Prevention of Industrial Pollution Section, Dinas Industry, Trade, SMEs & Cooperatives Pontianak
	Ditto	Head of Production Development Section, Chemical, Agro & Forestry Product Industries Division, Disperindag West Kalimantan
	Ditto	Head of Industrial Facility Section, Chemical, Agro & Forestry Product Industries Division, Disperindag West Kalimantan
	Ditto	Head of Business Development Section, Chemical, Agro & Forestry Product Industries Division, Disperindag West Kalimantan
(Fasilitator)	Erni Sulissiwati	Head of Admin. Section, Training Unit-SMI, Disperindag West Kalimantan
	Sumarna	Functional Staff, Disperindag West Kalimantan
	Parningotan	Functional Staff, Disperindag West Kalimantan

Anggota POKJA untuk industri alas kaki di Kota Mojokerto:

Posisi	Nama	Lembaga	
Ketua	Specified job position	Secretary to Diskoperindag Mojokerto	
Sekretaris	Ditto	Head of Industry Div., Diskoperindag Mojokerto	
Anggota	Ditto	Head of Disperindag East Jawa	
	Ditto	Head of Indonesian Footwear Industry Development Center, MoI	
	Ditto	Head of City Development Planning Board Mojokerto	
	Ditto	Head of Dinas Labor & Transmigration Mojokerto	
	Ditto	Head of Economic Affairs Division, Mayor's Office Mojokerto	
	Ditto	Head of Development Affairs Division, Mayor's Office Mojokerto	
	Ditto	Head of Prajuritkulon District, Mojokerto	
	(Fasilitator)	Ditto	Head of Industrial Technology Dev. Section, Diskoperindag Mojokerto
	(Fasilitator)	Ditto	Head of Business Dev. Section, Diskoperindag Mojokerto
	Ditto	Head of Business Development Section, Chemical, Agro & Forestry Product Industries Division, Disperindag West Kalimantan	
Observer	Ditto (3 persons)	Head of 3 Sub-districts, Prajuritkulon District, Mojokerto	
	Ali Mashud	Secretary to Indonesian Footwear Association (APRISINDO) East Java	
	David S. Kodrat	Faculty of Economics, Ciputra University Surabaya	

Lampiran-7:

Rencana Aksi Industri Lokal dan industri sasaran awal

* Daftar rinci industri sasaran (termasuk informasi kontak) diserahkan kepada JICA

RENCANA AKSI untuk Industri Fasyen Ulos di Kabupaten Samosir (*Local Industry Action Plan for Ulos Fashion Industry, Samosir*)

Tantangan Aksi:

1. Meningkatkan penjualan produk fashion berbahan kain motif ulos yang modis di pasar high-end dimana proses desainnya bekerja sama dengan desainer dari Jakarta.

2. Meningkatkan penjualan souvenir (aksesoris, kerajinan, dll) berbahan kain motif ulos dikalangan wisatawan dimana proses desainnya bekerja sama dengan desainer lokal dan juga dengan industri pariwisata dalam hal

Sasaran:

20 pengrajin gedokan, 10 pengrajin ATBM, 1 unit assosiasi IKM (KUB Harungguan)

Durasi:

November 2013-Desember 2015

Des 2014_Ver.03

No	Kegiatan	Penjelasan	Output	Indikator	Sasaran	PIC	Pihak yang terlibat	Periode
I Bahan Baku/ Input Supply								
1	Dukungan APBD untuk supply benang	Input supply untuk pengadaan benang bisa diakses dari belanja APBD. Diskoperindag mengupayakan bisa mengalokasikan pengadaan benang dan menyesaikannya dengan kebutuhan pengrajin dan orderan yang ada.	Ada 2-3 boom benang yang bisa didatangkan dari Majalaya	2-3 boom benang terpakai oleh pengrajin	10 pengrajin	Diskoperindag Samosir (Ada Anggaran)	Diskoperindag Samosir	Agust-Sep 2014
2	Dukungan Kementerian Dijen IKM untuk supply benang	Akses kemungkinan bantuan benang dari Kemenperri sehingga kebutuhan dapat teratasi	Ada 2-3 boom bantuan dari Kemenperri	2-3 boom benang terpakai oleh pengrajin	10 pengrajin	Kemenperri (Diharapkan ada anggaran dari Kemenperri)	Kemenperri, Diskoperindag Samosir	Jan-Des 2015
3	Dukungan Bidang Koperasi untuk supply benang	Bidang koperasi menyediakan dana Bansos untuk bisa diakses koperasi yang telah berdiri. Sentra pengrajin IKM Fashion akan didirikan dalam satu wadah koperasi sehingga memudahkan program pengembangan IKM fashion tenun ulos	Ada benang yang dapat dipakai untuk penganian ke dalam boom	2-3 boom benang terpakai oleh pengrajin	10 pengrajin	Diskoperindag Samosir (Ada Anggaran)	Bidang Koperasi	Jun-July 2015
4	Dukungan CSR Bank Sumut Untuk supply benang	Dengan adanya Bank Sumut sebagai lembaga permodalan dalam Pokja ini akan memudahkan koperasi IKM Fashion Tenun mengakses dana CSR untuk pengadaan benang	Ada benang yang dapat dipakai untuk penganian ke dalam boom	2-3 boom benang terpakai oleh pengrajin	10 pengrajin	Bank Sumut (Diharapkan ada anggaran dari Bank Sumut)	Diskoperindag, Bank Sumut	Jun-July 2014
5	Linkages bisnis dengan supplier benang (bahan baku) untuk tenun ATBM	Selama ini kebutuhan bahan baku khusus tenun ATBM berasal dari Majalaya Kab. Bandung yang jumlah (kuantitasnya) terbatas serta pemesanan yang relatif lama. Hanya ada satu pedagang benang (supplier lokal) yang mengusahakannya.	Ada MOU antara pengrajin (kelompok pengrajin) dan Suplier benang dari Majalaya Kabupaten Bandung. Ada MOU dengan beberapa suplier benang lainnya selain dari kabupaten Majalaya.	Terjadinya transaksi permintaan benang dan pengiriman benang dari majalaya ke kelompok pengrajin ATBM	10 Kelompok Pengrajin ATBM dan Supplier Majalaya	Dinas Koperindag Samosir (Ada Anggaran)	Pokja, Diskoperindag samosir, Bappeda Samosir, Kemenperin	Maret-April 2015
6	Akses pinjaman kredit	Diskusi anggota KUB pada Bulan Desember menyimpulkan bahwa anggota tidak punya modal untuk membeli bahan baku dan material lainnya untuk membuat produk diversifikasi.	Ada akses dana untuk mendukung dana awal KUB dan pengrajin lainnya	Ada kredit pinjaman bagi KUB dan pengrajin lainnya	KUB Harungguan	Diskoperindag Samosir	Bank Sumut, CU Dame	Maret-April 2015
II Proses Produksi								
1	Pelatihan Produk Kerajinan	Pengrajin mampu membuat produk kerajinan berbahan kain tenun ulos sehingga ada alternative produk selain kain tenun untuk dipasarkan. Hal ini juga akan menambah nilai tambah produk	Ada produk-produk kerajinan berbahan kain tenun	Muncul nya produk produk kerajinan dan terjualnya di pasar lokal	10 pengrajin, 10 kelompok penjahit, 2 anggota PKK dari Deskranasda	JICA (Ada Anggaran)	Diskoperindag Samosir, Dinas Sosial dan tenaga kerja dan Deskranasda	Maret 2014
2	Lomba Protype hasil pelatihan Produk Kerajinan	Setelah diadakan pelatihan produk kerajinan selama 4 hari diharapkan akan ada kegiatan untuk memperlombakan hasil pelatihan. Peserta yang terpilih 3-5 orang peserta akan diikutsertakan dalam kegiatan berikutnya yaitu TOT	Ada 3-5 orang pengrajin yang terpilih untuk mengikuti kegiatan TOT	Peserta yang terpilih mampu membuat produk kerajinan yang unik dan menarik serta punya harga jual	10 pengrajin, 10 kelompok penjahit, 2 anggota PKK dari Deskranasda	JICA (Ada Anggaran)	Diskoperindag	Maret 2014
3	Pelatihan pengembangan design	Setelah muncul kandidat designer lokal yang potensial perlu diperkuat kapasitasnya sehingga mampu untuk menciptakan design-design tenun motif ulos yang inovatif bagi pengrajin. Diharapkan kedepannya secara berkelanjutan terjadi mekanisme bisnis dari proses tersebut antara designer dan pengrajin. Ada 3 tahapan pelatihan selain TOT, yaitu Tahap 1 : Pengembangan pola pikir kreatif dan ketrampilan teknis, Tahap 2 : Pengembangan design dan standarnisasi product, Tahap 3 : Desain sesuai trend global dan segmentasi pasar.	Adanya pengembangan design baru baik dalam fashion maupun product lainnya	Munculnya beberapa design baru dalam fashion dan aplikasinya dalam aksesoris lainnya seperti sepatu dan tas	3 desainer baru dan 10 pengrajin ATBM serta 20 pengrajin gedokan	Diijen IKM, Disperindag Propinsi, JICA (Anggaran Diharapkan dari Diijen IKM dan JICA)	Diskoperindag Samosir, Designer dari jakarta (Dina Mediani) dan dari medan	April-May 2014
4	Fasilitasi ATBM baru bagi pengrajin	Dalam rangka pengembangan perluasan area sentra baru dan akan turunnya bantuan ATBM 2 unit dan 1 unit alat hanni dalam waktu dekat.	Adanya rumah produksi yang baru di sekitar sentra lama di desa Lumban Suhi-suhi	2 unit ATBM yang baru dan 1 unit hanni dalam sentra yang baru	3 pengrajin ATBM	Kemenperin (Ada Anggaran)	Dekranasda	Sep-Des 2013

5	Magang pengrajin tenun ulos ATBM baru ke sentra tenun di Jepara, Jawa Tengah	Dibutuhkan magang bagi pengrajin selama 2 minggu	munculnya pengrajin yang siap untuk kegiatan untuk pembuatan pro type dan diversifikasi produk	pengrajin mampu melakukan tenun ikat motif harongguan untuk diversifikasi produk	2 pengrajin	JICA (Ada Anggaran)	Diskoperindag Samsir dan lembaga yang menerima pengrajin	Nov-Des 2013
6	Pembuatan prototype product fashion menjadi tas, dompet, sepatu sandal, dasi, scarf dan pelatihan pembuatan product	Sebagai lanjutan pelatihan produk kerajinan Diskoperindag akan mengadakan pelatihan lanjutan Prototype sebagai contoh bagi pelaku untuk di pasarkan sebagai product yang siap pakai untuk pasar high-end dan pariwisata sebagai produk oleh-oleh	ada beberapa sampel pro type variant product	beberapa variant product laku di pasarkan	22 peserta yang telah mendapatkan pelatihan produk kerajinan	Diskoperindag Samsir (Ada Anggaran dan Diharapkan Anggaran dari Disperindag Propinsi)		Juni 2014
7	Dukungan Deskransada kepada dua orng pengrajin yang magang dari Jepara untuk intensive penghanian benang ke boom ATBM dan pewarnaan	2 orang pengrajin intensive untuk melakukan pengebooman sendiri dengan mesin hanni yang tersedia serta melakukan pewarnaan. Selama melakukan pengebooman pengrajin akan dibiayai dari anggaran Deskransada sehingga 2 orang pengrajin yang telah mengikuti magang di Jepara mampu melakukan pengebooman dan pewarnaan sendiri. Hal ini juga bertujuan untuk memulai pembuatan tenun ikat Harongguan	2 orang pengrajin mampu melakukan pengebooman dan pewarnaan sehingga tidak perlu mendatangkan boom benang dari Majalaya	3 boom benang mampu terisi dengan jangka waktu kurang lebih 2 bulan. 2-3 lembar kain tenun ikat dapat terselesaikan	2 pengrajin yang telah mengikuti magang di Jepara (Natalia dan Sondang)	Deskransada dan Diskoperindag Samsir (Ada Anggaran)	Diskoperindag Samsir	Jun-July 2015
8	Training penghanian dan pewarnaan bagi 8 pengrajin lainnya yang dilatih oleh 2 orang pengrajin yang magang dari Jepara	Setelah Natalia dan Sondang telah mampu melakukan pengebooman sendiri akan diadakan pelatihan penghanian boom kepada pengrajin lainnya. Sehingga ada transfer ilmu bagi pengrajin lainnya.	8 orang pengrajin lainnya mampu melakukan penghanian ke boom demikian juga pewarnaan	masing-masing pengrajin mampu mengisi 1 boom	8 pengrajin	Deskransada dan Diskoperindag Samsir (Ada Anggaran)	Dekranasda dan Diskoperindag Samsir	Nov-Dec 2015
9	Bimbingan teknis dan magang ke pembuatan zat warna alam	Perlunya alternative pewarnaan alami sebagai salah satu kegiatan yang berkaitan dengan eco friendly product. Selain itu pewarnaan alami diharapkan mampu memperkecil biaya produksi tenun samsir.	Terjadinya kegiatan pewarnaan alami di Samsir dengan tersedianya tanaman-tanaman lokal sebagai bahan pewarna benang untuk tenun ATBM serta gedokan	Beberapa pengrajin ATBM dan gedokan sudah mampu melakukan pewarnaan alami	10 Pengrajin ATBM, 20 pengrajin gedokan dan 3 designer lokal	Dinas Koperindag Samsir, Dinas Pertanian Samsir (Anggaran diharapkan dari Dinas Koperindag Samsir)	Instruktur dari Majalaya	May-June 2015
10	Pengembangan sentra baru	Melihat kebutuhan kain tenun ATBM semakin meningkat perlunya pengembangan sentra tenun ATBM di beberapa kecamatan di Samsir	Munculnya beberapa sentra baru di beberapa kecamatan di Kabupaten Samsir	Ada sentra baru di Kecamatan Sianjur Mula mula, Palipi dan Nainggolan	Pengrajin tenun di kecamatan Sianjur Mula mula, Palipi dan Nainggolan	Diskoperindag Samsir	Diskoperindag Samsir, bank Sumut, Ditjen IKM, CSR	Agustas 2015
11	Pelatihan ATBM bagi pengrajin baru	Perlunya penambahan pengrajin pengrajin yang mahir bertenen di ATBM untuk memenuhi permintaan kain tenun ATBM	Munculnya 20 orang pengrajin baru yang mewakili beberapa kecamatan	Ada 20 orang pengrajin yang baru dari kecamatan Sinajur Mula mula, Palipi dan Nainggolan	20 pengrajin tenun	Diskoperindag Samsir	Instruktur dari Pengrajin Samsir	Agust-Nov 2015
12	Fasilitasi ATBM baru bagi pengrajin untuk pengembangan sentra baru	Terkait pengembangan sentra baru di beberapa kecamatan, Diskoperindag membutuhkan dukungan ATBM yang baru untuk di letakkan di sentra yang baru	Ada ATBM baru di sentra Sianjur Mula mula, Nainggolan, dan Palipi	Ada tambahan ATBM sehingga bisa menambah jumlah produksi	Pengrajin ATBM	Diskoperindag Samsir, Ditjen IKM, CSR Bank Sumut dan Inalum		Agust-Ok 2015
III Pemasaran dan Promosi								
1	Pembuatan media promosi	Masih belum dikenalnya sentra produksi lumban suhi-suhi oleh masyarakat dan wisatawan dan industri wisata (hotel dan homestay). Selain itu profil pengrajin IKM tenun ulos ATBM dan gedokan perlu dibuat sehingga masyarakat, pembeli dan lainnya mengenal.	Tersedia leaflet/flyer (media promosi tentang tenun dan sejarah tenun dari desa Lumban Suhi-suhi samsir (Pengrajin Gedokan dan ATBM)	Leaflet tersebar di outlet wisata, toko-toko aksesoris, maupun hotel dan villa	Pengrajin ATBM/gedokan, KUB Harungguan	Dinas Parsenibud Samsir, Bidang Perdagangan Samsir, PUPUK, JICA (Anggaran diharapkan dari masing-masing pihak PIC)	Parsenibud, Bappeda	June-July 2014
2	Antena Shop di Jakarta	Salah satu usaha Diskoperindag adalah memasarkan produk produk kain tenun dan produk kerajinan Samsir ke Ibu Negara Indonesia, yaitu Jakarta. Hal ini melihat beberapa provinsi sudah memulai dan Diskoperindag mengupayakan membuka antena shop di Jakarta sehingga proses pemasaran lebih cepat	Ada wadah/toko Diskoperindag Samsir yang di Jakarta sebagai medai promosi	Produk-produk dari Samsir semakin terkenal dan meningkatnya jumlah produksi	Industri di Kabupaten Samsir	Dinas Koperindag Samsir (Dana diharapkan dari Dinas Koperindag Samsir)	Bappeda	May-June 2015
3	Temu bisnis antar pengusaha tenun dengan BUMN, swasta dan industri pariwisata	Temu bisnis bertujuan untuk membuka peluang pasar tenun samsir. Temu bisnis ini bentuknya dapat sebagai lokakarya atau seminar dengan mencari tema yang berhubungan dengan pangsa pasar tenun dan dikaitkan dengan pelestarian budaya	Ada nya permintaan dan transaksi dengan BUMN, PHRI, dan instansi lainnya	Terjadi permintaan kain tenun minimal 1 BUMN 2-3 kali permintaan dalam setahun	Pengrajin ATBM, KUB Harungguan	Bappeda (Dana diharapkan dai Bappeda)	Diskoperindag Samsir	Ags-Okt 2014
4	Kegiatan pemasaran promosi langsung	Kegiatan ini bertujuan untuk melihat peluang pemasaran produk tenun dan produk kerajinan lainnya di pasar lokal, seperti hotel-hotel, outlet maupun tempat strategis lainnya yang bisa menampung produk kain tenun untuk dipasarkan	Ada tempat-tempat yang strategis untuk memasarkan produksi kain tenun maupun produk kerajinan lainnya	Produksi kain tenun KUB IKM Fashion dapat terjual	Pengrajin ATBM, KUB Harungguan	Diskoperindag Samsir (Anggaran diharapkan dari JICA)	Pengajin	Jan-Dec 2015

5	Pengadaan etalase/display	Melihat kebutuhan yang berkembang di sentra tenun, perlunya ada wadah untuk melatakan display pajangan hasil tenun dan produk pengrajin. Hal ini juga akan memudahkan untuk promosi.	Ada beberapa display untuk dipajangkan di beberapa tempat	Display terpasang di beberapa tempat seperti hotel dan restaurant amupun di sentra	Pengrajin ATBM/gedokan, KUB Harunnguan	Diskoperindag Samsir (Anggaran diharapkan dari APBD)	Deskransda, Bappeda	April 2015
6	Pemunculan dan pendaftaran merk tenun motif ulos samsir (Branding dan Packging)	Perlunya menjaga identitas lokal sehingga perlunya memunculkan merk dan mendaftarkannya dan juga untuk memudahkan promosi product. KUB harunnguan memerlukan dukungan pembuatan branding karena selama ini produk yang telah dipasarkan belum punya branding. Demikian halnya juga packaging. KUB belum mampu membuat packaging yang menarik, murah dan effective	Adanya merk dan terdaptarnya merk dari kelompok pengrajin	Terdaptarnya satu merk dari kelompok pengrajin ATBM	Pengrajin ATBM/gedokan, KUB Harunnguan	Kemenperin (Anggaran diharapkan dari Kemenperin)	Diskoperindag Samsir	Jun-July 2015
7	Branding Lumban Suhi-Suhi dan pengembangan Desa Wisata	Lumban suhi-suhi adalah desa tertua di kabupaten samsir dimana tenun ulos berasal dari desa ini. Untuk pengembangan desa sangat tepat menjadikan desa lumban suhi-suhi sebagai tujuan wisata.	Ada nya branding lumban suhi-suhi Samsir sebagai asal muasal tenun di Samsir dan salah satu desa tertua di samsir.	Terdaptarnya satu merk dari kelompok pengrajin tenun gedokan di Desa Lumban Suhi suhi	Desainer lokal, pengrajin ATBM/gedokan, KUB Harunnguan, pengrajin kreatif lainnya	Dinas Parnsibud Samsir, Ditjen IKM (Anggaran diharapkan dari Dinas Parnsibud Samsir)	Diskoperindag Samsir, JICA, Designer dari Jakarta dan Medan	May-June 2015
8	Pameran dan Fashion Show	Perlunya kegiatan sebagai media promosi dan pengenalan branding pengrajin ATBM dan gedokan serta diversifikasi product lainnya. Melalui pameran ini juga diharapkan ada input dan pembelajaran product dari berbagai aspek yang melihat atau membeli product tenun samsir beserta divesifikasi lainnya.	Diharapkan akan terjadi pameran dan fashion show tenun kain motif ulos samsir dan diversifikasi produk-produk ulos sebanyak satu kali selama rencana dukungan	Beberapa kali pameran dan fashion show dan terjadinya transaksi bisnis serta orderan. Selain itu ada input dan pembelajaran dari berbagai pihak untuk perbaikan product	Pengrajin ATBM/gedokan, KUB Harunnguan, designer lokal	Kemenperin, Dinas Koperindag Samsir ,Dinas Perindag Sumut, Dinas Parnsibud Samsir dan JICA (Anggaran diharapkan masing-masing PIC berkontribusi terhadap pameran dan fashion show)	Kemenperin, Dinas Koperindag Samsir ,Dinas Perindag Sumut, Dinas Parnsibud Samsir dan JICA	2014&2015: February (Indonesia Fashion Week), April (INNACRAFT), Juli (ICCRA), Juli (PRJ), Nov (INDOCRAFT), PRSU, FDT
9	Promosi Pasar Produk KUB	Agar produk KUB Harunnguan dikenal di pasar luas maka perlu media promosi untuk menjelaskan produk kerajinan ulos	Ada leaflet atau brosur yang menjelaskan produk KUB	Leaflet tersebar di outlet wisata, toko-toko aksesoris, maupun hotel dan villa	KUB Harunnguan	JICA, KUB Harunnguan	Diskoperindag Samsir, Dinas Pariwisata Samsir	February-March 2015
IV Faktor Dukungan								
1	Pendirian KUB IKM Tenun Fashion	Ada nya wadah organisasi pengrajin dimana ada AD/ ART yang mengikat pengrajin untuk lebih serius mengembangkan tenun.	Berdirinya satu koperasi usaha bersama sentra tenun motif ulos samsir binaan Diskoperindag	KUB mampu meningkatkan jumlah produksi kain tenun dan produk kerajinan lainnya	Pengrajin tenun ATBM, penjahit	Diskoperindag Samsir (Ada Anggaran)	Diskoperindag Samsir	Jun 2014-Mar 2015
2	Penguatan kelompok IKM tenun tentang Manajemen bisnis	Perlunya penguatan kapasitas pengrajin sebagai organisasi KUB yang baru berdiri dalam melakukan manajemen bisnis sehingga skill dan pengetahuan bertambah di pengrajin demikian juga pedagang	Ketua kelompok mampu berperan menjadi manager bisnis bagi kelompok	Terjadinya seminar atau lokakarya manajemen bisnis kepada 10 orang pengrajin ATBM dan 20 pedagang	KUB Harunnguan	Diskoperindag Samsir, PUPUK, Ditjen IKM, JICA, CU Dame (Ada Anggaran)	Shindanshi dari Disperindag propinsi, TPL dari Diskoperindag Samsir	Nov 2014- Dec 2015
3	Penumbuhan komunitas industri kreatif Samsir	Berkaitan dengan desa wisata dan peningkatan wisata di daerah samsir, perlu meningkatkan kegiatan industri kreatif tenun dan diversifikasi tenun ulos di desa Lumban Suhi suhi sebagai sentra dan asal muasal tenun di samsir	Adanya Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan penumbuhan industri kreatif selain tenun seperti pembuatan scarf, tas, aksesoris lainnya yang berasal dari tenun gedokan	Kegiatan industri kreatif berjalan dinamis dan menghasilkan sumber pendapatan bagi masyarakat Desa Lumban Suhi suhi	Pengrajin, pedagang	Dinas Parnsibud Samsir (Anggaran diharapkan dari Dinas Parnsibud Samsir)	Dinas Koperindag Samsir	Jun-Okt 2015
4	Penetapan regulasi tentang pengadaan bahan dan jasa pemerintah untuk penggunaan tenun motif ulos sebagai atribut pemkab samsir	Memulai pengenalan sosialisasi pengganti batik dengan memakai product tenun lokal sebagai media promosi di kalangan PNS kab samsir	Regulasi (perbup, surat edaran, dll) yang dibuat oleh Pemkab mengenai penggunaan pakaian motif tenun ulos	Perbup diterima baik oleh pegawai negeri sipil Samsir dimulainya dari ES 2 untuk penggunaan seragam PNS	Pengrajin ATBM/gedokan, KUB Harunnguan	Bupati Samsir	Pemda Samsir	Jan-Feb 2015

RENCANA AKSI Pengembangan IKM Komponen Kapal di Kabupaten Tegal (Local Industry Action Plan for Ship-part Industry, Tegal)

Tantangan Aksi

Sertifikasi produk komponen untuk kapal klas BKI untuk 10 produk IKM logam Komponen Kapal untuk pasar galangan Kapal Indonesia

IKM Sasaran

30 IKM Komponen Kapal (Koperasi Mandiri Sejahtera) Kabupaten Tegal

Periode

Juli 2013 sampai dengan Oktober 2015

Aspek	Tujuan Umum	Kegiatan Dukungan			Penanggung Jawab	Sumber Dana (skema/ program)	Periode (bulan/ tahun)
		Judul	Isi	Sasaran Dukungan			
Bahan Baku	Pengembangan dan standardisasi bahan baku	Penelitian bahan dasar scrap menjadi bahan standar	Penelitian pengembangan bahan baku scrap	IKM yang menggunakan bahan baku non ferro	Disperindag Tegal	Disperindag Tegal	Jul. - Sep. 2014 2015 (dilanjut)
Produksi	Peningkatan produksi, dan pencapaian sertifikasi BKI untuk beberapa komponen kapal	Fasilitasi mesin produksi	Fasilitasi mesin produksi (mesin lahe 6m)	Koperasi Mandiri Sejahtera	Disperindag Tegal	Ditjen PPI	2015
		Bimbingan teknis penerapan 3S	Perbaiki lingkungan kerja untuk peningkatan produktivitas IKM melalui bimbingan penerapan 3S	12 IKM	Disperindag Tegal	Disperindag Tegal, SMIDeP	Okt. 2013 - Apr. 2015
		Dukungan sertifikasi BKI untuk beberapa komponen kapal	a. Penyusunan dokumen sistem mutu (proses produksi komponen kapal sasaran)	30 IKM	Disperindag Propinsi Jawa Tengah	BKI, Ditjen IUBTT, Ditjen IKM dan Disperindag Propinsi Jawa Tengah	Mar. - Apr. 2014
			b. Workshop drawing dan pendampingan drawing komponen kapal untuk sertifikasi BKI	30 IKM	Disperindag Tegal, Ditjen IUBTT	Ditjen IUBTT	April 2014 2015 (dilanjut)
			c. Pengisian dokumen sistem mutu dan pendampingan pembuatan dokumen tersebut	IKM-IKM yang membuat komponen prototipe	Disperindag Propinsi Jawa Tengah	BKI, Ditjen IUBTT, Ditjen IKM dan Disperindag Propinsi Jawa Tengah	Mei 2014 2015 (dilanjut)
			c. Pembuatan prototipe komponen kapal untuk sertifikasi	IKM-IKM yang membuat komponen prototipe	Disperindag Tegal, Ditjen IUBTT, SMIDeP	Ditjen IUBTT, BKI, SMIDeP	Mei - Sep 2014 2015 (dilanjut)
		d. Pengujian kinerja dan materi komponent kapal sasaran (10 produk for sertifikasi BKI).	IKM-IKM yang membuat komponen prototipe	Disperindag Tegal, Dinperindag Provinsi Ditjen IUBTT, JICA	Dinperindag Prov, Ditjen IUBTT, BKI	Mei - Okt. 2014 2015 (dilanjut)	
		Peningkatan sarana produksi	Fasilitasi dapur pengecoran dan termocopel produksi	Koperasi Mandiri Sejahtera	Disperindag Tegal	Disperindag Tegal	2015
Pemasaran	Pengembangan akses pasar	Studi-banding ke BKI dan galangan kapal	Studi-banding ke BKI dan 3 galangan kapal di Jakarta	Koperasi Mandiri Sejahtera, Koperasi RRT	Disperindag Tegal	Dinperindag Provinsi, JICA	Okt. 2013 2015
		Studi-banding dan temu bisnis ke galangan kapal	Studi-banding dan temu bisnis ke galangan kapal/ asosiasi galangan kapal	IKM-IKM yang membuat komponen prototipe	Disperindag Tegal	Disperindag Tegal	2015

Aspek	Tujuan Umum	Kegiatan Dukungan			Penanggung Jawab	Sumber Dana (skema/ program)	Periode (bulan/ tahun)
		Judul	Isi	Sasaran Dukungan			
Faktor Dukungan							
Kelembagaan							
Sumber Daya Manusia (SDM)	Pengembangan SDM keterampilan pengrajin logam	Pelatihan teknologi pengecoran (2 kali)	Pelatihan pengecoran non ferro	20 IKM komponen logam	Dinperindag Provinsi	Dinperindag Provinsi	Sep. 2013, Dec 2013
		Pelatihan teknologi pengelasan	Pelatihan pengelasan non ferro	20 IKM komponen logam	Ditjen IUBTT	Ditjen IUBTT	Sep. 2013
		Pelatihan die&mould	Pelatihan die&mould	IKM komponen logam	Disperindag Tegal	Disperindag Tegal	Okt. - Des. 2014 2015 (dlanjut)
Keuangan	Penguatan akses keuangan dan manajemen	Temu bisnis tentang produk/ layanan keuangan KospinJasa	Pengenalan produk/ layanan keuangan KospinJasa, dan konsultasi langsung ttg. masalah keuangan	IKM komponen logam	Disperindag Tegal, BI Tegal, KospinJasa, JICA	Disperindag Tegal, KospinJasa, JICA	Des. 2013
		Pelatihan manajemen keuangan	Pelatihan pembukuan dan manajemen kas (cash-flow) usaha	IKM komponen logam	Disperindag Tegal, YDBA-LPB, JICA, KospinJasa	Disperindag Tegal, YDBA-LPB, JICA	Apr. 2014
Infrastruktur	Penguatan UPTD laboratorium pengujian materi	Fasilitasi asesmen akreditasi KAN	Asesmen akreditasi komite akreditasi nasional	UPTD Labo Disperindag Tegal	Disperindag Tegal	Disperindag Tegal	Jan. - Mar. 2014
		Fasilitasi alat lab uji material/ komposisi (Al=Mg)	Bantuan alat pengujian komposisi Al-Mg	UPTD Labo Disperindag Tegal	Ditjen IKM (Wilayah II)	Ditjen IKM (Wilayah II)	Sep. 2014 Apr.- Jun. 2015

RENCANA AKSI Pengembangan IKM Pengolahan Aloe vera di Kota Pontianak (*Local Industry Action Plan for Aloe Processing Industry, Pontianak*)

Tantangan Aksi IKM aloe vera dapat memproduksi produk olahan Aloe vera yang berdaya saing di pasar modern dengan fokus produk minuman
 IKM Sasaran 21 IKM
 Periode January 2015~2 tahun

Ver. 1_18/5/2015

Kegiatan				Penanggung Jawab	Sumber Dana (skema/ program)	Periode
Judul	Isi	Tujuan	Sasaran			
Bahan Baku/ Pasokan Bahan Baku						
Dukungan tenaga penyuluh lapangan bagi petani	Pendampingan para petani aloe vera	Menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sikap, dan motivasi petani terhadap kegiatan usaha tani yang dilakukan	Petani aloe vera	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemerintah Kota Pontianak	APBD Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemerintah Kota Pontianak	2015
Sosialisasi Budidaya aloe vera	Pemberian materi terkait dengan cara melakukan penanaman yang baik, seperti: GAP		Kelompok petani aloe vera	Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Kalbar	APBN Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	2015
Sekolah lapang aloe vera	Pemberian materi terkait dengan cara melakukan penanaman yang baik		1 kelompok petani (15-20 orang petani)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar	APBD Dispan Prov. Kalbar	2015
Pembinaan Petani Aloe vera	Pengembangan lahan aloe vera di lahan binaan	Optimalisasi lahan terhadap peningkatan kapasitas produksi dengan penggunaan teknologi tepat guna	IKM binaan yang memiliki lahan pribadi	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	APBN Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	2015
Pelatihan manajemen produksi dalam pengembangan aloe vera	Pemberian materi terkait dengan alur manajemen produksi yang baik	Agar dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai manajemen produksi yang baik	Kelompok petani aloe vera	Dinas Koperasi & UKM Prov. Kalbar	APBN Dinas Koperasi & UKM Prov. Kalbar	2015
Proses Produksi						
Fasilitasi pertemuan antara pihak IKM dengan Politeknik Negeri Pontianak	Pertemuan antara pihak IKM dengan Politeknik/SMTI Pontianak	1. Untuk mendapatkan teknologi pendukung/kemasan 2. Untuk mendapatkan teknologi pendukung terkait dengan air bersih	Asosiasi IKM aloe vera	Disperindagkop & UKM Kota Pontianak / Disperindag Prov. Kalbar	Tidak menggunakan anggaran	2015
Kunjungan lapangan ke lokasi usaha IKM Olahan Aloe vera	Kunjungan lapangan oleh tim POKJA	Untuk mengetahui kondisi layout produksi IKM minuman aloe vera serta melakukan pengambilan sampel terkait dengan pengujian kualitas produk	5 IKM aloe vera produk minum	POKJA	Tidak menggunakan anggaran	Apr. 2015

Pengujian Kualitas Produk Minuman Aloe vera	Uji produk, air dan kualitas produk (Uji Laboratorium)	Untuk mengetahui kualitas produk IKM, dan diharapkan dengan adanya pengujian tersebut kedepannya pelaku IKM dapat meningkatkan kualitas	5 Kandidat IKM Aloe vera produk minuman	Baristan dan Tim SMIDeP JICA	Dana Tim SMIDeP JICA	Apr. 2015
Pelatihan home packing	Pemberian materi yang berkaitan dengan pengemasan produk, label, dan bahan kemasan	Untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana membuat kemasan yang baik, guna meningkatkan mutu produk	IKM Pengolahan Aloe vera	Disperindagkop & UKM Kota Pontianak	Disperindagkop & UKM Kota Pontianak (APBD)	Mei 2015
Pelayanan Klinik Design Merek Kemasan dan HAKI	Fasilitasi kepada IKM yang terkait dengan desain label/kemasan maupun konsultasi tentang HAKI	Meningkatkan kualitas kemasan produk IKM	IKM Pengolahan Aloe vera	Disperindagkop & UKM Kota Pontianak	Disperindagkop & UKM Kota Pontianak (APBD)	Agustus 2015
Pelatihan penerapan GM	Sosialisasi penerapan GMP	Meningkatkan pengetahuan IKM Aloe vera mengenai standar proses produksi sesuai dengan aspek-aspek GMP	IKM Pengolahan Aloe vera	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar	Mei 2015 (Minggu ke III)
Bimbingan penerapan GMP	Melakukan bimbingan penerapan GMP yang dilakukan oleh tenaga ahli langsung di workshop IKM	IKM menerapkan GMP pada workshopnya.	3 IKM aloe vera produk minuman yang terpilih	Ditjen IKM Wil. I Tim SMIDeP Lembaga sertifikasi GMP/Lembaga terkait	APBN Ditjen-IKM/ Dekon Dana Tim SMIDeP	Apr.-Sep. 2015
Penerapan dan sertifikasi GMP	Fasilitasi sertifikasi GMP	Memperoleh sertifikasi GMP yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi	3 IKM aloe vera produk minuman yang terpilih	Ditjen IKM Wil. I Tim SMIDeP Lembaga sertifikasi GMP/Lembaga terkait	APBN Ditjen-IKM/ Dekon Dana Tim SMIDeP	Okt.-Des. 2015
Pelatihan teknologi tepat guna dalam proses produksi	Pelatihan penggunaan teknologi pendukung produksi yang tepat guna	Untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan alternatif teknologi yang dapat mendukung kegiatan produksi	IKM aloe vera	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	APBN Dinas Koperasi & UKM Prov. Kalbar	2015
Mentoring bisnis	Mediasi antara pihak usaha besar kepada Asosiasi IKM Aloe vera dengan (Bimbingan) bisnis oleh INACO/Sumber Keong/Aloe vera Indonesia	Meningkatkan pemahaman serta untuk mendapatkan masukan langsung dari pelaku usaha yang sudah besar	Asosiasi IKM aloe vera	Disperindagkop & UKM Kota Pontianak/ Disperindag Prov. Kalbar	Tidak menggunakan anggaran	Apr. 2015
Bantuan Peralatan Packaging dan kemasan	Memberikan dukungan bantuan peralatan packaging serta bantuan kemasan	Memberikan dukungan untuk IKM melakukan perubahan kemasan yang lebih baik	3 IKM aloe vera produk minuman yang terpilih	Disperindag Prov. Kalbar	Disperindag Prov. Kalbar (APBD)	2016

Pemasaran/ Promosi						
Kunjungan langsung dan temu bisnis ke pasar/ ke agen, distributor,dll	Belajar kebutuhan dan persyaratan dari pembeli pontesial pada calon pasar sasaran baru (ke Wilayah Jawa, Bogor atau Malang)	Feedback/ komen dari pembeli pontensial pada calon pasar sasaran baru, termasuk kebutuhan, perluan, persyaratan terkait dengan isi/ kemasan produk.	Kerang lebih 5 IKM yang paham konsep kegiatan dan mau mumuju bisnis.	Tim SMIDeP,	Dana Tim SMIDeP/ APBD Disperindag Prov.Kalbar	Feb./ Mar. 2015
Promosi produk aloevera untuk uji konsumen/ pasar melalui pameran	Dartar parmeran terlampir	Meningkatkan brand awarenss konsumen terhadap produk, dan mendapatkan masukan langsung dari konsumen/ visitor	Seluruh IKM (termasuk IKM aloevera)	POKJA	Masing-masing anggota POKJA	2015-2016
Fasilitasi kerjasama pelaku IKM dengan perusahaan besar	Perpanjangan kontrak kerjasama dengan pihak Garuda Indonesia	Memperluas jaringan pemasaran produk olahan aloevera	2 IKM aloevera	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemerintah Kota Pontianak	Biaya ditanggung oleh IKM (Misalnya biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman barang ke Kantor Garuda)	Jun. 2015
Fasilitasi produk secara online	pembuatan website untuk produk	Memperluas Jaringan pemasaran melalui media sosial	Seluruh IKM (termasuk IKM aloevera)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar	APBD Dispertan Prov. Kalbar	Jun. 2015
				Disperindag Prov. Kalbar	APBD Disperindag Prov. Kalbar	
Sumber Daya Manusia						
Bimbingan Teknis Manajemen Usaha	Melakukan pelatihan mengenai dasar-dasar manajemen usaha, pelatihan pembuatan proposal , pemasaran dan kemasan	Untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan pelaku IKM	3 IKM aloevera	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar/ Disperindagkop & UKM Kota Pontianak	APBN Dinas Koperasi & UKM Prov. Kalbar	2015
Aspek Kelembagaan						
Pembentukan asosiasi IKM pengolahan aloevera	Pembentukan dan pendampingan asosiasi	Perkuatan akses informasi, komunikasi dan penguatan organisasi IKM	IKM aloevera	Disperindagkop & UKM Kota Pontianak	APBD Disperindagkop & UKM Kota Pontianak	2014- 2015
Pelatihan tentang perijinan	Fasilitasi pembuatan perijinan untuk IKM yang belum mendaftarkan/memiliki ijin-ijin terkait dengan kegiatan IKM, seperti; PIRT.	IKM mengerti dan sadar tentang kewajiban perijinan	Seluruh IKM (termasuk IKM aloevera)	Disperindagkop & UKM Kota Pontianak	APBD Disperindagkop & UKM Kota Pontianak	2015
Peraturan terkait dengan industri ini						
Dukungan Pemerintah Kota dalam penggunaan produk lokal di Industri Perhotelan Kota Pontianak	Surat Himbauan dari Walikota/Gubernur tentang penguanaan produk IKM/Lokal , termasuk produk Aloevera	Perluasan /peningkatan konsumsi produk lokal terutama produk olahan aloevera di Hotel-hotel Pontianak	IKM Aloevera	Disperindag Kota	Tidak menggunakan anggaran	2015

RENCANA AKSI Pengembangan IKM Sepatu/ Alas Kaki di Kota Mojokerto (Local Industry Action Plan for Footwear Industry, Mojokerto)

Tantangan Aksi Meningkatkan kualitas produk IKM alas kaki yang mampu menembus pasar domestik guna mendukung ikon Mojokerto sebagai Kota Alas Kaki

1. Pengembangan model IKM untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk alas kaki Mojokerto melalui praktek proses produksi yang baik serta pengembangan desain
2. Branding kota Mojokerto sebagai Kota IKM Alas Kaki untuk memperluas pasar produk alas kaki kota Mojokerto

IKM Sasaran Akan diseleksi melalui FGD (target; 5 - 20 IKM sebagai pilot project/ percontohan)

Periode Desember 2014~2 tahun

Kegiatan				Penanggung Jawab	Sumber Dana (skema/ program)	Periode
Judul	Isi	Tujuan	Sasaran			
Bahan Baku/ Pasokan Bahan Baku						
Unit bisnis/lembaga penyedia bahan baku		Menjamin ketersediaan bahan baku berkualitas dengan harga bersaing bagi industri alas kaki kota Mojokerto	IKM alas kaki kota Mojokerto	Diskoperindag Provinsi (perlu konfirmasi) Ditjen IKM	Ditjen IKM	2016
Proses Produksi						
Pendampingan oleh produsen lem untuk peningkatan kualitas pengeleman	Identifikasi produsen lem yang akan diajak berkolaborasi (dengan melakukan survei IKM)	Mengidentifikasi produsen lem berkualitas baik dengan harga bersaing untuk memperbaiki kualitas pengeleman produk alas kaki Mojokerto	IKM yang ditunjuk Produsen lem dgn kualitas baik	APRISINDO BPIPI Diskoperindag Kota	APRISINDO BPIPI	Triwulan I/2015
	Bimbingan teknis pada pengeleman oleh teknisi/ tenaga ahli lem	Memperbaiki cara pengeleman untuk meningkatkan kualitas dengan harga bersaing pada segmen pasar yg dituju	IKM yang ditunjuk	APRISINDO BPIPI (perlu konfirmasi) Diskoperindag Kota	Produsen lem BPIPI (perlu konfirmasi)	Triwulan I/2015
	Melakukan uji laboratorium terhadap hasil proses pengeleman pada produk	Monitoring dan evaluasi daya rekat produk alas kaki yang dihasilkan untuk menjamin peningkatan kualitas pengeleman	IKM yang ditunjuk	BPIPI IKM yg ditunjuk Tim SMIDeP	BPIPI IKM yg ditunjuk Dana Tim SMIDeP	2015~2016
Peningkatan kualitas produk melalui standarisasi produk alas kaki	Sosialisasi standarisasi produk alas kaki (SNI dan ISO 9001)	Pengenalan standar mutu SNI (wajib dan belum wajib) untuk produk alas kaki dan ISO 9001	IKM alas kaki (5 KUB, 30 IKM)	Diskoperindag Kota SDPI Disperindag Provinsi	APBD kota	Triwulan II/ 2015
	Pendampingan SNI alas kaki dan ISO 9001	Penerapan SNI alas kaki/ISO 9001 di IKM yang ditunjuk untuk memperoleh sertifikasi SNI alas kaki tertentu/ISO 9001 (sistem manajemen mutu)	IKM alas kaki yg lolos verifikasi kelayakan SNI/ISO 9001	SDPI Disperindag Provinsi Diskoperindag Kota	APBD Provinsi	Semester II /2015
	Pelatihan teknologi IKM alas kaki	Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi alas kaki dengan menggunakan peralatan yang lebih maju	IKM yg ditunjuk	Diskoperindag Kota	APBD Kota	Triwulan II/ 2015
	Pelatihan grading alas kaki	?	IKM yg ditunjuk	BPIPI Diskoperindag Kota	BPIPI-APBN	2-13 Feb 2015
Pengembangan produk	Pelatihan desain alas kaki	Meningkatkan kemampuan dan pengembangan desain produk alas kaki	IKM yg ditunjuk	Diskoperindag Kota	APBD Kota	2015
	Pelatihan desain alas kaki - 3 seri	Meningkatkan kemampuan dan pengembangan desain produk alas kaki	IKM yg ditunjuk	BPIPI Diskoperindag Kota	BPIPI-APBN	23 Feb-6 Mar 2015 9-20 Mar 2015 4-15 Mei 2015
	Sosialisasi HaKI	Mensosialisasi HAKI kepada IKM sehingga IKM mendapat perlindungan/manfaat dari pendaftaran HAKI	IKM yg ditunjuk	Disperindag Kota BPIPI	APBD Kota APBN Ditjen-IKM/ BPIPI	2015 or 2016
	Fasilitasi HaKI	Penerapan HaKI di IKM alas kaki (registrasi merek, barcode, dll)	IKM yg ditunjuk	Disperindag Provinsi	APBD Provinsi	2015
	Sosialisasi dan Bimtek tentang 3K/3S kepada IKM alas kaki	IKM dapat menerapkan 3K/3S untuk manajemen proses produksi yang baik dan memperbaiki efisiensi produksi	IKM yg ditunjuk	Tim SMIDeP Diskoperindag Kota	Dana Tim SMIDeP	Mar 2015/Apr 2015
	Studi banding ke sentra industri alas kaki	Memperluas wawasan IKM dan dinas terkait mengenai pengembangan sentra alas kaki yang baik (peningkatan mutu, perluasan pasar, perbaikan sistem, kebijakan, lembaga dukungan, dll)	IKM yg ditunjuk Diskoperindag Kota	Diskoperindag Kota Tim SMIDeP	Dana SMIDeP APBD Kota	2015

Judul	Kegiatan			Penanggung Jawab	Sumber Dana (skema/ program)	Periode
	Isi	Tujuan	Sasaran			
Promosi/ Pemasaran						
Promosi "Alas Kaki Kuat" Mojokerto	Pelatihan branding IKM	?	IKM yg ditunjuk	BPIPI Diskoperindag Kota	BPIPI-APBN	4-15 Mei 2015
	Display produk alas kaki unggulan di KPD Jatim	Promosi produk alas kaki unggulan yg diminati jejaring pasar KPD	IKM yg ditunjuk	Disperindag Provinsi Bag. Perdagangan Diskoperindag Kota	APBD Prov.	2015 ~ 2016
	Temu bisnis rutin melalui Kantor Perwakilan Daerah (KPD) dengan calon pembeli	Temu bisnis dengan mitra potensial melalui jaringan pasar KPD Rencana temu bisnis 2015 (Bidang Perdagangan Diskoperindag Kota): 1. Sorong 2. Banjarmasin 3. Kupang	IKM yg ditunjuk	Disperindag Prov. Bag. Perdagangan - Diskoperindag Kota	APBD Prov. APBD Kota	2015 (Triwulan) ~2016
	Temu bisnis antara IKM alas kaki dan calon pembeli	Mempromosikan produk alas kaki Mojokerto bermutu baik serta kerja sama antara IKM dengan buyer, supplier, dan eksportir	IKM yg ditunjuk	APRISINDO Diskoperindag Kota	APBD Kota	2015
	Fasilitasi kerjasama kemitraan diantara IKM dan pihak swasta (siapa??)	Memperluas segmentasi pasar IKM alas kaki Mojokerto	IKM yg ditunjuk	Diskoperindag Kota APRISINDO	APBD Kota	2015
	Promosi melalui website/ media sosial (blog, FB)	Pembuatan facebook fanpage dan twitter untuk mempromosikan produk alas kaki unggulan kota	IKM yg ditunjuk	Univ. Ciputra APRISINDO	Univ. Ciputra APRISINDO	2015~2016
	Partisipasi pada/ promosi melalui pameran/ trade Fair	Promosi produk alas kaki melalui acara pameran sbg berikut; - Pameran Sepatu, Kulit dan Fashion (stand dr APRISINDO, Juni 2015, JCC Jakarta) - Pameran Alas Kaki (Stand dr APRISINDO, Okt 2015, Plaza Kemenperin, Jkt)	IKM yg ditunjuk	Diskoperindag Kota Disperindag Prov. Ditjen-IKM/ BPIPI APRISINDO	APBD Kota APBD Prov. APBN Ditjen-IKM/ Dekon APRISINDO	Triwulan I, II, IV Tahun???
	Penguatan kampung sepatu Mojokerto	Pengembangan kampung sepatu Mojokerto sebagai destinasi bisnis dan wisata	IKM alas kaki Mojokerto	Pemkot Mojokerto - Diskoperindag Kota - Dinas Pariwisata	APBD Kota	2016
	Materi pemasaran & promosi sepatu	Membuat materi promosi sepatu "Mojokerto" (brosur/leaflet, katalog produk, brand identity, product tag)	IKM yg ditunjuk	Univ. Ciputra IKM yg ditunjuk Diskoperindag Kota JICA SMIDeP	JICA SMIDeP	2015
	Pendirian Pusat Informasi/ Promosi (atau Pusat Grosir/ Outlet) Alas Kaki Mojokerto (GMCC?)	Memberikan layanan informasi (database IKM, peta sentra, katalog produk, leaflet) kepada pembeli dan pengunjung ke sentra Mojokerto	IKM yg ditunjuk	Pemkot Disperindag Kota Tim SMIDeP (utk alat promosi)	APBD Kota Dana Tim SMIDeP	???
Branding Kota sebagai kota alas kaki	Sosialisasi Mojokerto sebagai kota alas kaki kepada IKM dan masyarakat	Mempromosikan "Alas Kaki Kuat" Mojokerto	IKM alas kaki dan masyarakat terkait	POKJA	APBD Kota	Semester II /2015
	Launching "Alas Kaki Kuat" Kota Mojokerto	?	Dito	Pemkot POKJA (Diskoperidag Kota) Ditjen IKM Tim SMIDeP	APBD Kota Ditjen IKM Tim SMIDeP	Jul./ Agu. 2015
	Pendirian tugu sepatu/ alas kaki di Kota Mojokerto	Memperkuat branding kota Mojokerto sebagai kota alas kaki	Dito	POKJA	APBD Kota	Triwulan III 2015

Kegiatan				Penanggung Jawab	Sumber Dana (skema/ program)	Periode
Judul	Isi	Tujuan	Sasaran			
Faktor Dukungan						
Aspek Kelembagaan						
Persiapan pembentukan koperasi alas kaki Mojokerto	Mempersiapkan pembentukan Koperasi untuk pemasaran produk alas kaki	Membentuk koperasi khusus pemasaran	IKM yang ditunjuk	Diskoperindag Kota	APBD Kota	Jan.-Feb. 2015??
Melengkapi database IKM	Mengumpulkan data IKM alas kaki melalui berbagai metode FGD, observasi dan wawancara	Menbuat database IKM alas kaki yang bisa diakseskan oleh pembeli dan pengunjung ke sentra	IKM alas kaki	Diskoperindag Kota	APBD Kota	Des-Jan 2014
Akses Keuangan/ Manajemen Usaha						
Optimalisasi KUB sentra alas kaki	Pelatihan manajemen dan kewirausahaan	Memperkuat kelembagaan dan kewirausahaan	KUB yang ditunjuk	Diskoperindag Kota Tim SMIDeP	APBD Kota	2015
	Pelatihan manajemen IKM alas kaki - 2 seri	?	IKM yang ditunjuk	BPIPI Diskoperindag Kota	BPIPI	6-17 Apr 2015 18-29 Mei 2015
Permodalan pada IKM alas kaki	Bantuan modal bergulir pada IKM alas kaki	Mempermudah akses permodalan dalam upaya meningkatkan pengembangan usaha IKM alas kaki	IKM alas kaki	Diskoperindag Kota	APBD Kota	2015
Sumber Daya Manusia						
Tenaga kerja terampil untuk industri alas kaki	Pelatihan keterampilan khusus untuk industri alas kaki, seperti jahit upper, sol	Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di IKM alas kaki Mojokerto serta mengurangi jumlah pengangguran	Masyarakat usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan	Disnaker Kota Disperindag Kota	APBD Kota (Disnaker)	2015
	Pelatihan teknologi acuan alas kaki	?	IKM / pengrajin yg ditunjuk atau kandidat yang sesuai	BPIPI Diskoperindag Kota Mojokerto	BPIPI	3 - 14 Juni 2014
Peraturan terkait dengan industri ini						
Regulasi penggunaan sepatu Mojokerto oleh Pemkot (Peraturan Walikota, Surat Edaran, dll)	Penetapan regulasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk penggunaan sepatu Mojokerto di lingkungan instansi pemerintahan dan sekolah kota Mojokerto	Mensosialisasikan pemakaian sepatu Mojokerto di lembaga pemerintahan dan sekolah sebagai media promosi	Instansi pemerintah dan sekolah di kota Mojokerto	POKJA (Diskoperindag Kota) Pemkot Mojokerto	APBD Kota	Semester II /2015
Surat Penetapan Mojokerto sebagai Kota Alas Kaki	Penetapan Mojokerto sebagai Kota Alas Kaki oleh Walikota Surat pemberitahuan kepada Gubernur (Jatim) dan Kementerian terkait (Kemenperin, Kemendag, KemenKop&UMKM)	Mensosialisasikan kota Mojokerto sebagai kota alas kaki kepada instansi pemerintahan terkait	Instansi pemerintah terkait	POKJA (Diskoperindag Kota) Pemkot Mojokerto	APBD Kota	Semester II /2015

Member List of KSU HARUNGGUAN (Cooperative) for Ulos Fashion Products

Head of Cooperative Ms. Merry Suryani Tel: 0821-6881-8288
 Address of Cooperative Jl. Lektol Sugiopranoto, Desa Pardomuan 1, Kec. Pangururan, Kab. Samosir

The existing members from the former Joint-Business Group (KUB)

No	Name	Position	Address	Sex	Job
1	Yuti Pasaribu		Simbolon	F	TPL
2	Palipi Naibaho		Huta Namora	M	Penjahit
3	Mangabing Simbolon		Huta Namora	M	Penjahit
4	Melwandi Manullang		Huta Namora	M	Penjahit
5	Wiwi Simbolon		Pangururan	F	Penjahit
6	Jalebar Sitanggang		Pangururan	M	Honor Diskoperindag
7	Rosalin Manullang		Pintu Sona	F	Penjahit
8	Rumania Malau		Pangururan	F	Penjahit
9	Merry Suryani	Kepala (head)	Pangururan	F	Pengusaha
10	Lince Veronika		Pangururan	F	Konsultan 0821-6834-5798
11	Winda Simbolon		Pangururan	F	Penjahit
12	Lawessani Limbong		Pangururan	F	Pengrajin
13	Benget Sianturi		Lumban Suhisuhi	M	Penjahit
14	Frenky Sihombing		Lumban Suhisuhi	M	Pengrajin
15	Wantimer Simbolon		Lumban Suhisuhi	F	Pengrajin tenun
16	Dewi Sagala		Lumban Suhisuhi	F	Pengrajin tenun
17	Hotmaida Silalahi		Pangururan	F	Pengrajin
18	Denny Simbolon		Pangururan	F	Pengrajin
19	Fransiska Tamba		Pangururan	F	Penjahit
20	Surya Nengsi (Jovito)		Pangururan	F	Penjahit

Newly joined members after Cooperative (KSU)

No	Name	Position	Address	Sex	Job
21	Supriadi Sihombing		Parbaba	M	Penjahit
22	Julina Sitinjak		Pangururan	F	Penjahit
23	Junita Sibarani		Pangururan	F	Penjahit
24	H.Situngkir		Situngkir	M	Penjahit
25	Krimson Malau		Pangururan	M	Penjahit
26	Resti Sidebang		Pangururan	F	Penjahit
27	Murni Sitinjak		Pangururan	F	Penjahit
28	Sariani Hasugian		Parbaba	F	Penjahit
29	Martha Simalango		Pangururan	F	TPL
30	Putri Tamba		Pangururan	F	TPL
31	Deliana Malau		Pangururan	F	Penjahit
32	Lampita Sinaga		Situngkir	F	Penjahit
33	Olga Silalahi	Secretariat	Situngkir	F	Staf Diskoperindag
34	Anna Sitanggang	Secretariat	Parbaba	F	Honor Diskoperindag

Daftar IKM Komponen Kapal Kabupaten Tegal (List of the initial target SMI's for Ship-part Industry)

No	Nama Perusahaan	Nama Pemilik	Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Produk	Tenaga Kerja	Pasar
1	Setia Kawan		100,000	1,020,000	Jendela Kotak Jendela Bulat Jendela Mati Jendela Hidup Pintu Kedap Air Handel Pintu Soket	10	After Market Industri Galangan Kapal
2	Rizky Saputra		100,000	1,140,000	Pompa Keong 80 Pompa Keong STA 3000	8	After Market
3	Utama Rajin Teknik		75,000	540,000	Baut Kupu kupu Handel Pintu Anoda Zink	5	After Market
4	Karya Utama Logam		100,000	1,080,000	Baut Kupu Kupu Nepel	7	After Market
5	Iqro Logam		100,000	720,000	Baling baling kapal Kili kili Baut kupu kupu	6	After Market
6	Rojiki		50,000	300,000	Kipas Pompa PC	5	After Market Industri Galangan Kapal
7	Karya Manunggal		65,000	420,000	Jendela Kapal Bulat Jendela Kapal Kotak	5	After Market
8	Karya Mulya		30,000	180,000	Stir Kapal	5	After Market
9	Anugrah Teknik		65,000	540,000	Baling baling Kapal Bushing Koker Baut kupu kupu	5	After Market
10	Putra Teknik		100,000	912,000	Dudukan Stir kapal Puller Kerekkan	8	After Market
11	Bintang Rejeki		70,000	180,000	Pompa Keong PC Pompa Keong STA Jangkar Kapak	5	After Market
12	Risna Jaya		100,000	720,000	Kopel Mesin kapal Pully	8	After Market
14	Langgan Menatari Jaya		150,000	600,000	Pompa Keong PC Pompa keong STA	8	After Market
15	Rizky Baru		70,000	300,000	AS Pompa PC As Pompa STA Pully	5	After Market
16	Logam Cor		95,000	780,000	Pompa Keong STA Pompa keong PC	6	After Market
17	Incor		85,000	780,000	as Pompa PC Bushing Koker Baling baling kapal	7	After Market Industri Galangan Kapal
18	H.Ony		20,000	240,000	Pompa Keong PC Baling Baling Kapal Pancing	6	After Market Industri Galangan Kapal
19	Kamali		30,000	240,000	as Pompa PC Bushing Koker As Kapal Pompa	7	After Market Industri Galangan Kapal
20	Hasil Karya Putra		100,000	900,000	Jendela kapal Handel Pintu Tempat lampu	6	After Market Industri Galangan Kapal
21	Sani		100,000	840,000	Jendela kapal Bushing Koker Tambatan	6	After Market Industri Galangan Kapal
22	Nadin		90,000	540,000	Jendela kapal Kotak Jendela kapal Bulat Tempat Lampu	6	After Market Industri Galangan Kapal
23	Ali Langgen		100,000	1,020,000	Jendela Kapal Bulat Jendela Kapal Kotak	7	After Market Industri Galangan Kapal
24	Lulu Putra Mandiri		45,000	240,000	Jendela kapal Handel Pintu Tempat Lamu Bushing Koker	5	After Market Industri Galangan Kapal
25	Haira		95,000	480,000	Jendela kapal Pelendes Dudukan Lampu Kapal	6	After Market Industri Galangan Kapal
26	Logam Bahari		50,000	360,000	Baling baling kapal Kili kili	5	After Market Industri Galangan Kapal
27	Utama Jaya		50,000	240,000	Baling Baling kapal Pelendes	5	After Market
28	Husni		50,000	240,000	Baling baling Kapal Kili kili	4	After Market
29	Putra Eka Jaya		50,000	300,000	Baling Baling Kapal Pompa Keong PC	5	After Market

Daftar Anggota APECC (Member list of Association for Chocolate Producers)

No	Nama Usaha	Merek Produk	Pemilik	Alamat	Thn mulai usaha	Tenaga Kerja	Jenis Produk Olahan	Tempat Penjualan	Penjualan per Bulan (Rata Rata)	PIRT	Halal
1	Sa'adah	Banua Cokelat		Kota Palu	2010	4 Tenaga kerja tetap 2, pemilik dan suaminya	cokelat bar, cokelat candy, cokelat praline, cokelat paket dll.	1. Outlet milik sendiri 2. Toko oleh oleh "Sri Rejeki" 3. Toko oleh oleh "Garuda Jaya" 4. Toko oleh oleh "Raja Bawang" 5. Toko oleh oleh "Mbok Sri" 6. Toko Oleh Oleh " Sumber Rezeki " 7. Toko Oleh Oleh " Salhan " 8. Toko Oleh Oleh "Diverso" 9. Toko Oleh Oleh " Zahra" 10. Toko Oleh Oleh "Sofie" 11. Toko Oleh Oleh "CLP" 12. Swissbell Hotel (café) *sdh tdk lagi 13. Jualan di pantai *sdh tidak lagi 14. Pameran	rp. 7.2 juta	○	○
2	Rapoviaka Simple	Rapoviaka Simple		Kota Palu	2010	4 Tenaga kerja tetap 2, 1 orang dipanggil sesuai kebutuhan dan pemilik	praline, semprong cokelat, cokelat bar	1. Penjualan Langsung 2. Toko oleh oleh "Salhan" 3. Toko oleh oleh "Diana" 4. Toko Oleh Oleh "Rhema" 5. Toko Oleh Oleh "Diverso" 6. Toko Oleh Oleh "Sri Rejeki" 7. Toko Oleh Oleh "Sibayak" Balikpapan 8. Pameran	rp. 5.6 juta	○	○
3	Maryam's Family	Tadulako Cokelat		Kota Palu	2012	3 Tenaga kerja tetap 2 dan pemilik	cokelat bar, cokelat candy, cokelat praline, cokelat kurma, brownies	1. Penjualan Langsung 2. Toko oleh oleh "Salhan" 3. Toko oleh oleh "Diana" 4. Toko Oleh Oleh "Rhema" 5. Toko Oleh Oleh "Diverso" 6. Toko Oleh Oleh "Sri Rejeki" 7. Toko Oleh Oleh "Sibayak" Balikpapan 8. Sumber Rejeki 9. Pameran	rp. 2 juta	○	○
4	Moon's Chocolate	Moon's Chocolate		Kota Palu	2012	2 1 orang dipanggil sesuai kebutuhan dan pemilik	selai cokelat, cokelat bar, cokelat praline, cokelat lolypop, cokelat edible	1. Penjualan langsung 2. Toko Oleh Oleh "Salhan" 3. Toko Oleh Oleh "Sibayak" Balikpapan 4. Pameran	rp. 1.1 juta	○	○
5	Sakulati Cokelat	Sakulati Cokelat		Kab. Sigi	2012	2 Tenaga kerja tetap 1 dan pemilik	brownies, cokelat bar, cokelat praline, cokelat lolypop, cokelat sagu, cokelat crispy, cokelat kurma, cokelat marbel, minuman cokelat	1. Kios/ Kedai (4) 2. SD (1) 3. Swalayan "Galeri Sigi" 4. Toko Oleh Oleh "Raja Bawang" 5. Toko Oleh Oleh "Rhema" 6. Penjualan langsung 7. Pameran	rp. 1.8 juta	○	○
6	Wanita Mandiri	Aisyah Cokelat		Kota Palu	2012	2 Tenaga kerja tetap 1 dan pemilik	lolypop, cokelat candy	1. SD 2. TK 3. Kios	rp. 4 juta	○	○
7	Al Ikhsan	Cokelat Halwa		Kota Palu	2013	1 Pemilik	brownies, cokelat bar, cokelat praline, cokelat lolypop, kukiw cokelat, cokelat marbel, cokelat kurma	1. SD, SMK 2. Penjualan langsung 3. Pameran	rp. 1.4 juta	○	○
8	Rumah roti dan kue Mangunsarkoro	Mangun Cokelat		Kota Palu	2013	1 Pemilik (memakai tenaga kerja pada usaha roti sesuai kebutuhan dan tenaga dari Sa'adah)	Roti cokelat, cokelat bar, cokelat praline, cokelat lolypop, minuman cokelat jahe, kue kering	1. Pameran 2. SMP 3. Swalayan (Gorontalo) 4. Koperasi 5. Penjualan langsung	rp. 2.9 juta (diluar penjualan roti)	○	○
9	Chocolate craft	Chocolate craft		Kota Palu	2013	1 Pemilik	brownies, puding cokelat, cokelat praline, lolypop	1. Toko Oleh Oleh "Rhema" 2. Toko Oleh Oleh "Diverso" 3. Sekolah 4. Pameran 5. Penjualan langsung	rp. 600 rb	○	○
10	Choco-Pal	Choco-Pal		Kota Palu	2013	1 Pemilik	cokelat praline	n/a	n/a	○	○
11	Kaili Cokelat	Kaili Cokelat		Kota Palu	2014			1. Outlet Banua Cokelat	n/a		
12	Merpati Cokelat	Merpati Cokelat		Kota Palu	2014			n/a	n/a		

Daftar Produsen Meubel Rotan di Kota Palu (Target Producers for Rattan Furniture Industry)

No	Nama IKM	Pemimpin	Tahun Berdiri	Jenis Produk	Jumlah Tenaga Kerja	Penjualan 2014 (Natal 2013, Lebaran 2014)	Asal Pembeli	Kelompok Pembeli	Perubahan yang terjadi	Telepon	Sumber Bahan Baku
1	CV. Bone Layana Indah		2004	kursi meja tamu, kursi meja makan, kursi meja teras, kursi santai, sketsel, piring, tutup saji, dll	6 orang tenaga kerja tetap termasuk pemilik	Bulan biasa : 5 jt/ bln Lebaran: 50 jt	Palu, Morowali, Parigi, Poso, Makassar	Pribadi, Instansi Pemda (Perkebunan Prov., Pendidikan/ Kebudayaan Kota)	Penjualan tahun 2014 menurun, tenaga kerja tetap berproduksi sehingga ada tumpukan stok yang siap untuk finishing.	085341367728	Pantai Timur Jaya
2	Istana Seni Rupa		2005	kursi meja tamu, kursi meja makan, kursi meja teras, kursi santai, sketsel, piring, tutup saji, dll	1 orang (diri sendiri) Panggil tenaga jika ada orderan	Bulan biasa : Rp 6 juta / bulan (5 set kursi@Rp 1.200.000 - 1,500.000) Lebaran : Rp 37.600.000 (8 set kursi@1.200.000 dan 7 set kursi@Rp 4.000.000)	Palu dan sekitarnya, Makassar	Pribadi, Instansi / lembaga (PIRNAS)	Penurunan penjualan, disebabkan tingkat kesibukan pemilik sangat tinggi (pemilik memiliki profesi sebagai guru)	081354561140	Pantai Timur Jaya
3	Bamba Rotan		2007	kursi meja tamu, kursi meja makan, kursi meja teras, kursi santai	1 orang (diri sendiri) Panggil tenaga jika ada orderan	Bulan biasa : Rp 5 juta/ bln (2 - 5 set@Rp 1.200.000 - 1,500.000),	Palu, Palopo	Pribadi, Instansi Pemda (Pariwisata), Bandara	Penurunan penjualan, disebabkan tingkat kesibukan pemilik sangat tinggi (pemilik memiliki kesibukan sebagai staff di PIRNAS)	085241224660	Pantai Timur Jaya
4	Sumber Rotan Tohti		2005	kursi meja tamu, kursi meja makan, kursi meja teras, kursi santai, sketsel, piring, tutup saji, dll	9 orang tenaga kerja tetap termasuk pemilik	Bulan biasa : 5-10 jt/ bln Natal 2013: 135 jt (30 set@4.5 jt) Lebaran: 180 jt (40 set@4.5 jt)	Palu dan sekitarnya, Tanah Toraja	Pribadi, Dinas, Hotel, cafe	Penjualan tahun 2014 sangat meningkat.	081245186613	Pantai Timur Jaya ?@Tawaeli
5	Tora Tora Rotan		1973	kursi meja tamu, kursi meja makan, kursi meja teras, kursi santai, sketsel, piring, tutup saji, dll	10 orang 4 orang tenaga kerja tetap, 6 orang tidak tetap (tidak termasuk pemilik/ pemilik tidak terlibat dalam proses produksi)	Bulan biasa : 5-10 jt/ bln Natal 2013: 40 jt Lebaran: 60 jt	Palu dan sekitarnya	Pribadi	Penjualan tahun 2014 dalam kondisi stabil, kecuali orderan natal tahun ini menurun, kemungkinan disebabkan oleh kenaikan BBM (menurut IKM).	082187696831	Pantai Timur Jaya CV Budi Mulia
6	Indra Jaya Rotan		2008	kursi meja tamu, kursi meja makan, kursi meja teras, kursi santai	4 orang tenaga kerja tetap termasuk pemilik (namun sekarang bulan desember 2014 tenaga kerja selain pemilik bekerja di sentra ujuna)	Bulan biasa : 12 jt/ bln Lebaran: 60 jt (50 set)	Palu dan sekitarnya	Pribadi	Penurunan penjualan, disebabkan tingkat kesibukan pemilik sangat tinggi (memiliki aktifitas di luar kota)	082193778583	
7	Meubel Rizki		1990	kursi meja makan, , kursi meja tamu, kursi meja teras, meubel kayu	5 orang tenaga kerja tetap termasuk pemilik	Bulan biasa : 10 jt/ bln Lebaran: 30 jt	Palu, Tanah Toraja, Mamuju	Pribadi, Instansi/ lembaga (PIRNAS)	Penjualan khususnya produk rotan cukup meningkat (pemilik memiliki usaha mebel kayu juga), disebabkan keaktifan IKM dalam mengikuti pameran lokal.	085241398029	PT Verko UD Fajar Baru

Daftar Produsen Meubel Rotan di Kota Palu (Non-target Producers)

No	Nama IKM	Pemimpin	Tahun Berdiri	Jenis Produk	Jumlah Tenaga Kerja	Penjualan	Asal Pembeli	Kelompok Pembeli	Keterangan	TELEPON / HP	Sumber Bahan Baku
1	Kaili Jaya		1979	kursi meja tamu, kursi meja makan, kursi meja teras, kursi santai, sketsel, piring, tutup saji	3 orang tenaga kerja tetap	Bulan biasa : 2-5 jt/ bln Lebaran: 20 jt	Palu dan sekitarnya	Pribadi		085394353549	Pantai Timur Jaya
2	Subur Rotan 1&2		1986	kursi meja tamu, kursi meja makan, kursi meja teras, kursi santai, sketsel, piring, tutup saji, dll	12 orang tenaga kerja tetap	Bulan biasa : 20 jt/ bln Lebaran: 200 jt (100 set)	Palu dan sekitarnya	Pribadi		082195991003	Pantai Timur Jaya
3	Irma Jaya Rotan		1981	kursi meja tamu, kursi meja makan, kursi meja teras, kursi santai, sketsel, piring, tutup saji, dll	2 orang tenaga kerja tetap	Bulan biasa : 2-5 jt/ bln Lebaran: 15 jt	Palu dan sekitarnya	Pribadi		085241182018	Pantai Timur Jaya
4	Palunesia		2007	kursi meja tamu, kursi meja makan, kursi meja teras, kursi santai, sketsel, piring, tutup saji, dll	4 orang		Palu, Manado, Poso, Toli Toli, Ampana, Morowali	Pribadi		081354582708	Pantai Timur Jaya
5	Eka Bintang 2		1987	kurungan ayam, ayunan bayi, meubel (jika ada orderan)	2 orang tenaga kerja tetap	5-6 jt/ bln	Palu dan sekitarnya	Pribadi			UD Fajar Baru
6	Bina Sampesuvu		2000	Kerajinan Parsel Buah	5 orang tenaga kerja tidak tetap	400 rb/ bln	Palu	Pribadi		085241051848	

No	Nama IKM	Pemimpin	Tahun Berdiri	Jenis Produk	Jumlah Tenaga Kerja	Penjualan 2014 (Natal 2013, Lebaran 2014)	Asal Pembeli	Kelompok Pembeli	Perubahan yang terjadi	Telepon	Sumber Bahan Baku
8	Kriya Rotan		2008	tempat sampah dan piring rotan	1 orang					085228923263	
9	Prima Rotan		2004	Kerajinan (piring, lampu, tudung saji, dll)	1 orang	300 rb / bln	Palu	Pribadi	Guru SMK 5	085241355223	Pantai Timur Jaya
10	Meubel Rotan Fatikh			Keranjang Buah	1 orang	1,5 jt/ bln	Palu, Poso	Pribadi (penjual buah)		081354529344	
13	Taipa Rotan 1		2013	kursi meja tamu, kursi meja teras	4 orang						
11	Meubel Rotan Very		2009						Untuk sementara, produksi kurang aktif (perlu konfirmasi).	085298730704	
12	Astri Lauro		2006	kursi meja tamu, kursi meja makan, kursi meja teras, kursi santai	1 orang				Sekarang menjadi tenaga di IKM Palunesia, kurang aktif melakukan produksi di tempat sendiri.	081341460513	
14	Bunga Talise								Produksi di tempat sendiri kurang aktif, IKM memiliki bekerja bersama dgn IKM Bamba Rattan.	085241362147	
15	Hasta Roviega Rotan		2010	kursi meja tamu, Kursi meja Teras	1 orang				Produksi kurang aktif, pelaku IKM memiliki pekerjaan lain.	081944593568	
16	Taipa Rotan 2								Sudah tutup. Pelaku IKM bekerja pada IKM lain sebagai tenaga kerja.		
17	Eka Bintang 2								Sekarang tinggal meubel kayu.	085341299177	
18	UPT Batik & Rotan								Sekarang fokus pada industri batik.	081354276658	
19	Kopinkra								Untuk sementara belum menjual produk.	081341216787	
20	Rotan Baiya								Sekarang tidak ada produksi/ tenaga kerja.		
21	Meubel Rotan Jagat		2012	kerajinan	1 orang				Produksi belum rutin dilakukan, hasil produksi juga belum dapat dipasarkan.	081341442000	

Daftar IKM Pengolahan Aloe vera Pontianak (List of the initial target SMI for Aloe Processing Industry)

No	Nama Merek	Alamat	Pemilik	Izin Usaha	No.Telepon	Jenis Produk	Pasar			Tenaga Kerja	Produksi (harian)
							Lokal	Domestik	Mancanegara		
1	Barokah			PIRT, Halal, Layak Sehat	0852-5046-3078	Dodol, Manisan, Kerupuk	Terminal Agrobisnis, PSP, Mitra-anda, HM, CS, Kaisar	Surabaya, Semarang		7	30-40 kg
2	I Sun Vera			Haki, PIRT, Halal	0813-5208-2882	Dodol, Manisan, Kerupuk, Jelly, Tea, Minuman, Pilus, Cokelat, Stick, Bakso, Nasi, Sabun	PSP, Mitramart, Mitra-anda	Jakarta (Smesco), Lottemart	Korea (lwt online), Singapura (minuman), Brunei (tea/sabun), Malaysia (sabun)	35	2 ton
3	Kemuning			PIRT, Halal	0813-4543-1775	Dodol	PSP, Gajahmada, Sisinga Maharaja, Le Gita Cake			6	60 kg
4	Nusa Indah			PIRT, Halal	0561-88-4056	Manisan	PSP			21	75-80 kg
5	Mitra Sumber Aloe Vera			PIRT, Halal	0812-560-7554	Manisan, Tea, Minuman	PSP, Mitra-anda	Jakarta		8	1 ton
6	Mavera			PIRT, Halal	0812-5675-0677	Minuman	PSP, Minimarket Serasan, Rindu Alam, Freshmarket, Hotels, Kantoran	Jakarta, Surabaya (café lga bakar)		3 tenaga kerja	2-2.5 ton
7	Rotiku Hidup			Haki, PIRT, Halal	0561-73-9189 0813-4592-5189	Minuman, Jelly, Tea, Kerupuk, Cokelat, Dodol	PSP, Incubator BI	Jakarta, Semarang		7	1-2 ton
8	Saviera			PIRT, Halal	0852-2244-7355	Minuman	Minimarket Garuda, Mitra-anda, Mitramart, Harum Manis, Citraniaga, Asoka			2	40 dus
9	Kimken			PIRT, Halal		Minuman	Pontianak, Kab. Sintang, Kab. Ketapang			4	50 dos
10	Kope Aloe vera Juwara			PIRT, Haki	0812-5763-6555	Kopi Aloe vera	Kafe Jirey	Bali, Jakarta		2	10 kg
11	Tripple			PIRT, Halal, IMB?	0852-5233-5812	Minuman	PSP	Jakarta		30	500 dus
13	Artika Vera			PIRT, Halal	0852-4594-2178	Manisan	Minimarket Kota Madya, Kota Baru, Sangai Jawi, Toko buah, Mempawah, Sungai Penyu, Anjungan, Sungai Duri			7	30-50 kg
14	Amplang Pontianak			PIRT, Halal, B-Pom	0852-49-6472	Amplang	Perhotelan (Orchad, Kini, Kapuas Darma, Merpati), Mitramart, Mitraanda			3	10 kg
15	Jetskin			PIRT, Halal	0813-4505-5219	Minuman, Manisan, Cokelat, Tea	PSP, Carefour, Hypermart	Carefour, Hypermart, Superindo		15	1,000 dus
16	Ulira Food			PIRT	0852-4964-7298	Rempeyek, Stik tulang ikan, Stik keju	Happymart, Le gita Cake, Jutali, Sengti			2	16 kg
17	Aloe vera Segar Rasa			PIRT, Halal	0852-4724-2980	Minuman	Toko 56, Cita Rasa, Ahui			2	60 dos
18	My Beauty			PIRT	0852-5221-0990	Cokelat	Hypermart, Mitramart, Mega Mitra, Harum Manis, Balas Tara, Banks, Hotel Santika	Mempawa, Sintang		2	30 kg: batangan 30 kg: kiloan
19	Hidayah			PIRT	0812-5671-7776	Dodol	PSP, Lego, Harum Manis, Citra Santan, Kaisar			7	30 kg
20	Kaliovera			PIRT	0812-560-1679	Minuman	Gajahmada, PSP, Mitramart, Legita Cake, Citraniaga, Koperasi Alas Kusuma, Amplang Pelai, Familymart, Freshmart, MM Alamin, Purnamamart, Indah Selera, Happymart, Sabar Subur, Mitra Lestari, Sangat Manis, Saricha Cake, Mamamart, Kingmart, Bunda Rasa Cake			3	50 kg
21	O-Degree			PIRT	0812-572-1721	Kosmetik	Apotik Sungai Landak, Resto, Ditributors, Salon Elqeuu/ Sandra tj. Hulu	Jakarta, Palembang, Jogjakarta	Kuching, Kuala Lumpur	15-kontrak 4-tetap	1600 botol/produksi

Data IKM Alas Kaki Sasaran di Kota Mojokerto (List of the initial target SMI's for Footwear Industry)

No.	Nama	Alamat	Produk	Kontak	Tel	Pasar		KUB	Legalitas Usaha		Jumlah Pengrajin	Keterangan
						Domestik	Ekspor		Ada	Tidak		
Kelurahan Miji												
1	UD. Cipta Karya		Sepatu/ Sandal Kulit		08123156085	√			√		22	Kurang motivasi
2	Victor		Sepatu/ Slop		081335715023	√			√		25	Kurang motivasi
3	Nurah		Sepatu		0321391388	√			√		6	Perlu diobservasi
4	Vandiaz		Sepatu/ Sandal		085648877718	√			√		20	Model Product
5	UD. Perdana		Sepatu/ Slop		0321395826	√			√		8	Perlu diobservasi
6	Abbro		Sepatu/ Slop		321323493	√			√		6	Perlu diobservasi
7	Zanlo		Sepatu/ Slop		08542635858	√		Satria Maja	√		12	Model Product
8	Sandal Zainul		Sandal		0321320722	√			√		7	Perlu diobservasi
9	Shandy Suryawijaya		Sepatu/ Sandal Imitasi		081330352879	√			√		60	Kurang motivasi
10	Wenders		Sepatu/ Sandal Wanita		0321395887	√			√		10	Model Product
11	Wardhana		Sepatu Boot		0321325446	√		Kompak	√		25	Model Product, SOP Coaching (SDPI)
Kelurahan Surodinawan												
12	Alas Kaki Sai'Un		Sepatu		085645590596	√			√		22	Perlu diobservasi
13	Al Atthyah		Sandal		081235726636	√		Satria Maja	√		15	Pendampingan SNI (BSN/ PUPUK)
14	Karya Abadi		Sepatu/ Sandal		085649153007	√		Java Dwipa	√		20	Model Product, SOP Coaching (SDPI)
15	Fandy Anger Prayugo		Sandal/ Sepatu		0857497780	√			√		14	Perlu diobservasi
16	UD. Alimda		Sepatu/ Sandal		0321325268	√		Satria Maja	√		20	Model Product
17	UD. Orlando Jaya		Safety Shoes		0321390968	√		Satria Maja	√		5	SNI Coaching (SDPI)
18	The Hero		Sepatu Kulit		085732924550	√			√		6	Model Product
19	UD. Mitra Kerja		Sepatu Sport Anak		082234982877	√			√		30	Pendampingan SNI (BSN/ PUPUK)
20	Handeye		Sepatu/ Sandal		03217220630	√		Java Dwipa	√		7	Model Product
21	UD. Priti		Sepatu wanita		0321 391918	√			√		32	Model Product/ Pendampingan SNI (BSN/ PUPUK)
Kelurahan Prajuritkulon												
22	Dani Irawan		Sandal		0321390384	√		Java Dwipa	√		12	Model Product
23	Makruf		Sandal		087856528999	√			√		12	Perlu diobservasi
24	Jaya Mulya		Sepatu Kulit		0321390731	√			√		6	SNI Coaching (SDPI)
25	Fadil Jaya Abadi		Sandal		081330512390	√			√		6	Perlu diobservasi
26	D & R		Sepatu		0817584125	√			√		8	Model Product
27	Indra Jaya		Sepatu/ Sandal		082140010090	√			√		12	Pendampingan SNI (BSN/ PUPUK)
28	Putra Jaya		Sandal		08133001600	√			√		15	Perlu diobservasi
Kelurahan Blooto												
29	Puspa Utama		Sepatu/ Sandal			√			√		8	Perlu diobservasi
30	TBG		Sepatu/ Sandal		085648834674	√		Java Dwipa	√		4	Model Product
31	Magersari		Safety Shoes			√			√			SNI Coaching (SDPI)

Lampiran-8:
Rincian output/ pencapaian fasilitasi Rencana Aksi Industri Lokal
oleh wilayah/ industri sasaran

Pencapaian dari Output

Output-2: Pengoperasian platform bagi pengembangan industri lokal

= Memperkuat daya saing IKM sasaran dengan penyediaan layanan yang efisien.

2-1 Jumlah Pertemuan POKJA yang Telah Dilaksanakan

Jumlah pertemuan POKJA yang dilaksanakan oleh setiap industri sasaran

Industri	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dan penjelasan
Industri fesyen ulos	- Telah mengadakan 8 rapat POKJA termasuk evaluasi terminal. Pertemuan ke-empat dan selanjutnya telah diadakan secara sukarela. POKJA menyiapkan agenda/ materi untuk rapat-rapat sukarela ini.
Industri komponen kapal	- Telah mengadakan 13 rapat POKJA termasuk evaluasi terminal dan beberapa perkumpulan kecil diantara anggota kunci POKJA. Perkumpulan kecil ini telah dilakukan secara sukarela dalam rangka berbagi kemajuan/ isu mengenai implementasi Rencana Aksi.
Industri pengolahan kakao	- Telah mengadakan 14 rapat POKJA termasuk evaluasi terminal dan juga menghadiri pertemuan periodik oleh produsen sasaran dimana anggota POKJA/ fasilitator meninjau kemajuan aksi yang dilakukan oleh produsen, dan mendengar kebutuhan/ permintaan untuk dukungan tambahan. Pertemuan POKJA telah diadakan secara sukarela pada bulan-bulan terakhir.
Industri mebel rotan	- Telah mengadakan 17 rapat POKJA termasuk evaluasi terminal, dimana sebagian besar diadakan berdasarkan fasilitasi Tim Ahli sebelumnya, namun kini telah diadakan secara sukarela pada bulan-bulan terakhir.
Industri pengolahan aloevera	- Telah mengadakan 6 rapat POKJA dengan tujuan diagnosis industri, perencanaan Rencana Aksi awal, termasuk FGD dengan industri sasaran, persiapan kegiatan dukungan penting, dan review perkembangan/ kemajuan Rencana Aksi.
Industri alas kaki	- Telah mengadakan 6 rapat POKJA dengan tujuan diagnosis industri, perencanaan Rencana Aksi awal, termasuk FGD dengan industri sasaran, persiapan kegiatan dukungan penting, dan review perkembangan/ kemajuan Rencana Aksi.

2-2 Jumlah kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi diantara dukungan/ layanan yang diajukan pada Rencana Aksi.

Kegiatan/ layanan dukungan (berjumlah 183) yang telah difasilitasi sejauh ini oleh setiap POKJA di industri sasaran (pada saat pelaporan);

Jumlah kegiatan/ layanan dukungan yang difasilitasi oleh setiap POKJA di industri sasaran

Industri	Jumlah kegiatan dukungan yang telah diberikan
Industri fesyen ulos	Jumlah: 43 kali, termasuk: - pada bahan mentah/ peralatan: 12 kali - pada produksi/ peningkatan teknis: 16 kali - pada pengembangan pasar: 12 kali - pada manajemen bisnis/ akses keuangan: 2 kali - pada pengembangan infrastruktur/ kelembagaan industri: 1 kali
Industri komponen kapal	Jumlah: 21 kali, termasuk; - pada bahan mentah/ peralatan: 1 kali - pada produksi/ peningkatan teknis: 11 kali - pada pengembangan pasar: 6 kali - pada manajemen bisnis/ akses keuangan: 2 kali

	- pada pengembangan infrastruktur/ kelembagaan industri: 1 kali
Industri pengolahan kakao	Jumlah: 43 kali, termasuk; - pada bahan mentah/ peralatan: 3 kali - pada produksi/ peningkatan teknis: 12 kali - pada pengembangan pasar: 24 kali - pada manajemen bisnis/ akses keuangan: 3 kali - pada pengembangan infrastruktur/ kelembagaan industri: 1 kali
Industri mebel rotan	Jumlah: 29 kali, termasuk; - pada bahan mentah/ peralatan: 0 kali - pada produksi/ peningkatan teknis: 8 kali - pada pengembangan pasar: 19 kali - pada manajemen bisnis/ akses keuangan: 2 kali
Industri pengolahan aloevera	Jumlah: 25 kali, termasuk; - pada bahan mentah/ peralatan: 0 kali - pada produksi/ peningkatan teknis: 6 kali - pada pengembangan pasar: 18 kali - pada manajemen bisnis/ akses keuangan: 0 kali - pada pengembangan infrastruktur/ kelembagaan industri: 1 kali
Industri alas kaki	Jumlah: 22 kali, termasuk; - pada bahan mentah/ peralatan: 0 kali - pada produksi/ peningkatan teknis: 13 kali - pada pengembangan pasar: 5 kali - pada manajemen bisnis/ akses keuangan: 2 kali - pada pengembangan infrastruktur/ kelembagaan industri: 2 kali

Tabel dibawah meringkas kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi oleh setiap POKJA pada industri sasaran, dan aksi yang telah dilakukan oleh IKM sasaran (pada saat pelaporan);

Ringkasan kegiatan/ layanan dukungan yang difasilitasi dan aksi yang dilakukan oleh IKM sasaran

Wilayah/ Industri	Kegiatan/ Layanan Dukungan Aksi yang dilakukan IKM sasaran
Samosir, Sumatera Utara Industri Fesyen Ulos	Kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi: - Pelatihan/ bimbingan teknis pengembangan/ diversifikasi produk kerajinan tangan (menggunakan <i>Ulos</i>) (4 kali) - Pelatihan desain dan pengembangan keterampilan untuk kerajinan tangan/ baju yang menggunakan <i>Ulos</i> (5 kali) - Pelatihan/ bimbingan teknis peningkatan mutu kain/ keterampilan pembuatan motif (2 kali) - Magang untuk penenun ATBM yang sudah mahir dan pelatihan pengoperasian ATBM (3 kali) - Pelatihan kewirausahaan/ manajemen keuangan KUB (2 kali) - Pengadaan peralatan (alat tenun/ mesin jahit/ bahan mentah) (12 kali) - Promosi melalui acara/ pameran (11 kali) - Pengembangan alat promosi dan <i>branding</i> - Fasilitasi/ bimbingan teknis pendirian koperasi kepada para produsen Aksi yang dilakukan IKM sasaran: - Pendirian kelompok usaha bersama dan kemudian koperasi produsen - Pengembangan/ diversifikasi produk kerajinan tangan Ulos - Kunjungan pasar ke pembeli potensial/ saluran penjualan (pasar lokal/ turis)
Tegal, Jawa Tengah Industri Komponen	Kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi: - Bimbingan teknis mengenai praktik produksi yang baik/ peningkatan kualitas workshop melalui pengenalan 3S (fase percobaan dan perpanjangan) - Bimbingan teknis dan dukungan terkait untuk sertifikasi komponen kapal oleh BKI,

Kapal	<p>termasuk;</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pelatihan dokumentasi proses produksi * Lokakarya mengenai persiapan gambar untuk komponen sasaran * Bimbingan teknis mengenai prototipe/ dokumentasi proses produksi untuk komponen sasaran * Uji mutu/ performa dari komponen prototipe * Penelitian pada standarisasi bahan pengecoran berbahan <i>scrap</i> <ul style="list-style-type: none"> - Studi banding/ pemasaran ke BKI/ industri pembuatan kapal di Jakarta - Temu bisnis dengan pemilik galangan kapal di Tegal - Partisipasi dalam pameran dan lokakarya industri maritim (3 kali) - Seminar mengenai jasa keuangan oleh lembaga non-bank lokal - Pelatihan mengenai manajemen keuangan (pembukuan/ manajemen arus kas) <p>Aksi yang dilakukan IKM sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan 3S di workshop - Pembuatan prototipe, dokumentasi proses produksi untuk persiapan sertifikat BKI - Pemasaran dan promosi kepada pembeli yang sudah ada maupun yang potensial
Sulawesi Tengah Industri Pengolahan Kakao	<p>Kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studi komparatif pada industri cokelat - Bimbingan teknis/ konsultasi teknis mengenai keterampilan produksi/ pengoperasian mesin kepada operator di pabrik pengolahan (2 kali) - Bimbingan teknis pengolahan produk cokelat untuk produsen cokelat local/ pelatihan diversifikasi produk (7 kali) - Pelatihan Good Manufacturing Practice - Bimbingan teknis mengenai kemasan produk - Pengadaan peralatan/ mesin (3 kali) - Uji pasar/ promosi melalui acara/ pameran (16 kali) - Temu bisnis dengan outlet retail nasional/ industri perhotelan lokal (3 kali) - Misi penjualan ke pasar regional (2 kali) - Fasilitasi pembentukan toko di bandara lokal - PR melalui radio lokal/ pemasangan instrumen PR (2 kali) - Seminar bimbingan mengenai pendirian/ manajemen lembaga keuangan mikro - Pelatihan kewirausahaan (2 kali) <p>Aksi yang dilakukan IKM sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendirian asosiasi produsen cokelat lokal - Pengembangan/ diversifikasi produk cokelat/ berbahan kakao - Kunjungan pasar ke penjual potensial di segmen modern lokal - Pendirian toko cokelat milik asosiasi (di bandara lokal)
Industri Mebel Rotan	<p>Kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survei pasar modern lokal di Palu/ seminar survei pasar untuk mebel rotan - Penerbitan surat dukungan untuk aksi pemasaran/ pengembangan peraturan (2 kali) - Persiapan katalog produk - Promosi melalui acara/ pameran (12 kali) - Iklan billboard/ PR melalui televisi lokal (2 kali) - Pelatihan desain produk dan keterampilan penyelesaian (6 kali) - Pembentukan praktik manufaktur standard dan sistem audit proses (2 kali) - Pelatihan kewirausahaan (2 kali) <p>Aksi yang dilakukan IKM sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan pasar ke pembeli/ pengguna potensial di pasar modern lokal.
Pontianak Kalimantan	<p>Kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan bisnis dengan politeknik

Barat Industri Pengolahan Aloevera	<ul style="list-style-type: none"> - Uji mutu produk (minuman) - Bimbingan teknis sertifikasi GMP (persiapan) - Studi banding mengenai kemasan/ GMP di Jakarta dan Bandung - Pelatihan desain kemasan - Promosi melalui acara/ pameran (18 kali) - Fasilitasi pembentukan/ penguatan asosiasi industri <p>Aksi yang dilakukan IKM sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan asosiasi IKM pengolahan aloevera lokal - Pembentukan jasa desain kemasan
Mojokerto Jawa Timur Industri Alas kaki	<p>Kegiatan/ layanan dukungan yang telah difasilitasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kewirausahaan/ manajemen bisnis (2 kali) - Pelatihan desain lanjut - Pelatihan standarisasi ukuran - Pelatihan <i>branding</i> - Pelatihan pembuatan acuan (<i>shoelast</i>) alas kaki - Pelatihan jahit <i>upper/</i> produksi <i>out sole</i> (2 kali) - Pelatihan pengembangan produk/ desain (3 kali) termasuk riset pasar - Uji kualitas (daya rekat) produk prototipe - Pelatihan/ klinik praktik pengeleman - Sosialisasi/ bimbingan teknis (pendampingan) Standar Nasional Indonesia/ praktik manufaktur standar (SOP) - Sosialisasi/ bimbingan teknis peningkatan tempat kerja/produksi (<i>workshop</i>) melalui pengenalan 3S - Misi dagang/ temu bisnis dengan pembeli domestik/ asing potensial - Promosi/ uji pasar melalui acara/ pameran (3 kali) - Pelatihan/ bimbingan penguatan kelompok usaha bersama (KUB) - Studi banding ke pusat industri alas kaki yang lebih mumpuni <p>Aksi yang dilakukan IKM sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan 3S di <i>workshop</i> - Pembuatan prototipe, dokumentasi proses produksi sebagai persiapan pelaksanaan SOP - Pemasaran dan promosi kepada pembeli yang ada/ potensial

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang mendukung dalam rantai pasokan (kecuali lembaga pendukung)

Setiap POKJA yang telah memfasilitasi networking dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan pendukung lainnya, khususnya pembeli/ merchandiser, dan lembaga akreditasi dalam rantai pasokan pada industri sasaran seperti yang ditunjukkan dibawah, dalam rangka mengembangkan produk yang laku di pasaran dan memperluas saluran penjualan. Networking dan kolaborasi dengan pemasok bahan mentah hanya terbatas pada kasus industri pengolahan kakao.

Industri	Pemangku kepentingan yang telah bekolaborasi	Objektif
Industri Fesyen <i>Ulos</i>	3 merchandiser kerajinan tangan di Medan, yaitu, Kriya <i>Ulos</i> , I Love Medan, Langgam Souvenir (semua di Sumatera Utara) Asosiasi Perancang Busana Indonesia	Bimbingan teknis, pengembangan produk dan pengembangan saluran penjualan
Industri Komponen Kapal	Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), badan akreditasi untuk komponen kapal KospinJasa, lembaga non-bank lokal terbesar	Bimbingan teknis, sertifikasi komponen kapal Memperkuat akses keuangan
Industri Pengolahan Kakao	2 kelompok tani (dibimbing mengenai praktik bertani yang baik)	Pasokan stabil pada biji berkualitas yang telah difermentasi

Industri Pengolahan Aloe vera	PT. Aloe vera Indonesia (perusahaan besar pengolahan aloe vera) Federasi Kemasan Indonesia, dan Distributor/ produsen kemasan	Bimbingan teknis pengembangan produk Bantuan teknis dukungan desain kemasan/ pasokan materi
Industri Alas kaki	Universitas Ciputra (mahasiswa)/ Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) PT. Greco (distributor agen pengeleman)	Desain/ pengembangan/ pemasaran produk Peningkatan kualitas produk

2-3 Jumlah IKM/ produsen yang telah menerima/ menggunakan dukungan/ layanan yang telah difasilitasi

Jumlah IKM/ produsen yang telah menerima/ menggunakan dukungan/ layanan

Industri	Target awal IKM/ produsen	Target actual IKM/ produsen
Fesyen Ulos	40 produsen (30 penenun, 10 penjahit)	Mereka yang menerima/ menggunakan dukungan/ layanan: 80 produsen (30 penenun, 20 penjahit, 30 pendatang baru) Produsen sasaran yang sekarang menjadi fokus: 20 produsen (anggota koperasi yang baru dibentuk)
Komponen kapal	30 IKM yang menjadi anggota koperasi industri komponen kapal	Mereka yang menerima/ menggunakan dukungan/ layanan: Sekitar 40 IKM (termasuk yang bukan anggota koperasi) IKM sasaran yang menjadi fokus sekarang: 12 IKM (termasuk yang bukan anggota koperasi)
Pengolahan kakao	20 produsen coklat (yang telah membentuk kelompok produsen), dan satu pabrik pengolahan yang dijalankan pemerintah	Mereka yang menerima/ menggunakan dukungan/ layanan: 18 produsen (tambahan 95 orang menerima pelatihan wirausaha coklat) Produsen sasaran yang menjadi fokus sekarang: 16 produsen (10 mengikuti asosiasi produsen)
Mebel rotan	Sekitar 20 produsen	Mereka yang menerima/ menggunakan dukungan/ layanan: 10 produsen (termasuk yang bukan anggota kelompok) Produsen sasaran yang menjadi fokus sekarang: 5 produsen
Industri Pengolahan Aloe vera	21 IKM (yang membentuk asosiasi industri)	Mereka yang menerima/ menggunakan dukungan/ layanan: 21 IKM IKM sasaran yang menjadi fokus sekarang: Sama seperti diatas
Industri Alas kaki	Sekitar 40 IKM	Mereka yang menerima/ menggunakan dukungan/ layanan: 30 IKM Produsen IKM yang menjadi fokus sekarang: 25 IKM

2-4 Kepuasan (oleh sebagian besar IKM sasaran) dengan layanan/ kegiatan dukungan yang difasilitasi

Tingkat kepuasan IKM sasaran yang menerima/ memanfaatkan dukungan/ layanan

Industri	Tingkat kepuasan	Keterangan
----------	------------------	------------

Fesyen <i>Ulos</i>	Diantara 20 produsen sasaran, 19 produsen sangat puas atau puas, sedangkan satu merasa biasa.	
Komponen kapal	Diantara 12 IKM sasaran, 7 IKM merasa sangat puas/ puas, sedangkan 4 IKM merasa biasa dan 1 IKM merasa tidak puas.	Satu IKM menjawab 'tidak puas' karena tidak ada efek langsung pada jumlah permintaan.
Pengolahan cokelat	Diantara 10 produsen sasaran, 7 produsen merasa sangat puas/ puas, sedangkan 2 produsen tidak yakin dan satu merasa kurang puas.	Satu produsen menjawab 'kurang puas' karena kurangnya partisipasi pada tahap akhir Rencana Aksi.
Mebel rotan	Lima (5) produsen sasaran tidak yakin tentang kepuasan mereka.	Mereka menjawab 'tidak yakin' karena mereka tidak melihat efek nyata untuk bisnis mereka.

Tingkat kepuasan oleh IKM sasaran disurvei untuk industri sasaran fase I.

2-5 Hasil (perubahan positif) fasilitasi POKJA kepada IKM/ produsen sasaran dalam aspek terkait

Review pencapaian fasilitasi POKJA atas Rencana Aksi telah dikompilasi pada bagan di bawah ini berdasarkan aspek-aspek berikut (sesuai dengan tujuan umum Rencana Aksi), dengan mencantumkan jumlah IKM/ produsen yang terlibat dalam kasus sukses;

- Persiapan prototipe atau pengembangan produk baru/ diperbaiki, dan diversifikasi produk,
- Perbaikan komentar dari pengguna/ konsumen.
- Penguatan hubungan keterpautan antar IKM/ dengan pemangku kepentingan eksternal
- Perluasan/ diversifikasi saluran pasar dan penjualan, dan pengembangan pasar/ pembeli baru,
- Kinerja manajemen (penjualan, karyawan), dan,
- Pencapaian terkait lainnya (kelembagaan, kewirausahaan, akses keuangan, dan aspek lainnya)

Industri Sasaran Fase I

Industri fesyen *Ulos* di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara

Fasilitasi kegiatan dukungan oleh POKJA/ aksi oleh IKM sasaran	<p>Di antara 30 penenun <i>Ulos</i> dan 10 penjahit yang sebelumnya menjadi sasaran pada Rencana Aksi, 10 penenun/ penjahit dipilih sebagai sasaran utama dalam kegiatan dukungan berdasarkan keterampilan yang mereka miliki dan kemauan. Prototipe kerajinan tangan yang menggunakan bahan <i>Ulos</i>, termasuk tas, aksesoris, dsb., telah dikembangkan melalui pelatihan/ bimbingan teknis pengembangan/ diversifikasi produk kerajinan tangan dan keterampilan proses/ desain, dimana merchandiser kerajinan tangan dari luar dimobilisasi sebagai instruktur. Kemudian, POKJA melakukan fasilitasi pada produsen sasaran untuk melaksanakan kunjungan pasar, berjumlah 28 hotel wisata/ toko souvenir yang dikunjungi di Samosir, ditambah juga memfasilitasi kesempatan pameran. Produsen sasaran utama tersebut kemudian membentuk kelompok bisnis bersama (KUB), sehingga mereka dapat berbagi peran pada produksi dan pemasaran.</p> <p>Kemudian, pelatihan pengembangan/ diversifikasi produk juga diberikan pada penenun/ penjahit tambahan, sehingga kapasitas produksi kerajinan tangan ini dapat meningkat seiring dengan peningkatan jumlah hotel/ toko souvenir yang menunjukkan ketertarikan untuk memamerkan produk kerajinan tangan. Penyediaan modal awal (dalam bentuk bahan mentah) dan peralatan (mesin jahit) ke KUB telah difasilitasi oleh Ditjen IKM dan melalui pendekatan pada penyalur dana CSR di provinsi. Anggota KUB, difasilitasi oleh Diskoperindag Samosir, telah</p>
--	--

	<p>memutuskan untuk berubah menjadi koperasi produsen (KSU) untuk melegitimasi dan memperkuat entitasnya (dalam hal memungkinkan akses langsung ke dukungan keuangan/ dana dari pemerintah/ CSR). Per Oktober 2015, koperasi beranggotakan 22 produsen dan secara terus-menerus meningkatkan kapasitas produksi/ manajemennya.</p>						
<p>Pencapaian tujuan Rencana Aksi</p> <p>Meningkatkan penjualan produk berbahan Ulos (aksesoris/ kerajinan) dipasar lokal dan turis, bekerjasama dengan desainer-desainer lokal untuk pengembangan desainnya dan dengan industri pariwisata untuk promosinya.</p>	<p>Mengingat hampir tidak ada penjualan kerajinan Ulos yang dibuat di Samosir sebelum pelaksanaan Rencana Aksi, tujuan keseluruhan dianggap tercapai, sedangkan tingkat pencapaian kemajuan lebih lanjut sebagai berikut;</p> <p>Koperasi produsen (KSU) telah menyadari kasus transaksi konsinyasi produk kerajinan Ulos dengan 11 saluran pembeli/ penjualan di pasar lokal/ turis, meskipun penjualan belum mencapai jumlah yang signifikan. Meskipun pembeli lain juga telah menunjukkan minat mereka dalam menempatkan kerajinan ini, koperasi belum mampu memenuhi semua karena kapasitas produksi terbatas. Dari produk-produk konsinyasi ini, penjualan telah mencapai Rp. 3,6 juta (93 item dari 350 produk). Selain itu, koperasi telah mencatat penjualan sebesar Rp. 5 juta dari 9 pameran.</p> <p>Diantara anggota koperasi, terdapat 12 anggota yang telah memulai bisnis kerajinan mereka sendiri di tempat masing-masing selain menempatkan produk mereka di beberapa hotel lokal dan toko souvenir. Total penjualan dari 12 produsen telah mencapai Rp 52.8 juta sampai saat ini.</p>						
<p>Hasil nyata (perubahan positif) fasilitasi ke IKM sasaran</p>	<p>Persiapan prototipe dan pengembangan produk baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berbagai jenis kerajinan produk memanfaatkan kain motif Ulos termasuk tas, dompet, cincin, anting-anting, aksesoris rambut, pakaian, dasi, dan topi (total 93 item, jika menghitung berbagai spesifikasi masing-masing jenis produk). <p>Penguatan hubungan antar IKM/ dengan pemangku kepentingan eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - POKJA telah memfasilitasi kerjasama dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia untuk pengembangan keterampilan dan pengembangan produk baru dari produsen sasaran. <p>Pengembangan pasar/ pembeli/ saluran penjualan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi produsen telah mengembangkan pasar dan saluran penjualan kerajinan Ulos, termasuk 5 hotel wisata, 5 toko souvenir di Samosir dan 1 merchandiser kerajinan di Medan secara konsinyasi. - Di antara anggota koperasi, telah ada 12 anggota yang telah memulai usaha kerajinan mereka sendiri di tempat mereka selain menempatkan produk di beberapa hotel lokal dan toko-toko souvenir. <p>Kinerja manajemen (penjualan, karyawan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagaimana dinyatakan di atas, jumlah produsen terlibat dalam usaha kerajinan Ulos dan penjualan produk telah cukup meningkat dibandingkan dengan kondisi awal, mengingat hampir tidak ada produksi dan penjualan sebelum fasilitasi. <p>Aspek lain: Peningkatan kinerja tindakan bersama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagaimana dinyatakan di atas, produsen sasaran bersama-sama membentuk KUB dan kemudian mengubahnya menjadi koperasi produsen (KSU) yang saat ini terdiri dari 22 anggota. Anggota koperasi menilai perbaikan dalam kinerja tindakan bersama ini, dibandingkan dengan kondisi awal; <table border="1" data-bbox="550 1832 1425 2056"> <tr> <td data-bbox="550 1832 1137 1899">Pengadaan bahan baku</td> <td data-bbox="1137 1832 1425 1899">16: Meningkatkan 4: Tidak berubah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1899 1137 1995">Kapasitas produksi</td> <td data-bbox="1137 1899 1425 1995">11: Meningkatkan 8: Tidak berubah 1: Tidak jelas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1995 1137 2056">Produktivitas (waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam produksi)</td> <td data-bbox="1137 1995 1425 2056">14: Meningkatkan 5: Tidak berubah</td> </tr> </table>	Pengadaan bahan baku	16: Meningkatkan 4: Tidak berubah	Kapasitas produksi	11: Meningkatkan 8: Tidak berubah 1: Tidak jelas	Produktivitas (waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam produksi)	14: Meningkatkan 5: Tidak berubah
Pengadaan bahan baku	16: Meningkatkan 4: Tidak berubah						
Kapasitas produksi	11: Meningkatkan 8: Tidak berubah 1: Tidak jelas						
Produktivitas (waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam produksi)	14: Meningkatkan 5: Tidak berubah						

		1: Tidak jelas
	Diversifikasi produk	17: Meningkatkan 3: Tidak berubah
	Pemasaran dan promosi	18: Meningkatkan 2: Tidak berubah
	Manajemen keuangan	19: Meningkatkan 1: Tidak berubah
	Pemenuhan tanggung jawab setiap anggota	13: Meningkatkan 4: Tidak berubah 3: Tidak jelas
	Negosiasi/ komunikasi dengan pemerintah	12: Meningkatkan 7: Tidak berubah 1: Tidak jelas

Industri komponen kapal di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah

<p>Fasilitasi kegiatan dukungan oleh POKJA/ aksi oleh IKM sasaran</p>	<p>Dalam rangka sertifikasi komponen kapal oleh BKI, kegiatan dukungan telah disediakan dalam aspek i) produksi/ pengendalian mutu (bimbingan teknis dalam pengenalan 3S, dukungan langsung dalam persiapan untuk sertifikasi BKI), ii) akses keuangan. Lima (5) komponen (dengan nama koperasi) menjadi target awal untuk sertifikasi BKI pada tahun anggaran 2014, dan POKJA telah memfasilitasi bimbingan teknis untuk dokumentasi manual mutu produk, penggambaran, dan persiapan prototipe secara bertahap. Prototipe dari komponen sasaran, yang disiapkan oleh IKM berdasarkan gambar yang telah disetujui, telah diuji dengan metode <i>try & error</i> di laboratorium Dinas dalam mempersiapkan audit dari BKI. Karena tantangan ini merupakan kasus pertama bagi industri lokal di Indonesia, POKJA mengalami kesulitan dalam memperkirakan dan mempersiapkan dukungan yang diperlukan secara terjadwal. Sebab itulah POKJA secara aktif memfasilitasi penyesuaian program yang telah dianggarkan dan pendekatan ke pusat/ pemerintah provinsi yang dapat membiayai tambahan dukungan yang diperlukan guna mendukung tantangan aksi IKM-IKM dengan segera.</p> <p>Dalam menanggapi prediksi pertumbuhan galangan kapal di tahun-tahun mendatang, POKJA memutuskan untuk memperpanjang dukungan bimbingan teknis/ pemasaran untuk beberapa komponen tambahan pada TA 2016 dan seterusnya dengan tetap menjaga pengaturan fasilitasi yang sudah ada. Anggaran yang diperlukan untuk tujuan ini (seperti biaya audit) juga telah dijamin oleh Kemenperin (Ditjen IKM) untuk meningkatkan jumlah komponen dalam negeri yang bersertifikat.</p>
<p>Pencapaian tujuan Rencana Aksi IKM-IKM komponen kapal mampu membuat komponen kapal BKI-class dan menyuplainya ke industri pembuatan kapal</p>	<p>Sebagai hasil dari fasilitasi, 7 komponen telah disertifikasi atau akan disertifikasi segera. Di antara 7 komponen, 3 (pintu kapal, jendela, dua jenis nozzle) telah disertifikasi oleh BKI, di mana 3 SIMS atas nama koperasi telah menerima sertifikat BKI. Saat ini 4 komponen lainnya (berbagai jenis jendela kapal, <i>air rent</i>, dan katup gerbang yang memerlukan sertifikasi proses pengecoran besi juga), prototipe yang disusun melalui kolaborasi 3 IKM dan 1 tambahan, sedang dalam proses audit final BKI.</p> <p>Karena dukungan pemasaran untuk komponen-komponen bersertifikat, terdapat sejumlah pembuat kapal/ galangan kapal yang telah memperkuat permintaan/ transaksi komponen tersebut, dan beberapa pembeli baru yang sudah memesan komponen bersertifikat (nilai pesanan dari pembeli baru sebesar Rp 400 juta), sambil mengamati peningkatan permintaan dari pembeli baru/ yang ada sebagai berikut.;</p> <p>- Kementerian Perhubungan, dijadwalkan akan membangun 193 kapal,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan perminyakan, dijadwalkan akan membangun 12 kapal, - Satu galangan kapal, dijadwalkan akan membangun 609 kapal - Kementerian Kelautan dan Perikanan, dijadwalkan akan membangun 3.540 perahu ikan <p>Hal ini juga dicatat bahwa 3 pihak terkait (Kemenperin, BKI dan asosiasi industri komponen kapal) telah memasuki MoU untuk percepatan sertifikasi komponen kapal di seluruh Indonesia dalam meningkatkan jumlah komponen bersertifikat dan meningkatkan konten lokal pada galangan kapal. MoU merupakan hasil dari kasus sukses bimbingan teknis di Tegal.</p>										
<p>Hasil nyata (perubahan positif) fasilitasi ke IKM sasaran</p>	<p>Persiapan prototipe dan produksi produk yang ditingkatkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seperti disebutkan di atas, 7 komponen kapal telah diperbaiki sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas (BKI) melalui pengulangan persiapan prototipe dan pengujian. <p>Penguatan hubungan antara IKM/ dengan pemangku kepentingan eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKM sasaran mengakui bahwa komunikasi/ kerjasama di antara mereka telah banyak ditingkatkan melalui berbagi proses sertifikasi BKI. - POKJA mengakui bahwa kemitraan dengan BKI baru dikembangkan dan masih dipertahankan, di mana BKI terus memberikan bimbingan/ saran untuk POKJA/ IKM, seperti tentang pilihan komponen yang akan disertifikasi. <p>Kinerja manajemen (penjualan, karyawan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di antara 12 IKM sasaran, 5 IKM melaporkan peningkatan penjualan dibandingkan dengan fasilitasi sebelumnya, sementara 3 IKM tidak ada perubahan dan 4 IKM mengalami penurunan (karena ketidakpedulian pemilik kapal 'dalam persiapan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat). - Di antara 12 IKM sasaran, 5 IKM melaporkan peningkatan karyawan dibandingkan dengan fasilitasi sebelumnya, sementara 3 IKM tidak ada perubahan dan 4 IKM mengalami penurunan. <p>Aspek lain: peningkatan produktivitas/ manajemen produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKM sasaran (12) mengakui peningkatan berikut karena pengenalan 3S dan bimbingan terkait selama fasilitasi. <table border="1" data-bbox="550 1308 1423 1695"> <tr> <td data-bbox="550 1308 1139 1373">Pengurangan waktu produksi sampai pengiriman</td> <td data-bbox="1139 1308 1423 1373">5: sangat meningkat 7: sedikit meningkat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1373 1139 1469">Pengurangan biaya produksi/ input</td> <td data-bbox="1139 1373 1423 1469">4: sangat meningkat 7: sedikit meningkat 1: tidak meningkat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1469 1139 1568">Pengurangan produk yang tidak sempurna</td> <td data-bbox="1139 1469 1423 1568">4: sangat meningkat 7: sedikit meningkat 1: tidak meningkat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1568 1139 1632">Waktu yang dibutuhkan untuk pemilik dalam mengawasi workshop/ karyawan</td> <td data-bbox="1139 1568 1423 1632">5: sangat meningkat 7: sedikit meningkat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1632 1139 1695">Kesadaran karyawan dalam kontrol kualitas/ produktivitas</td> <td data-bbox="1139 1632 1423 1695">5: sangat meningkat 7: sedikit meningkat</td> </tr> </table>	Pengurangan waktu produksi sampai pengiriman	5: sangat meningkat 7: sedikit meningkat	Pengurangan biaya produksi/ input	4: sangat meningkat 7: sedikit meningkat 1: tidak meningkat	Pengurangan produk yang tidak sempurna	4: sangat meningkat 7: sedikit meningkat 1: tidak meningkat	Waktu yang dibutuhkan untuk pemilik dalam mengawasi workshop/ karyawan	5: sangat meningkat 7: sedikit meningkat	Kesadaran karyawan dalam kontrol kualitas/ produktivitas	5: sangat meningkat 7: sedikit meningkat
Pengurangan waktu produksi sampai pengiriman	5: sangat meningkat 7: sedikit meningkat										
Pengurangan biaya produksi/ input	4: sangat meningkat 7: sedikit meningkat 1: tidak meningkat										
Pengurangan produk yang tidak sempurna	4: sangat meningkat 7: sedikit meningkat 1: tidak meningkat										
Waktu yang dibutuhkan untuk pemilik dalam mengawasi workshop/ karyawan	5: sangat meningkat 7: sedikit meningkat										
Kesadaran karyawan dalam kontrol kualitas/ produktivitas	5: sangat meningkat 7: sedikit meningkat										

Industri pengolahan kakao di Provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu dan sekitarnya)

<p>Fasilitasi kegiatan dukungan oleh POKJA/ aksi oleh IKM sasaran</p>	<p>Pabrik pengolahan penghasil couverture (olahan kakao yang siap digunakan oleh produsen coklat) yang dikelola pemerintah telah melanjutkan percobaan produksi, mencapai level kualitas yang dapat diterima (menurut uji pada konsumen yang dilakukan melalui rangkaian dukungan pengembangan pasar). Skala produksi oleh pabrik pengolahan kakao ini terus meningkat dan berbagai produk olahan kakao juga telah diperluas untuk larutan coklat, couverture (coklat susu dan pahit), bubuk coklat, dan coklat mentega. Produk kakao olahan telah disediakan untuk</p>
---	---

	<p>produsen coklat lokal.</p> <p>Pada bulan Agustus 2015, Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi memutuskan untuk melegalkan pabrik pengolahan kakao sebagai unit usaha dalam bentuk UPT. Hal ini membuat pabrik lebih solid dalam melanjutkan/ memperluas skala produk kakao olahan sesuai dengan berbagai kebutuhan pengguna berorientasi komersial dan lebih proaktif dalam memberikan dukungan kepada produsen pemula sebagai unit pelayanan inti teknis industri.</p> <p>Sejalan dengan upaya di atas, POKJA telah memfasilitasi produsen coklat lokal (start-up bisnis skala mikro, yang memanfaatkan produk olahan kakao untuk pengembangan/ pemasaran produk coklat) untuk meningkatkan kualitas, diversifikasi dan mempromosikan produk coklat mereka melalui kunjungan pemasaran kepada pembeli potensial/ konsumen di segmen modern dan mengalokasikan waktu untuk pameran, dengan peningkatan produk yang besar.</p> <p>Produsen coklat aktif berjumlah 10 rata-rata selama tahap awal fasilitasi. Produsen aktif ini kemudian membentuk asosiasi produsen untuk mengkompilasi kebutuhan dukungan mereka kepada POKJA dan untuk mengaktifkan tindakan bersama (seperti promosi/ pemasaran bersama). Mereka telah melakukan kunjungan pemasaran ke pembeli/ pengguna potensial di segmen modern lokal untuk mengeksplorasi dan membangun saluran penjualan yang stabil.</p> <p>Setelah menyadari tanda-tanda kasus keberhasilan produsen coklat, POKJA memutuskan untuk meningkatkan jumlah produsen lokal dalam tahap terakhir fasilitasi. Sejauh ini POKJA telah berhasil mendorong 6 pengusaha untuk memulai bisnis coklat di tahun 2015. Selanjutnya, Dinas Provinsi memberikan kesempatan pelatihan kepada 15 orang di Palu untuk belajar pengolahan produk coklat.</p>
<p>Pencapaian tujuan Rencana Aksi</p> <p>Menghasilkan produk coklat/ kue secara kontinu dengan memanfaatkan couverture yang diproses dari biji kakao lokal dan memasuki segmen pasar lokal modern.</p>	<p>Tujuan keseluruhan dianggap tercapai dengan jumlah yang memadai dengan kasus transaksi produk coklat dari olahan biji kakao lokal di pasar segmen modern lokal. 28 kasus transaksi dengan pembeli/ saluran penjualan di segmen modern lokal telah dilaporkan dengan rata-rata angka penjualan bulanan sebesar Rp. 36 juta (65 juta tertinggi) oleh 13 produsen total (10 anggota asosiasi dan 3 pendatang baru). Satu produsen telah mendapat kesepakatan dengan jaringan supermarket besar, Carrefour di Kota Palu. Akibatnya, asosiasi telah mencapai penjualan tahunan sebesar Rp. 300 juta pada tahun 2014, dan Rp. 300 juta selama Januari-September tahun 2015 dengan target penjualan sebesar Rp. 450 juta pada tahun yang sama.</p>
<p>Hasil nyata (perubahan positif) fasilitasi ke IKM sasaran</p>	<p>Persiapan prototipe dan pengembangan produk baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di antara 10 produsen sasaran di asosiasi, 9 IKM melaporkan peningkatan jenis produk seperti coklat batang, praline, selai dan brownies, dibandingkan dengan sebelum fasilitasi. <p>Peningkatan komentar dari pengguna/ konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuisisioner konsumen yang dibagikan pada beberapa pameran menunjukkan bahwa kemasan produk cukup memuaskan dan dapat diterima di pasar domestik. <p>Penguatan keterkaitan antar IKM/ dengan pemangku kepentingan eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produsen sasaran yang bergabung di asosiasi menegaskan bahwa komunikasi antara produsen sebagian besar telah ditingkatkan melalui tindakan bersama untuk kegiatan promosi/ pemasaran, dan telah menginspirasi satu sama lain dalam melewati tantangan pengembangan produk/ pasar lebih lanjut. <p>Pengembangan pasar/ pembeli/ saluran penjualan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para anggota asosiasi (dan beberapa produsen pendatang) sejauh ini mengembangkan 28 pembeli/ saluran penjualan di pasar segmen modern lokal, termasuk 3 supermarket, 24 bahan makanan/ toko-toko souvenir, 1 Hotel.

	<ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi ini juga telah membuka outlet produk cokelat mereka di bandara lokal sejak Mei 2015 di mana 11 produsen memiliki penjualan bulanan rata-rata Rp. 8 juta sejauh ini. - Sejauh ini 3 IKM telah berhasil mengembangkan saluran penjualan diluar Kota Palu, seperti kota besar lainnya di Pulau Sulawesi (Gorontalo, Kendari, dan Toli-toli) dan Jakarta. <p>Kinerja manajemen (penjualan, karyawan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di antara 10 produsen sasaran dalam asosiasi, 7 IKM melaporkan peningkatan penjualan rata-rata bulanan dibandingkan dengan sebelum fasilitasi, sementara 3 lainnya mengalami penurunan. - Di antara 10 produsen yang sama, 4 IKM melaporkan peningkatan karyawan dibandingkan dengan sebelum fasilitasi, sementara 5 lainnya tidak mengalami perubahan dan 1 IKM mengalami penurunan. <p>Aspek lain: Pengembangan kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahap awal fasilitasi, 12 orang memutuskan untuk membentuk asosiasi produsen cokelat lokal. Asosiasi ini telah aktif dalam melakukan pemasaran dan promosi dengan inisiatif mereka pribadi dan bekerja bersama dalam meningkatkan kualitas produk. - 10 produsen dalam asosiasi menilai peningkatan dalam beberapa aspek berikut ini, dibandingkan dengan kondisi awal; <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Pengetahuan dan teknik karyawan atas produktivitas/ kontrol kualitas</td> <td>6: Cukup Meningkatkan 2: Meningkatkan 2: Sangat meningkat</td> </tr> <tr> <td>Kemampuan/ kepercayaan diri dalam kegiatan promosi</td> <td>5: Meningkatkan 5: Sangat meningkat</td> </tr> <tr> <td>Kesadaran atas manajemen keuangan</td> <td>5: Cukup Meningkatkan 4: Meningkatkan 1: Sangat meningkat</td> </tr> </table>	Pengetahuan dan teknik karyawan atas produktivitas/ kontrol kualitas	6: Cukup Meningkatkan 2: Meningkatkan 2: Sangat meningkat	Kemampuan/ kepercayaan diri dalam kegiatan promosi	5: Meningkatkan 5: Sangat meningkat	Kesadaran atas manajemen keuangan	5: Cukup Meningkatkan 4: Meningkatkan 1: Sangat meningkat
Pengetahuan dan teknik karyawan atas produktivitas/ kontrol kualitas	6: Cukup Meningkatkan 2: Meningkatkan 2: Sangat meningkat						
Kemampuan/ kepercayaan diri dalam kegiatan promosi	5: Meningkatkan 5: Sangat meningkat						
Kesadaran atas manajemen keuangan	5: Cukup Meningkatkan 4: Meningkatkan 1: Sangat meningkat						

Industri mebel rotan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

<p>Fasilitasi kegiatan dukungan oleh POKJA/ aksi oleh IKM sasaran</p>	<p>Fasilitasi penerapan Rencana Aksi untuk industri ini sedikit lebih lamban jika dibandingkan dengan yang lain karena Rencana Aksi dianggap kurang bermanfaat atau cukup kuat oleh produsen sasaran sejak awal. Oleh karena itu, POKJA merevisi Rencana Aksi dan memutuskan untuk memulai dengan survei di pasar modern lokal, dengan asumsi bahwa hasil survei tersebut dapat membuat produsen lokal merasakan tuntutan dan masalah yang harus ditangani. Setelah hasil survei pasar disebarkan ke produsen lokal, beberapa produsen bersedia bergabung dalam usaha pemasaran dan perbaikan produk. Namun, kunjungan pasar ke pengguna segmen modern (seperti hotel, restoran, kantor pemerintahan, fasilitas publik) mengalami stagnansi. POKJA juga memfasilitasi penerbitan surat dukungan oleh gubernur/ walikota mengenai rekomendasi penggunaan mebel rotan yang dibuat secara lokal untuk pengguna modern lokal.</p> <p>Secara bersamaan, dalam rangka menghapus kesan negatif produk rotan lokal (yang diperoleh dari hasil survei), POKJA merubah Rencana Aksi dan memulai inisiasi jaminan mutu, dan telah mempersiapkan proses produksi standar (SOP) untuk mebel rotan. Berkaitan dengan SOP ini, POKJA telah melaksanakan audit proses manufaktur secara terus-menerus untuk 5 produsen prioritas sejak bulan Februari 2015 dalam rangka memastikan praktik jaminan kualitas oleh produsen lokal yang memiliki orientasi ke segmen modern. Inisiatif untuk jaminan kualitas produk ini didukung oleh konsultan manajemen IKM, yang merupakan bagian Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi dan Kota untuk pengawasan di lapangan</p>
---	---

	<p>secara periodik sesuai dengan SOP.</p> <p>POKJA juga telah melakukan dukungan promosi untuk mengubah persepsi yang kurang baik di konsumen terhadap mebel rotan buatan lokal, termasuk dengan terlibat dalam pameran lokal untuk menunjukkan contoh produk yang sesuai dengan SOP dan menampilkan produk tersebut dalam media televisi. Terinspirasi dari kegiatan ini, Dinas provinsi memutuskan untuk menerapkan persiapan SOP dan proses audit produksi yang terkait sebagai alat dukungan peningkatan kualitas untuk industri lainnya mulai tahun depan.</p>				
<p>Pencapaian tujuan Rencana Aksi</p> <p>Mengembangkan segmen pasar lokal modern bagi furnitur rotan dan/atau pembuatan kerajinan oleh produsen lokal di Kota Palu, sesuai dengan proses produksi standar.</p>	<p>Survei kuesioner kepada 10 produsen, yang telah menerima kegiatan dukungan setidaknya lebih dari sekali selama fasilitasi Rencana Aksi, mengungkapkan bahwa 8 produsen mengakui adanya peningkatan yang signifikan atau sedikit (dibandingkan dengan sebelum fasilitasi) dalam jumlah order dari pengguna segmen modern lokal, sedangkan 2 produsen mengaku 'tidak ada perubahan', dan juga menunjukkan bahwa 5 produsen mengakui adanya peningkatan yang signifikan atau sedikit (dibandingkan dengan sebelum fasilitasi) dalam jumlah penjualan ke pengguna segmen modern lokal, sedangkan sisanya mengaku 'tidak ada perubahan atau sedikit penurunan'. Salah satu dari mereka mengaku pertumbuhan lebih dari empat kali lipat penjualan dibandingkan dengan fasilitasi sebelumnya.</p> <p>Namun, kedua POKJA tidak berani mengakui bahwa fasilitasi POKJA pada Rencana Aksi telah mencapai kenaikan transaksi dengan/ permintaan dari segmen modern lokal dengan kuesioner. Hal ini dikarenakan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya beberapa produsen yang aktif/ konsisten terlibat dalam Rencana Aksi, dan fasilitasi kegiatan dukungan (terutama selama tahap awal fasilitasi) belum sejalan dengan arah tujuan keseluruhan, - Upaya pemasaran untuk pengguna segmen modern dengan produsen dianggap stagnan selama periode fasilitasi, - Semua produsen belum mencatat penjualan sesuai permintaan, sehingga jawaban mereka tidak dianggap cukup tepat. <p>POKJA ini telah memfasilitasi sejumlah kegiatan dukungan, sementara berkala meninjau Rencana Aksi/ mengusulkan dukungan tambahan dalam mendorong produsen lokal untuk terlibat dalam Rencana Aksi. Namun, hanya beberapa dari mereka yang terlibat dalam Rencana Aksi, sehingga menimbulkan komunikasi yang intermiten dan terbatas dengan produsen sasaran selama periode fasilitasi.</p>				
<p>Hasil nyata (perubahan positif) fasilitasi ke IKM sasaran</p>	<p>Kinerja manajemen (penjualan, karyawan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diantara 10 produsen yang mengikuti kegiatan dukungan lebih dari sekali, 5 produsen menganggap adanya sedikit peningkatan atau peningkatan signifikan (dibandingkan dengan sebelum fasilitasi) pada jumlah penjualan secara keseluruhan, sedangkan yang lain mengakui tidak ada perubahan ataupun sedikit menurun. - Diantara 10 produsen yang sama, 4 IKM dilaporkan mengalami peningkatan karyawan jika dibandingkan dengan sebelum fasilitasi, sedangkan 2 IKM tidak mengalami perubahan dan 4 IKM mengalami penurunan. <p>Aspek lain: peningkatan produksi dan pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 produsen yang menerima kegiatan dukungan setidaknya lebih dari sekali mengakui tingkat perbaikan pada aspek berikut; <table border="1" data-bbox="549 1906 1406 2063"> <tr> <td data-bbox="549 1906 1139 2002"> <p>Pengetahuan & teknik karyawan pada kontrol kualitas/ produktivitas</p> </td> <td data-bbox="1139 1906 1406 2002"> <p>2: Cukup Meningkat 3: Meningkat 5: Sangat meningkat</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 2002 1139 2063"> <p>Kemampuan/ kepercayaan diri dalam kegiatan promosi</p> </td> <td data-bbox="1139 2002 1406 2063"> <p>2: Cukup Meningkat 3: Meningkat</p> </td> </tr> </table>	<p>Pengetahuan & teknik karyawan pada kontrol kualitas/ produktivitas</p>	<p>2: Cukup Meningkat 3: Meningkat 5: Sangat meningkat</p>	<p>Kemampuan/ kepercayaan diri dalam kegiatan promosi</p>	<p>2: Cukup Meningkat 3: Meningkat</p>
<p>Pengetahuan & teknik karyawan pada kontrol kualitas/ produktivitas</p>	<p>2: Cukup Meningkat 3: Meningkat 5: Sangat meningkat</p>				
<p>Kemampuan/ kepercayaan diri dalam kegiatan promosi</p>	<p>2: Cukup Meningkat 3: Meningkat</p>				

		5: Sangat meningkat	
--	--	---------------------	--

Industri sasaran fase II

Industri Pengolahan Aloe vera di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

<p>Fasilitasi kegiatan dukungan oleh POKJA/ aksi oleh IKM sasaran</p>	<p>Rencana Aksi terdiri dari dua program utama, i) standardisasi proses produksi, dan ii) perbaikan kemasan. Untuk program ini, POKJA menyarankan serangkaian kegiatan dukungan, termasuk uji kualitas produk, bimbingan teknis untuk sertifikasi <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP), temu bisnis dengan industri kemasan, pemberian pelatihan/ peralatan untuk perbaikan kemasan, dan bimbingan bisnis dengan perusahaan besar.</p> <p>Adapun program i), 3 IKM sasaran telah menerima bimbingan teknis sertifikasi GMP sejak Juli 2015 dan audit yang diharapkan selesai pada Januari 2016. Selain itu, uji kualitas produk dua IKM sasaran yang dilakukan oleh pusat riset (Baristan), menunjukkan poin untuk perbaikan, sedangkan hasil uji harus diperiksa lebih lanjut untuk membahas dan menetapkan standar produk lokal yang harus diikuti oleh IKM sasaran.</p> <p>Adapun program ii), POKJA telah memfasilitasi kunjungan belajar ke Jakarta/ Bandung untuk tujuan belajar tentang perbaikan kemasan. Asosiasi industri pengolahan aloe vera mengunjungi produsen minuman skala menengah dan distributor/ pembuat kemasan, selain melakukan pertemuan dengan Federasi Kemasan Indonesia dan Rumah Kemasan di Kemenperin. Setelah kunjungan belajar, pelatihan desain kemasan telah diselenggarakan untuk anggota asosiasi. Mengambil manfaat dari pengalaman dari kunjungan belajar, asosiasi telah membentuk layanan desain kemasan untuk anggotanya dan industri makanan/ minuman lainnya di Pontianak. Selain itu, POKJA telah memfasilitasi asosiasi untuk membuka outlet untuk produk aloe vera di bandara Pontianak. POKJA juga telah memfasilitasi IKM sasaran untuk berpartisipasi dalam 18 pameran sejauh ini untuk pengembangan pasar produk mereka.</p>
<p>Pencapaian tujuan Rencana Aksi</p> <p>Meningkatkan kemampuan yang memadai untuk memproduksi produk olahan aloe vera, berfokus pada produk minuman, yang kompetitif di segmen pasar modern.</p>	<p>Pencapaian tujuan belum dilakukan peninjauan karena POKJA mengakui bahwa pelaksanaan Rencana Aksi hanya difasilitasi setengah jalan. Meskipun kecepatan pelaksanaan Rencana Aksi dianggap agak lambat pada tahap awal, POKJA telah secara bertahap mempercepat fasilitasi kegiatan dukungan utama yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian tujuan secara keseluruhan, dan berkomunikasi erat dengan IKM sasaran untuk menangkap kebutuhan mereka yang terbaru dan mengidentifikasi perlunya meningkatkan / meninjau Rencana Aksi.</p>
<p>Hasil nyata (perubahan positif) fasilitasi ke IKM sasaran</p>	<p>Memperkuat hubungan antar IKM/ dengan pemangku kepentingan eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - POKJA telah memulai untuk memfasilitasi pengolah aloe vera skala besar (PT Aloe Vera Indonesia.) untuk memberikan layanan bimbingan kepada IKM sasaran, meskipun tindakan nyata belum terwujud. - Para anggota asosiasi telah mulai mencari penawaran bisnis dengan distributor/ pembuat kemasan (melalui kunjungan belajar), yang dapat menawarkan layanan untuk IKM seperti permintaan kecil dan biaya bahan yang lebih rendah, dan menjawab kebutuhan konsultasi oleh IKM mengenai pilihan paket desain/ bahan. <p>Aspek lainnya: pengembangan kelembagaan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Hampir semua IKM pengolahan aloevera di Pontianak mengambil bagian dalam pembentukan asosiasi baru. Asosiasi telah memperkuat komunikasi dengan POKJA, sehingga membangun saluran untuk menyampaikan kepentingan industri kepada pemerintah daerah. - Asosiasi juga berfungsi sebagai jendela untuk menerima peluang dukungan dari pemerintah, sehingga mampu menetapkan IKM yang paling relevan untuk setiap kegiatan dukungan (sebelumnya, penerima manfaat dari kegiatan dukungan secara langsung ditunjuk oleh pemerintah tanpa konsultasi). - Asosiasi juga telah membentuk layanan desain kemasan untuk anggotanya.
--	---

Industri Alas kaki di Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

<p>Fasilitasi kegiatan dukungan oleh POKJA/ aksi oleh IKM sasaran</p>	<p>Tantangan aksi didukung melalui dua program dukungan utama, i) Pendampingan SOP kepada IKM terpilih dengan bimbingan teknis 3S, dan ii) pengembangan model sepatu berkolaborasi dengan mahasiswa di Surabaya. POKJA telah melakukan bimbingan teknis 3S sebagai persiapan pendampingan SOP yang kemudian dilakukan oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) untuk membantu IKM terpilih mengikuti standar proses produksi dan mengontrol kualitas produk.</p> <p>Selain itu, dukungan pengembangan produk telah difasilitasi secara kontinu bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Ciputra/ Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO dan sejauh ini telah menyelesaikan riset pasar, penentuan segmen, pelatihan desain (dasar dan lanjut), dan desain produk. Sekitar 20 desain produk telah diseleksi oleh Universitas Ciputra/ APRISINDO guna mengidentifikasi desain berorientasi pasar yang akan dibuat menjadi prototipe. Prototipe awal telah dibuat untuk mempersiapkan model produk untuk uji pasar berikut. POKJA saat ini memfasilitasi penyediaan kesempatan uji pasar, agar IKM sasaran memperoleh masukan untuk perbaikan produk lebih lanjut.</p> <p>Selama uji pasar, isu pengeleman (penyelesaian buruk pada pengeleman antara upper sepatu dan alasnya) telah diidentifikasi. POKJA, menanggapi ini, meminta BPIPI untuk membantu pengujian mengenai kekuatan lem terhadap prototipe. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk-produk dari Mojokerto tidak memenuhi standar, membuat IKM sasaran mengakui pengeleman mereka yang buruk. POKJA, dalam menanggapi lebih lanjut hasil tes ini, menyelenggarakan pelatihan pengeleman dengan pemasok lem (PT. Greco) yang memperkenalkan lem berkualitas dan praktik pengeleman yang memadai untuk IKM. Masalah ini telah ditindaklanjuti oleh layanan klinik periodik pada pengeleman oleh PT. Greco, dan pelatihan produksi alas oleh BPIPI.</p>
<p>Pencapaian tujuan Rencana Aksi</p> <p>Menciptakan model IKM, yang dapat mengadopsi praktik produksi yang baik berdasarkan SOP dan mengembangkan segmen pasar baru melalui pengembangan produk yang memadai.</p>	<p>Pencapaian tujuan belum ditinjau karena POKJA mengakui bahwa pelaksanaan Rencana Aksi hanya difasilitasi setengah jalan, meskipun kecepatan pelaksanaan Rencana Aksi dianggap memuaskan. Meskipun menghadapi sistem anggaran yang kaku, Tim Ahli mengakui bahwa POKJA telah melakukan revisi Rencana Aksi yang baik dan memfasilitasi industri sasaran secara fleksibel dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan/ masalah yang dimiliki oleh industri sasaran.</p>
<p>Hasil nyata (perubahan positif) fasilitasi ke IKM sasaran</p>	<p>Persiapan prototipe dan pengembangan produk baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sejauh ini, 7 IKM telah mengembangkan 14 produk baru (model) yang fokus pada segmen mahasiswa/ pekerja muda.

	<p>Penguatan hubungan antar IKM/ dengan pemangku kepentingan eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan model produk telah meningkatkan bentuk kolaborasi baru antar IKM seperti penggunaan bahan baku bersama dan pemasaran, karena mereka telah melakukan pengembangan produk yang membutuhkan bahan-bahan dan segmen pasar baru. - POKJA telah aktif memanfaatkan Universitas Ciputra (mahasiswa) dan APRISINDO untuk memfasilitasi IKM dalam mengembangkan produk-produk untuk segmen baru yang ditargetkan mereka, di mana Ciputra/ APRISINDO telah memberikan saran/ panduan kepada IKM pada studi pasar, konsep/ desain produk, dan tes pasar. - POKJA juga telah mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan antara pemasok lem (PT. Greco) dan IKM, di mana PT. Greco melakukan pelatihan keterampilan pengeleman, dan telah mendirikan layanan klinik dwi-mingguan pada pengeleman. Hal ini memungkinkan IKM untuk mendapatkan pengelem yang memadai dengan mudah. <p>Pengembangan/ diversifikasi pasar/ saluran penjualan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meskipun masih terbatas jumlahnya, 6 dari 7 IKM yang terlibat dalam program pengembangan model produk sejauh ini telah melakukan transaksi senilai Rp 713.7 juta dan menerima permintaan senilai Rp 465.5 juta untuk produk baru mereka melalui percobaan pengembangan/ pemasaran pada pameran/ upaya promosi sendiri sampai akhir tahun 2015. - 4 dari 7 IKM telah mengidentifikasi beberapa pembeli baru/ saluran penjualan untuk produk baru mereka <p>Kinerja manajemen (penjualan, karyawan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diantara 25 IKM sasaran (yang direspon oleh 22 IKM), 12 IKM memperoleh peningkatan jumlah penjualan mereka secara keseluruhan dari tahun 2014 (sebelum fasilitasi) ke tahun 2015, sedangkan sisanya mengakui tidak ada perubahan ataupun ada penurunan. Jumlah penjualan dari 22 IKM responden ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 2.2% di tahun 2015, dibandingkan dengan 2014 (sebelum fasilitasi). - Diantara 25 IKM sasaran (yang direspon oleh 22 IKM), 6 IKM berhasil meningkatkan jumlah karyawan mereka di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 (sebelum fasilitasi), sedangkan sebagian besar IKM sisanya tidak mengalami perubahan. <p>Aspek lain: peningkatan produktivitas/ manajemen produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 IKM sasaran yang menerima bimbingan teknis pada pengenalan 3S mengakui peningkatan, sebagai berikut; <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Pengurangan waktu produksi sampai pengiriman</td> <td>3: sangat meningkat 6: sedikit meningkat 1: tidak meningkat</td> </tr> <tr> <td>Pengurangan biaya produksi/ input</td> <td>4: sangat meningkat 5: sedikit meningkat 1: tidak meningkat</td> </tr> <tr> <td>Pengurangan produk yang tidak sempurna</td> <td>5: sangat meningkat 5: sedikit meningkat</td> </tr> <tr> <td>Waktu yang dibutuhkan untuk pemilik dalam mengawasi workshop/ karyawan</td> <td>4: sangat meningkat 4: sedikit meningkat 2: tidak meningkat</td> </tr> <tr> <td>Kesadaran karyawan dalam kontrol kualitas/ produktivitas</td> <td>5: sangat meningkat 4: sedikit meningkat 1: tidak meningkat</td> </tr> </table>	Pengurangan waktu produksi sampai pengiriman	3: sangat meningkat 6: sedikit meningkat 1: tidak meningkat	Pengurangan biaya produksi/ input	4: sangat meningkat 5: sedikit meningkat 1: tidak meningkat	Pengurangan produk yang tidak sempurna	5: sangat meningkat 5: sedikit meningkat	Waktu yang dibutuhkan untuk pemilik dalam mengawasi workshop/ karyawan	4: sangat meningkat 4: sedikit meningkat 2: tidak meningkat	Kesadaran karyawan dalam kontrol kualitas/ produktivitas	5: sangat meningkat 4: sedikit meningkat 1: tidak meningkat
Pengurangan waktu produksi sampai pengiriman	3: sangat meningkat 6: sedikit meningkat 1: tidak meningkat										
Pengurangan biaya produksi/ input	4: sangat meningkat 5: sedikit meningkat 1: tidak meningkat										
Pengurangan produk yang tidak sempurna	5: sangat meningkat 5: sedikit meningkat										
Waktu yang dibutuhkan untuk pemilik dalam mengawasi workshop/ karyawan	4: sangat meningkat 4: sedikit meningkat 2: tidak meningkat										
Kesadaran karyawan dalam kontrol kualitas/ produktivitas	5: sangat meningkat 4: sedikit meningkat 1: tidak meningkat										

Lampiran-9:
Surat penawaran mengenai penerapan model fasilitasi SMIDeP

Nomor : 6\ /IKM /3/ 2016
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Penawaran Pendekatan SMIDeP dalam
Pengembangan Industri daerah

Jakarta, 10 Maret 2016

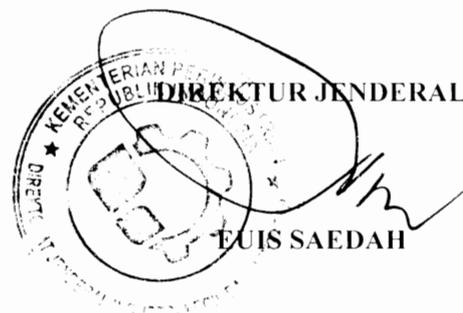
Kepada Yth.:
(daftar terlampir)
di -

Tempat

Sehubungan dengan tindak lanjut disusunnya Model Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal yang merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal IKM dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* melalui Proyek Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia (SMIDeP), serta tindak lanjut dari diseminasi/penawaran bagi Provinsi yang telah disampaikan dalam Rakor Pengarahan DITJEN IKM di Bengkulu bulan Februari 2016 yang lalu, bersama ini kami sampaikan bahwa pendalaman materi akan dilakukan kembali bagi unit Saudara yang **tertarik, berkomitmen penuh** dan dapat **memenuhi kriteria umum** serta **kriteria industri** sasaran (terlampir) pada model pendekatan program *multi-years* dimaksud, pada **Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyusunan Program** tahun anggaran 2017 tanggal 27-30 Maret 2016 di Banda Aceh.

Berkenaan dengan hal tersebut, masukan serta ketertarikan unit Saudara diharapkan dapat disampaikan paling lambat pada tanggal 24 Maret 2016 atau pada pertemuan Rakornas dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Bayu Nugroho (081319357605) atau Indra Dilana (085691334644).

Atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terimakasih



DIREKTUR JENDERAL
TUIS SAEDAH

Tembusan:

1. Para Direktur di lingkungan Ditjen IKM;
2. Kepala BPIPI;
3. Peringgal

Lampiran Surat Nomor 6 /IKM/ 3/ 2016

Persyaratan dan Wilayah/ Industri Sasaran melalui Model Fasilitasi SMIDeP oleh Ditjen IKM

Model Fasilitasi SMIDeP ini telah didiseminasi dan akan diinternalisasi juga di Ditjen IKM dengan mempraktekannya langsung di wilayah / industri di provinsi dan Kabupaten/ Kota yang tertarik secara serius untuk penerapan model tersebut dalam pengembangan industri lokal melalui pembentukan / pengoperasian platform yang telah dijalankan Proyek kerjasama SMIDeP dengan dukungan/ bimbingan Ditjen IKM. Sekretariat Ditjen IKM akan berkoordinasi secara internal dengan tiap Direktorat IKM Sektoral terkait dengan daerah yang berminat untuk menerapkannya. Diharapkan daerah/ industri yang diusulkan dapat memenuhi kondisi dengan kriteria sebagai berikut:

Kriteria Umum:

- Ditetapkan sebagai Kompetensi Inti Industri Daerah (pada tingkat kabupaten / kota), industri prioritas/Industri Unggulan Provinsi (provinsi), atau RIPIN/KIN (Kemenperin), Renstra Ditjen IKM maupun RPJMN 2015 -2019.
- Penerima Dana DAK Perindustrian 2016 akan lebih disukai.
- Dikenali sebagai industri prioritas dalam kebijakan / rencana pembangunan pemerintah daerah RPJMD dan atau sudah ditetapkan sebagai RPIK atau RPIP melalui Peraturan Daerah.
- Pernyataan ketertarikan dan kesanggupan dari Kepala Dinas Perindag Provinsi kepada Dirjen IKM c.q. Sesditjen IKM untuk difasilitasi Pengembangan Industri Lokal dengan langkah, metode dan pendekatan SMIDeP (yang disusun dalam Petunjuk Teknis).
- Kesiediaan untuk membentuk POKJA dengan otorisasi melalui SK Kepala Daerah,
- Kesanggupan untuk memfasilitasi rapat rapat di daerah terkait POKJA dan menugaskan satu atau lebih fasilitator (dari Shindan- shi, PFPP atau UPL)
- Bersedia melakukan Rapat koordinasi periodik di Kementerian Perindustrian.

Kriteria Industri Sasaran:

- Industri yang telah ada selama waktu tertentu (bukan yang baru didirikan), dimana industri skala kecil / medium terkonsentrasi pada level tertentu, dan namun tidak tertutup kemungkinan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru dari industri yang dipilih.
- Menghasilkan produk jadi, bukan produk setengah-jadi (kecuali bagi produk komponen).

Dari wilayah / industri yang mengusulkan kepada Sekretariat Ditjen IKM, akan disaring dan kemudian dikonfirmasi. Dalam pengertian ini, sejumlah varietas industri / komoditas yang wajar harus dipastikan saat memeriksa daerah/ industri, sekaligus untuk mengkonfirmasi apakah kondisi diatas dapat terpenuhi. Jumlah daerah/industri yang akan dipilih tahun 2016 akan ditetapkan oleh Dirjen IKM.

Lampiran Surat Nomor 61 /IKM/ 3/ 2016

1. Kepala Dinas Perindag Provinsi NAD
2. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Perindag Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Perindag Provinsi Riau Kepulauan
6. Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Perindag Provinsi Bengkulu
8. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Dinas Perindag Provinsi Bangka Belitung
10. Kepala Dinas Perindag Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Perindag Provinsi Banten
12. Kepala Dinas Perindag DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat
14. Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Tengah
15. Kepala Dinas Perindag Provinsi DIY
16. Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Timur
17. Kepala Dinas Perindag Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Perindag Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Dinas Perindag Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Selatan
23. Kepala Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Utara
25. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Utara
26. Kepala Dinas Perindag Provinsi Gorontalo
27. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tengah
28. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Barat
29. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan
30. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tenggara
31. Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara
32. Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku
33. Kepala Dinas Perindag Provinsi Papua Barat
34. Kepala Dinas Perindag Provinsi Papua

Lampiran-10:
Daftar Disperindag Provinsi yang berminat untuk berpartisipasi
dalam tahap penerapan model fasilitasi SMIDeP berbasis petunjuk

Daftar Dinas Perindag Provinsi yang berminat pada penerapan Model Fasilitas SMIDeP berbasis Petunjuk

Pada akhir April 2016

No.	Dinas Perindag	Nama Kontak	Jabatan	Kab./Kota, Industri	Status Balasan (ke Ditjen IKM)	Keterangan
1	Bangka Belitung	Hj. Jamilah, SH	Sekretaris	Kab. Bangka Barat Pewter timah (kerajinan)	Berkomitmen secara resmi utk penerapan model dgn membalas ke Ditjen IKM.	Lebih baik jika tersedia pelatihan fasilitasi bagi fasilitator/ Pokja. Perlu pendampingan tenaga ahli (masalah produktivitas, komposisi timah).
2	Sulawesi Tenggara	Monasman	Kabid Industri	Kota Bau-Bau Pengolahan mutiara Mabe	Berkomitmen secara resmi utk penerapan model dgn membalas ke Ditjen IKM.	
3	Bali	I Gde Wayan Suamba	Kabid Aneka Industri	Kab. Karangasem Anyaman, atau tenun grinsing	Diputuskan utk tidak berpatisipasi, karena tidak dapat mempersiapkan utk memenuhi persyaratan.	
4	Kalimantan Barat	Bulyadi S., Yenny Susilawati	Kabid IKAHH Kabid ILMEA	Kab. Sintang/ Kapuas Hulu Tenun ikat	Akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh Ditjen IKM.	
5	Sumatera Selatan	Peri Rizal	Kabid Industri Non-agro	Kab. OKI & Ogan Ilir Fashion berbasis songket	Diputuskan utk tidak berpatisipasi.	
6	Sulawesi Barat	Idrus	Kabid Industri	Kab. Mamuju Pengolahan kakao	Berkomitmen secara resmi utk penerapan model dgn membalas ke Ditjen IKM.	
7	Sulawesi Selatan	Meyke N.S.	Kabid IKAHH	Kota Makassar Emas-perak (kerajinan)	Berkomitmen secara resmi utk penerapan model dgn membalas ke Ditjen IKM.	Telah mengadakan FGD pertama dgn mengundang staf lokal dari Tim SMIDeP.
8	Jambi	Rosnifa	Kabid Industri Kecil Kerajinan	Kota Jambi Fashion berbasis Batik	Diputuskan utk tidak berpatisipasi, karena tidak dapat melihat manfaat (dari model fasilitasi SMIDeP).	
9	Papua Barat	M.M. Quillo	Kabid Industri	Kab. Fak Fak Pala	Diputuskan utk tidak berpatisipasi, karena belum memperoleh persetujuan dari Kadis pada saat ini.	
10	Jawa Timur	Yannedi	Kabid IATT	Kab. Lamongan Komponen kapal	Berkomitmen secara resmi utk penerapan model dgn membalas ke Ditjen IKM.	Ingin mengikuti model bantuan dari Kab. Tegal.
11	Papua	Elsje Pekade	Kabid Industri	Belum ditemskan utk daerah. Pengolahan makanan (kopi, kakao, buah merah)	Berkomitmen secara resmi utk penerapan model dgn membalas ke Ditjen IKM.	

12	Sulawesi Utara	Alwy Pontoh	Kabid IKM	Ide belum ditawarkan.	Diputuskan utk tidak berpartisipasi, karena belum memperoleh persetujuan dari Kadis pada saat ini.	
13	Bengkulu	Hermadewi	Kabid Industri	Mebel kayu kelapa	Diputuskan utk tidak berpartisipasi, karena tidak dapat mempersiapkan utk memenuhi persyaratan.	
14	Aceh	Murni	Kabid Industri	Kerajinan kulit	Akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh Ditjen IKM.	

Lampiran-11:
Surat permohonan konfirmasi kesediaan
sebagai calon sasaran penerapan model fasilitasi SMIDeP
(kepada pemerintah daerah yang berminat)



Nomor : 3401/KM.1/4/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Konfirmasi Kesiadaan sebagai Calon Sasaran
Penerapan Model Fasilitas SMIDeP

Jakarta, 13 April 2016

Kepada Yth.
Kadis Perindag Provinsi terlampir
di –

TEMPAT

Menyusul surat kami Nomor 61/IKM/3/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Penawaran Pendekatan SMIDeP dalam Fasilitas Pengembangan Industri Daerah dan hasil konsultasi mengenai penerapan Model Fasilitas SMIDeP dalam Rakornas di Aceh, bersama ini disampaikan bahwa terdapat 14 (empat belas) provinsi yang melakukan konsultasi dengan Tim SMIDeP dan Ditjen IKM.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan agar kiranya Saudara dapat memberikan konfirmasi kesiadaan dan komitmen untuk didaftarkan sebagai calon sasaran dari penerapan Model Fasilitas SMIDeP dengan melengkapi:

1. Nama Provinsi/ Dinas
2. Jenis Industri Sasaran
3. Kabupaten/ Kota yang memiliki industri tersebut (sebagai mitra)
4. Calon anggota POKJA yang terdiri atas (tentatif), meliputi:
 - Pimpinan Pokja (nama dan jabatan)
 - Sekretaris Pokja (nama dan jabatan)
 - Anggota (nama instansi dan bidang dari instansi tersebut)
 - Fasilitator (nama, jabatan dan instansi)

Surat konfirmasi dan kelengkapan tersebut diharapkan dapat kami terima paling lambat tanggal 29 April 2016 untuk selanjutnya akan kami tentukan Provinsi yang memiliki komitmen dengan memenuhi persyaratan (sebagaimana terlampir) yang kemudian menjadi sasaran pembinaan dari penerapan Model Fasilitas SMIDeP pada tahun anggaran 2017- 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih



Tembusan:

1. Dirjen IKM (sebagai laporan);
2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen IKM;
3. Chief Advisor JICA;
4. Peringgal

Lampiran Surat Nomor 340/IKM.1/4/2016

1. Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Perindag Provinsi Bangka Belitung
(sudah menerima surat konfirmasi)
4. Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Dinas Perindag Provinsi Bali
6. Kepala Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Barat
7. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Barat
8. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan
9. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tenggara
(sudah menerima surat konfirmasi)
10. Kepala Dinas Perindag Provinsi Papua Barat
11. Kepala Dinas Perindag Provinsi Bengkulu
12. Kepala Dinas Perindag Provinsi DIY
13. Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Utara
14. Kepala Dinas Perindag Provinsi Papua

**Persyaratan bagi Pemda (Disperindag Provinsi)
untuk Mengikuti Model Fasilitas Pengembangan Industri Lokal**

Seperti yang telah disampaikan dalam surat penawaran Ditjen IKM ke seluruh Disperindag Provinsi, Ditjen IKM telah memutuskan untuk memperluas penerapan Model Fasilitas SMIDeP berbasis Petunjuk untuk pengembangan industri lokal ini ke daerah lain, terutama bagi Pemda-Pemda yang dapat berkomitmen untuk mengikuti model fasilitas tersebut. Guna melengkapi surat penawaran dan lampiran kemarin, surat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai persyaratan bagi pemda (Dinas Perindag) serta industri (komoditas) yang dapat menjadi fokus dalam fase perluasan, sebagai berikut;

Persyaratan bagi Pemda (Dinas Perindag) Provinsi

- 1) Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) lintas lembaga/ sektoral yang melibatkan pelaku usaha dari industri sasaran untuk memfasilitasi pengembangan industri lokal di daerah dan menjalankan proses fasilitasnya (tugas Pokja) sebagai berikut;
 - Diagnosis (identifikasi pemangku kepentingan terkait dan masalah/ kendala dari industri sasaran),
 - Penyusunan Rencana Aksi untuk pengembangan industri sasaran,
 - Fasilitas pelaksanaan Rencana Aksi,
 - *Monitoring/ review* dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi.
- 2) Merumuskan Kelompok Kerja (Pokja) daerah yang dikukuhkan dengan SK pimpinan daerah untuk mempermudah komunikasi dan kerja sama lintas lembaga/ sektoral di daerah. Pokja ini sebaiknya yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perindag, bersekretariat pada Kepala Bidang tertentu/ Sekretariat dari Dinas Perindag, dan beranggotakan lintas-Dinas/ lembaga termasuk;
 - Disperindag Kabupaten/ Kota yang memiliki industri sasaran (menjadi mitra dari Dinas Provinsi),
 - Dinas terkait, seperti yang memiliki hubungan dari sisi bahan baku, permodalan, tenaga kerja (melibatkan yang dianggap penting),
 - Badan/ lembaga terkait dengan industri sasaran,
 - Perwakilan dari pihak pelaku usaha (boleh dalam bentuk koperasi, asosiasi, KUB, dll),
- 3) Menugaskan fasilitator (dapat lebih dari 1 orang jika diperlukan) sebagai anggota Pokja daerah. Fasilitator ini dapat direkrut baik dari internal maupun eksternal Dinas Perindag. Jika direkrut dari internal Dinas, PFPP, Shindan-shi, atau staf dari UPL dapat dimanfaatkan,
- 4) Menganggarkan biaya perjalanan Dinas, baik secara berkala ke Kabupaten/ Kota (dan lokasi industri sasaran) yang ditunjuk, dan kadang ke Ditjen IKM (misalnya, 3 kali per tahun untuk koordinasi/ pelaporan), serta juga biaya pertemuan pada saat FGD (misalnya, 2 kali untuk diagnosi dan penyusunan Rencana Aksi) dan Pokja (misalnya, 3 bulan sekali untuk fasilitas, monitoring/ review dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi antara anggota Pokja).
- 5) Dapat mempersiapkan maupun merevisi anggaran bantuan sesuai dengan tujuan fasilitasnya serta kebutuhan industri sasaran, dan mengusahakan untuk mengarahkan Dinas/ lembaga terkait kedalam suatu tujuan Rencana Aksi dengan menganggarkan dana bantuan.

Persyaratan terkait Industri Sasaran

- 1) Merupakan Industri Unggulan Provinsi (IUP), Kompetensi-Inti Daerah (KIID), prioritas dan sebagainya dari Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), atau akan didasarkan dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPID).
- 2) Telah ada selama waktu tertentu (bukan yang baru didirikan), dimana IKM/ usaha produsen terkonsentrasi pada level tertentu, namun tidak tertutup kemungkinan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru.
- 3) Menghasilkan produk-jadi (dapat digunakan langsung oleh konsumen umum), bukan produk setengah-jadi namun terbuka untuk produk komponen (misalnya, yang berbasis logam untuk kapal, otomotif, elektronika, dll) dan sebagainya.

Akan lebih dihargai jika industri tersebut;

- 4) Memiliki potensi untuk membentuk atau memperkuat hubungan yang saling menguntungkan/ membutuhkan dengan industri skala besar dari sektor prioritas nasional yang ditunjukkan dari Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN 2015-2035).
- 5) Merupakan industri sasaran (di tingkat Kabupaten/ Kota) dari Program DAK Pengembangan Sentra maupun Revitalisasi Sentra.

Lampiran-12:
Minutes of Meeting dari Komite Koordinasi Bersama
(JCC; pertama, kedua, ketiga) dan mid-term monitoring

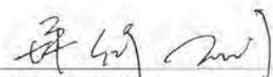
The Minutes of Meeting
of
The Joint Coordination Committee
on
The Project on Small and Medium Industry (SMI) Development
based on Improved Service Delivery
in
Indonesia

The First (kick-off) Joint Coordination Committee (JCC) for the Project on Small and Medium Industry (SMI) Development based on Improved Service Delivery in Indonesia (hereinafter referred to as the "Project") is held on 26 April, 2013 at the meeting room of Directorate General for Small and Medium Industry (DG-SMI) of the Ministry of Industry (MoI), and chaired by the Director General for Small and Medium Industry (Dirgen-SMI) and the Director for Small and Medium Industry Region I (who succeeded Dirgen-SMI after she cessed).

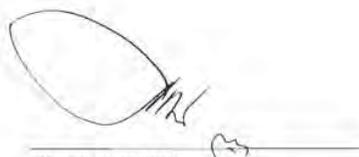
The JCC is commenced with the opening remarks by Dirgen-SMI at 9:30 am, followed by the welcome speech from JICA Indonesia Office to the participants of the JCC. Subsequently, the Chief Advisor of the JICA Expert Team explained the work plan (ver. 0) of the Project and requested the necessary arrangements for the smooth execution of the Project activity. Then, the chair opened the JCC for the discussion among the participants, and the closed the JCC at 11:30 am.

As a result of the JCC, all the parties which engage in the Project, including DG-SMI, the local governments in the target regions of the Project, and the other related stakeholders basically agreed on the Work Plan (ver. 0) of the Project. The main points discussed and confirmed during the discussion in the JCC are as per attached.

Jakarta, April 26, 2013



Mr. Taro TSUBOGO
Chief Advisor
The Project on SMI Development based on
Improved Service Delivery



Ms. Euis SAEDAH
Chair of JCC
Director General for Small and Medium
Industry, the Ministry of Industry

The Main Points Discussed and Confirmed in the First JCC

1. DG-SMI expressed her concern on a necessity of capacity building of government officials who engage in planning and provision of the support programs to SMIs, and expectation for the Project to collaborate with other related Directorates in the MoI, other related institutions such as the Ministry of Cooperatives and SMEs, the Ministry of Trade, and Bank Indonesia.
2. DG-SMI confirmed that the Project shall be implemented for the target industries at the three regions according to the structure of DG-SMI (by region) including the provinces of North Sumatra, Central Java (Tegal District) and Central Sulawesi.
3. The target industries in each target region of the Project shall be as follows:
Region I: To be further discussed and confirmed during May 2013 between DG-SMI and Dinas Industry and Trade of North Sumatra, based on the core-competence commodities
Region II: Metal parts industry (focusing on the metal components for shipping, automobile and heavy machinery) in Central Java Province/ Tegal District
Region III: Cocoa processing/ rattan furniture industries (prioritized out of the originally recommended four local resources based industries) in Central Sulawesi Province
4. DG-SMI agreed on formation of the Project counterpart team (referred to as the Project Implementation Unit: PIU) which shall support and guide the Local Working Group (LWG) to be formed for each target industry above during June 2013.
5. Both Dinas Industry and Trade (Disperindag) Central Java and Central Sulawesi Provinces agreed on formation of LWG for the target industries, and assignment of facilitator (to be recruited from *Shindan-shi* or field extension staff), and nomination of the trainees for the facilitation training to be held in early of July 2013 at Pusdiklat of the MoI, Jakarta.
6. LWG for the metal parts industry shall be organized under the leadership by Disperindag Tegal, and involve the relevant officials of Disperindag Central Java. LWG for the target industries in Central Sulawesi shall be organized by Disperindag Central Sulawesi involving the relevant officials of Disperindag Palu City.
7. Both Disperindag Central Java and Central Sulawesi Provinces expressed their commitment to engage in the Project activity and the support for their target industries, referring to the budget arranged for FY2013 and preparedness for FY2014 in accordance to the Action Plan for Local Industry to be prepared during the course of Project.
8. Disperindag Central Java highlighted a necessity to discuss the role-sharing among the central, provincial and district/ city governments for the said Action Plan. In this regard, the Expert Team recommended the participants to review the existing guidance (*pedoman*) for the core-competence development program of MoI, and revise this if deemed necessary, and noted that guideline preparation for local industry development is one of the activities to be followed in the Project.
8. Concerning the formation of LWG and other related matters in the target region of North Sumatra, the Expert Team shall visit to Disperindag of province and district/ city in the mid of June, once the target industry is confirmed by DG-SMI.

List of Attendance

Indonesian side

Central government

- Directorate General for Small and Medium Industry, Ministry of Industry including:
 - Secretariat of Director General for Small and Medium Industry
 - Directorate of Small and Medium Industry Region I
 - Directorate of Small and Medium Industry Region II
 - Directorate of Small and Medium Industry Region III
- Directorate General for International Industrial Cooperation
 - Secretariat for Director General for International Industrial Cooperation
- Directorate of Cooperative & SME Empowerment, Deputy for Poverty, Manpower & SME, BAAPLENAS
- Bureau of Planning, Secretariat, Ministry of Cooperatives and SMEs
- Directorate of Small and Medium Scale Business and Domestic Products, Directorate General for Domestic Trade, Ministry of Trade
- Department of Rural Bank and MSME, Bank Indonesia

Local Government

- Dinas Industry and Trade, North Sumatra Province (with Dinas Industry and Trade, District Samosir)
- Dinas Industry and Trade, Central Java Province
- Dinas Cooperatives, UMKM, Industry and Trade, Central Sulawesi Province

Japanese side

- JICA Indonesia Office
- JICA Expert Team

The Minutes of Meeting
of
The Joint Coordinating Committee (Second)
on
The Project on Small and Medium Industry (SMI) Development
based on Improved Service Delivery
in
Indonesia

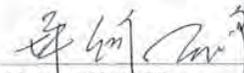
The Second Joint Coordinating Committee (JCC) for *the Project on Small and Medium Industry (SMI) Development based on Improved Service Delivery in Indonesia* (hereinafter referred to as the "Project") was held on July 1st 2014 at the meeting room of Directorate General for Small and Medium Industry (Ditjen IKM) of the Ministry of Industry (MoI), and chaired by a Secretary of Directorate General of Small and Medium Industry.

The JCC was commenced with an opening remark by the chair at 13:10 pm. Subsequently, the Chief Advisor of the JICA Expert Team explained the overall progress/ achievements of the Project during the Project Phase I, defined and shared the Project Goal, and requested necessary follow-up actions/ facilitations by Ditjen IKM and concerned local governments through the Local Working Group (LWG).

Then, the progress and achievements of the Local Industry Action Plan (LIAP) through the platform for local industry development were explained in detail by each LWG. And, the chair opened the JCC for the discussion among the committee participants, and finally closed the JCC with his closing remark at 15:15 pm.

The main points discussed and confirmed during the discussion in the JCC are as per attached.

Jakarta, July 1, 2014



Mr. Taro TSUBOGO
Chief Advisor
The Project on SMI Development
based on Improved Service Delivery



Mr. BUSHARMAIDI
Chair of the second JCC
Secretary to Directorate General for Small and
Medium Industry, the Ministry of Industry

The Main Points Discussed and Confirmed in the Second JCC

1. The Project Goal was reconfirmed, so that the Project SMIDeP shall aim to improve the work model/ the technical guideline for local industry development together with Ditjen IKM, and internalize the technical guideline (harmonizing this with the existing guidelines) in view of ensuring the better planning and implementation of the existing programs such as *Kompetensi Inti Industri Daerah, Industri Unggulan Provinsi*, and Industry Cluster Development.
2. As for reminders made by the Expert Team concerning, i) comments/ announcement on the service provider (support institution) directory database (demo-version) to the Service Directory Team and, ii) recommendation of options of additional target industry, Ditjen IKM has commenced responding to these respects, and shall follow-up through holding internal meeting in Ditjen IKM. The follow-up results of both respects shall be reported to the Expert Team.
 - * After the Phase II of the Project starts, the Expert Team shall confirm the additional target from recommended options and report them to JICA Head Office for its acknowledgement. Then, the Expert Team shall start assisting the field activity with the formation of the Local Working Group (LWG) for additional industry.
3. Concerning the progress/ achievements and further facilitation to the Local Industry Action Plan (LIAP) for target industries, the participants discussed and confirmed as follows;

Uloa fashion industry in Samosir District

Main issue faced has been a limited producing capacity (in terms of skills and raw materials) of Uloa-applied handicrafts/ fashion products, although a good number of potential buyers show interests in such products.

Metalwork (ship-parts) industry in Tegal District

The process to component certification by Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) has been scheduled, and target five components have been ready to be brought to BKI for final performance test. Once these components are certified, the Local Working Group (LWG) shall activate promotion support to shipbuilding industry, for example, in Batam, where the necessary warehouse for components can be facilitated through the cooperation among all the level of government. Replacement of casting materials to standard ones shall be also considered.

Cacao processing industry in Central Sulawesi Province

The LWG needs to consider how cacao/ chocolate products of Central Sulawesi become regional specialty, which possesses clear difference and uniqueness from other regions, in case regional/ national markets are also targeted.

Rattan furniture industry in Palu City

As for the program of Comfort School with Rattan, an importance of coordination with Dinas Education in terms of budget source and technical guideline was raised by the LWG. In response to this, Ditjen-IKM reminded that technical guideline which enables school/ dinas to use rattan furniture was already prepared, and suggested that the program shall be commenced on a pilot basis while utilizing fund through Corporate Social Responsibility.

4. Ditjen IKM explained the newly enacted Bill of Industry (No. 3 in 2014) to the regional participants, citing the articles concerning i) empowerment of SMI related institutions, ii) a wider scopes of facilitation support to SMIs including raw material provision), and iii) special care for cultural based industries.
5. Approach to facilitation of local industry development can differ from newly formed industry to the long-run industry and depending on the characteristics of commodity. Such differences in approach observed during the Project shall be reflected into the work model/ technical guideline to be prepared in the Phase II. Further, a reasonable variety of industry/ commodity shall be ensured when recommending additional industry for the Phase II.
6. Ditjen IKM at the end of JCC wished that the Project experiences shall be a reference to our SMI development, and also stressed that it is the regions that best understand what issues can be highlighted and what supports can be proposed for their local industries. The central government is fully committed to the needs from regions, however, shall also examine whether the objective or challenge set by the action plan is clear and realistic enough.

List of Attendance (Institution)

Indonesian side

Central government

- Ministry of Industry including:
 - Secretariat of Directorate General of Small and Medium Industries (Ditjen-IKM)
 - Directorate of Small and Medium Industries for Region I, Ditjen-IKM
 - Directorate of Small and Medium Industries for Region II, Ditjen-IKM
 - Directorate of Small and Medium Industries for Region III, Ditjen-IKM
 - Secretariat of Directorate General of International Industrial Cooperation (Ditjen-KII)
 - Directorate of International Industrial Cooperation for Territory II and Regional Area, Ditjen-KII
 - Directorate of Textile and Various Industries, Ditjen-BIM (related to *Ulos* fashion industry)
 - Directorate of Maritime, Air Transportation and Defense Equipment Industries, Ditjen-IUBTT (related to ship-parts industry)
 - Directorate of Food, Marine and Fishery Product Industries, Ditjen-IA (related to cacao processing industry)
 - Directorate of Region III, Industrial Regional Development for Region III, Ditjen-PPI (related to rattan industry)
- Directorate of Empowerment of SMEs and Cooperatives, Division of Poverty, Employment and SMEs, BAPPENAS
- Bureau of Planning, Secretariat, State Ministry of Cooperatives and SMEs/ Micro Enterprises
- Department of Credit, Rural Bank and SMEs, Sector of Banking, Bank Indonesia

Local Government

- Dinas Cooperatives, Industry and Trade of Samosir District, North Sumatra Province
- Dinas Industry and Trade of Central Java Province
- Dinas Industry and Trade of Tegal District, Central Java Province
- Dinas Cooperatives, SMEs, Industry and Trade of Central Sulawesi Province
- Dinas Industry, Trade, Cooperatives and SMEs of Palu City, Central Sulawesi Province

Japanese side

- JICA Indonesia Office
- JICA Expert Team

The Minutes of Meeting of The Joint Coordinating Committee (Third) on

The Project on Small and Medium Industry (SMI) Development based on Improved Service Delivery in Indonesia

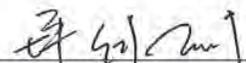
The Third Joint Coordinating Committee (JCC) for the Project on Small and Medium Industry (SMI) Development based on Improved Service Delivery in Indonesia (hereinafter referred to as the "SMIDeP") was held on June 16th 2015 at *Ukir* room of Directorate General for Small and Medium Industry (DG-SMI) of the Ministry of Industry (Mol), and chaired by the Secretary to the DG-SMI.

The JCC was commenced with an opening remark by the chair at 10:30 am. Subsequently, the Chief Advisor of the JICA Expert Team outlined the meeting agenda. JICA Expert Team then shared the outcomes and outputs of the SMIDeP, and explained the overall progress/ achievements so far of each output as well as the activity plan for one of the outputs; establishment of the work model and technical guideline for facilitation of local industry development based on the experiences and lessons learnt from the SMIDeP.

Then, the progress and achievements of the Local Industry Action Plan (LIAP) through the platform for local industry development were explained in detail by each Local Working Group (LWG; both of the Phase I and II). Afterward, the Secretariat of DG-SMI facilitated the discussion among the committee participants, and finally closed the JCC with a closing remark at 13:00 pm.

The main points discussed and confirmed during the discussion in the JCC are as per attached.

Jakarta, June 16, 2015


Mr. Taro TSUBOGO
Chief Advisor
The Project on SMI Development
based on Improved Service Delivery


Mr. BUSHARMAIDI
Chair of the third JCC
Secretary to Directorate General for Small and
Medium Industry, the Ministry of Industry

The Main Points Discussed and Confirmed in the Third JCC

1. The Technical Guideline Team is newly formulated in DG-SMI for the purpose of preparation of the work model and technical guideline for facilitation of local industry development, involving the Directorate General for Regional Industrial Development of MoI. The activity plan for this purpose is shared with DG-SMI, and consists of the five steps; i) evaluation of SMIDeP approach, ii) preparation of the work model, iii) preparation of the technical guideline, iv) dissemination of the work model/technical guideline at the national and regional levels (including the results of the SMIDeP), and v) any necessary support for preparation of the programs of DG-SMI.
2. In response to the request for DG-SMI to allocate the time in its national coordination meetings for the dissemination of work model/ technical guideline at the national level, DG-SMI indicates such an opportunity in its national coordination meeting in March 2016 or the budget preparation in August 2015. A suitable occasion would be confirmed once the target/ audience of dissemination are determined.
3. The establishment of work model/ technical guideline is the most important output from SMIDeP and DG-SMI will provide the necessary facilitation for this purpose.
4. Concerning the directory database for support institutions, which was demonstrated at the JCC, internal meeting among DG-SMI (Service Directory Team) and the Expert Team shall be organized in the coming week (the fourth week in June 2015) for the purpose of discussing its continued usage and implications to additional responsibility to DG-SMI first, and then uploading to the website of DG-SMI and determining the role of directory administrator. Representative of the Data Information Center (Pusdatin) of MoI shall be invited for technical confirmation, if deemed necessary.
5. Concerning the achievements/progress and further facilitation to the LIAP for target industries by LWGs, DG-SMI commented as follows;

Ulos fashion industry in Samosir Regency

An issue which has been unsolved yet is difficulty in obtaining raw material (threads/yarns) for weaving ulos fabric without relying on the traditional yarn supply system through the middlepersons. The usage of locally produced natural fiber (abaca) and dyes as alternative yarn source shall be considered, in addition to expanding the sources of yarn supply.

Metalwork (ship-parts) industry in Tegal Regency

Three ship components have been so far certified by Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), while the follow-up support activities and challenge for the certification of additional components have been also scheduled. This case is deemed as one of good models/practices for facilitation, which shall be adapted to other regions/sectors by DG-SMI.

Cacao processing industry in Central Sulawesi Province

Chocolate products from this industry has been already entering the target market segment and expanding the sales channel with a steady increase in sales volume. The cacao processing factory (Rumah Cokelat) will be legalized as a Technical Service Unit (UPTD) of provincial Dinas

Industry & Trade in view of accelerating promotion activity of this industry and ensuring its continuous operation. This case is also deemed as one of good models/practices for facilitation, revealing no immediate issues to be tackled.

Rattan furniture industry in Palu City

Remarkable achievement is not reported yet in this industry, although a variety of support activities has been facilitated by LWG including introduction of an audit system on adequate manufacturing process and a range of promotional support. Adequate practice of material treatment needs to be settled in this industry, or the common service facility to ensure quality material supply could be installed within the newly planned industrial zone (referred to as SIKIM) in Palu City.

Aloevera processing industry in Pontianak City

Major issues which have been faced by this industry include limited i) availability of adequate packaging material, ii) acknowledgement of good manufacturing process, iii) usage of supporting equipment (to realize efficient process and to obtain clean water), iv) market access, etc. Some of these issues are being/ will be dealt with by support activities proposed in the LIAP. DG-SMI advised that the service facility be installed in the scheduled industrial zone (SIKIM) in Pontianak City to tackle some of the above issues.

Footwear industry in Mojokerto City

LWG for this industry has commenced key support activities to create model SMIs, including technical guidance of 3S introduction, model product design/development support, business matching for market development, etc. In parallel with the model product development support, LWG shall facilitate the introduction of standard production practices (SOP coaching) to SMIs by mobilizing intensive technical guidance from Indonesian Footwear Industry Development Center (BPIPI).

List of Attendance (Institution)

Indonesian side

National Level Government

Ministry of Industry including:

- Secretariat of Directorate General of Small and Medium Industries (DG-SMI)
- Directorate of Small and Medium Industries for Region I, DG-SMI
- Directorate of Small and Medium Industries for Region III, DG-SMI
- Secretariat of Directorate General of International Industrial Cooperation (DG-IIC)
- Legal and Cooperation Division, Secretariat of DG-SMI
- Coordination Team in Project Implementation Unit (PIU) of DG-SMI
- Region I Team (responsible for *ulos* fashion/ aloe processing industries) in PIU of DG-SMI
- Region III (responsible for cacao/ rattan furniture industries) in PIU of DG-SMI
- Service Directory Team in PIU of DG-SMI
- Technical Guideline Team in PIU of DG-SMI

Local Government

- Dinas Cooperatives, Industry and Trade of Samosir Regency, North Sumatra Province
- Dinas Industry and Trade of West Kalimantan Province
- Dinas Industry and Trade of Central Java Province
- Dinas Industry and Trade of Tegal District, Central Java Province
- Dinas Industry and Trade of East Java Province
- Dinas Cooperatives, Industry and Cooperatives of Mojokerto City, East Java Province
- Dinas Industry and Trade of Central Sulawesi Province

Japanese side

- JICA Indonesia Office
- JICA Expert Team

**MINUTES OF MEETING
BETWEEN
JAPANESE MID-TERM REVIEW TEAM
AND
AUTHORITIES CONCERNED OF THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON
THE PROJECT ON SMALL AND MEDIUM INDUSTRY (SMI)
DEVELOPMENT BASED ON IMPROVED SERVICE DELIVERY
IN INDONESIA**

The Japanese Mid-term Review Team, organized by the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") visited the Republic of Indonesia from January 15 to January 23, 2015, for the purpose of conducting the mid-term review concerning "the Project on Small and Medium Industry (SMI) Development based on Improved Service Delivery in Indonesia" (hereinafter referred to as "the project").

During its stay in Indonesia, the Team exchanged views and had a series of discussions with the Ministry of Industry (hereinafter referred to as "MOI"), represented by Directorate General of Small and Medium Industry (hereinafter referred to as "DG-SMI"), and relevant organizations in regard with necessary measures to be taken by JICA and the Government of Indonesia represented by MOI for the successful implementation of the project.

As a result of the discussions, both sides reached a common understanding concerning the matters referred to in the document attached hereto.

Jakarta, 23rd January 2015



Kenji MISHIMA
Cooperation Planning
Med-term Review Team
Japan International Cooperation Agency
Japan



BUSHARMAIDI
Secretary to Directorate General for Small and
Medium Industry
Ministry of Industry
Republic of Indonesia

Main Points Discussed

1. Introduction of New Monitoring Method – “Monitoring Sheets”

MOI and JICA agreed that the “Monitoring Sheets” are to be used for monitoring the project progress. Both sides will jointly monitor the progress of the project through the “the Monitoring Sheets” based on Summary Sheets, Project Design Matrix (PDM) and Plan of Operation (PO) as attached hereto. The Monitoring Sheets shall be reviewed every six (6) months. Also, Project Completion Report shall be drawn up one (1) month before the completion of the project.

2. Modification of Project Design Matrix (PDM)

MOI and JICA agreed to the achievement of the project as of the mid-term review as the attached Monitoring Sheets. In addition, both sides agreed to modify, as shown in the attached Monitoring Sheets, the PDM – “Objectively Verifiable Indicators”: the indicator “3” of the project purpose, indicators “1-1” and “1-2” of the project output 1 and indicators “2-1”, “2-2” and “2-3” of the project output 2, although the modification is subject to final confirmation by JICA HQs.

3. Conclusion and Recommendation of Mid-term Review

MOI and JICA confirmed and agreed to the contents of the conclusion and recommendation of the JICA Mid-term Review Team as attached hereto.

Attachment 1: Monitoring Sheets

Attachment 2: Conclusion and Recommendation of Mid-term review team

Conclusion and Recommendation of JICA Mid-term Review Team on
“the Project on Small and Medium Industries (SMI) Development based on Improved
Service Delivery in Indonesia (SMIDeP)”

January 23rd, 2015

JICA Mid-term Review Team

According to a series of visit of the team to the pilot sites - metal working industry focusing in ship parts in Tegal Regency, Central Java, and cacao processing industry/rattan industry in Palu city, Central Sulawesi, as of the date of mid-term review, several positive impacts at enterprise level was observed such as quality improvement and sales increase as shown in the Monitoring Sheets.

However, it is more important that several good practices, which could contribute to modeling/establishing/utilizing efficient service delivery platforms (for local industry development) – the core objective to be achieved in the project, were also observed in the activities implemented by Local Working Group and other related organizations.

In order for pursuing effective service delivery platforms as one of the tools for SMI promotion even in the other regions/industries, and so as to make the operational guideline – to be developed through the project – more practically useful for all stakeholders involved in SMI promotion, the following recommendation ought to be addressed by the completion of the project.

1) Concept Sharing of SMIDeP Approach

It was observed that each stakeholder understands the main focus of the project but in a different way. Some consider it is the direct support to local producers by the Japanese experts, for example in the field of 3S. Some others consider that the main focus of the project is business development itself of local producers supported by various programs during the project. It should be clarified that the main purpose of the project is to establish the efficient approach/models to deliver support services for developing local industries in various areas in Indonesia, not just pursuing the development of businesses in the model provinces.

Therefore, it is recommended to share again the purpose and concept of the project among all the project stakeholders through the initiative of Directorate General of Small and Medium Industry (DG-SMI). It is also recommended to involve other DGs of MOI, of which roles are closely linked with the project purpose.

2) Guideline of the SMIDeP Approach

The mission team is concerned about utilization of the SMIDeP approach by DG-SMI, local governments and other stakeholders after the project was completed. To enhance awareness of the SMIDeP approach, stakeholders need to be involved in the process of preparing the guideline, which contains a concept and steps for implementation of the SMIDeP approach as well as good practices of applying the approach in model provinces. Hence, it is recommended that MOI staff and other stakeholders actively participate in discussions in the process of preparing the guideline.

Contents of the guideline are based on the results of actions taken to pilot activities in selected sites. The purpose of pilot activities is to extract lessons of success and failure including reasons why they had such consequences. Patterns of stakeholders' involvement and the role and training of facilitators as well as mobilizing budget sources for supporting programs could influence the quality of the actions taken. Monitoring activities in Local Working Group and periodical monitoring by DG-SMI could be also important for the quality of implementation of Action Plans developed by Local Working Groups. In addition, the way of using the web-based service directory should be carefully considered in developing the guideline.

For the pursuit of preparing a useful guideline, it is necessary to test the applicability of models/lessons led by SMIDeP approach continuously. Thus, it is expected to implement activities at new pilot sites of Mojokert and Pontianak based on the implications from 4 model activities in Samosir, Tegal and Palu. In-depth analysis of pilot activities with factors for success and failure makes it possible to form the applicable guideline of the SMIDeP approach.

3) Involvement of Other Stakeholders

The mid-term review team had discussions with DG of Regional Industry Development and DG of Leading Industry with High Technology as well as Planning

Bureau under Secretary General of MOI and found that there are other potential resources for improving sustainability of the SMIDeP approach. For example, DG of Regional Industry Development supports regencies/cities to formulate roadmaps of potential industry development. The guideline of SMIDeP can support their effort to improve the quality of roadmaps and implementation of the actions described in those roadmaps by providing the clear method for industrial development. The guideline of SMIDeP might be used when local governments develop Regional Industry Development Master Plan. Another example is to utilize *Shindan-shi* (SMI Management Consultant) and field officers belonging to *Unit Pendampingan Langsung* (UPL) in Dinas Industry and Trade, who could play an effective role as facilitators of Local Working Group of SMIDeP as was the case in Tegal and Palu.

As was seen in the above examples, it is possible that there are other institutions which can be involved to strengthen the SMIDeP approach. Therefore, it is recommended to share the project information with other institutions especially those under MOI. This could help other institutions recognize the SMIDeP approach as a tool for industrial promotion. Workshops to share lessons learned from the already implemented activities are a possible way to start strengthening such links with potential partner institutions.

END

Lampiran-13:
Minutes of Meeting dari Komite Koordinasi Bersama (JCC) terakhir

The Minutes of Meeting
of
The Joint Coordinating Committee (Terminal)
on
The Project on Small and Medium Industry (SMI) Development
based on Improved Service Delivery
in
Indonesia

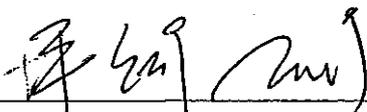
The Terminal Joint Coordinating Committee (JCC) for the Project on Small and Medium Industry (SMI) Development based on Improved Service Delivery in Indonesia (hereinafter referred to as the "SMIDeP") was held on March 22, 2016 at *Ukir* room of Directorate General for Small and Medium Industry (DG-SMI) of the Ministry of Industry (MoI), and chaired by the Secretary to the DG-SMI.

The JCC was commenced with an opening remark by the chair at 10:20 am. Subsequently, the Chief Advisor of the JICA Expert Team outlined the meeting agenda. JICA Expert Team then shared the achievements of the outputs and the Project Purposes of the SMIDeP, the result of overall evaluation of the SMIDeP, and the prospect for attainment of the overall goals, and further suggested the recommendations for DG-SMI to extend the facilitation model based on the guideline, which was formulated as an important outcome from the filed facilitation activities through the SMIDeP.

On the other hand, DG-SMI explained its scenario for the extension of the facilitation model of the SMIDeP based on the guideline, stating that the recommendations made by JICA Expert Team would be examined and taken into account. Afterward, the DG-SMI facilitated the discussion among the committee participants, and finally closed the JCC with a closing remark at 12:15 pm.

The main points discussed and confirmed during the discussion in the JCC are as per attached.

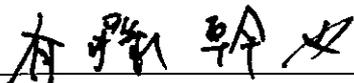
Jakarta, March 22, 2016



Mr. Taro Tsubogo
Chief Advisor
Project on SMI Development based on
Improved Service Delivery in Indonesia



Mr. Roy Sianpar
Chair of the Terminal JCC
Secretary to Directorate General for Small and
Medium Industry, the Ministry of Industry



Witnessed by Mr. Mikiya SAITO
Senior Representative, Indonesia Office
Japan International Cooperation Agency



The Main Points Discussed and Confirmed in the Terminal JCC

1. DG-SMI duly shared the evaluation result of the technical cooperation of SMIDeP during the last three (3) years, which was presented by the Expert Team in this Joint-coordinating Committee, and was satisfied with the extent of achievement of both the outputs and the Project Purposes, and the concept of the facilitation model formulated as a result of the technical cooperation.
2. DG-SMI decided and would commit to extend the SMIDeP model and guideline for facilitation of local industry development to other regions, in response to the successful facilitation cases by the SMIDeP approach in its target regions/ industries. A commitment of DG-SMI to the model extension based on the guideline was already acknowledged by the last statement of Director General for SMI (Dirjen IKM) at the national coordination meeting (RAKORNAS) in Bengkulu Province in February 2016 and the subsequent letter issued by Dirjen IKM concerning the offer of the SMIDeP facilitation model to all the provincial governments.
3. As a follow-up to the result of the consultative session to be organized at RAKORNAS in Aceh Province at the end of March 2016 to the regional governments which would show their interest in facilitating their industries according to the model and guideline, DG-SMI would select the regional governments/ industries to be focused according to the appropriate criteria and points of view made through the internal discussion in DG-SMI.
4. In view of ensuring the institutional and budgetary arrangements of DG-SMI in an optimal manner for the purpose of extending the facilitation model based on the guideline, DG-SMI shall pay its due attention onto the Recommended Actions presented by the Expert Team to DG-SMI (specified in the attachment of this Main Points Discussed and Confirmed), in particular on such aspects as incentive for the regional governments to use the facilitation model/ guideline, and the budget for guidance/ monitoring and support activities by DG-SMI to those selected regional governments.
5. The Bank Indonesia appraised effectiveness of the SMIDeP approach highly, thereby pointing out the importance that DG-SMI would extend the facilitation model of SMIDeP to other regions. The Bank then emphasized that it would be challenging but essential for the regional government to take initiative in adopting the SMIDeP model for the local industry development without much dependence on the central government.
6. The Ministry of Cooperatives and SMEs also highly assessed effectiveness of the SMIDeP approach, stating that the approach would be effective for the local industry development in other regions. The Ministry, at the same time, underscored significance to deal with the challenge related to lack of human resources in the regional government in facilitating local industry development.
7. KADIN remarked that the SMIDeP approach corresponded to its SMI promotion concept, thereby presenting its interests in collaboration with DG-SMI for SMI promotion. KADIN underlined necessity to develop upstream and intermediate (components) industries that are relatively less nurtured compared to the downstream/ creative industries; for this, it would be more effective if there were incentives policies to accelerate the development.
8. In response to remarks as well as concern raised by various participants about sustainability of the

M. d

RT

SMIDeP, the JICA conveyed that it would be essential for DG-SMI to set the concrete policy and actions to extend the facilitation model of SMIDeP to other regions. The JICA continued to state that it would be difficult to extend the model to all the regions; rather DG-SMI should focus on the limited number of the regions/ industries that are willing and commit to utilize the facilitation model for local industry development. The JICA expressed its hope that DG-SMI would allocate budget/ incentive to the extension stage of SMIDeP facilitation model, which would, even if small in amount, yield an important outcome motivating other regions to follow.

9. DG-SMI expressed its expectation for JICA to continue technical cooperation for the extension stage of SMIDeP facilitation model, especially in such a way that DG-SMI and JICA would extend the facilitation based on the SMIDeP model/ guideline in different regions in parallel. The JICA responded that an expert to be dispatched from the JICA would monitor the progress of the extension stage to other regions by DG-SMI's initiative for a while in order to assess the relevance to render the further support from JICA.

**Recommended Actions to DG-SMI
for the Extension of Facilitation Model based on the Guideline to Other Regions**

1. The Model and Guideline for Facilitation of Local Industry Development

- DG-SMI shall authorize and publicize the Guideline as one of its guidelines or handbooks, in order to make the Guideline referential document for the local governments with willingness to follow the Facilitation Model of SMIDeP.
 - * The Guideline can also complement the guideline for preparation of Regional Industry Development Master Plan (the Ministerial Regulation No. 110/M-IND/12/2015).
- DG-SMI shall disseminate the Facilitation Model together with the Guideline to local governments (particularly to regency and mayoralty) even after the National Coordination Meeting in March 2016 through identifying or funding the relevant opportunities, and explain them with success stories of SMIDeP facilitation which can motivate local governments to follow the Model.

2. Incentive for the Local Governments to follow the Model and Guideline

- DG-SMI shall clearly indicate the incentive for local governments to follow the Facilitation Model based on the Guideline. If local governments commit to facilitate their industries after the Guideline, DG-SMI shall direct its support programs in an intensive and focused manner to such local governments/ industries (refer to the attached figure).
- DG-SMI can fund assignment of facilitators by local governments as a means of ensuring that local governments commit to facilitate their industries properly after the Guideline.
 - * Facilitators can be recruited either from internal or external Dinas Industry & Trade. If recruited from internal Dinas, DG-SMI can recommend mobilization of *Shindan-shi* with advising local government to direct a usage of de-concentration budget to this purpose.

3. Guidance and Monitoring to the Local Government

- DG-SMI shall formulate a Facilitation Team (as focal point to local governments) with assigning its officers for i) the overall coordination, ii) explanation of the Model and Guideline with the success stories of SMIDeP, and iii) guidance and monitoring to the local governments/ industries to be focused.
- DG-SMI (secretariat and each sector directorate) shall prepare the budget of travel expenses for the above purposes.

4. Capacity Building to the Officers of Local Governments/ DG-SMI and facilitators

- DG-SMI shall organize the facilitation training (or workshop) to the local governments to be focused (the Working Group members/ facilitators to be assigned), in order to ensure their proper understanding and usage of the Model and Guideline.
 - * The training opportunity can be also available to the officers of DG-SMI, so that they become able to render the adequate guidance of the Model and Guideline.
- DG-SMI can also optimize the usage of the support institutions' directory (uploaded to its web) and expand the regional coverage through the cooperation with local governments.

M. P.

PL

**Rekomendasi Aksi kepada Ditjen-IKM
untuk Perluasan Model Fasilitasi berbasiskan Petunjuk ke Wilayah Lain**

1. Model dan Petunjuk untuk Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal

- Ditjen IKM mengesahkan dan memublikasikan Petunjuk sebagai salah satu pedoman atau buku panduan, agar Petunjuk menjadi dokumen referensi bagi pemerintah daerah yang bersedia mengikuti Model Fasilitasi SMIDeP.
 - * Petunjuk dapat juga menjadi pelengkap Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/ Kota (PERMENPERIN No 110/M-IND/12/2015).
- Ditjen IKM mendiseminasi Model Fasilitasi beserta Petunjuk kepada pemerintah daerah (terutama kepada Kabupaten dan Kota) juga setelah Rapat Koordinasi Nasional IKM pada bulan Maret 2016 dengan mengidentifikasi atau mendanai kesempatan yang relevan, dan menjelaskannya dengan kasus sukses fasilitasi SMIDeP, sehingga dapat memotivasi pemerintah daerah untuk mengikuti Model tersebut.

2. Insentif bagi Pemerintah Daerah untuk Mengikuti Model dan Petunjuk

- Ditjen IKM menunjukkan insentif bagi pemerintah daerah untuk mengikuti Model Fasilitasi berbasiskan Petunjuk. Jika pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi industrinya sesuai Petunjuk, Ditjen IKM akan mengarahkan program dukungannya secara intensif dan terfokus kepada pemerintah daerah/ industri tersebut (lihat gambar terlampir).
- Ditjen IKM dapat mendanai penugasan fasilitator oleh pemerintah daerah sebagai upaya memastikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi industri mereka sesuai dengan Petunjuk tersebut.
 - * Fasilitator dapat direkrut baik dari internal maupun eksternal Disperindag. Jika direkrut dari internal Disperindag, Ditjen IKM dapat mengusulkan mobilisasi *Shindan-shi* dengan menyarankan untuk mengarahkan penggunaan Dana Dekosentrasi untuk tujuan ini.

3. Bimbingan dan Monitoring bagi Pemerintah Daerah

- Ditjen IKM membentuk Tim Fasilitasi (sebagai focal poin bagi pemerintah daerah) dengan menugaskan staf untuk i) koordinasinasi keseruluhan, ii) penjelasan Model dan Petunjuk dengan kasus sukses fasilitasi SMIDeP, dan iii) bimbingan dan monitoring kepada pemerintah daerah/ industri yang terfokus.
- Ditjen IKM (sekretariat dan direktorat sektoral) mempersiapkan anggaran biaya perjalanan untuk tujuan di atas.

4. *Capaciy building* bagi Staf Pemerintah Daerah/ Ditjen-IKM dan Fasilitator

- Ditjen IKM menyelenggarakan pelatihan fasilitasi (atau lokakarya) bagi pemerintah daerah yang terfokus (anggota Kelompok Kerja/ fasilitator yang ditugaskan), dalam rangka memastikan pemahaman dan penggunaan yang tepat dari Model dan Petunjuk tersebut.
 - * Kesempatan pelatihan di atas sebaiknya tersedia juga bagi staf Ditjen IKM, sehingga mereka mampu memberikan bimbingan yang memadai tentang Model dan Petunjuk.
- Ditjen IKM juga dapat mengoptimalkan penggunaan direktori lembaga dukungan (diunggah di situs) dan memperluas cakupan wilayah melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.



M.S.

List of Attendance (Institution)

Indonesian side

Ministry of Industry including;

- Secretary to Directorate General of Small and Medium Industries (DG-SMI)
- Directorate for Food, Wood-based Product and Furniture SMI, DG-SMI
- Directorate for Chemical, Textile, Handicraft and Various Product SMI, DG-SMI
- Directorate for Metal, Machinery, Electronics and Transport Equipment SMI, DG-SMI
- Secretariat of Directorate General for International Industrial Access Development and Industrial Resilience
- Secretariat of Directorate General for Industrial Regional Development
- Indonesia Footwear Industry Development Center (BPIPI)
- Legal and Cooperation Division, Secretariat of DG-SMI
- Program, Evaluation and Report Division, Secretariat of DG-SMI
- Technical Guideline Team, Project Implementation Unit (PIU) of DG-SMI
- Region I Team (responsible for *ulos* fashion/ aloe processing industries), PIU of DG-SMI
- Region II Team (responsible for ship-component/ footwear industries), PIU of DG-SMI
- Region III Team (responsible for cacao/ rattan furniture industries), PIU of DG-SMI

Related ministries/ institutions including;

- Bureau of Planning, State Secretary of the Ministry of Cooperatives, and Micro, Small and Medium Enterprises
- Directorate for Small and Medium Trade, and Domestic Products, the Ministry of Trade (MoT)
- Department of Small and Medium Enterprises Development, Bank Indonesia
- Directorate for Strengthening of Small and Medium-scaled Business and Association, the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN)

Japanese side

- JICA HQ (Mr. Nagae)
- JICA Indonesia Office (Mr. Saito, Mr. Igarashi)
- JICA Expert Team

A.S.

PLA

Lampiran-14:
Daftar produk (Petunjuk, Buku Panduan)

The List of Products prepared by the Project

Name of Product	Date of Preparation	Note
Technical Guideline for Local Industry Facilitation	March 2016	Attached
Guidebook for 3S Introduction	October 2014	Attached
Brochure of the SMIDeP Project	April 2013	Attached
Newsletter (Bulletin) of the SMIDeP Project (10 editions)	Every three month	Not attached
Topic article to the Project website of JICA	Periodically	Not attached

Daftar Produk yang disusun dalam Proyek

Nama Produk	Tanggal Penyusunan	Catatan
Petunjuk Teknis Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal	Maret 2016	Terlampir
Buku Panduan Pengenalan 3K	Oktober 2014	Terlampir
Brosur Proyek SMIDeP	April 2013	Terlampir
Newsletter (Buletin) Proyek SMIDeP (10 edisi)	Setiap tiga bulan	Tidak terlampir
Topik artikel dalam situs Proyek JICA	Secara periodik	Tidak terlampir

Petunjuk Teknis Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal



**Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia**

2016

Bekerjasama dengan

SMIDeP

Proyek Kerjasama Teknis JICA
Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan

Petunjuk Teknis Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal



**Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia**

2016

Bekerjasama dengan

SMIDeP

Proyek Kerjasama Teknis JICA
Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan

Petunjuk Teknis
Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal

Daftar Isi

Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Petunjuk	1
1.3 Definisi dan Pengertian	1

BAB II STRUKTUR FASILITASI

2.1 Platform Pengembangan Industri Lokal	3
2.2 Perumusan Kelompok Kerja	3
2.2.1 Pimpinan dan Keanggotaan	3
2.2.2 Otorisasi Keanggotaan	4
2.2.3 Peran dan Tugas	5
2.3 Penempatan Fasilitator	5
2.3.1 Kandidat Fasilitator	5
2.3.2 Otorisasi Penempatan	6
2.3.3 Peran dan Tugas	6

BAB III FASILITASI UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI LOKAL

3.1 Langkah Keseluruhan Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal	7
3.2 Diagnosis Industri	7
3.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup	7
3.2.2 Metode, Format dan Output	8
(1) Analisis pemangku kepentingan	8
(2) Analisis rantai pasok	9
3.3 Penyusunan Rencana Aksi	10
3.3.1 Tujuan dan Ruang Lingkup	10
3.3.2 Metode, Format dan Output	10
(1) Tujuan umum	11
(2) IKM sasaran	12
(3) Kegiatan dukungan	13
(4) Aksi oleh IKM sasaran	14
3.4 Pelaksanaan Rencana Aksi	15
3.4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup	15
3.4.2 Metode dan Output	16
(1) Pendekatan ke lembaga yang bertanggung jawab terhadap usulan dukungan	16
(2) Kerja sama dengan lembaga di luar perindustrian & perdagangan	16
(3) Mempertimbangkan keterkaitan antar kegiatan dukungan	17
3.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi	18
3.5.1 Tujuan dan Ruang Lingkup	18
3.5.2 Metode, Format dan Output	18
(1) Monitoring/ <i>review</i>	18
(2) Revisi Rencana Aksi	19
(3) Evaluasi	20
(4) Pelaporan monitoring/ <i>review</i> dan evaluasi	20

BAB IV INFORMASI SUMBER DUKUNGAN

4.1 Sumber Dukungan untuk Pengembangan Industri Lokal	21
4.2 Survei Profil Lembaga Dukungan	21
4.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup	21
4.2.2 Metode, Format dan Output	21
4.3 Fasilitas Dukungan dan Skema Pembiayaan bagi Pemerintah Daerah	22
4.3.1 Ditjen IKM di Kementerian Perindustrian	22
4.3.2 Ditjen Terkait di Kementerian Perindustrian	23
4.3.3 Kementerian Terkait (Perdagangan, Koperasi)	23
4.3.4 Fasilitasi dan Skema Pembiayaan dari Non-pemerintah	24

PENUTUP: ~ Hal-hal penting selama fasilitasi pengembangan industri lokal

Lampiran 1 Contoh Surat Keputusan Perumusan Kelompok Kerja: Tegal

Lampiran 2 Contoh Peta Pemangku Kepentingan

Lampiran 3 Contoh Analisis Rantai Pasok

Lampiran 4 Contoh Rencana Aksi Industri Lokal

Lampiran 5 Format Laporan Monitoring/ *Review*

Lampiran 6 Format dan Contoh Survei Profil Lembaga Dukungan

PENGANTAR

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional, dan berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. UU Perindustrian No.3 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melakukan pemberdayaan IKM guna mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional serta pengentasan kemiskinan, dan menghasilkan barang dan jasa industri untuk ekspor.

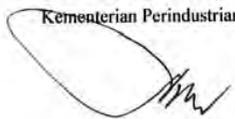
Kewajiban pemerintah tersebut didukung dengan PP No.14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Pelaksanaan UU dan PP diatas mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) atau Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (RPIK). Hal ini sejalan dengan arah otonomi daerah yakni pemerintah daerah adalah pelaku utama pembangunan industri lokal dengan memanfaatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan dan pemerintah pusat.

Sebagai salah satu upaya dalam menanggapi amanat tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (Ditjen IKM), telah melaksanakan kerja sama teknis dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam 'Proyek Pengembangan IKM melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia (*Project on Small and Medium Industry (SMI) Development Based on Improved Service Delivery SMIDeP*)'. SMIDeP ini telah memfasilitasi pengembangan industri lokal di wilayah percontohan melalui pembentukan dan pemanfaatan *platform* untuk pengembangan industri lokal, dengan prinsip 'Kolaborasi Kerja antara semua pemangku kepentingan di bawah Satu Rencana untuk Satu Industri Lokal'.

Sejauh ini, pendekatan SMIDeP memfasilitasi lima wilayah percontohan dengan berbagai sektor industri/ komoditas, dan telah menghasilkan kasus sukses di IKM, antara lain industri komponen kapal di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan industri pengolahan kakao di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kasus-kasus ini dipandang sebagai "model fasilitasi" yang dapat diterapkan oleh provinsi atau kabupaten/ kota lain. Pengalaman SMIDeP selanjutnya disusun sebagai **Petunjuk Teknis Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal** ini berdasarkan pendekatan, pelajaran dan praktik baik yang diperoleh melalui kegiatan fasilitasi di lapangan untuk wilayah/ industri percontohan dalam SMIDeP. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai referensi bagi pemerintah daerah, yaitu Dinas Perindag, dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pengembangan industri lokal yang lebih baik.

Maka sejalan dengan hal tersebut, kami mempublikasikan serta mengantarkan Petunjuk Teknis ini kepada saudara-saudara di daerah. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan pembinaan IKM/ industri lokal kita akan lebih efektif dan berorientasi pada tujuan.

Jakarta, Maret 2016
Direktur Jenderal
Industri Kecil dan Menengah
Kementerian Perindustrian



EUIS SAEDAH

Kasus Sukses dengan Pendekatan SMIDeP -1

Industri Sasaran	: Industri komponen kapal
Lokasi	: Kabupaten Tegal
Landasan	: Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kabupaten Tegal
Tujuan Utama	: IKM-IKM komponen kapal mampu membuat komponen kapal BKI-klas, dan menyuplainya ke industri galangan kapal.
Pemangku	: Disperindag Kab., Disperindag Prov., Bappeda Kab., Kemenperin (Ditjen IKM, ILMATE), BI Cab.
Keperentingan	: Tegal, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Univ. Diponegoro, Politeknik lokal
Kelompok Sasaran	: 30 IKM komponen kapal, dengan fokus pada 12 IKM
Model	: Penguatan industri pendukung (penyuplai komponen)

Latar Belakang

Kabupaten Tegal merupakan sentra industri pengolahan logam yang diandalkan sejak era pemerintahan kolonial Belanda hingga saat ini. Potensi industri secara umum ada 28.473 unit usaha dan menyerap 117.198 tenaga kerja. Dari potensi tersebut 2.761 unit usaha bergerak di sektor perlogaman berupa peralatan rumah tangga, pertanian, serta produk menengah berupa komponen otomotif dan kapal. Melalui diagnosis industri dan mendengarkan kebutuhan dari pelaku IKM, diketahui bahwa untuk dapat menyuplai produk komponen kapal ke industri galangan harus memiliki sertifikat BKI. Guna mengaktifkan para pelaku IKM komponen kapal agar dapat memproduksi dan memasok produknya ke industri galangan, produk IKM harus mencapai standar sertifikasi dari BKI. Selain itu, terkait dengan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) maka sertifikasi klas dari BKI menjadi tantangan sekaligus peluang sangat baik bagi IKM.

Fasilitasi Rencana Aksi

Menanggapi kebutuhan IKM tersebut, Pokja industri komponen kapal menetapkan tujuan utama yakni, "IKM-IKM komponen kapal mampu membuat komponen kapal BKI-klas dan menyuplainya ke industri galangan kapal". Tantangan sertifikasi BKI awalnya ditetapkan untuk lima (5) komponen berdasarkan suara dari pasar (telah diperluas menjadi delapan komponen), dan disusun sebagai tujuan utama dari Rencana Aksi. Kemudian Pokja mengusul dan memfasilitasi kegiatan dukungan berikut yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut, serta monitoring dan mereview rencana aksi secara periodik;

1. Studi banding ke industri galangan kapal, BKI, dan Kementerian Perindustrian
2. Bimtek penerapan 3S untuk perbaikan efisiensi produksi/ workshop
3. Bimtek dan pendampingan untuk memfasilitasi sertifikasi komponen BKI, termasuk; i) pelatihan dokumentasi proses produksi, ii) pelatihan mengenai persiapan gambar untuk komponen sasaran, iii) bimtek prototipe/ dokumentasi proses produksi untuk komponen sasaran, iv) uji mutu/ performa dari prototipe,
4. Perbaikan fasilitas pengecoran/ termokopel
5. Penyediaan alat pengecoran dan uji laboratorium
6. Kunjungan pemasaran ke industri galangan, temu bisnis, dan fasilitasi promosi melalui pameran
7. Temu bisnis dengan jasa keuangan dari lembaga lokal non-bank
8. Pelatihan manajemen keuangan (pembukuan/ manajemen arus kas)

Karena Pokja telah menyusun Rencana Aksi sesuai dengan kebutuhan IKM secara baik, maka IKM pun terdorong untuk berupaya secara mandiri pada beberapa kegiatan dukungan, seperti i) perbaikan dan penerapan 3S di workshop IKM, ii) pembuatan prototipe, termasuk dokumentasi proses produksi untuk sertifikasi BKI dan iii) upaya penjualan melalui pemasaran bersama.

Pencapaian dan Perkembangan

Kolaborasi yang baik antara Pokja, Kementerian Perindustrian dan BKI telah berhasil menghantarkan para IKM memperoleh sertifikasi BKI untuk 3 produk komponen kapal, sementara 3 komponen lainnya sedang dalam proses audit terakhir, 1 komponen dalam persiapan sertifikasi, dan beberapa komponen lain yang telah diidentifikasi sebagai sasaran selanjutnya. Penerbitan sertifikasi BKI adalah kasus pertama di industri lokal di Indonesia.



Selama monitoring pemasaran, 2 tipe komponen bersertifikasi BKI dengan nilai lebih dari 700 juta rupiah telah dibeli dan digunakan oleh industri galangan kapal untuk memproduksi 3 kapal perintis. Sedangkan, satu komponen lainnya masih dalam proses penajakan/penawaran dengan industri galangan lainnya dengan potensi 250 kapal yang sedang/ akan dibangun terutama kapal negara, perintis, ikan, patroli, dsb.

Kasus Sukses dengan Pendekatan SMIDeP -2

Industri Sasaran	: Industri pengolahan kakao
Lokasi	: Kota Palu dan sekitarnya
Landasan	: Industri Unggulan Provinsi (IUP) Sulawesi Tengah
Tujuan Utama	: 1) Pabrik pengolahan biji kakao Dinas Perindag Prov. (Rumah Cokelat) dapat memenuhi kebutuhan bahan baku IKM cokelat (batangan <i>liquor</i> & <i>couverture</i>), serta menyuplai produk cokelat ke kafe, bakeri, hotel di Kota Palu. 2) IKM cokelat sasaran dapat meningkatkan produksi dan pemasaran olahan cokelat Sulawesi Tengah.
Pemangku	: Disperindag Prov., Disperindag Kota, Univ. Tadulako, Kemenperin (Ditjen IKM, Industri Agro, Kepentingan
	BBIHP), BI Cab. Palu, ASKINDO, Asosiasi Pengusaha Cokelat Celebes (APECC)
Kelompok Sasaran	: Pabrik pengolahan kakao (Rumah Cokelat) dan 20 IKM cokelat
Model	: Hillirisasi hasil agro, Penumbuhan wirausaha baru, Penetrasi pasar lokal

Latar Belakang

Selama ini biji kakao produksi Sulawesi Tengah dipasarkan di pasar nasional (pabrik biji kakao) dan mancanegara dalam bentuk biji mentah yang belum difermentasi, akibat belum tersedianya industri pengolahan biji kakao menjadi produk setengah jadi di Sulawesi Tengah serta keengganan petani untuk memfermentasi biji kakao. Guna mengembangkan industri pengolahan kakao dan menumbuhkan wirausaha baru di bidang cokelat, maka Dinas Perindag Provinsi melalui Pokja menyusun Rencana Aksi dengan dua tujuan utama, yaitu 1) Pendirian dan pengoperasian pabrik pengolahan cokelat (Rumah Cokelat) di Kota Palu yang dapat memenuhi kebutuhan bahan baku IKM cokelat (batangan *liquor* dan *couverture*) serta menyuplai produk cokelat ke segmen pasar sasaran lainnya, dan 2) IKM cokelat sasaran dapat meningkatkan produksi dan pemasaran olahan cokelat.

Fasilitasi Rencana Aksi

Kegiatan dukungan penting yang difasilitasi Pokja untuk mencapai kedua tujuan utama:

1. Studi lapangan ke industri kakao di wilayah lain untuk mempelajari industri pengolahan biji kakao lokal.
2. Pengajuan proposal pengadaan mesin/ peralatan pengolahan biji kakao ke Ditjen Industri Agro.
3. Bersama Ditjen IKM membina dan menumbuhkan IKM cokelat baru melalui program Wirausaha Baru.
4. Bekerja sama dengan Gapoktan di Sulawesi Tengah untuk menjamin kontinuitas suplai biji kakao lokal yang difermentasi secara baik ke Rumah Cokelat. Untuk itu, Rumah Cokelat bersedia membeli biji kakao fermentasi di atas harga pasar.
5. Uji coba produksi di Rumah Cokelat hingga diperoleh standar produk berkualitas layak untuk bahan baku IKM cokelat. Diperlukan konsultasi, bimbingan teknis dan pelatihan secara terus-menerus antara tenaga operator Rumah Cokelat dengan para tenaga ahli pengolahan kakao.
6. Pemilihan IKM sasaran yang berkomitmen kuat dalam pencapaian tujuan utama.
7. Sosialisasi dan pelatihan tentang cara pengolahan batangan cokelat (*couverture*) dan diversifikasi olahan cokelat kepada IKM sasaran.
8. Pembentukan kelembagaan IKM yang beranggotakan para IKM yang memiliki kesamaan visi untuk maju bersama dalam mengembangkan cokelat Sulteng, Asosiasi Pengusaha Cokelat Celebes (APECC).
9. Promosi/ pemasaran aktif ke segmen pasar sasaran, pameran, outlet bandara, serta uji coba pasar dengan kuesioner untuk input komentar/ masukan dari konsumen.
10. Monitoring/ evaluasi Rencana Aksi secara berkala dengan berkomunikasi intensif dengan IKM sasaran untuk mencari solusi terhadap hambatan yang ditemui.

Pencapaian dan Perkembangan

Rumah Cokelat dapat mengolah biji kakao khas Sulteng yang telah difermentasi menjadi olahan cokelat berupa batangan *liquor*/*couverture* untuk memenuhi kebutuhan IKM cokelat. Rumah Cokelat telah membuka kafe minuman cokelat bekerja sama dengan IKM, dan akan dilengkapi dengan pusat penjualan produk IKM (olahan Cokelat Sulteng). Rumah Cokelat ini sedang proses dijadikan UPTD Provinsi.



Omzet penjualan produk Cokelat Sulteng dari 10 anggota APECC di tahun 2014 telah mencapai Rp. 300 juta, dan penjualan di 2015 berjalan stabil dengan angka Rp. 33 juta/ bulan. Sudah terhitung 6 IKM cokelat baru selain anggota APECC mulai produksi dan memasarkan produk Cokelat Sulteng.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek Kerja Sama Teknis untuk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia (SMIDeP) antara JICA dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin)/ Direktorat Jenderal IKM (Ditjen IKM) telah dilaksanakan sejak bulan April 2013 selama tiga (3) tahun. SMIDeP bertujuan untuk merumuskan model fasilitasi dan Petunjuk untuk fasilitasi pengembangan industri lokal, yang disusun berdasarkan pengalaman kegiatan fasilitasi di wilayah/ industri sasaran.

Industri-industri sasaran SMIDeP mencakup 'kumpulan IKM/ produsen sejenis' di wilayah tertentu, yang mencakup IKM/ produsen baik dari sentra industri dan wirausaha baru, dan berbagai macam sektor/ komoditas termasuk makanan (kakao)/ minuman (aloe), mebel (rotan), kerajinan tangan/ fesyen (kain tradisional), kulit (alas kaki), pengolahan logam (komponen kapal). Dalam memfasilitasi industri sasaran, SMIDeP memobilisasi pihak pemerintah pusat dan regional, dan menggunakan sumber daya dukungan yang tersedia di wilayah masing-masing.

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Petunjuk

Petunjuk ini bertujuan untuk memperkenalkan praktik-praktik yang disarankan dalam fasilitasi pengembangan industri lokal, sebagai dokumen referensial bagi pemerintah daerah (khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan) di tingkat kabupaten/ kota dan provinsi. Petunjuk dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi yang lebih baik untuk pengembangan industri unggulan yang berfokus pada tujuan.

Petunjuk ini mencakup tiga (3) aspek pengembangan industri lokal, i) perumusan tata laksana fasilitasi, ii) langkah dan metode proses fasilitasi (diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/ evaluasi rencana aksi), dan iii) informasi sumber dukungan (fasilitas dukungan dan skema pembiayaan yang terkait dengan pengembangan IKM).

Hasil pengamatan menunjukkan, bahwa penyusunan rencana aksi pengembangan industri lokal sering kali tidak menyertakan proses dialog dengan IKM di industri sasaran, ataupun monitoring dan *review* kemajuan/ pencapaian. Hal ini mengakibatkan minimnya penyesuaian terhadap kebutuhan IKM dan tujuan rencana aksi, oleh karena itu diperlukan perencanaan *bottom-up* pengembangan industri lokal yang lebih memadai dari pihak pemerintah. Petunjuk ini menyediakan pedoman praktik fasilitasi industri lokal yang dapat dipergunakan.

1.3 Definisi dan Pengertian

Istilah penting yang digunakan pada Petunjuk ini didefinisikan dan/ atau dipahami sebagai berikut:

IKM	: Unit bisnis yang menggunakan berbagai bentuk teknologi pengolahan untuk manufaktur produk, mulai dari skala menengah, kecil dan mikro. IKM juga mengacu pada produsen atau sebuah kelompok produsen bergantung pada konteksnya.
SMIDeP	: Proyek kerja sama teknis pengembangan industri kecil dan menengah melalui peningkatan penyediaan layanan di Indonesia antara JICA dan Kemenperin yang bertujuan untuk meningkatkan praktik dan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi pengembangan industri lokal di wilayah/ industri sasaran.
Platform (untuk pengembangan industri lokal)	: Menerapkan struktur fasilitasi pengembangan industri lokal yang dibentuk di setiap industri sasaran sebagai sarana bagi pihak-pihak terkait untuk merumuskan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi Rencana Aksi dengan saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan pengembangan bersama.
Kelompok Kerja (Pokja)	: Tim kerja khusus yang mengatur proses fasilitasi pengembangan industri lokal secara keseluruhan di setiap industri sasaran.

Fasilitator	: Orang yang ditunjuk khusus untuk terlibat dalam proses fasilitasi pengembangan industri lokal dengan tujuan membantu Kelompok Kerja.
Diagnosis industri	: Tugas mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan di industri sasaran, seperti pemasok bahan baku, pelaku pasar, industri pendukung/ terkait, dan lembaga dukungan (termasuk lembaga pemerintah seperti kementerian, Dinas dan organisasi terkait).
Pemangku kepentingan	: Seluruh entitas yang memiliki peran penting dalam pengembangan industri sasaran, seperti pemasok bahan baku, pelaku pasar, industri pendukung/ terkait, dan lembaga dukungan (termasuk lembaga pemerintah seperti kementerian, Dinas dan organisasi terkait).
Sumber dukungan	: Seluruh ragam bentuk sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri sasaran, seperti sumber daya manusia, barang/ jasa, teknologi/ keahlian, dana, informasi, skema/ program dukungan, dsb.
Lembaga dukungan	: Seluruh organisasi yang bisa menyediakan kegiatan dukungan untuk pengembangan IKM/ industri, mulai dari organisasi publik (termasuk lembaga pemerintah seperti kementerian, Dinas dan lembaga dibawahnya), swasta dan akademis.
Rencana Aksi untuk pengembangan industri lokal	: Dokumen perencanaan tunggal bagi setiap pengembangan industri lokal, yang mengindikasikan arah, cara dan tujuan pengembangan yang dimiliki dan dituju bersama oleh seluruh pihak terkait, memuat tujuan umum, IKM sasaran di industri lokal, kegiatan dukungan, dan aksi yang dilakukan oleh IKM sasaran.
Tujuan umum	: Sasaran spesifik dan terukur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ide arah pengembangan industri lokal di masa depan bersama dengan seluruh pihak terkait yang diatur dalam 2 tahap, yaitu jangka pendek (2 tahun pertama) dan jangka menengah (5 tahun).
Industri (lokal) sasaran	: Kumpulan IKM/ produsen sejenis yang difasilitasi dan dapat disebut sebagai industri inti.
IKM sasaran	: IKM yang diidentifikasi dari industri (lokal) sasaran dan menunjukkan keinginan kuat untuk terlibat dalam Rencana Aksi, dapat berupa kelompok IKM yang membentuk koperasi, asosiasi, atau kelompok usaha bersama (KUB).
Kegiatan dukungan	: Berbagai dukungan yang dianggap penting bagi IKM sasaran untuk mencapai tujuan Rencana Aksi, juga bagi pemerintah untuk mengintervensi siklus bisnis yang dihadapi industri sasaran yang meliputi seluruh aspek rantai pasok dan faktor dukungan bisnis.
Aksi (oleh IKM sasaran)	Seluruh aksi (atau inisiatif) yang dilakukan oleh IKM sasaran dengan usaha/ sumber daya sendiri yang dapat mendukung pencapaian tujuan Rencana Aksi.
Fasilitasi pengembangan industri lokal (Rencana Aksi)	: Tugas untuk mengawal Rencana Aksi pengembangan industri lokal agar dapat terlaksana (seperti memfasilitasi setiap lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan kegiatan dukungan yang diusulkan dan memfasilitasi IKM sasaran untuk melakukan aksi sendiri) guna mencapai tujuan umum dari Rencana Aksi.
Lembaga di luar perindustrian dan perdagangan	: Lembaga pemerintah, seperti kementerian, Dinas dan lembaga dibawahnya yang menangani sektor di luar perindustrian dan perdagangan.
Monitoring/ review dan evaluasi	: Tugas-tugas untuk mengobservasi, mengonfirmasikan, mendiskusikan, dan melaporkan secara berkala mengenai kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi dalam rangka mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi performa, dan peningkatan Rencana Aksi dan struktur fasilitasi.

BAB II STRUKTUR FASILITASI

2.1 Platform Pengembangan Industri Lokal

Sebagai langkah pertama, pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) yang bertanggung jawab dalam pengembangan industri lokal sasaran harus menyusun struktur fasilitasi pengembangan industri lokal, yaitu platform pengembangan industri lokal. Melalui platform ini, pemangku kepentingan terkait dapat mendiskusikan, merencanakan, mengimplementasikan, dan melakukan monitoring/ review Rencana Aksi secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan industri sasaran dengan saling berkoordinasi dan melibatkan satu sama lain guna mencapai tujuan pengembangan bersama.



Gambar 2.1.1 Struktur (platform) fasilitasi pengembangan industri lokal

Struktur fasilitasi pengembangan industri lokal meliputi beberapa unsur penting, yaitu, i) Kelompok Kerja (Pokja) sebagai tim khusus yang ditugaskan untuk mengatur seluruh proses fasilitasi pengembangan industri sasaran, ii) fasilitator sebagai orang yang ditugaskan secara khusus untuk ikut serta pada proses fasilitasi pengembangan industri lokal untuk membantu Pokja, iii) informasi sumber daya dukungan (lembaga dukungan yang terkait dengan industri sasaran) tersedia untuk Pokja. Platform ini akan menjadi dasar komunikasi dan kolaborasi bersama antara 'pendukung' yang diwakili oleh Pokja dan 'penerima manfaat' dari industri sasaran.

2.2 Perumusan Pokja

Pokja sebaiknya selalu dirumuskan sebagai tim kerja khusus yang merencanakan dan melaksanakan Rencana Aksi dalam pengembangan di setiap industri lokal sasaran. Pokja harus mengelola proses fasilitasi pengembangan industri sasaran secara keseluruhan, seperti identifikasi masalah dan kebutuhan industri sasaran, menetapkan tujuan umum, mengusulkan kegiatan dukungan untuk mencapai tujuan, memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi, dan monitoring/ evaluasi kemajuan dan pencapaian secara konsultatif dengan industri sasaran.

2.2.1 Pimpinan dan Keanggotaan

Pokja harus terdiri dari para pemangku kepentingan yang sangat terkait dengan industri lokal sasaran, dan dibentuk dengan kepemimpinan kuat dari Dinas Perindag.

Pokja disarankan untuk melibatkan bidang-bidang terkait di Dinas Perindag (dan Koperasi), Dinas sektor terkait (khususnya terkait masalah bahan baku), lembaga dukungan yang terkait erat, para pemangku

kepentingan berpengaruh, dan perwakilan IKM di sentra (misalnya dalam bentuk koperasi, asosiasi, dsb). Para pemangku kepentingan lain (contohnya, lembaga keuangan dan institusi akademik, dan pelaku pasar utama, industri dukungan) bisa didekati sesuai kebutuhan ketika kebutuhan dukungan jelas teridentifikasi. Daftar di bawah ini merupakan anggota Pokja untuk pengembangan industri lokal.

Tabel 2.2.1 Anggota yang memungkinkan untuk Pokja

Pemerintah yg memimpin (Prov., atau Kob./ Kota)	- Dinas Perindag, termasuk kepala Dinas, kepala/ staff bidang industri (bertanggung jawab pada industri sasaran) dan bidang perdagangan, UPTD terkait, UPL. - Dinas di sektor terkait bahan baku, koperasi/pengadaan
Pemerintah yg menunjang	- BAPPEDA (jika dibutuhkan) - Dinas Perindag: sama seperti diatas - Dinas di sektor terkait: sama seperti diatas - BAPPEDA (jika dibutuhkan)
Lembaga dukungan lain Sektor swasta	- Lembaga dukungan teknis mengenai riset/ pengujian/ standarisasi/ jaminan kualitas - Universitas lokal (jika dibutuhkan) - Perwakilan IKM di industri lokal (dapat dalam bentuk koperasi, asosiasi, dsb.) - Asosiasi industri skala besar di sektor sejenis (jika dibutuhkan) - Lembaga dukungan swasta (BDS) yang aktif di industri lokal sasaran (jika dibutuhkan) - Lembaga keuangan (seperti bank) (jika dibutuhkan)

Petunjuk ini merekomendasikan agar Pokja dimulai dengan jumlah anggota yang sedikit, namun terlibat secara proaktif dalam proses fasilitasi. Akan tetapi, keterlibatan awal pemangku kepentingan kunci yang bisa memiliki peran signifikan dalam perencanaan Rencana Aksi dan menawarkan sumber daya dukungan signifikan amatlah berharga. Hal ini khususnya untuk pemangku kepentingan yang bisa memberikan pengetahuan/ wawasan mengenai pengembangan pasar dan pemasaran.

Bagan 2.2.1 Keterlibatan awal para pemangku kepentingan di Pokja

Pokja industri alas kaki mengundang asosiasi industri alas kaki berskala besar dan pusat bisnis inkubasi universitas lokal (sebagai pemangku kepentingan dalam aspek pemasaran) di Pokja dari proses perencanaan Rencana Aksi. Pelibatan lembaga-lembaga seperti ini membantu Pokja dalam merancang kegiatan dukungan yang berorientasi pasar dan mempercepat kemajuan Rencana Aksi sejak awal, dan selanjutnya menjadi dasar jalinan kemitraan dengan industri sasaran. Pokja untuk industri pengolahan aloe vera juga menunjukkan kasus yang sama di mana sekolah politeknik lokal terlibat sejak awal di Pokja dan membuahkan kemitraan yang berhasil dalam pengembangan peralatan pengolahan.

Pokja sebaiknya dipimpin oleh Dinas Perindag, misalnya Kepala Dinas Perindag. Disarankan peran sekretariat dalam Pokja dipegang oleh kepala bidang industri yang bertanggung jawab terhadap industri lokal sasaran.

Penentuan Dinas tingkat provinsi atau kabupaten/ kota yang akan memimpin Pokja bergantung pada posisi kebijakan industri sasaran, yaitu apakah industri sasaran diakui sebagai industri prioritas di Dinas provinsi atau kabupaten/ kota. Jika industri sasaran diakui sebagai prioritas pemerintah kabupaten/ kota, Pokja harus dipimpin oleh Dinas Perindag kabupaten/ kota dengan berperan sebagai sekretariat, serta melibatkan Dinas provinsi sebagai anggota.

2.2.2 Otorisasi Keanggotaan

Otorisasi resmi keanggotaan Pokja merupakan tugas pokok dalam administrasi Indonesia agar para anggota dari lembaga yang berbeda dapat berbagi peran dan tugas dengan selaras. Otorisasi resmi menjadi penting karena implementasi peran dan tugas memerlukan pengaturan anggaran operasional, termasuk biaya remunerasi, rapat dan perjalanan untuk anggota.

Dalam hal ini, otorisasi anggota memerlukan penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh kepala pemerintah daerah, yang akan menjadi dasar komunikasi dan kerja sama di antara lembaga yang berbeda. SK akan lebih efektif apabila mendeskripsikan kewajiban bersama para anggota dan kewajiban individu spesifik kepada setiap anggota (seperti, ruang lingkup dan konten dukungan yang dikehendaki). Contoh SK dapat dilihat pada [Lampiran 1](#).

2.2.3 Peran dan Tugas

Pokja harus melakukan peran dan tugas berikut selama keseluruhan proses fasilitasi untuk pengembangan industri lokal sasaran;

- Diagnosis pada industri lokal sasaran,
- Perumusan Rencana Aksi untuk pengembangan industri lokal sasaran,
- Fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi (usulan kegiatan dukungan),
- Identifikasi lembaga dukungan yang berpotensi untuk usulan kegiatan dukungan,
- Fasilitasi lembaga dukungan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan, menganggarkan, dan melaksanakan usulan kegiatan dukungan,
- Monitoring/ *review* Rencana Aksi secara berkala,
- Evaluasi pencapaian Rencana Aksi pada akhir,
- Pelaporan hasil monitoring/ *review* dan evaluasi Rencana Aksi.

Dalam rangka melakukan peran dan tugas tersebut di atas dan berbagi hasil dari proses fasilitasi diantara para anggotanya, Pokja harus mengorganisasi serangkaian rapat dan/ atau *Focus Group Discussion* (dengan industri sasaran untuk tujuan diagnosis industri dan perumusan Rencana Aksi).

2.3 Penempatan Fasilitator

Pokja harus menempatkan fasilitator yang terlibat dalam proses fasilitasi pengembangan industri sasaran. Fasilitator harus membantu Pokja dalam menjalankan peran dan tugasnya, mulai dari diagnosis, perumusan dan fasilitasi Rencana Aksi, untuk memonitor dan mengevaluasi.

2.3.1 Kandidat Fasilitator

Setidaknya satu fasilitator harus ditempatkan di Pokja untuk setiap industri lokal sasaran sebagai salah satu anggota. Pokja bisa memiliki lebih dari dua (2) fasilitator sesuai dengan kebutuhan Pokja dan ketersediaan anggaran, dengan membagi peran dan tugas kepada fasilitator. Kandidat-kandidat berikut ini dapat dipertimbangkan sebagai fasilitator untuk pengembangan industri lokal;

- Staf fungsional bidang Industri (PFPP) di Dinas Perindag,
- Konsultan Manajemen IKM (*Shindan-shi*) di Dinas Perindag,
- Staf struktural dengan wawasan/ pengalaman relevan di Dinas Perindag,
- Dosen, konsultan atau sejenisnya dari universitas/ institusi akademik lokal, atau
- Konsultan atau sejenisnya dari organisasi swasta atau individual, dsb.

Secara umum, staf struktural Dinas Perindag memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan kunjungan kerja ke lapangan. Sehingga, staf fungsional (dan/ atau Konsultan Manajemen IKM) mungkin lebih relevan sebagai fasilitator yang membutuhkan kunjungan lapangan berkala dengan tujuan untuk memastikan komunikasi yang terus-menerus dengan IKM dan mengobservasi kemajuan Rencana Aksi.

Kemudian, staf fungsional akan lebih cenderung untuk memperbarui wawasan atas industri sasaran, mulai dari aspek teknis dan manajemen hingga kondisi pasar, karena lebih dekat dengan IKM. Karenanya, mobilisasi staf fungsional tersebut bisa memberikan keuntungan lebih dalam fasilitasi setiap proses diagnosis, dan perumusan, pelaksanaan dan monitoring/ *review* Rencana Aksi secara konsultatif dengan IKM. Hal ini lebih menguntungkan jika fasilitator adalah Konsultan Manajemen IKM (*Shindan-shi*).

Pokja juga bisa mempertimbangkan mobilisasi fasilitator (sebagai tambahan) dari sumber daya eksternal seperti universitas lokal atau organisasi swasta. Fasilitator dimobilisasi dari sumber daya eksternal bisa memiliki orientasi yang lebih kuat untuk memastikan kemajuan/ pencapaian Rencana Aksi, dan melakukan proses manajemen selama berjalannya fasilitasi. Meskipun begitu, mereka mungkin kurang terbiasa dengan proses administrasi dalam perencanaan/ penganggaran kegiatan dukungan, dan sumber daya/ skema dukungan yang tersedia, dibandingkan dengan fasilitator yang dimobilisasi dari Dinas Perindag.

Bagan 2.3.1 Kebutuhan untuk penempatan beberapa fasilitator

SMIDeP mengobservasi beberapa kasus, dimana staf muda di Dinas Perindag ditunjuk sebagai fasilitator dibandingkan staf senior yang sudah berpengalaman di Dinas, dimana sebagai staf struktural, harus menghabiskan sebagian waktu kerja di kantor. Fasilitator muda biasanya cenderung ragu-ragu untuk memfasilitasi diskusi dan menyampaikan pandangan pribadinya secara sukarela di acara formal seperti rapat Pokja, meskipun fasilitator muda terbiasa dengan kondisi IKM dan ide realistis pada dukungan untuk IKM. Karena itu fasilitator muda tidak bisa bekerja secara optimal dalam tugas menjembatani kebutuhan dukungan IKM ke Pokja, dan mengarahkan diskusi Pokja dengan konstruktif dalam waktu yang sama. Ketua Pokja pada khususnya disarankan untuk lebih memperhatikan hal ini. Salah satunya dengan menempatkan beberapa fasilitator dengan kombinasi senior yang berpengalaman dengan junior yang masih punya sedikit pengalaman, sehingga keduanya dapat melengkapi satu sama lain untuk mengoptimalkan fungsi fasilitator. Penempatan beberapa fasilitator bisa dipertimbangkan dengan kombinasi mobilisasi staf Dinas dan konsultan swasta.

Pada kasus lain, fasilitator harus cukup ramah dalam membina hubungan dengan IKM, rajin dalam mengerjakan peran dan tugasnya di lapangan, dan menjadi pendengar yang baik bagi IKM. Membangun hubungan saling percaya dengan IKM adalah satu dari kunci sukses Rencana Aksi.

2.3.2 Otorisasi Penempatan

Pokja harus mengotorisasi penempatan fasilitator agar staf yang ditunjuk secara resmi mengenali peran dan tugasnya. Otorisasi resmi bagi fasilitator juga penting, karena implementasi tugas dan perannya memerlukan pengaturan anggaran operasional. Fasilitator harus ditunjuk sebagai salah satu anggota Pokja dalam Surat Keputusan yang sama terkait perumusan Pokja oleh kepala pemerintah daerah. SK akan lebih efektif jika mendeskripsikan kewajiban spesifik untuk fasilitator.

2.3.3 Peran dan Tugas

Fasilitator harus terlibat dalam proses fasilitasi pengembangan industri lokal sasaran guna membantu Pokja dalam melakukan peran dan tugasnya, dan untuk menjembatani antara Pokja, industri sasaran dan para pemangku kepentingan. Melihat peranannya, fasilitator harus melakukan tugas berikut;

- Moderasi rapat Pokja, FGD dan kesempatan diskusi lain, dan melaporkan hasilnya,
- Fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi melalui identifikasi dan konsultasi kepada lembaga dukungan yang bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan dukungan,
- Observasi secara berkala mengenai kegiatan dukungan dan kemajuan/ pencapaian Rencana Aksi melalui kunjungan lapangan ke IKM sasaran,
- Mendengarkan secara periodik masalah dan kebutuhan IKM sasaran melalui kunjungan lapangan kepada IKM sasaran,
- Melaporkan setiap kunjungan ke lembaga dukungan dan IKM sasaran, kepada Pokja,
- Memberikan *review* yang diperlukan dalam Rencana Aksi kepada Pokja.

Ketua Pokja harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung fasilitator dengan memahami posisi yang diembannya di Pokja dan menyiapkan anggaran untuk melakukan cakupan tugas yang diharapkan.

Bagan 2.3.2 Cara untuk memastikan kunjungan berkala fasilitator ke IKM

SMIDeP mendorong setiap fasilitator untuk melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk mengobservasi IKM sasaran dan kegiatan dukungan selama fasilitasi Rencana Aksi, meskipun begitu, tidak mudah bagi fasilitator untuk mengulang kunjungan lapangan karena kurangnya pengaturan kelembagaan (atau instruksi pekerjaan) oleh atasan fasilitator dan kurangnya anggaran perjalanan. Dalam hal ini, beberapa Pokja mengatur kondisi dimana fasilitator bisa melakukan observasi lapangan dan komunikasi dengan IKM sasaran, sebagai contoh; Pokja untuk industri pengolahan kakao telah menetapkan monitoring penjualan bulanan untuk IKM sasaran di Rencana Aksi sebagai salah satu tugas fasilitator, sehingga fasilitator ditugaskan secara rutin untuk berkunjung dan wawancara IKM tersebut. Fasilitator untuk industri mebel rotan memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan monitoring secara berkala ke seluruh IKM sasaran, karena menjadi staf struktural di Dinas. Maka dari itu, Pokja memutuskan untuk melibatkan staf fungsional (*Shindan-shi*) tambahan di Dinas Perindag, dalam memperkuat monitoring kemajuan kegiatan penting pada setiap IKM sasaran.

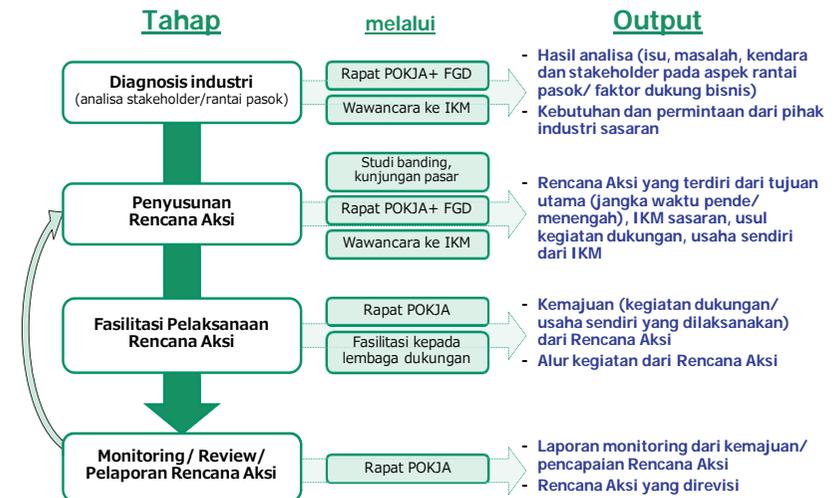
BAB III FASILITASI UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI LOKAL

3.1 Langkah Keseluruhan Fasilitasi Pengembangan Industri Lokal

Setelah struktur fasilitasi pengembangan industri lokal dirumuskan, proses fasilitasi bisa dimulai. Langkah fasilitasi dimulai dengan i) diagnosis industri melalui analisis pemangku kepentingan dan rantai pasok, ii) penyusunan Rencana Aksi untuk industri sasaran, dilanjutkan dengan tahap iii) implementasi Rencana Aksi, serta iv) monitoring/ *review* dan evaluasi Rencana Aksi. Selama fasilitasi, rapat Pokja (dan FGD dengan para IKM sasaran di industri lokal) diselenggarakan untuk mendorong proses di atas.

Bagian selanjutnya menjelaskan cara/ metode memfasilitasi proses pengembangan industri lokal melalui pemanfaatan struktur (platform, yang dijelaskan pada bab sebelumnya) secara lebih baik. Bagian ini memberikan petunjuk mengenai bagaimana tahapan fasilitasi berikut dapat dilakukan secara lebih baik oleh Pokja/ fasilitator.

- 1) Diagnosis industri (melalui analisis pemangku kepentingan dan rantai pasok)
- 2) Penyusunan Rencana Aksi
- 3) Fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi
- 4) Peninjauan/ *review* dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi
- 5) Rapat Pokja



Gambar 3.1.1 Langkah keseluruhan dan output dari fasilitasi pengembangan industri lokal

3.2 Diagnosis Industri

3.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Diagnosis industri bertujuan untuk mengidentifikasi: i) pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan peranan penting dalam pengembangan industri sasaran, dan ii) masalah/ kendala dan kebutuhan industri sasaran. Hasil diagnosis akan dikaji secara mendalam untuk memperoleh arah perkembangan industri dan dukungan yang diperlukan/ diminta dalam merumuskan Rencana Aksi.

3.2.2 Metode, Format dan Output

Pokja melakukan diagnosis industri yang terdiri dari i) analisis pemangku kepentingan dan ii) analisis rantai pasok melalui rapat POKJA, FGD dengan IKM di industri sasaran atau kunjungan wawancara langsung kepada IKM, untuk memahami kondisi sebenarnya saat ini dari industri sasaran. Diskusi dan analisis dalam rapat/ FGD sebaiknya dibantu oleh fasilitator.

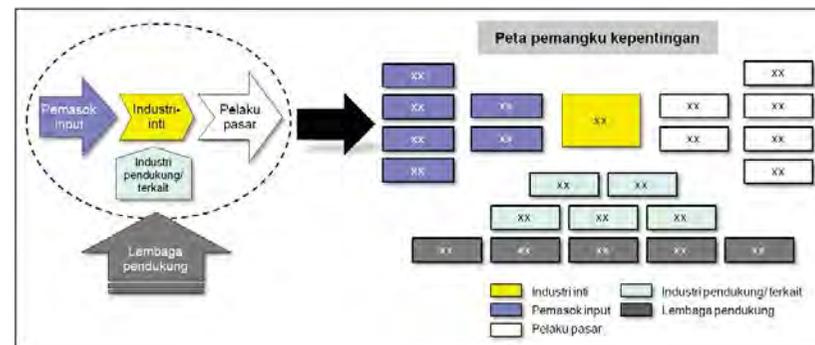
(1) Analisis pemangku kepentingan

Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan menggambar peta para pemangku kepentingan berdasarkan pengkategorian para pemangku kepentingan utama/ kunci terkait industri sasaran yang terbagi menjadi empat (4) kelompok;

Tabel 3.2.1 Kategori pengelompokan para pemangku kepentingan

Kelompok	Contoh
Pemasok input	Pemasok/ petani bahan baku, pemasok bahan input lainnya, dll.
Pemain pasar	Pembeli, agen/ distributor, penjual/ saluran distribusi, dan kegiatan (yang dapat mendorong pengadaan produk dari industri sasaran), dll.
Industri pendukung/ terkait	Pemasok mesin/ peralatan, penyedia layanan desain/ kemasan/ uji, logistik, industri hulu, industri skala besar, sekolah kejuruan (yang menyelenggarakan kursus terkait industri sasaran), perantara/ intermediet keuangan, dll.
Lembaga pendukung	Lembaga publik terkait riset dan pengembangan, laboratorium uji, lembaga akreditasi standar/kualitas, fasilitas layanan umum, institusi pendidikan, penyedia BDS swasta, dll.

Di bawah ini adalah ilustrasi dari pemetaan pemangku kepentingan, dan contoh dapat dilihat pada [Lampiran 2](#).



Gambar 3.2.1 Gambar peta pemangku kepentingan

Kelompok Kerja sebaiknya menentukan nama para pemangku kepentingan yang dipetakan dan keterlibatan/ peranan pemangku kepentingan tersebut dalam pengembangan industri sasaran. Disarankan bagi Pokja untuk menilai pengaruh kontribusi pemangku kepentingan terhadap pengembangan industri sasaran, dan menandai pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh tinggi sebagai pemangku kepentingan kunci/ utama. Para pemangku kepentingan dengan pengaruh tinggi sebaiknya diundang dalam perumusan Rencana Aksi dan analisis rantai pasok pada tahapan selanjutnya sebagai narasumber.

Pokja sebaiknya mengompilasi informasi dari hasil pemetaan pemangku kepentingan ke dalam daftar pemangku kepentingan dari industri sasaran, sebagai berikut.

Tabel 3.2.2 Format daftar pemangku kepentingan (contoh)

Kelompok	Stakeholder	Keterlibatan/ Peranan	Pengaruh
Pemasok Input	Pemasok bahan baku	Pengumpulan/ pengolahan primer/ pasokan bahan baku dalam bentuk siap pakai dengan hutang tunggakan.	Sangat tinggi
	Petani bahan baku	Penanaman bahan baku skala kecil.	Tinggi
	Pedagang aksesoris/ komponen	Pasokan aksesoris/ suku cadang metal siap pakai.	Tidak tinggi
Pemain pasar	Supermarket	Saluran pemasaran kepada kelas menengah/atas dalam jumlah besar / sistem konsinyasi.	Tidak tinggi
	Distributor	Saluran distribusi mencakup Surabaya dan area sekitarnya dengan pesanan jumlah besar/ sistem penjualan (grosir).	Sangat tinggi
	Glossary shops	Saluran pemasaran kepada kelas menengah/bawah dengan jumlah pesanan kecil/ sistem konsinyasi.	Tinggi
Industri pendukung/ terkait	Pemasok mesin	Manufaktur/ suplai/ perawatan dari peralatan pemrosesan.	Tinggi
	Produsen material kemasan/ percetakan	Percetakan/ pasokan bahan kemasan (cardboard) dengan layanan desain.	Sangat tinggi
	Bank komersial	Umumnya menggunakan deposito tunai, jarang digunakan sebagai sumber pinjaman modal kerja.	Tidak tinggi
Lembaga pendukung	Baristand Provinsi	Layanan uji kualitas (berdasarkan standar Indonesia)/ komposisi material, dan riset pengembangan produk baru.	Tinggi
	Badan-POM/ Dinas Kesehatan	Layanan lisensi/ perijinan produk mamin dan konsultasi GMP/higienitas, dll.	Tinggi
	LSM, universitas lokal	Dapat melakukan transfer ilmu/ pengetahuan mengenai pengolahan makanan.	Tidak tinggi

Di antara para pemangku kepentingan, Pokja sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap 'industri pendukung/ terkait'. Khususnya di luar Jawa/ Bali, ketersediaan industri pendukung/ terkait biasanya terbatas, sehingga industri sasaran sering kali kesulitan dalam mengakses produk/ jasa dari industri pendukung/ terkait dengan biaya terjangkau. Industri tersebut dapat mencakup desain/ industri kemasan, pemroses bahan baku, pemasok suku cadang/ mesin/ peralatan. Jika tidak diidentifikasi di wilayah itu, maka disarankan agar Pokja dapat mencari potensi tersebut di daerah lain.

Bagan 3.2.1 Pentingnya pra identifikasi industri pendukung/ terkait

Hampir semua Pokja di SMIDeP mengakui perlunya kontribusi teknis atau masukan dari industri pendukung/ terkait selama fasilitasi, seperti industri kemasan (dalam kasus industri pengolahan lidah buaya), bahan baku prosesor/ arranger (mebel rotan, fesyen ulos, pengolahan kakao), pemasok mesin (pengolahan kakao) dan desainer/ penjahit terampil (fesyen ulos). Pengalaman SMIDeP mengindikasikan bahwa Pokja yang mengidentifikasi dan melibatkan industri pendukung/ terkait pada tahap awal dapat memberikan kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi yang baik.

(2) Analisis rantai pasok

Analisis rantai pasok harus mengidentifikasi masalah/ kendala dan kebutuhan industri sasaran berdasarkan aspek-aspek rantai pasok mulai dari pengadaan bahan baku, produksi/ pengolahan hingga pemasaran, serta faktor-faktor dukungan yang mempengaruhi bisnis IKM, seperti infrastruktur, peraturan/ kelembagaan, sumber daya manusia dan akses pembiayaan.

Pokja harus mengidentifikasi masalah/ kendala yang dianggap faktual dan penting, dan menganalisisnya secara mendalam guna memahami akar permasalahan, sehingga dalam Rencana Aksi dapat diusulkan kegiatan-kegiatan dukungan yang tepat untuk menangani penyebab tersebut. Kemudian, Pokja harus menentukan masalah/ kendala yang faktual dan penting untuk industri sasaran dengan menggunakan matriks di bawah ini. Contoh analisis rantai pasok terdapat pada [Lampiran 3](#).

Rantai pasokan	Kondisi selama ini	Isu / Kendala	Kebutuhan
Bahan baku			
Distribusi bahan			
Produksi			
Pemasaran			
Faktor dukung - SDM - Akses keuangan - Kelembagaan - Peraturan - Infrastruktur			

Gambar 3.2.2 Format matriks analisis rantai pasok

Sebelum menyusun matriks di atas, Pokja dapat menggambar peta rantai pasok industri sasaran, yang mengilustrasikan aliran (produk jadi, produk setengah jadi, bahan baku), sehingga diperoleh gambaran akurat dari rantai pasok industri. Contoh peta juga dapat dilihat pada Lampiran 3.

Dianjurkan agar Pokja dapat mengorganisasikan pertemuan untuk melakukan analisis pendahuluan antar para anggotanya terlebih dahulu, kemudian hasil yang diperoleh didiskusikan dan diverifikasi lebih lanjut melalui FGD dan wawancara langsung dengan para IKM dan para pemangku kepentingan kunci.

Kelompok Kerja juga direkomendasikan untuk mengunjungi beberapa perwakilan IKM guna memperoleh informasi spesifik-individu, seperti segmen pasar, pembeli, penjualan, pemasok, pengadaan bahan baku, skala omset dan jumlah pegawai/pekerja, segmen pasar, ide pengembangan produk/pasar, dsb. Informasi dari masing-masing IKM dapat membantu dalam memastikan validitas analisis, dan mengetahui dukungan yang diperlukan.

3.3 Penyusunan Rencana Aksi

3.3.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan i) pemangku kepentingan utama dan ii) masalah/ hambatan dan kebutuhan yang diidentifikasi melalui analisa rantai pasok, Pokja harus merumuskan Rencana Aksi untuk pengembangan industri sasaran. Rencana Aksi harus dianggap sebagai dokumen perencanaan tunggal untuk setiap industri sasaran, yang mengindikasikan arah/ skenario pengembangan yang dituju bersama oleh semua pihak terkait termasuk Pokja, Ditjen IKM, industri sasaran dan pemangku kepentingan.

3.3.2 Metode, Format dan Output

Perencanaan Rencana Aksi untuk pengembangan industri lokal setidaknya harus mencakup konten berikut, baik untuk jangka pendek (2 tahun) maupun jangka menengah (5 tahun sesuai dengan standar periode perencanaan di Indonesia).

Tabel 3.3.1 Standar konten Rencana Aksi untuk pengembangan industri lokal

1. Kondisi terkini industri lokal sasaran
2. Tujuan Umum yang akan dicapai (baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah)
3. IKM sasaran (di industri lokal) yang terlibat di Rencana Aksi
4. Kegiatan dukungan yang dibutuhkan (untuk IKM sasaran guna mencapai tujuan)
5. Aksi yang dilakukan oleh IKM sasaran.

Pokja harus merumuskan Rencana Aksi untuk industri sasaran, dengan i) menentukan tujuan umum (dengan hasil yang diharapkan) yang ingin dicapai oleh industri sasaran, ii) mengidentifikasi IKM sasaran di industri untuk mengikuti Rencana Aksi, iii) mengusulkan kegiatan dukungan industri sasaran untuk mencapai Tujuan Umum, dan iv) mengindikasikan aksi (atau inisiatif) yang dilakukan IKM sasaran.

Dalam merumuskan Rencana Aksi, Pokja sebaiknya mengorganisasi rapat dan/ atau FGD dengan industri sasaran untuk memperoleh Rencana Aksi berdasarkan konsultasi dengan industri sasaran. Rapat Pokja dan FGD tersebut bisa diselenggarakan beberapa kali hingga Rencana Aksi diterima oleh kedua belah pihak yaitu Pokja dan industri sasaran. Perencanaan dan diskusi dapat dibantu oleh fasilitator. Bagian dibawah dapat menjadi panduan bagaimana Rencana Aksi yang layak diformulasikan.

(1) Tujuan umum

Hal ini merupakan bagian paling penting dalam Rencana Aksi. Tanpa tujuan terukur yang spesifik, Rencana Aksi menjadi tidak bermakna atau dapat dievaluasi. Pertama-tama, Pokja harus menetapkan tujuan umum (dengan hasil yang diharapkan) di Rencana Aksi melalui konsultasi dengan industri sasaran.

Pokja harus berdiskusi dengan industri sasaran mengenai kebutuhan atau ide arah pembangunan di masa depan, menentukan "**Produk Apa yang akan dikembangkan atau ditingkatkan untuk Segmen Pasar/ Konsumen Mana, dan Bagaimana cara mencapainya**". Tujuan umum Rencana Aksi akan ditetapkan dalam 2 tahapan, pertama untuk jangka pendek (2 tahun pertama) dan kedua untuk jangka menengah (5 tahun).

Tujuan Rencana Aksi dapat didefinisikan secara **Spesifik, Objektif** (secara kuantitatif, jika memungkinkan), **Dapat Diukur, Menantang namun cukup Realistis** (khususnya untuk jangka pendek), sedangkan tujuan jangka menengah akan lebih luas dan berorientasi harapan. Sehingga, **tujuan jangka pendek harus didefinisikan sebagai milestone untuk mencapai tujuan jangka menengah**.

Bagan 3.3.1 Contoh Tujuan Umum Rencana Aksi

Di bawah ini merupakan contoh Tujuan Umum (tujuan jangka pendek dari industri sasaran SMIDeP):	
Industri fesyen ulos di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara	Untuk meningkatkan penjualan produk dengan aplikasi Ulos (kerajinan tangan/ aksesoris) di pasar wisatawan dan lokal, bekerja sama dengan perancang lokal untuk pengembangan desain dan dengan industri pariwisata untuk promosi.
Industri komponen kapal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah	Untuk memampukan IKM komponen kapal memproduksi komponen kapal kelas BKI dan sebagai pemasok pada industri galangan kapal.
Industri pengolah kakao di Provinsi Sulawesi Tengah	Untuk memproduksi produk cokelat secara terus menerus dengan memanfaatkan olahan <i>couverture</i> dari biji cokelat lokal, dan menembus segmen pasar modern lokal.

Pokja sangat disarankan untuk menghindari penetapan tujuan yang tidak diutarakan secara spesifik dan tidak terukur secara obyektif. Tujuan yang kurang jelas diutarakan, seperti peningkatan daya saing, inovasi industri, peningkatan kualitas produk, atau perluasan pasar ke tingkat nasional, sering ditemukan pada dokumen perencanaan untuk pengembangan industri lokal. Pada kasus seperti itu, usulan kegiatan dukungan di rencana aksi memiliki konsistensi/ kontribusi yang lemah terhadap tujuan.

Agar industri sasaran dapat mengungkapkan aspirasi/ kebutuhan pengembangan, Pokja harus mengatur rapat dan/ atau FGD dengan mengundang sejumlah IKM (atau perwakilan IKM dari setiap asosiasi/ koperasi) di industri. Fasilitator dapat membantu diskusi ini untuk memperoleh aspirasi/ kebutuhan dari IKM peserta.

Fasilitator juga disarankan untuk mengunjungi dan mewawancarai IKM yang diundang secara individual sebelum rapat/ FGD dan memperoleh ide arah pengembangan sebelumnya, karena dalam rapat/ FGD itu sendiri tidak memungkinkan setiap peserta untuk mengutarakan pendapat akibat keterbatasan waktu. Pada beberapa kasus, rapat/ FGD mungkin terlalu resmi untuk IKM secara proaktif menyampaikan pendapat.

Berdasarkan hasil pengamatan, IKM biasanya memilih untuk menjaga *status-quo* dibandingkan dengan melakukan tantangan baru yang diikuti dengan tindakan beresiko, contohnya, pengembangan produk baru, perluasan pasar, dsb. IKM cenderung memiliki sedikit ide mengenai arah pengembangan, kecuali IKM terekspos keluar, pesaing dan pasar (potensial). Pada kasus ini, Pokja dapat mengatur kunjungan belajar ke industri sejenis namun lebih maju, lembaga dukungan, atau ke pasar potensial, dalam rangka membuat IKM mengetahui teknologi terbaru dan tren pembeli/ konsumen. Dengan melakukan hal tersebut, IKM bisa memperoleh wawasan/ informasi yang bermanfaat untuk diskusi tujuan Rencana Aksi.

Bagan 3.3.2 Kunjungan pendahuluan ke pasar potensial/ lembaga dukungan teknis

Pokja industri komponen kapal menghadapi kesulitan dalam mendata kegiatan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai Tujuan Umum Rencana Aksi: yaitu memampukan IKM memproduksi komponen kapal kelas BKI ke industri galangan kapal, meskipun tujuan disetujui IKM sasaran. Pokja memutuskan untuk melakukan kunjungan belajar ke lembaga akreditasi sertifikasi komponen kapal, Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) dan galangan kapal guna mengetahui prosedur dan pengaturan untuk sertifikasi serta peluang pasar beberapa jenis komponen selama perumusan Rencana Aksi. Sekitar 20 IKM dan anggota Pokja mengikuti kunjungan. Kunjungan belajar ini memungkinkan Pokja untuk memperoleh input yang dibutuhkan untuk mengembangkan Rencana Aksi dan juga membuat Memorandum bersama BKI untuk kesuksesan sertifikasi komponen sasaran. Kemudian, kunjungan belajar ini menyediakan peluang, dimana pemangku kepentingan dapat berbagi Rencana Aksi.

Jika industri sasaran berada pada tahapan awal pengembangan bisnis (mis. proses *start-up*), tidaklah mudah bagi IKM untuk mendapat ide arah pengembangan, karena IKM cenderung memprioritaskan berjalannya bisnis dengan lancar atau memperoleh kemampuan/ input yang dibutuhkan dalam mengoperasikan bisnis berkelanjutan terlebih dahulu. Dalam kasus tersebut, Pokja bisa menyarankan tujuan pengembangan untuk menantang industri sasaran (khususnya untuk jangka pendek) dengan skenario pengembangan.

(2) IKM sasaran

Kedua, Pokja harus mengidentifikasi IKM sasaran dari industri sasaran yang menunjukkan keinginan untuk berbagi dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan Rencana Aksi. Meskipun setiap IKM yang mau berkomitmen terhadap Rencana Aksi dapat diterima sebagai sasaran, Pokja juga harus menyeleksi IKM dengan mengamati tingkat keterlibatan dan kontribusi pada proses diagnosis dan perumusan Rencana Aksi.

IKM sasaran pada Rencana Aksi dapat berupa kelompok IKM yang membentuk koperasi, asosiasi, atau kelompok usaha bersama (KUB), sepanjang kelompok tersebut dianggap bersemangat untuk mencapai tujuannya. Paling tidak satu atau beberapa IKM terkemuka (yang berpengaruh) dapat diidentifikasi di antara IKM/ kelompok yang memimpin dan mengkoordinasi lainnya dan menunjukkan aksi (atau inisiatif) untuk yang lainnya.

Bagan 3.3.3 IKM sasaran dari setiap industri sasaran di SMIDeP

Dibawah ini menjelaskan bagaimana IKM sasaran diidentifikasi dan difokuskan selama pelaksanaan Rencana Aksi di SMIDeP:

Industri	IKM sasaran
Fesyen ulos	Awalnya teridentifikasi 30 produsen dari beberapa kelompok penenun ulos oleh Disperindag, dan ditambah 10 penjahit lokal untuk menjamin keberadaan pengrajin terampil potensial. Kemudian, ke-20 produsen tersebut berkeinginan untuk membentuk kelompok usaha bersama guna menjalankan bisnis kerajinan tangan bersama.
Komponen kapal	Awalnya menargetkan 25 anggota IKM dari koperasi industri komponen kapal dan ditambah IKM yang berminat di luar koperasi. Akhirnya, 12 IKM aktif terlibat dalam Rencana Aksi.
Pengolahan Kakao	Awalnya teridentifikasi seluruh 20 IKM yang berpartisipasi dalam program kewirausahaan sebelumnya. Kemudian, 12 diantaranya membentuk asosiasi untuk aksi bersama dan aktif terlibat dalam Rencana Aksi.
Mebel Rotan	Awalnya teridentifikasi seluruh 20 IKM yang aktif, namun hanya 5 IKM yang merespon Rencana Aksi dengan positif.
Pengolahan Aloe vera	Menargetkan 21 IKM yang berminat untuk terlibat dalam Rencana Aksi, kecuali untuk beberapa yang menunjukkan kurang tertarik. Kemudian, IKM-IKM tersebut membentuk asosiasi untuk aksi bersama.
Alas Kaki	40 IKM terpilih (dari 100 IKM di daerah sasaran) yang mewakili kelompok bisnis yang aktif (berdasarkan pengamatan lapangan oleh Disperindag). Akhirnya, sekitar 25 IKM aktif terlibat dalam Rencana Aksi.

Berdasarkan pengalaman SMIDeP, jumlah keseluruhan IKM sasaran untuk setiap Rencana Aksi berkisar antara 20 sampai 30 IKM (atau produsen). Pokja disarankan untuk memulai fasilitasi dengan beberapa IKM yang mudah dihubungi.

(3) Kegiatan dukungan

Ketiga, Pokja harus mengusulkan dan mendata kegiatan-kegiatan dukungan yang dibutuhkan IKM sasaran untuk mencapai tujuan Rencana Aksi, juga agar pemerintah dapat mengintervensi stagnansi siklus bisnis yang dihadapi oleh industri sasaran. Kegiatan dukungan harus diusulkan pada i) setiap aspek rantai pasok yang terdiri dari bahan baku, produksi/ pengolahan, dan pemasaran/ promosi, dan ii) setiap faktor dukungan bisnis seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM), akses keuangan, pengembangan (atau perbaikan) kebijakan/ lembaga dan pengembangan infrastruktur. Berbagai dukungan yang memungkinkan ditulis di bawah ini.



Gambar 3.3.1 Cara dukungan yang memungkinkan

Setiap usulan dukungan harus mencantumkan setidaknya: judul, konten, tujuan, sasaran, lembaga yang bertanggung jawab, periode pelaksanaan, sumber anggaran. Kesimpulannya, usulan kegiatan dukungan harus tergabung dalam Rencana Aksi dan tersusun dalam bentuk matriks di bawah ini.

Rantai pasokan	Kegiatan				Lembaga Penanggung Jawab	Periode
	Judul	Isi	Tujuan	Sasaran		
Bahan baku						
Distribusi bahan						
Produksi						
Pemasaran						
Faktor dukung						
- SDM						
- Akses keuangan						
- Kelembagaan						
- Peraturan						
- Infrastruktur						

Gambar 3.3.2 Format Matriks Usulan Kegiatan Dukungan

Pokja dapat menerjemahkan kebutuhan dan permintaan yang diamati selama rapat/ FGD dengan industri sasaran. Kemudian, Pokja harus mengatur rapat ini dengan mengundang para pemangku kepentingan utama (yang diidentifikasi dalam diagnosis industri) untuk mengusulkan kegiatan dukungan yang

dibutuhkan IKM sasaran dalam mencapai tujuan umum Rencana Aksi. Fasilitator dapat membantu diskusi Pokja selama proses pengusulan.

Secara paralel, Pokja dapat mengumpulkan informasi mengenai kegiatan dukungan yang berkaitan dengan industri sasaran, yang telah dijadwalkan (atau dianggarkan untuk tahun anggaran kedepan) oleh para pemangku kepentingan. Jika konten dukungan yang dijadwalkan oleh pemangku kepentingan utama memiliki konsistensi dengan tujuan umum (dan/ atau kebutuhan IKM sasaran), hal ini bisa dimasukkan dalam Rencana Aksi.

Bagan 3.3.4 Paket dukungan yang disarankan untuk tantangan sertifikasi

Kasus industri komponen kapal di SMIDeP menunjukkan, bahwa salah satu tantangan bagi industri pendukung lokal dalam memasuki pasar pemasok komponen asli adalah memastikan produksi terstandarisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pabrik dan untuk memperoleh sertifikat dari lembaga akreditasi yang terotorisasi. Dari pengalaman SMIDeP di industri komponen kapal, paket kegiatan dukungan berikut dapat menjadi rekomendasi bagi industri pendukung sejenis untuk melakukan sertifikasi:

Sosialisasi standar	Diatur oleh lembaga akreditasi yang terotorisasi untuk mengenalkan standar, proses dan syarat sertifikasi.
Pelatihan/ lokakarya gambar teknis dan dokumentasi proses produksi (kualitas manual)	Diatur untuk IKM agar dapat mempersiapkan gambar teknis dan dokumen proses produksi untuk komponen berdasarkan standar yang harus disetujui oleh lembaga akreditasi sebelum pembuatan prototipe dan kegiatan penjualan.
Bimbingan teknis persiapan pembuatan prototipe/ spesimen material	Tenaga ahli yang dapat memberikan saran/ konsultasi langsung harus ditempatkan dalam periode waktu tertentu agar IKM dapat melakukan pembuatan prototipe secara terus menerus sesuai gambar/ standar.
Uji laboratorium untuk prototipe/ bahan material	Fasilitasi uji laboratorium prototipe/ bahan material sesuai permintaan oleh lembaga sertifikasi harus dipersiapkan dengan biaya yang terjangkau (atau gratis, jika mengantisipasi revisi prototipe).
Audit/ konsultasi oleh lembaga sertifikasi terotorisasi	Proses audit biasanya mencakup dokumen proses produksi (kualitas manual), dan hasil uji laboratorium pada produk prototipe (kinerja/ ukuran) dan bahan material (komposisi). Hal ini membutuhkan biaya untuk sertifikasi setiap produk.
Misi pemasaran untuk komponen bersertifikat	Mengorganisasi IKM dalam mendekati pengguna (pabrik) potensial komponen tersertifikasi sebagai peluang temu bisnis.

Amatlah penting untuk memastikan koordinasi antara Pokja dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dukungan. Fasilitator memiliki peran penting dalam memfasilitasi lembaga dukungan dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai jadwal. Hal ini sangat disarankan untuk memastikan komitmen dari lembaga dukungan, dengan melibatkan lembaga tersebut dari tahap awal Rencana Aksi.

(4) Aksi oleh IKM sasaran

Perlu dicatat bahwa penyediaan kegiatan dukungan saja tidak akan mendorong IKM mencapai tujuan umum di Rencana Aksi. Aksi oleh IKM sasaran sangat penting dalam mencapai tujuan. Pada saat perumusan Rencana Aksi, IKM sasaran disarankan untuk mempertimbangkan aksi (atau inisiatif) IKM sendiri yang membantu pencapaian tujuan, dan berkomitmen melakukan aksi tersebut. Aksi (atau inisiatif) yang dilakukan oleh IKM sasaran dapat mencakup berbagai macam konten, seperti berikut ini;

- Pengadaan bahan baku berkualitas yang dibutuhkan untuk memperbaiki standar produk
- Pengembangan produk baru atau diversifikasi produk (prototipe)
- Perbaikan atau standarisasi produk yang sudah ada (prototipe)
- Aplikasi dan usaha untuk sertifikasi produk dan praktek manufaktur/ manajemen
- Partisipasi pada pameran perdagangan
- Kunjungan promosi ke pembeli/ saluran penjualan
- Persiapan alat dan media pemasaran/ promosi
- Pembukaan dan toko operasional/ ruang pameran

- Pendirian dan pengoperasian, atau perbaikan fungsi lembaga sentra (seperti koperasi, kelompok usaha bersama, atau unit dukung usaha lainnya)

Bagan 3.3.5 Aksi yang dilakukan industri sasaran (pengolahan kakao)

IKM sasaran di industri pengolahan kakao aktif terlibat sejak tahap perencanaan Rencana Aksi dan mengadakan rapat secara periodik dengan Pokja dalam rangka berbagi kemajuan dan kebutuhan (atau permintaan) untuk Rencana Aksi. Pertama-tama, IKM setuju untuk membentuk asosiasi untuk bersama-sama mempromosikan produk cokelat mereka. Asosiasi tersebut menyarankan dan melakukan berbagai usaha promosi dengan biaya sendiri atau dengan mencari dana dari pihak ketiga. Usaha promosi ini termasuk kunjungan pasar ke pembeli/ pengguna potensial (supermarket, hotel, kafe, dsb), keikutsertaan dalam pameran, persiapan media PR, dsb. Kemudian, IKM mengusulkan pembangunan toko. Toko ini berhasil direalisasikan di bandara lokal, dan telah beroperasi secara terus menerus. Keikutsertaan secara aktif pada Rencana Aksi dipimpin oleh beberapa IKM terkemuka yang berkeinginan kuat untuk maju dalam industri.

Pokja harus memfasilitasi IKM sasaran untuk mengidentifikasi aksi (atau inisiatif) apa yang penting dalam mencapai tujuan umum dari Rencana Aksi, dan memasukkan aksi tersebut kedalam format matriks, seperti yang diindikasikan di bawah. Contoh Rencana Aksi untuk pengembangan industri lokal dapat dilihat di [Lampiran 4](#).

Tujuan Umum (hasil yang diharapkan)	IKM-IKM sasaran					
Rantai pasokan	Kegiatan				Lembaga Penanggung Jawab	Periode
	Judul	Isi	Tujuan	Sasaran		
Bahan baku						
Distribusi bahan						
Produksi						
Pemasaran						
Faktor dukungan - SDM - Akses keuangan - Kelembagaan - Peraturan - Infrastruktur						
Aksi oleh IKM Sasaran						

Gambar 3.3.3 Format Matriks Rencana Aksi

3.4 Pelaksanaan Rencana Aksi

3.4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Melanjutkan penyusunan Rencana Aksi (versi awal), Pokja harus memulai dan melanjutkan fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi dengan membantu masing-masing lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan usulan kegiatan dukungan, dan mendorong IKM sasaran untuk melakukan aksi (atau inisiatif) sendiri untuk mencapai tujuan umum, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah.

3.4.2 Metode dan Output

(1) Pendekatan ke lembaga yang bertanggung jawab terhadap usulan dukungan

Pokja perlu mengidentifikasi lembaga terkait yang dapat bertanggung jawab (lembaga dukungan yang bisa memberikan dukungan yang diusulkan) dan ketersediaan sumber dana/ anggaran pada masing-masing usulan kegiatan dukungan. Status usulan kegiatan dukungan bervariasi berdasarkan tingkat kesiapan, sebagai berikut:

- i) Teridentifikasi lembaga yang bertanggung jawab dan terjaminnya anggaran yang dibutuhkan,
- ii) Teridentifikasi lembaga yang bertanggung jawab dan akan mengusulkan atau meminta anggaran yang dibutuhkan,
- iii) Tidak dapat mengidentifikasi lembaga yang bertanggung jawab, namun terjamin anggaran yang dibutuhkan, atau,
- iv) Tidak dapat mengidentifikasi lembaga yang bertanggung jawab, dan belum terjamin anggaran yang dibutuhkan.

Menanggapi usulan dukungan i) dan ii), Pokja/ fasilitator harus mendekati lembaga dukungan yang teridentifikasi dalam rangka membantu lembaga tersebut merancang metode, tujuan, konten, sasaran, dan pemilihan waktu kegiatan dukungan tersebut sesuai dengan Rencana Aksi, dan/atau mempersiapkan pelaksanaan (atau mengusulkan anggaran yang dibutuhkan).

Untuk dukungan dengan status iii), Pokja/ fasilitator harus mengidentifikasi dan mendekati lembaga kandidat terlebih dahulu, dan kemudian membantu dalam merancang dan mempersiapkan dukungan sesuai dengan Rencana Aksi.

Bagan 3.4.1 Contoh baik fasilitasi kerja sama ke lembaga dukungan

Pokja industri alas kaki mengusulkan serangkaian program dukungan pengembangan produk dalam Rencana Aksi untuk menjawab kebutuhan diversifikasi saluran penjualan/ segmen pasar yang disampaikan oleh industri sasaran, dan kemudian meminta kerja sama teknis dari Universitas Ciputra dan Aprisindo (Asosiasi Persepatuan Indonesia) sebagai pemangku kepentingan paling relevan di bidang ini. Pada awalnya, Pokja (Dinas Perindag dan Koperasi Kota) memiliki ketakutan untuk mengulangi dukungan pengembangan produk yang sebelumnya tidak memberikan hasil nyata, dan bertujuan untuk mengidentifikasi lembaga dukungan yang bisa membantu pengembangan produk/ dukungan promosi dengan cara berorientasi pada hasil. Pokja kemudian mempersiapkan konsep dan output yang diharapkan dari usulan program, dan mendekati Universitas Ciputra dan Aprisindo untuk meminta kerja sama dan umpan balik atas konsep program tersebut. Atas konsultasi sebelumnya, program dukungan yang diusulkan untuk pengembangan produk berhasil memberikan output yang nyata seperti permintaan transaksi dengan merek desainer fesyen terkenal dan pengembangan saluran penjualan/ segmen pasar baru.

Menanggapi status dukungan iv), Pokja/ fasilitator harus mengidentifikasi dan mendekati lembaga kandidat untuk meminta kolaborasi, dan kemudian membantu lembaga tersebut untuk memfasilitasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.

(2) Kerja sama dengan lembaga di luar perindustrian dan perdagangan

Cukup menantang bagi Pokja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selaku pemimpin Pokja) untuk memperoleh kolaborasi dan kontribusi dari kementerian, Dinas dan lembaga di luar perindustrian dan perdagangan (terkait pertanian, perkebunan, perhutanan, pariwisata, dsb.).

Seringkali beberapa kasus kegiatan dukungan penting yang membutuhkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di luar perindustrian dan perdagangan tidak dapat diimplementasikan. Meskipun, telah dianggarkan atau dilaksanakan, penyalarsan tujuan/ sasaran/ pemilihan waktu pelaksanaan dukungan tetap menjadi isu penting. Jika masalah ini tidak diatasi dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan Rencana Aksi.

Dalam memfasilitasi kerja sama dengan pemangku kepentingan di luar perindustrian dan perdagangan, Pokja disarankan untuk melakukan pengaturan sebagai berikut:

- i) Membuat ketua Pokja (Kepala Dinas Perindag) mendekati kepala lembaga yang terkait dalam rangka menjalin kerja sama dan/ atau pengaturan anggaran yang dibutuhkan,

- ii) Mempersiapkan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Dinas Perindag (atau ketua Pokja) dengan lembaga terkait dalam rangka memastikan kerja sama selama pelaksanaan Rencana Aksi, atau,
- iii) Menentukan peran/ tanggung jawab lembaga terkait pada Surat Keputusan (SK) oleh kepala pemerintah daerah pada perumusan Pokja.

Bagan 3.4.2 Fasilitasi usulan kegiatan dukungan oleh lembaga di luar Perindag

Pokja industri pengolahan kakao dan industri fesyen ulos telah mengusulkan kegiatan dukungan yang membutuhkan kerja sama kuat dengan Dinas terkait (selain Dinas Perindag), seperti, pengembangan jaringan kelompok petani kakao untuk memastikan pasokan buah berkualitas, dan pengembangan desa ulos untuk memikat perhatian turis kepada ulos. Pengembangan jaringan dengan kelompok petani kakao diasumsikan sebagai tanggung jawab Dinas Perkebunan provinsi (salah satu anggota Pokja). Meskipun begitu, hal ini tidak dilaksanakan oleh Dinas tersebut yang tidak hadir pada rapat Pokja kecuali pada tahap awal. Pengembangan desa ulos pada Rencana Aksi belum dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten, meskipun asosiasi hotel lokal telah menekankan kebutuhan pengembangan atraksi wisata yang sejenis. Kasus seperti ini sering terjadi, dan sering terobservasi dalam SMIDeP. Salah satu cara yang paling mungkin bagi Pokja untuk memfasilitasi lembaga di luar perindustrian dan perdagangan adalah dengan keterlibatan ketua Pokja (Dinas Perindag), yang diharapkan dapat berkonsultasi langsung dengan kepala lembaga terkait dan meminta intervensi kepala pemerintah daerah.

(3) Mempertimbangkan keterkaitan antar kegiatan dukungan

Dalam mengelola pelaksanaan Rencana Aksi dan mencapai Tujuan Umum secara terkontrol, Pokja harus mempertimbangkan beberapa hal berikut, misalnya, dalam interval dua tahun sekali;

- i) Mana saja usulan kegiatan dukungan, yang dapat dimulai terlebih dahulu,
- ii) Mana saja kegiatan dukungan, yang mengikuti,
- iv) Jangka waktu dan urutan, yang bisa mengkomposisi pendekatan *trial-&error*.

Mengenai hal i) diatas, Pokja harus memulai dengan kegiatan dukungan berkepentingan dan tingkat urgensi yang relatif tinggi dalam hal kontribusi terhadap tujuan umum Rencana Aksi. Pokja bisa juga memprioritaskan fasilitasi kegiatan dukungan yang memiliki efek demonstratif kepada IKM sasaran dan pemangku kepentingan agar terlibat dalam Rencana Aksi secara berkelanjutan dan menghasilkan kasus sukses secepat mungkin dalam jangka pendek.

Kemudian, Pokja harus mempertimbangkan kegiatan dukungan yang mengikuti sehingga output dari dukungan awal bisa terefleksi dengan baik dan/atau dimanfaatkan dalam dukungan selanjutnya. Hal ini penting untuk menghindari pengadaan dukungan secara *ad-hoc* tanpa mempertimbangkan hubungan antar dukungan.

Pada akhirnya, Pokja dapat menerapkan pendekatan *trial-&error* selama Rencana Aksi (terutama jika Rencana Aksi memberikan tantangan pengembangan produk atau pasar baru), dimana pengembangan produk (dalam bentuk prototipe) dan pengembangan pasar (dalam bentuk uji pasar) diulangi secara siklik (komentar pembeli/ pengguna menjadi dasar atas perbaikan produk/ prototipe lebih lanjut). Dalam hal ini, Pokja disarankan untuk menyediakan rangkaian peluang uji pasar seperti pameran, temu bisnis, kunjungan pasar ke pembeli, kegiatan PR lainnya secara berselang-seling.

Bagan 3.4.3 Mengakomodasi pendekatan 'trial-&error' pada Rencana Aksi

Kedua Rencana Aksi untuk industri pengolahan kakao dan fesyen ulos menargetkan IKM/ produsen pada proses *start-up*, yang baru belajar keterampilan produksi. IKM tidak melakukan bisnis secara komersil dan tidak memiliki saluran penjualan. Biasanya hanya beberapa pameran yang dipersiapkan untuk bisnis pemula tersebut sebagai kesempatan promosi, dengan tidak terlalu memperhatikan pentingnya IKM/ produsen pemula untuk menerima umpan balik atas produknya dan untuk mengembangkan pembeli/ konsumen yang stabil. Oleh karena itu, Pokja untuk *start-up* bisnis ini mengatur kesempatan pemasaran/ promosi secara berselang-seling sehingga IKM/ produsen tersebut dapat menerima umpan balik atas produknya dan bertemu konsumen/ pembeli potensial kapan saja produk tersedia, bersamaan dengan memfasilitasi dukungan teknis untuk perbaikan produk. Pendekatan *trial-&error* dianggap signifikan, sehingga IKM/ produsen termotivasi untuk memperbaiki produk dan mencari saluran penjualan dalam jangka waktu yang relatif pendek.

3.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi

Selama proses fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi, Pokja harus melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi.

3.5.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi merupakan tugas penting bagi Pokja. Cara Pokja melakukan monitoring dan evaluasi akan secara signifikan mempengaruhi hasil Rencana Aksi. Pokja akan melaksanakan i) monitoring kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi secara periodik dan meninjau revisi Rencana Aksi, ii) evaluasi pencapaian pada akhir Rencana Aksi, dan iii) melaporkan hasil monitoring/ *review* dan evaluasi ke pihak terkait.

Tugas monitoring/ *review* pada khususnya tidak hanya untuk memahami hasil Rencana Aksi, namun juga untuk meningkatkan konten Rencana Aksi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa masalah dan kebutuhan industri sasaran dapat berubah sejalan dengan perkembangan Rencana Aksi. Tujuan lain bagi Pokja adalah untuk memenuhi akuntabilitas kepada pihak-pihak terkait mengenai kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi.

3.5.2 Metode, Format dan Output

Monitoring/ *review* termasuk i) pengumpulan informasi/ data yang dibutuhkan untuk monitoring, ii) *review* informasi/ data tersebut, dan iii) revisi Rencana Aksi berdasarkan hasil *review*, dan harus diulang secara periodik. Kemudian, evaluasi pencapaian harus dilakukan sampai akhir Rencana Aksi (dua kali untuk jangka pendek dan jangka menengah). Monitoring/ *review* dan evaluasi tersebut harus diikuti dengan pelaporan hasil.

(1) Monitoring/ *review*

Monitoring/ *review* harus dimulai dua (2) sampai tiga (3) bulan setelah versi awal Rencana Aksi disusun. Awalnya, fasilitator bersama dengan anggota Pokja harus mengumpulkan dan menyusun informasi/ data penting untuk monitoring kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi. Daftar dibawah menunjukkan informasi/ data yang akan dikumpulkan untuk monitoring.

Tabel 3.5.1 Informasi/ data yang akan dikumpulkan untuk *monitoring* (disarankan)

Kategori	Informasi/ data	Cara Pengumpulan
Indikator kemajuan: untuk dimonitor pada setiap rapat.		
Kegiatan dukungan	- Kegiatan dukungan lengkap dengan output dan tindak lanjut. - Kegiatan dukungan yang akan difasilitasi. - Kegiatan dukungan yang ditunda dengan alasan penundaan. - Kemajuan dari kegiatan lain: pengembangan kelembagaan/ fasilitas dan perbaikan peraturan, yang diusulkan dalam Rencana Aksi.	- Setiap laporan kegiatan disiapkan oleh lembaga dukungan yang bertanggung jawab - Laporan oleh fasilitator
Aksi oleh IKM sasaran	- Aksi (inisiatif) yang telah/ sedang dilakukan dengan output. - Aksi (inisiatif) yang akan dilakukan.	- Laporan oleh fasilitator
IKM sasaran	- Jumlah IKM penerima kegiatan dukungan yang difasilitasi. - Jumlah IKM sasaran yang secara terus-menerus terlibat dalam Rencana Aksi. - IKM tambahan yang tertarik untuk terlibat dalam Rencana Aksi.	- Laporan oleh fasilitator
Lainnya	- Masalah, kebutuhan (atas dukungan) IKM sasaran (jika ada). - Perubahan mendasar pada lingkungan usaha.	- Laporan p oleh fasilitator
Indikator pencapaian: untuk dimonitor setiap dua kali setahun atau tahunan		
Tujuan umum	- Tingkat pencapaian tujuan umum dari Rencana Aksi (indikator ditentukan berdasar konten tujuan umum). - Jumlah kasus sukses (IKM sasaran yang mencapai tujuan umum dari Rencana Aksi).	- Laporan oleh fasilitator - Kuesioner/ wawancara kepada IKM sasaran

Dampak derivatif	- Setiap dampak positif yang diamati pada keseluruhan industri, seperti pertumbuhan jumlah IKM, pekerja, penjualan, volume produksi. - Kinerja dan pemanfaatan lembaga, fasilitas dan peraturan yang dikembangkan atau diperbaiki.	- Laporan oleh fasilitator - Kuisisioner/ wawancara kepada IKM sasaran
------------------	---	---

Pokja kemudian harus mengatur rapat, mengundang IKM sasaran dengan tujuan i) berbagi dan konfirmasi informasi/ data untuk monitoring, dan ii) berdiskusi untuk *review* Rencana Aksi. Fasilitator harus melaporkan informasi/ data untuk monitoring kepada Pokja, dan memfasilitasi diskusi untuk *review* dalam hal-hal berikut:

- Kemajuan dan pencapaian keseluruhan pelaksanaan Rencana Aksi,
- Masalah dan kebutuhan (atas dukungan) terbaru oleh IKM sasaran (jika ada), dan perubahan mendasar pada lingkungan usaha.
- Faktor yang menghambat kemajuan pengadaan kegiatan dukungan,
- Faktor yang menghambat kemajuan aksi (atau inisiatif) oleh IKM sasaran,
- Kinerja fasilitator,
- Peningkatan apapun yang diperlukan pada *platform* (seperti anggota Pokja).

Rapat monitoring/ *review* harus diatur setidaknya setiap triwulan, dan bisa dilakukan ketika muncul topik khusus untuk diskusi.

(2) Revisi Rencana Aksi

Ketika Pokja mengenali kebutuhan revisi Rencana Aksi atau peningkatan *platform* sebagai hasil *review*, hal-hal berikut harus diperhatikan lebih khusus;

Tabel 3.5.2 Hal-hal yang harus diperhatikan pada revisi Rencana Aksi

Revisi Rencana Aksi	- Kebutuhan merevisi (atau memperjelas) tujuan umum (jika masalah dan kebutuhan IKM sasaran yang terbaru berubah jauh dari awal) - Kebutuhan akan tambahan usulan kegiatan dukungan - Kebutuhan merevisi kegiatan dukungan (untuk yang telah diusulkan sebelumnya), - Kebutuhan mengubah dan/ atau menambah IKM sasaran, - Kebutuhan memperkenalkan hasil Rencana Aksi (mengingat perluasan kasus sukses IKM lain di industri yang sama).
Perbaikan <i>platform</i>	- Kebutuhan menambah dan/ atau mengganti anggota Pokja, - Kebutuhan menambah dan/ atau mengganti fasilitator, - Kebutuhan mengidentifikasi dan mendekati pemangku kepentingan (lembaga dukungan) tambahan untuk kerja sama/ kontribusi.

Pokja dapat merevisi Rencana Aksi secara fleksibel berdasarkan kebutuhan, namun wajib untuk merevisi Rencana Aksi setidaknya setiap tahun, dan harus melaporkan revisi tersebut kepada pihak terkait.

Bagan 3.5.1 Monitoring/ review berdasarkan pengalaman SMIDeP

Meskipun monitoring/ review dianggap penting, tugas ini tidak dilakukan secara periodik dan berorientasi pada tujuan. Kasus SMIDeP berikut ini menjelaskan mengapa monitoring/ review sangat signifikan;
Kebutuhan utama bisa dialihkan sejalan dengan kemajuan Rencana Aksi; Kebutuhan yang dimiliki industri kakao lebih berat pada kestabilan pasokan bahan yang berkualitas pada perencanaan awal, namun kebutuhan utama secara bertahap beralih kepada dukungan pemasaran/ promosi produk. Pokja mengadakan rapat dengan IKM sasaran untuk melakukan review pencapaian sementara Rencana Aksi, dan kemudian memutuskan untuk merevisi Rencana Aksi yang lebih menekankan pada dukungan pemasaran/ PR. Pengalihan kebutuhan utama untuk dukungan juga terjadi pada Rencana Aksi untuk ulos fesyen dan komponen kapal. Industri mebel rotan menunjukkan fenomena yang berlawanan. Pokja pada awalnya berasumsi untuk lebih menekankan pada dukungan pemasaran/ promosi pada Rencana Aksi. Namun, saat dukungan pemasaran dijalankan, masalah teknis penting muncul dan harus ditangani. Oleh karena itu, Pokja memutuskan untuk merevisi Rencana Aksi, menekankan aspek produksi dengan fokus pada bimbingan proses produksi yang baik.
Pengumpulan IKM bisa menjadi kesempatan untuk mengobservasi perubahan masalah/ kebutuhan; Selain rapat formal Pokja, peluang komunikasi informal dengan IKM sasaran sangat penting untuk mengobservasi perubahan situasi IKM sasaran dan situasi bisnis. Fasilitator untuk industri pengolahan kakao berkomunikasi erat dengan asosiasi IKM sasaran melalui kehadiran pada pertemuan reguler, dimana asosiasi menyusun peralihan masalah/ kebutuhan kepada fasilitator. Menanggapi hal itu, Pokja menambah dan menyesuaikan kegiatan dukungan.
Peluang komunikasi seperti itu antara fasilitator dan IKM bisa sengaja dirancang dalam berbagai bentuk. Pokja untuk industri kakao merancang monitoring penjualan setiap bulan bagi IKM sasaran dalam Rencana Aksinya, yang menugaskan fasilitator secara rutin untuk mengunjungi dan mewawancarai IKM tersebut.

(3) Evaluasi

Pokja harus mengevaluasi pencapaian keseluruhan Rencana Aksi pada akhir: misalkan dua kali pada setiap akhir jangka pendek (2 tahun) dan menengah (5 tahun). Evaluasi terakhir harus menganalisis tingkat pencapaian Tujuan Umum (dan jumlah kasus sukses IKM sasaran yang mencapai tujuan tersebut) dan dampak derivatif. Indikator pencapaian harus disetujui pada tahap awal. Meskipun begitu, Pokja masih bisa menambah atau merevisi indikator tersebut berdasarkan perubahan konten Rencana Aksi.

Pokja harus mengatur rapat evaluasi dengan mengundang IKM sasaran dan pemangku kepentingan terkait dengan Rencana Aksi. Fasilitator bersama dengan anggota Pokja harus mengumpulkan informasi/ data yang dibutuhkan untuk evaluasi sehingga Pokja dapat menganalisa dan mengkonfirmasi tingkat pencapaian, dan membahas faktor yang mempengaruhi hasil tersebut.

Rencana Aksi disarankan bisa direvisi secara keseluruhan berdasarkan evaluasi pada akhir jangka pendek, ketika Pokja mengenali kebutuhan untuk menyesuaikan Rencana Aksi jangka menengah pada kemajuan dan pencapaian yang dibuat dalam jangka pendek.

Bagan 3.5.2 Evaluasi menurut pengalaman SMIDeP

Tanpa memahami apa yang telah dicapai oleh rencana aksi, tidak ada yang dapat memutuskan apakah rencana akan dilanjutkan, apakah bisa meningkatkan cakupan rencana, atau tingkat tantangan. Industri komponen kapal merupakan kasus baik yang menunjukkan pentingnya evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi jangka pendek, yang mengonfirmasi pencapaian tujuan umum (transaksi dengan industri galangan kapal untuk komponen yang telah disertifikasi), Pokja memutuskan untuk memperpanjang Rencana Aksi dengan menambah komponen sasaran yang akan disertifikasi untuk periode Rencana Aksi berikutnya.

(4) Pelaporan monitoring/ review dan evaluasi

Pada setiap rapat monitoring/ review dan evaluasi terminal, Pokja melaporkan hasil dalam rangka memenuhi akuntabilitas kepada pihak terkait mengenai kemajuan dan pencapaian Rencana Aksi. Format standar laporan monitoring/ review dapat dilihat di [Lampiran 5](#). Pada kasus monitoring/ review yang memerlukan revisi pada Rencana Aksi, Pokja harus melampirkan Rencana Aksi yang telah direvisi ke laporan monitoring.

Pokja juga disarankan untuk membuat laporan periodik mengenai kemajuan/ pencapaian Rencana Aksi kepada kepala daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota) guna memfasilitasi kerja sama antar lembaga dukungan terkait.

BAB IV INFORMASI SUMBER DUKUNGAN

4.1 Sumber Dukungan untuk Pengembangan Industri Lokal

Fasilitasi pengembangan industri lokal membutuhkan keterlibatan serta kerja sama dari lembaga dukungan terkait (lembaga pemerintah, akademi dan swasta yang menyediakan dukungan/ layanan kepada IKM) yang saling berkoordinasi satu sama lain, sehingga kontribusi/ input teknis yang dibutuhkan dari lembaga terkait dapat dimobilisasi secara efektif untuk menyediakan usulan kegiatan dukungan dalam Rencana Aksi.

Fasilitasi ini juga memerlukan pemanfaatan fasilitasi/ skema dukungan IKM yang telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, sehingga keterbatasan anggaran daerah dapat dilengkapi secara optimal untuk menjawab usulan kebutuhan dukungan pada Rencana Aksi.

4.2 Survei Profil Lembaga Dukungan

4.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Pemerintah daerah sebaiknya memiliki informasi mengenai lembaga dukungan yang tersedia di daerah (termasuk cakupan layanan, prosedur untuk mengakses layanan, informasi kontak dan sektor keahlian lembaga dukungan) agar dapat mengidentifikasi dan memobilisasi kontribusi/ input dari lembaga tersebut untuk penyediaan usulan dukungan di Rencana Aksi.

Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat provinsi, atas nama pemerintah kabupaten/ kota, disarankan untuk melakukan survei profil lembaga dukungan yang tersedia di provinsi tersebut dengan keahlian yang terkait dengan industri unggulan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat provinsi, melalui survei profil, sebaiknya mengidentifikasi lembaga dukungan utama yang tersedia di daerah dari lembaga publik (universitas, BUMN, dan lembaga pemerintah lainnya) dan lembaga swasta (asosiasi, yayasan, lembaga non-profit, dan lembaga swasta lainnya) berdasarkan kategori berikut;

- 1) Manajemen Bisnis dan akses keuangan
- 2) Produksi dan Teknis, yang dikategorikan kedalam:
 - Sertifikasi/ Uji/ Riset termasuk perijinan
 - Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
 - Proses/ Cara Produksi dan Manufaktur
 - Desain/ Kemasan
- 3) Pengembangan SDM
- 4) Pemasaran dan promosi

Lembaga-lembaga yang tercakup dalam survei ini harus cukup aktif dan memiliki layanan spesifik/ sumber daya relevan untuk pengembangan IKM.

4.2.2 Metode, Format dan Output

Survei profil lembaga dukungan di daerah harus mencakup informasi/ data berikut, dan harus dilaksanakan oleh Dinas Perindag provinsi melalui kombinasi distribusi kuisioner atau wawancara langsung kepada lembaga dukungan yang sudah diidentifikasi. Format dari survei profil ditunjukkan pada [Lampiran 6](#), bersama dengan contoh hasil survei.

Tabel 4.2.2 Informasi/ data yang dimuat pada profil lembaga dukungan

1.	Nama Lembaga/ Instansi
2.	Alamat
3.	Nomor Telepon Kantor
4.	Nomor Faksimili
5.	Alamat Situs Web
6.	Alamat E-mail
7.	Status Lembaga
8.	Tahun Berdiri
9.	Nama Pimpinan Lembaga/ Penanggung jawab
10.	Profil Singkat
11.	Visi, Misi Lembaga
12.	Program/ Layanan yang ditawarkan
13.	Persyaratan dan Prosedur untuk Program/ Layanan Dukungan
14.	Sumber Pembiayaan untuk Program/ Layanan yang ditawarkan
15.	Biaya yang dikenakan untuk Pengguna
16.	Provinsi
17.	Kompetensi Teknis
18.	Sektor Industri dimana Lembaga tersebut terspesialisasi
19.	Kasus Sukses dari Lembaga
20.	Staf Terkemuka dari Lembaga (instruktur/ dosen untuk pelatihan, bimbingan dan jasa konsultasi)

4.3 Fasilitas Dukungan dan Skema Pembiayaan bagi Pemerintah Daerah

Dengan keterbatasan anggaran daerah (APBD) bagi pemerintah daerah, Pokja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) sebaiknya secara aktif mengidentifikasi dan memanfaatkan fasilitas dukungan dan skema pembiayaan yang tersedia di pemerintah/ lembaga pusat dalam rangka merealisasikan kegiatan dukungan sebanyak mungkin dari Rencana Aksi.

Dalam rangka membantu pengembangan industri lokal oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat mempersiapkan berbagai fasilitas dukungan dan skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Berikut ini adalah fasilitas dukungan utama dan skema pembiayaan yang tersedia di pemerintah pusat, pada khususnya Ditjen IKM Kementerian Perindustrian.

4.3.1 Ditjen IKM di Kementerian Perindustrian

Ditjen IKM bertanggungjawab langsung terhadap pengembangan IKM/ industri lokal, melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitasi dukungan untuk sektor IKM. Dalam RENSTRA Kementerian Perindustrian (2015-2019), Ditjen IKM merumuskan enam (6) program utama yakni;

- Peningkatan kemampuan industri sentra (bantuan bersifat fisik untuk infrastruktur industri melalui skema Dana Alokasi Khusus),
- Pengembangan produk (bantuan bersifat non-fisik),
- Pembangunan wirausaha baru (untuk bisnis *start-up*),
- Penyediaan mesin dan peralatan IKM,
- Revitalisasi UPT, dan,
- Penyediaan informasi pasar, pendampingan promosi dan pameran.

Dalam rangka meneruskan program di atas, Ditjen IKM sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan dukungan dengan 10 cara fasilitasi;

- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi,
- Bantuan dan bimbingan teknis,
- Bantuan bahan baku dan bahan penolong,
- Bantuan mesin dan peralatan,

- Pengembangan produk,
- Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup,
- Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran,
- Akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru,
- Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan; dan atau,
- Pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan dengan industri besar serta dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Pokja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dapat mengakses dan memanfaatkan dukungan dengan 10 cara fasilitasi di atas dalam rangka mewujudkan (sebagian) usulan kegiatan dukungan dalam Rencana Aksi, dengan meminta kepada Ditjen IKM sesuai dengan proses penganggaran resmi. Ditjen IKM secara reguler melakukan Rapat Koordinasi, di mana proposal bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah akan disampaikan ke dan disaring oleh Ditjen IKM untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. Proposal bisa juga disampaikan melalui surat permintaan ke Ditjen IKM (sekretariat dan Direktorat sektoral).

Ditjen IKM juga meluncurkan skema pembangunan/ revitalisasi infrastruktur industri (bantuan fisik dalam bentuk gedung, mesin/ peralatan) di industri sentra industri menggunakan DAK sejak tahun anggaran 2016. Pokja, melalui kepala Dinas Perindag dapat memanfaatkan skema ini untuk menjawab kebutuhan penguatan infrastruktur industri (sarana prasarana) terkait pada industri sentra.

Selain itu, Ditjen IKM mempersiapkan skema Restrukturisasi Mesin/ Peralatan IKM dalam rangka mempercepat penggantian mesin/ peralatan tua IKM melalui penyediaan subsidi terhadap nilai modal kepada IKM yang menghadapi keterbatasan modal. Persyaratan, kriteria, dan tata cara pendaftaran serta jenis mesin/ peralatan yang dapat diikutsertakan pada skema ini dapat dilihat dari petunjuk teknis untuk skema tersebut.

4.3.2 Ditjen Terkait di Kementerian Perindustrian

Pokja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dapat juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Ditjen lain dalam rangka memfasilitasi Rencana Aksi. Usulan kegiatan dukungan sebaiknya disampaikan dari kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau bahkan lewat pimpinan daerah kepada Ditjen-Ditjen yang terkait dengan industri sasaran. Pokja juga dapat meminta kerja sama dengan industri berskala besar.

Bagan 4.3.1 Fasilitasi kerja sama dengan Ditjen terkait dalam Rencana Aksi

Pokja industri komponen kapal di Tegal meminta Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ditjen ILMATE) untuk memfasilitasi kunjungan kerja ke Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan industri galangan kapal besar, dengan harapan Ditjen ILMATE dapat memulai bimbingan teknis dalam sertifikasi komponen perkapalan oleh BKI.
Pokja industri pengolahan aloe juga meminta Ditjen Industri Agro (Ditjen IA) untuk memperkenalkan beberapa industri minuman skala menengah yang melakukan manajemen pabrik berdasarkan *Good Manufacturing Practice* (GMP), dalam rangka pembelajaran praktik nyata GMP bagi IKM lokal dan memastikan keberhasilan program pembinaan GMP di industri ini.

4.3.3 Kementerian Terkait (Perdagangan, Koperasi)

Pokja dapat memobilisasi dukungan fasilitas dan skema pembiayaan yang tersedia dari Kementerian terkait lainnya untuk pengembangan industri lokal termasuk Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan UMKM. Memobilisasi beragam sumber dukungan dari lembaga di luar perindustrian merupakan salah satu tantangan bagi Pokja. Terkait hal ini, Pokja disarankan untuk melibatkan bidang lain (misalkan, bidang perdagangan dan koperasi) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai anggota Pokja dan berbagi Rencana Aksi, untuk merealisasikan usulan kegiatan dukungan terkait perdagangan, promosi, keuangan dan koperasi.

(1) Kementerian Koperasi dan UMKM

Pokja dapat mengusulkan dan memanfaatkan fasilitasi dan skema pembiayaan (berdasarkan RPJMN 2015-2019) yang tersedia di Kementerian Koperasi dan UMKM. Berikut ini adalah contoh fasilitas

dukungan yang tersedia di kementerian tersebut;

- a. Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari UMKM dan koperasi,
- b. Fasilitasi akses pembiayaan UMKM dan koperasi melalui penguatan Lembaga Kredit Mikro (LKM), bantuan dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), serta kredit bagi UMKM,
- c. Fasilitasi pengembangan produk unggulan dari sumber daya lokal yang dihasilkan UMKM atau koperasi,
- d. Fasilitasi peningkatan akses pasar, melalui promosi untuk pasar dalam dan luar negeri,
- e. Layanan pemasaran oleh SMEsCO (*trading house* dan *showroom* bagi produk UMKM atau koperasi), and,
- f. Konsultasi bisnis dan pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Selain itu, kementerian menyediakan skema pembiayaan melalui Dana Dekonsentrasi (Dekon) untuk menanggapi kebutuhan daerah terhadap koperasi/ pengembangan UKM dari pemerintah daerah. Pokja dapat memanfaatkan Dana Dekon untuk membiayai kegiatan dukungan seperti pendirian/ penguatan koperasi atau kelompok usaha bersama.

(2) Kementerian Perdagangan

Pokja dapat mengusulkan dan memanfaatkan fasilitasi dan skema pembiayaan (berdasarkan RPJMN 2015-2019) yang tersedia di Kementerian Perdagangan juga. Berikut ini adalah contoh fasilitasi yang tersedia di Kementerian ini;

- a. Program peningkatan penggunaan barang produksi dalam negeri (P3DN),
- b. Fasilitasi ekspor melalui pengembangan produk (seperti layanan *designer dispatch*),
- c. Fasilitasi ekspor melalui pengembangan SDM (seperti pelatihan bagi eksportir dan eksportir potensir),
- d. Fasilitasi pengembangan pasar (pameran, misi dagang, temu bisnis, dsb.) dan penyediaan informasi pasar luar negeri,
- e. Layanan pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi standar, dsb.

Kementerian Perdagangan juga menyediakan skema pembiayaan melalui Dana Dekon sebagai respon terhadap kebutuhan terkait dengan pengembangan dagang/ ekspor dari pemerintah daerah. Pokja dapat memanfaatkan Dana Dekon ini untuk membiayai kegiatan dukungan seperti pengembangan pasar dan fasilitasi perdagangan (baik internasional maupun regional) produk-produk industri lokal pada khususnya.

4.3.4 Fasilitasi dan Skema Pembiayaan dari Non-pemerintah

Dukungan fasilitas dan sumber pembiayaan yang diberikan oleh lembaga non-pemerintah dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan usulan kegiatan dukungan Rencana Aksi untuk melengkapi kekurangan anggaran dari pemerintah. Sumber pembiayaan, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan besar, program kemitraan (PKBL) dari badan usaha milik negara/ daerah dan lembaga swadaya masyarakat, dan dana hibah lain bisa masuk kategori ini.

Ini adalah kesempatan baik untuk memanfaatkan dana CSR atau PKBL yang tersedia di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, Pokja disarankan untuk mengidentifikasi dan mendekati para penyedia pembiayaan potensial dari masing-masing daerah sejak tahap awal fasilitasi, jika diperlukan.

PENUTUP ~ Hal-hal penting selama fasilitasi pengembangan industri lokal

Seperti yang telah disampaikan, Petunjuk ini bertujuan untuk memperkenalkan pendekatan dan praktik yang disarankan untuk memfasilitasi pengembangan industri lokal berdasarkan pelajaran dan praktik baik yang dialami oleh SMIDeP. Petunjuk ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, yaitu Dinas Perindag di tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi, dan Ditjen IKM, sehingga pemerintah daerah bisa merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi pengembangan industri sasaran dengan cara yang berorientasi pada tujuan. Berikut adalah rangkuman hal-hal penting dalam fasilitasi pengembangan industri lokal.

- **Diagnosis dan Rencana Aksi secara konsultatif:** Petunjuk ini menekankan proses fasilitasi secara konsultatif dengan industri sasaran, khususnya pada tahap awal fasilitasi, seperti diagnosis industri dan perumusan Rencana Aksi. Tanpa memastikan masalah, hambatan dan kebutuhan aktual dari industri sasaran melalui konsultasi, serta merefleksikannya ke dalam Rencana Aksi, Pokja akan menghadapi kesulitan dalam memastikan keterlibatan dan kolaborasi proaktif industri sasaran dalam Rencana Aksi.
- **Penetapan tujuan secara jelas:** Petunjuk ini juga menekankan pentingnya penetapan tujuan umum yang Spesifik, Terukur secara Obyektif, Menantang namun Realistis dalam Rencana Aksi, dengan mempertanyakan "Produk Apa (atau Mana Saja) yang akan dikembangkan atau ditingkatkan untuk Segmen Pasar/ Konsumen Mana, dan Bagaimana cara mencapainya". Tanpa tujuan terukur yang spesifik, Rencana Aksi akan berakhir sebagai rencana tanpa tujuan dengan hanya mendaftar kegiatan dukungan dan tidak akan memberikan hasil nyata terhadap pihak terkait.
- **Monitoring dan review secara terus-menerus:** Petunjuk ini menyatakan bahwa monitoring dan *review* selama pelaksanaan Rencana Aksi merupakan tugas yang harus diutamakan Pokja, karena ini merupakan sarana untuk mengungkapkan dan berbagi hasil Rencana Aksi, kemudian memperbaiki Rencana Aksi, dan bahkan meningkatkan keterlibatan lebih lanjut dari industri sasaran dan pemangku kepentingan. Fasilitasi pengembangan industri lokal merupakan proses pembelajaran, dimana aksi akan memberikan pelajaran untuk aksi-aksi berikutnya. Karena itu, Pokja perlu menghindari kehilangan kesempatan pembelajaran yang berharga untuk mengembangkan Rencana Aksi, dengan melakukan monitoring dan *review* secara memadai.

Petunjuk ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memampukan kawan-kawan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan fasilitasi secara lebih baik sesuai dengan arah pengembangan industri lokal yang diharapkan.



BUPATI TEGAL

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 050/ / 2013

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing Industri lokal di Kabupaten Tegal, mendukung pencapaian Visi Misi Daerah serta untuk mendorong dan melancarkan pelaksanaan Program Percepatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal, perlu dilaksanakan Pembinaan dan Pendampingan Industri Kecil yang memiliki keunggulan di Kabupaten Tegal dengan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Daerah Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal dalam Keputusan Bupati Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang - undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Profinsi Djawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7425);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 17 Tahun 2009 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2014
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2009 tentang RPJP Kabupaten Tegal Tahun 2005 - 2015;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 135/M-IND/PER/12/2011 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Daerah Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi dan pihak terkait, pusat dan daerah serta tim proyek Japan International Cooperatioan Agency (JICA) dalam pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal;
- b. Merumuskan kebijakan dan langkah - langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal dengan mengatasi permasalahan hambatan dan kendala yang timbul;
- c. Memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Tim Proyek JICA dalam melakukan Pembinaan, Pendampingan Industri Kecil dan Menengah.
- d. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan pada para pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah yang ditetapkan sebagai Kompetensi Industri Inti;
- e. Bersama pihak terkait dalam hal ini Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan tim Proyek JICA melakukan pembinaan, pendampingan serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal; dan

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tegal.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal selama 3 (tiga) tahun pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal

Plt. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH,

HARON BAGAS PRAKOSA

Lampiran I : Keputusan Bupati Tegal

Nomor :

Tanggal : Juni 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEGAL

- I. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tegal
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tegal
- III. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- IV. Anggota : 1. Drs. Mukti Sarjono, Msi
2. Abdullah An
3. Sutardi
4. Munadi, S.Sos
5. Saeful Bachri Arif, ST
6. Amin Toyib Mustofa, ST

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal

Pit. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH,

HARON BAGAS PRAKOSA

Industri Pengolahan Aloe di Kota Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 45 /DISPERINDAG/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) ALOEVERA
DI KALIMANTAN BARAT**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) unggulan di Kalimantan Barat yang salah satunya adalah IKM Aloe vera, perlu disusun rencana aksi berupa kegiatan pendukung yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Aloe vera di Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Aloe vera di Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) di Sentra;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Aloe vera di Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Pokja Pengembangan IKM Aloe vera di Kalimantan Barat;
 - b. menetapkan target capaian kegiatan dan penyusunan rencana aksi dalam rangka pengembangan IKM Aloe vera di Kalimantan Barat;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendukung rencana aksi oleh Dinas atau instansi terkait;

- 3 -

- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan rencana aksi;
- e. melakukan koordinasi dengan para pengambil kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Januari 2015

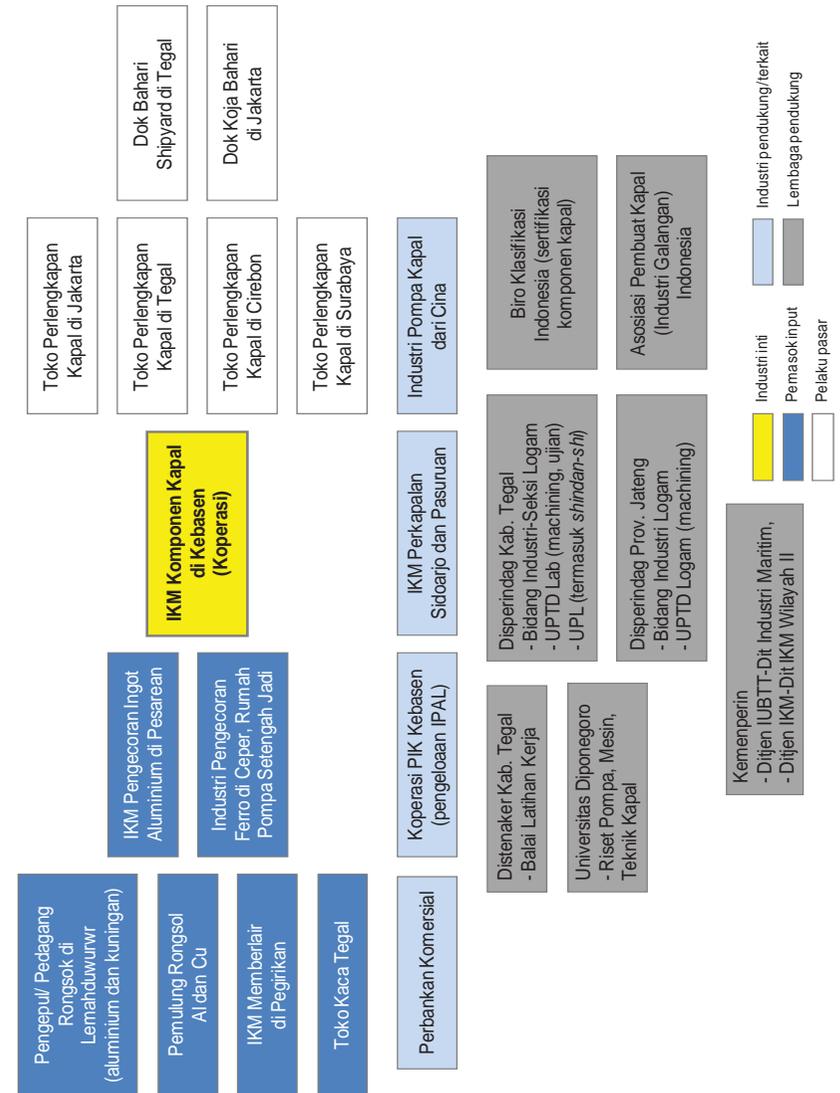


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 Nomor : 45 /DISPERINDAG/2015
 Tanggal : 7 Januari 2015

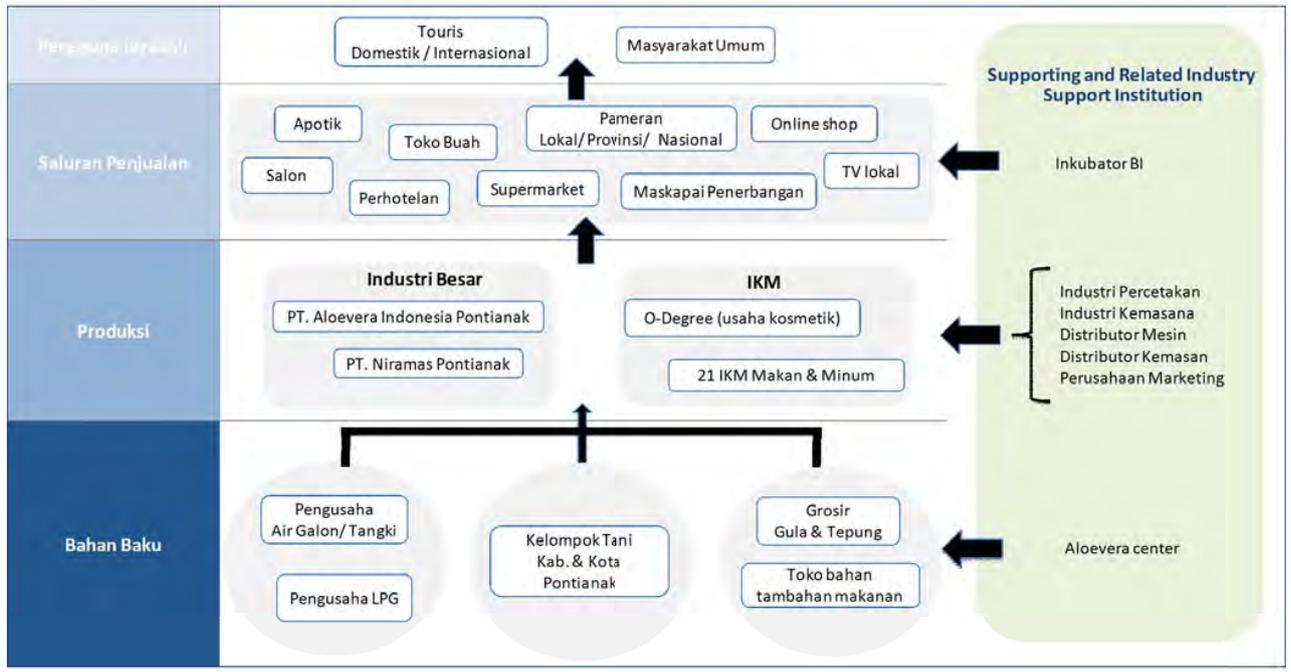
**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) ALOEVERA
 DI KALIMANTAN BARAT**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Barat	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Prov. Kalbar	Pembina
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	Sekretaris
7.	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalbar	Anggota
8.	Kabid Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Kalimantan Barat	Anggota
9.	Kepala Unit Pelatihan Industri Kecil Menengah Prov. Kalbar	Anggota
10.	Kabid Industri Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pontianak	Anggota
11.	Kabid Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak	Anggota
12.	Kasi Pengembangan Jasa Teknik Baristand Industri Pontianak	Anggota
13.	Kasi P4I pada Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pontianak	Anggota
14.	Kasi Pengembangan Produksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	Anggota
15.	Kasi Sarana Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	Anggota
16.	Kasi Pengembangan Usaha Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	Anggota
17.	Erni Sulissiwati, SP, M.Si (Kasubbag Tata Usaha Unit Pelatihan Industri Kecil Menengah Prov. Kalbar)	Fasilitator
18.	Sumarna (Fungsional Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar)	Anggota
19.	Parningotan (Fungsional Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar)	Anggota

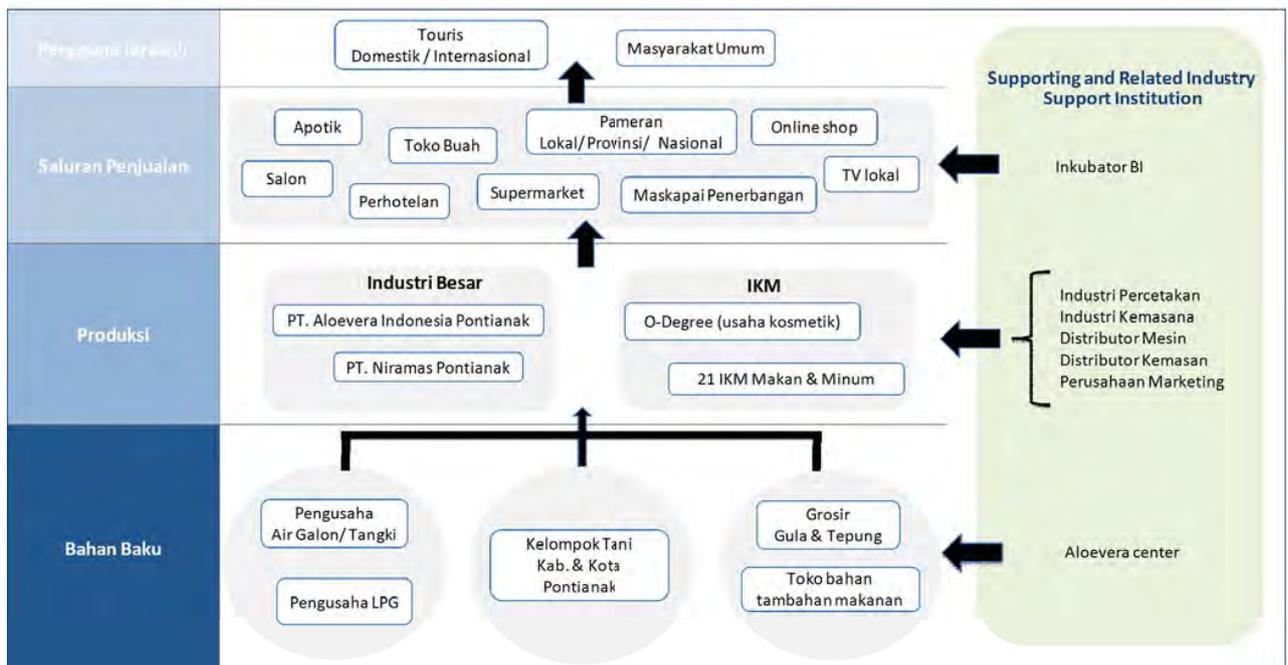
Lampiran 2: Contoh Peta Stakeholders
 Industri Komponen Kapal di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah



Rantai pasokan	Kondisi selama ini	Isu/ kendala	Kebutuhan
Bahan baku/ Distribusi bahan	<ul style="list-style-type: none"> Variety of Pontianak-grown aloe plant is superior and its midrib overweighs other varieties'. Land conditions in Pontianak are conducive to aloe planting. Farmers are altering their land-usage to pineapple cultivation and commercial properties. Some IKMs own aloe-farm land with the contracted farmers. Land in Pontianak is predominantly peaty. No private water-processing company operates in Pontianak. Rainwater is used for the production. 	<ul style="list-style-type: none"> Supply of aloe plant is not sufficient. Price of aloe plant is fluctuated and often influenced by the companies procuring the large amount. Availability of clean water is limited. 	<ul style="list-style-type: none"> Sufficient supply of quality aloe plant Sufficient supply of clean water
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Production process and quality is not standardized. Production site of some SMIs are not hygienic enough for food/ beverage production. Packaging companies are scarce in Pontianak. Aloe processing companies in Pontianak do not possess decent skills in package-designing. 	<ul style="list-style-type: none"> Product quality remains low and varied. The product safety is not reliable. Packaging cost is high. Packaging design is not attractive. 	<ul style="list-style-type: none"> Production process standardization and safety improvement through obtainment of the relevant certifications including GMP, MD, and PIRT Provision of packaging machines Easy access to the packaging facility Skill development in packaging-designing
Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> Product quality does not meet market standards. Some IKMs have not obtained necessary certificates to prove safety of their products. Aloe product demand in Pontianak is relatively stable. Certain and long-term business relationship has not been established in the outside markets. 	<ul style="list-style-type: none"> Consumers' confidence against the product quality and safety is not high enough. Sales channels to distribute the products outside Pontianak are still limited. Logistical cost of product distribution is high. 	<ul style="list-style-type: none"> Enhancement of consumers' confidence against the product quality and safety Establishment of firm relationship with the distributors Expansion and diversification of the sales channels (especially outside Pontianak)
Faktor dukung - SDM - Akses keuangan - Kelembagaan - Peraturan - Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Structured training system is not existent. There is a special credit scheme from Bank of West Kalimantan. There is no local association or cooperative for the aloe-processing industry. There is no collaboration with the large companies. Aloe products are designated as a priority product by the local government. 	<ul style="list-style-type: none"> Collaboration and joint actions among SMIs are not existent. There is no learning opportunity from the large companies. Electric supply is unstable. 	<ul style="list-style-type: none"> Establishment and strengthening of the association/ cooperative Business mentoring from the large companies Regulatory support from the local government Stable electric supply



Rantai pasokan	Kondisi selama ini	Isu/ kendala	Kebutuhan
Bahan baku/ Distribusi bahan	<ul style="list-style-type: none"> Berbagai aloevera yang tumbuh di Pontianak adalah budidaya unggul dan pelepahnya lebih berat dibandingkan dengan varietas lain. Kondisi tanah Pontianak cocok untuk penanaman aloevera. Petani mengubah lahan penggunaan tanah untuk budidaya nanas dan properti komersial. Beberapa IKM memiliki pertanian aloevera dengan petani kontrak. Tanah di Pontianak didominasi dengan tanah bergambut. Tidak ada perusahaan pengolahan air swasta yang beroperasi di Pontianak. Air hujan digunakan dalam proses produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasokan aloevera tidak mencukupi. Harga aloevera berfluktuasi dan sering kali dipengaruhi oleh perusahaan yang membeli dalam jumlah besar. Ketersediaan air bersih yang terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasokan aloevera berkualitas yang mencukupi. Pasokan air bersih yang mencukupi.
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Proses dan kualitas produksi belum distandardisasi Lokasi produksi beberapa IKM masih belum cukup higienis untuk produksi makanan/ minuman. Perusahaan kemasan jarang ada di Pontianak. Perusahaan pengolahan aloevera di Pontianak tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam mendesain kemasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas produk rendah dan bervariasi. Keamanan produk tidak terpercay. Biaya pengemasan tinggi. Desain kemasan tidak menarik. 	<ul style="list-style-type: none"> Standardisasi proses produksi dan peningkatan keamanan pangan melalui didaptkannya sertifikat yang relevan, seperti GMP, MD, dan PIRT. Pengadaan mesin pengemasan. Kemudahan akses pada fasilitas pengemasan. Pengembangan kemampuan desain pengemasan.
Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas produk tidak sesuai dengan standar pasar. Beberapa IKM belum memiliki sertifikasi yang dibutuhkan untuk membuktikan keamanannya. Permintaan produk aloevera di Pontianak relatif stabil. Hubungan bisnis pasti dan jangka panjang yang belum ditetapkan di pasar luar. 	<ul style="list-style-type: none"> Kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk tidak cukup kuat. Saluran penjualan untuk mendistribusikan produk ke luar Pontianak masih terbatas. Biaya logistik untuk distribusi produk tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk. Pembentukan hubungan kuat dengan distributor. Perluasan dan diversifikasi saluran penjualan (terutama yang diluar Pontianak)
Faktor dukung - SDM - Akses keuangan - Kelembagaan - Peraturan - Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya sistem pelatihan terstruktur. Adanya skema peminjaman khusus dari Bank Kalbar. Tidak ada asosiasi atau koperasi lokal untuk industri pengolahan aloevera. Tidak ada kolaborasi dengan perusahaan besar. Produk aloevera ditetapkan sebagai produk prioritas oleh pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya kolaborasi dan aksi bersama diantara IKM Tidak ada kesempatan belajar dari perusahaan besar. Pasokan listrik tidak stabil. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan dan penguatan asosiasi/ koperasi. Mentoring bisnis dari perusahaan besar. Dukungan peraturan dari pemerintah daerah. Pasokan listrik yang stabil.



RENCANA AKSI Industri (Sentra IKM) Komponen Perkapalan di Kabupaten Tegal

Disusun pada Juli Versi Pertama

Tujuan Utama **Jangka Pendek** IKM-IKM komponen kapal mampu membuat komponen kapal BKI-class (10 produk komponen Kapal yang sertifikasi oleh BKI) dan menyuplainya ke industri/ pasar galangan kapal Indonesia.
Jangka Panjang
IKM Sasaran 30 IKM Komponen Kapal (Koperasi Mandiri Sejahtera) di Kabupaten Tegal
Periode Juli 2013 sampai dengan Oktober 2015

Lampiran 4: Contoh Rencana Aksi Pengembangan Industri Lokal

Aspek	Kegiatan Dukungan				Lembaga Penanggung Jawab	Sumber Dana (skema/ program)	Periode (bulan/ tahun)	
	Judul	Isi	Tujuan	Sasaran Dukungan				
Kegiatan Dukungan								
Bahan Baku	Penelitian bahan dasar scrap menjadi bahan standar	Penelitian pengembangan bahan baku scrap	Pengembangan dan standarisasi bahan baku	IKM yang menggunakan bahan baku non ferro	Disperindag Tegal	Disperindag Tegal	Juli - September 2014	
Produksi/ Proses Produksi	Bimbingan teknis pada penerapan 3S	Perbaikan lingkungan kerja untuk peningkatan produktivitas IKM sesuai dengan prinsip 3S	Pencapaian sertifikasi BKI untuk beberapa komponen kapal	12 IKM	Disperindag Tegal	Disperindag Tegal, JICA	Oktober 2013 - April 2014	
	Pendampingan proses sertifikasi BKI untuk 10 komponen kapal	a. Pendampingan pada penyusunan dokumen sistem mutu (proses produksi komponen kapal)	Peningkatan produksi dan perbaikan efisiensi produksi	Koperasi Mandiri Sejahtera	30 IKM	Disperindag Propinsi	BKI, Ditjen IUBTT, Ditjen IKM dan Disperindag Propinsi	Maret - April 2014 Dilanjut pada 2015
		b. Workshop dan penyusunan drawing komponen kapal untuk sertifikasi BKI			30 IKM	Disperindag Tegal, Ditjen IUBTT	Ditjen IUBTT	April 2014 Dilanjut pada 2015
		c. Penyediaan bahan baku untuk pembuatan prototipe komponen kapal untuk sertifikasi BKI			IKM-IKM yang membuat komponen prototipe	Disperindag Tegal, Ditjen IUBTT	Ditjen IUBTT, JICA	Mei 2014 Dilanjut pada 2015
		d. Bimbingan teknik selama pembuatan prototipe komponen kapal untuk sertifikasi BKI			IKM-IKM yang membuat komponen prototipe	Disperindag Tegal, Ditjen IUBTT	Ditjen IUBTT, BKI, JICA	Mei - September 2014 Dilanjut pada 2015
	d. Pengujian kinerja dan materi komponent kapal untuk sertifikasi BKI	IKM-IKM yang membuat komponen prototipe	Disperindag Tegal, Dinperindag Provinsi	Dinperindag Prov, Ditjen IUBTT, BKI	Mei - Oktober 2014 Dilanjut pada 2015			
	Peningkatan sarana produksi	Fasilitasi dapur pengecoran dan termocopel	Fasilitasi mesin produksi (mesin lathe 6m)	Koperasi Mandiri Sejahtera	Koperasi Mandiri Sejahtera	Disperindag Tegal	Disperindag Tegal	Oktober - Desember 2014
Fasilitasi mesin produksi (mesin lathe 6m)		Koperasi Mandiri Sejahtera			Disperindag Tegal	Ditjen PPI	2015	
Pemasaran/ Promosi	Studi-banding ke BKI dan galangan kapal	Studi-banding ke BKI dan 3 galangan kapal di Jakarta	Pengembangan akses pasar, dan realisasi transaksi langsung dengan industri galangan kapal	Koperasi Mandiri Sejahtera, Koperasi RRT	Disperindag Tegal	Dinperindag Provinsi, JICA	Okt. 2013	
	Studi-banding dan temu bisnis ke galangan kapal	Studi-banding dan temu bisnis ke galangan kapal/ asosiasi galangan kapal	Koperasi Mandiri Sejahtera, Koperasi RRT	IKM-IKM yang membuat komponen prototipe	Disperindag Tegal	Disperindag Tegal	Setelah sertifikasi komponen sasaran	
	Pameran terkait dengan industri galangan/ maritime	Partisipasi dalam pameran-pameran terkait dengan industri galangan/ maritim dengan produk komponen yang (akan) tersertifikasi.		IKM-IKM yang membuat komponen prototipe	Ditjen IUBTT	Ditjen IUBTT	Selama dan setela usaha sertifikasi BKI	

Aspek	Kegiatan Dukungan				Lembaga Penanggung Jawab	Sumber Dana (skema/ program)	Periode (bulan/ tahun)
	Judul	Isi	Tujuan	Sasaran Dukungan			
Faktor Dukungan Kelembagaan	Fasilitasi alat lab uji material ke UPTD Labo.	Bantuan alat pengujian komposisi materi produk (Al=Mg) ke UPTD Laboratorium	Penguatan fungsi pengujian (materi) dari UPTD tsb.	IKM komponen logam, khususnya yang membuat komponen prototipe	Ditjen IKM (Wilayah II)	Ditjen IKM (Wilayah II)	September 2014 April - Juni 2015
	Fasilitasi akreditasi KAN ke UPTD Labo.	Bantuan teknis untuk asessmen akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional pada layanan pengujian dari UPTD Laboratorium			Disperindag Tegal	Disperindag Tegal	Januari - Maret 2014
Sumber Daya Manusia (SDM)	Pelatihan teknologi pengecoran (2 kali)	Pelatihan pada keterampilan pengecoran non-ferro	Peningkatan pengrajin muda yang terampil di bidang logam	20 IKM komponen logam	Dinperindag Provinsi	Dinperindag Provinsi	September/ Desember 2013, Dilanjut setiap tahun
	Pelatihan teknologi pengelasan	Pelatihan pada keterampilan pengelasan non-ferro		20 IKM komponen logam	Ditjen IUBTT	Ditjen IUBTT	September 2013, Dilanjut setiap tahun
	Pelatihan die&mould	Pelatihan pada keterampilan die & mould		IKM komponen logam	Disperindag Tegal	Disperindag Tegal	Oktober - Desember 2014 Dilanjut pada 2015
Akses Keuangan	Temu bisnis tentang produk/ layanan keuangan KospinJasa	Pengenalan produk/ layanan keuangan KospinJasa, dan konsultasi langsung ttg. masalah keuangan	Penguatan akses keuangan dan manajemen	IKM komponen logam	Disperindag Tegal, KospinJasa	Disperindag Tegal, KospinJasa, JICA, Bank Indonesia Tegal	Desember 2013
	Pelatihan manajemen keuangan	Pelatihan pembukuan dan manajemen kas (cash-flow) usaha		IKM komponen logam	Disperindag Tegal, YDBA-LPB, KospinJasa	Disperindag Tegal, YDBA-LPB, JICA	Apr. 2014
Infrastruktur							
Usaha Sendiri oleh IKM Sasaran							
Produksi/ Proses Produksi	Pembuatan prototipe komponen kapal untuk sertifikasi BKI	a. Penyusunan dokumen sistem mutu/ drawing pada komponen kapal sasaran dari sertifikasi BKI	Pencapaian sertifikasi BKI untuk beberapa komponen kapal	-	IKM-IKM yang membuat komponen prototipe	IKM-IKM yang membuat komponen prototipe	Maret - April 2014 Dilanjut pada 2015
		b. Pembuatan prototipe komponen kapal sasaran dari sertifikasi BKI, termasuk pengaturan bahan baku yang dibutuhkan					IKM-IKM yang membuat komponen prototipe, Ditjen IUBTT, JICA
	Penerapan 3S	Perbaikan lingkungan kerja untuk peningkatan produktivitas IKM sesuai dengan prinsip 3S				IKM-IKM yang membuat komponen prototipe	Oktober 2013 - April 2014
Pemasaran/ Promosi	Pemasaran komponen tersertifikasi	Perkenalan langsung komponen tersertifikasi kepada industri galangan (lewat telepon, kunjungan pembeli, dll.)	Realisasi transaksi langsung dengan industri galangan	-	IKM-IKM yang membuat komponen prototipe, Koperasi	IKM-IKM yang membuat komponen prototipe, Koperasi	Selama dan setela usaha sertifikasi BKI
Kelembagaan	Perkuatan kelembagaan sentra komponen kapal	Perbaikan fungsi dan pengembangan aksi bersama dari koperasi industri komponen kapal yang ada di sentra	Perkuatan manajemen dan layanan lembaga koperasi dalam sentra	-	Koperasi Mandiri Sejahtera	Koperasi Mandiri Sejahtera	2014 - 2015

Lampiran 5: Format Laporan Monitoring dan Review

Lembar Monitoring/ Review untuk Program Pengembangan Industri Lokal

Nama industri sentra sasaran	:
Disusun oleh	:
Diakui oleh	:
Tanggal persiapan	:
No. versi dari monitoring	:

A. Monitoring Rencana Aksi

1. Kemajuan Rencana Aksi (yang akan dimonitor pada setiap rapat Pokja)

Kategori	Indikator (Informasi/ data yang akan dilaporkan)	Penjelasan
Usulan kegiatan dukungan di Rencana Aksi	- Kegiatan dukungan yang telah dilaksanakan	<i>Dijelaskan dengan garis besar, output dan tindak lanjut yang dibutuhkan.</i>
	- Kegiatan dukungan yang akan difasilitasi segera	<i>Dijelaskan dengan garis besar dan output.</i>
	- Kegiatan dukungan dengan keterlabatan besar	<i>Dijelaskan dengan alasan.</i>
	- Kemajuan dari pengembangan kelembagaan dan fasilitas, serta perbaikan peraturan (yang diusulkan dalam Rencana Aksi)	<i>'Pengembangan kelembagaan' termasuk penguatan koperasi, pendirian unit usaha untuk bahan baku, dan pengembangan fasilitas termasuk revitalisasi UPT.</i>
Tindakan oleh IKM sasaran	- Tindakan yang sudah dilakukan	<i>Dijelaskan dengan garis besar, output, dan tindak lanjut yang dibutuhkan.</i>
	- Tindakan yang akan dilakukan	<i>Dijelaskan dengan garis besar dan output.</i>
IKM sasaran	- Jumlah IKM yang menerima fasilitasi kegiatan dukungan	
	- Jumlah IKM yang terlibat secara terus menerus dalam Rencana Aksi	<i>Dijelaskan dengan tingkat keaktifan.</i>
	- IKM tambahan yang tertarik untuk terlibat dalam Rencana Aksi	
Lainnya	- Masalah dan kebutuhan terbaru dari IKM sasaran	<i>Dijelaskan, jika ada.</i>
	- Perubahan mendasar dalam lingkungan usaha	<i>Dijelaskan, jika ada.</i>

2. Pencapaian Rencana Aksi (untuk dimonitor dua kali setahun)

Kategori	Indikator (Informasi/ data yang dilaporkan)	Keterangan
Tujuan keseluruhan	- Tingkat pencapaian dari Tujuan Umum Rencana Aksi	<i>Tergantung pada isi tujuan keseluruhan, seperti, transaksi dengan segmen pasar/ pembeli, penerbitan sertifikasi, produk yang baru dikembangkan dan diversifikasi produk dengan penawaran transaksi, pertumbuhan pendapatan, bergantung pada isi tujuan.</i>
	- Jumlah kasus sukses	<i>Seperti, IKM sasaran yang berhasil mencapai tujuan keseluruhan Rencana Aksi.</i>
Dampak turunan	- Segala dampak positif yang diamati pada keseluruhan industri	<i>Seperti pertumbuhan jumlah IKM, pekerja, penjualan, volume produksi, dsb.</i>
	- Kinerja dan pemanfaatan lembaga, fasilitas dan peraturan yang dikembangkan atau diperbaiki.	

B. Review Rencana Aksi (untuk dimonitor pada setiap Rapat Pokja)

Hal yang di review	Hasil review atau segala tindakan yang akan dilakukan
Kemajuan dan pencapaian keseluruhan pada pelaksanaan Rencana Aksi	
Faktor-faktor penghambat kemajuan penyediaan kegiatan dukungan dan tindakan oleh IKM sasaran	
Revisi Rencana Aksi	
Perbaikan yang diperlukan dari platform	<i>Terkait dengan struktur fasilitasi Rencana Aksi, termasuk perubahan anggota Pokja, fasilitator.</i>

Lampiran:

- Rencana Aksi untuk Pengembangan Industri XXXXXX di XXXXXX (versi XX)
- Surat Keputusan tentang Pembentukan Pokja (dan Penempatan Fasilitator) (jika direvisi)

Lampiran 6: Format Survei Profil untuk Lembaga Dukungan

1	Nama Lembaga/ Instansi	
2	Alamat	
3	Nomer Telepon Kantor	
4	Nomer Facsimile	
5	Alamat Situs Web	
6	Alamat e-mail	
7	Status Lembaga/ Hukum	
8	Tahun Berdiri	
9	Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab	
10	Profil Singkat	
11	Visi, Misi	
12	Program/ Layanan	
13	Persyaratan/ Prosedur untuk Program/ Layanan	
14	Sumber Pendanaan untuk Program/ Layanan	
15	Biaya yang Dikenakan kepada Pengguna	
16	Provinsi (atau Lembaga Nasional)	
17	Bidang Lembaga	
18	Sektor Industri Dimana Lembaga Tersebut Terspesialisasi	
19	Sukses Story dari Lembaga Tersebut	
20	Nama dan Kontak Staf yang Terkemuka dari Lembaga Tersebut untuk Instruktur, Ahli, Konsultan	

Contoh Profil Lembaga Dukungan (badan pemerintah)

1	Nama Lembaga/ Instansi	Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED), Disperindag Jatim
2	Alamat	Jalan Kedungdoro 86 - 90, Surabaya
3	Nomer Telepon Kantor	031-5343807
4	Nomer Facsimile	031-5345650
5	Alamat Situs Web	http://p3esurabaya.com
6	Alamat e-mail	p3esurabaya@gmail.com p3ed@rad.net.id
7	Status lembaga/ hukum	Badan Pemerintah
8	Tahun berdiri	-
9	Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab	-
10	Profil Singkat	P3ED merupakan lembaga yang didirikan pada September 2002 atas kerjasama antara Kemendag dan JICA. P3ED mempunyai tanggung jawab besar untuk terus menerus meningkatkan pelayanan dan kinerja untuk meningkatkan profesionalise sumber daya manusia (SDM) di Bidang ekspor dan promosi yang berkontribusi dalam pengembangan ekspor Jatim.
11	Visi, Misi Lembaga	Visi: 'Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka, berdaya saing global dan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat'. Misi: Untuk mewujudkan visi pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Jawa Timur dan mengaplikasikan misi dari Provinsi Jawa Timur yaitu mewujudkan makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat.
12	Program/ Layanan	Pelatihan dan Seminar: Program pelatihan dengan durasi 1 s/d 10 hari menyajikan pengetahuan praktis dan ketrampilan yang diharapkan dapat membantu para pelaku dunia usaha untuk memperoleh gagasan baru ataupun masukan, sehingga dapat membuat perubahan-perubahan positif yang dapat menguntungkan perusahaan. Program ini berkaitan dengan Persaingan Internasional, seperti; - Bagaimana memulai ekspor - Prosedur ekspor - Export costing and pricing - Kontak dagang melalui internet - Pembayaran ekspor dengan L/C dan non-L/C - Strategi pemasaran ekspor - Negoisasi dan kontrak dagang - Manajemen ekspor-impor - Pelatihan perdagangan internasional Pameran melalui Showroom / Mini Display: Menampilkan komoditas atau produk potensial untuk pasar ekspor, dengan harapan dapat dilanjutkan melalui kontak dagang yang lebih produktif dengan mendatangkan buyer potensial dari manca negara. Bagi para peserta juga akan mendapat kesempatan masuk dalam Virtual Exhibition yang memudahkan akses informasi secara internasional untuk mempromosikan

		produknya. Konsultasi Bisnis: Konsultasi bisnis dibidang rencana pengembangan produksi dan promosi ekspor, perluasan pasar bagi UKM yang diberikan oleh para ahli dibidangnya. Fasilitas yang Tersedia: - Gedung kantor modern berlantai dua di tengah kota yang strategis - Ruang auditorium lengkap berkapasitas +/- 100 peserta - Layanan informasi dan publikasi melalui mini resource center - Showroom permanen display - Ruang konsultasi bisnis dan memfasilitasi kontak dagang - Ruang kelas pelatihan lengkap dengan AC dan audio visual dengan kapasitas 15 dan 30 orang - Jaringan komputer mutakhir terpadu dengan ruang kelas komputer khusus lengkap dengan 20 PC yang dapat langsung mengakses internet - Tenaga pengajar yang handal dengan topik-topik bahasan berkualitas
13	Persyaratan/ prosedur untuk program/ layanan	Persyaratan Peserta: - Memiliki usaha dan legalitas usaha - Memiliki produk sendiri Prosedur pelayanan: - Pendaftaran, mengisi formulir dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan, - Seleksi administrasi. Peserta pameran dipilih dari alumni UP3S yang telah mengikuti pelatihan prosedur ekspor, disesuaikan antara produk IKM dan tema pameran yang difasilitasi oleh Disperindag Jatim.
14	Sumber pendanaan untuk program/ layanan	APBN, APBD, Biaya dari pengguna
15	Biaya yang dikenakan kepada pengguna	Peserta dari Dinas Perindag Kota/ Kab di wilayah Prov. Jatim tidak dikenakan biaya. Peserta mandiri dari IKM Potensial dikenakan biaya diklat sebesar Rp. 500.000 selama 3 hari.
16	Provinsi (atau Lembaga Nasional)	Jawa Timur
17	Bidang lembaga	Bidang pemasaran
18	Sektor Industri Dimana Lembaga Tersebut Terspesialisasi	Umum
19	Sukses Story dari Lembaga Tersebut	Mendampingi dan melatih pemilik PT. Promosia Asia Dagang Surabaya yang memproduksi handicraft mulai tahun 2003. Saat ini perusahaan tersebut sudah dapat melakukan kegiatan ekspor ke mancanegara.
20	Nama dan Kontak Staf yang Terkemuka dari Lembaga Tersebut untuk Instruktur, Ahli, Konsultan	Ibu Ir. Soekarsih Ibu Dra.Masita Rahman Bp. Joni Sumedyo

Contoh Profil Lembaga Dukungan (lembaga swasta)

1	Nama Lembaga/ Instansi	Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)
2	Alamat	Gedung ICMI Center Lt. 4, Jl. Warung Jati Timut No. 1 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740
3	Nomer Telepon Kantor	021-29407140 ext.131
4	Nomer Facsimile	021-29407150
5	Alamat Situs Web	Http://www.pinbukindonesia.com/
6	Alamat e-mail	pinbuk.indonesia@gmail.com/ pinbukpusat@yahoo.com
7	Status Lembaga/ Hukum	Yayasan
8	Tahun Berdiri	Maret 1995
9	Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab	Abdul Jabir Uksim
10	Profil Singkat	Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) didirikan pada Maret 1995 di Jakarta oleh Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) Prof. DR. B.J. Habibie, Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) alm. K.H. Hasan Basri dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) Zainul Bahar Noor, SE. Dalam kiprahnya, PINBUK banyak membantu penyaluran modal kepada masyarakat melalui BMT. Selain itu, PINBUK juga mendampingi IKM dalam capacity building, untuk pengembangan bisnisnya.
11	Visi, Misi	Sebagai lembaga fasilitator dan inkubator BMT dan KUBE, PINBUK memiliki misi; - Menumbuhkembangkan sumber daya insani dan sumber daya ekonomi mikro dan kecil melalui BMT dan KUBE serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya berdasarkan prinsip syariah. - Mewujudkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil, merata dan berkelanjutan sehingga umat mampu mengejawantahkan fungsinya sebagai rahmatan lil alamin. - Membangun lembaga yang mampu sebagai wahana berkarya dan beribadah bagi kader-kadernya sebagai insan kamil.
12	Program/ Layanan	Menetaskan dan mengembangkan BMT sebagai lembaga keuangan masyarakat. Pelatihan, Konsultansi, Pendampingan, Kemitraan dan layanan <i>networking</i> bagi UMKM
13	Persyaratan/ Prosedur untuk Program/ Layanan	Syarat-syarat kelompok IKM mendirikan BMT; - Kelompok minimum 20 orang IKM, - Mengajukan permohonan kepada PINBUK wilayah, - PINBUK wilayah melakukan pelatihan kepada calon BMT, - Calon BMT menyediakan modal awal dan akan ditambahkan modal penyertaan oleh PINBUK, contoh, modal awal BMT 30 juta dan diberikan modal penyertaan sebesar 100 juta. Syarat-syarat IKM menjadi anggota BMT; - Mengisi formulir permohonan pembiayaan, - Menyerahkan fotocopy KTP dan KK, - Menyerahkan laporan keuangan (Bagi Badan Usaha), - Menyerahkan fotocopy Surat Ijin Usaha

		(Keterangan Pengurus Wilayah) - Mempunyai Rekening Simpanan di BMT
14	Sumber Pendanaan untuk Program/ Layanan	PINBUK tidak menarik biaya layanan kepada IKM. Untuk keperluan operasional BMT sendiri berasal dari dana swadaya kelompok, yang berasal dari iuran wajib dan iuran pokok. Sumber pembiayaan terhadap pelayanan yang diberikan kepada BMT dan IKM berasal dari program-program yang sedang berjalan, seperti dari INKOPSA, dana program Kementerian Sosial, Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS) dan swadaya masyarakat (modal dan tabungan).
15	Biaya yang Dikenakan kepada Pengguna	- Bila ada program atau pelatihan yang didanai instansi lain, UMKM tidak dipungut biaya - Bila program pelatihan swadana, biaya yang ditanggung IKM besarnya dinegoisasikan sesuai dengan jumlah peserta, jenis pelatihan dan lama pelatihannya
16	Provinsi (atau Lembaga Nasional)	Nasional
17	Bidang Lembaga	Bidang manajemen/ akses keuangan
18	Sektor Industri Dimana Lembaga Tersebut Terspesialisasi	Umum
19	Sukses Story dari Lembaga Tersebut	
20	Nama dan Kontak Staf yang Terkemuka dari Lembaga Tersebut untuk Instruktur, Ahli, Konsultan	Irfan Sismiyananto Kurniawan



Buku Panduan Pengenalan 3K/3S

Untuk Industri Manufaktur Skala Kecil

Oktober 2014

Proyek JICA Pengembangan IKM melalui
Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia



Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Kementerian Perindustrian

PENGANTAR

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha dibidang industri yang memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional. Sesuai amanat UU Perindustrian No 3 Tahun 2014, pemerintah melakukan pengembangan dan pemberdayaan IKM guna mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk ekspor.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), sebagai salah satu upaya melaksanakan amanat tersebut, tengah menjalin kerjasama teknis dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam Proyek Pengembangan IKM Melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia. Proyek ini akan memfasilitasi pengembangan industri lokal melalui pembentukan dan pemanfaatan platform pengembangan industri lokal dengan tujuan mengkreasikan kasus sukses IKM. Selanjutnya, pengembangan industri lokal melalui platform tersebut akan dibentuk sebagai "model kerja" bagi wilayah lain, berdasarkan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman Proyek ini.

Maka sejalan dengan hal tersebut, disertai keinginan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Industri Nasional pada tahun 2035 yaitu "Menjadi Negara Industri Tangguh", dengan salah satu strateginya adalah mengembangkan industri kecil dan menengah, kami menyambut baik diterbitkannya Buku Panduan Pengenalan 3S untuk Industri Manufaktur Skala Kecil ini. Dengan adanya buku ini diharapkan pelaksanaan pembinaan IKM dilapangan akan lebih terarah dan efektif.

Akhirnya, kami mengajak semua pihak terkait untuk secara bersama-sama dan bersinergi mendukung pengembangan IKM nasional.

Jakarta, 2014

Direktur Jenderal
Industri Kecil dan Menengah


EUIS SAEDAH

PRAKATA

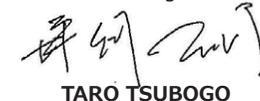
3K/3S (Keteraturan [*Seiri*], Kerapihan [*Seiton*], Kebersihan [*Seiso*]) adalah persiapan mendasar melalui perbaikan lingkungan kerja. 3K/3S adalah upaya yang harus dilakukan untuk mencapai perbaikan kualitas produk, peningkatan produksi disamping untuk mencapai efektifitas dan standarisasi kerja.

Di Indonesia, telah banyak diselenggarakan kegiatan pengenalan 5K/5S (3K/3S + Kelestarian [*Seiketsu*] dan Kedisiplinan [*Shitsuke*]) melalui seminar maupun pelatihan. Tetapi dalam penerapannya tidak sampai ke level industri skala kecil terutama di daerah, terkecuali pada industri yang memang mempunyai hubungan kemitraan dengan industri di luar negeri.

Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, mulai bulan September 2013 melalui bimbingan Proyek Kerjasama Teknis dengan JICA, telah dilaksanakan program bantuan pengenalan 3K/3S kepada para industri komponen kapal yang berpusat pada Unit Pendampingan Langsung (UPL) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal. Setelah bimbingan pengenalan 3K/3S dilaksanakan, dalam waktu singkat saja ternyata hasilnya segera terlihat. Telah tercipta perbaikan lingkungan kerja yang mendatangkan peningkatan efektifitas kerja.

Buku panduan ini bertujuan membagi dan mentransfer pengetahuan dan pengalaman baik yang telah diperoleh melalui Proyek Kerjasama JICA kepada pihak-pihak yang telah mendapat bimbingan di lembaga pendukung dan instansi pemerintah yang terkait dengan bidang industri. Buku panduan ini juga dapat menjadi referensi bagi pemilik pabrik atau industri, serta manajer yang akan memperkenalkan 3K/3S secara sendiri. Dalam panduan ini, diperkenalkan dan dipraktikkan 3K/3S di lebih banyak tempat industri melalui pemerintah setempat (UPL atau Bidang Industri Dinas), dan diharapkan dapat mencapai momentum upaya peningkatan kualitas produk dan peningkatan produksi.

Ketua Tim Tenaga Ahli JICA


TARŌ TSUBOGO

BUKU PANDUAN PENGENALAN 3K/3S
Di Industri Manufaktur Skala Kecil

Daftar Isi

PENGANTAR

PRAKATA

APA ITU 3K/3S? 1

- Terdiri dari apakah 3K/3S? 1
- Untuk apa 3K/3S? 1
- Langkah apa yang mengikuti 3K/3S? 2
- Apa saja yang harus dipersiapkan untuk pengenalan 3K/3S? 3

LANGKAH 1: PENINGKATAN LAYOUT WORKSHOP 5

LANGKAH 2: KETERATURAN (*Seiri*) 8

LANGKAH 3: KERAPIHAN (*Seiton*) 10

LANGKAH 4: KEBERSIHAN (*Seiso*) 12

LANGKAH 5: MONITORING 14

Check list 3K/3S untuk monitoring berkala 15

Pencatatan dan analisa kinerja produksi 17

Lampiran 1: Contoh tag/ label identifikasi

Lampiran 2: Contoh Lembar catatan produksi

Lampiran 3: Contoh poster slogan 3S

APA ITU 3K/3S?

Terdiri dari apakah 3K/3S?

3K/3S¹ adalah slogan yang diambil dari huruf besar **Keteraturan (Seiri)**, **Kerapihan (Seiton)**, **Kebersihan (Seiso)**. Slogan-slogan ini harus dilaksanakan di tempat kerja sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan kerja.

Masing-masing definisi 3K/3S tersebut adalah sebagai berikut:

Keteraturan	Memilah-milah barang yang perlu dan tidak perlu. Barang yang tidak diperlukan harus dibuang.
Kerapihan	Berusaha meletakkan barang yang diperlukan di tempat yang telah ditentukan, supaya mudah digunakan oleh siapa saja, dan harus selalu dalam kondisi siap digunakan.
Kebersihan	Selalu menciptakan kondisi yang bersih dengan cara membersihkan tempat kerja dan barang-barang di sekitar diri sendiri, supaya dalam kondisi tidak ada sampah dan tidak ada kotoran.

Catatan : Yang disebut dengan barang di sini adalah semua barang-barang atau benda yang ada di dalam tempat kerja atau pabrik, seperti mesin, peralatan, bahan baku, produk, jig/peralatan bantu, mebel, dan lain-lain.

Untuk apa 3K/3S?

Tujuan 3K/3S adalah mengurangi ketidakteraturan cara dan waktu kerja. Ini menjadi penyebab umum kelebihan stok atau barang rusak (*scrap*), meningkatkan standardisasi kerja, serta meletakkan dasar bagi perbaikan kualitas produk dan peningkatan produksi.

Hasil yang secara langsung atau tidak secara langsung adalah seperti berikut ini:

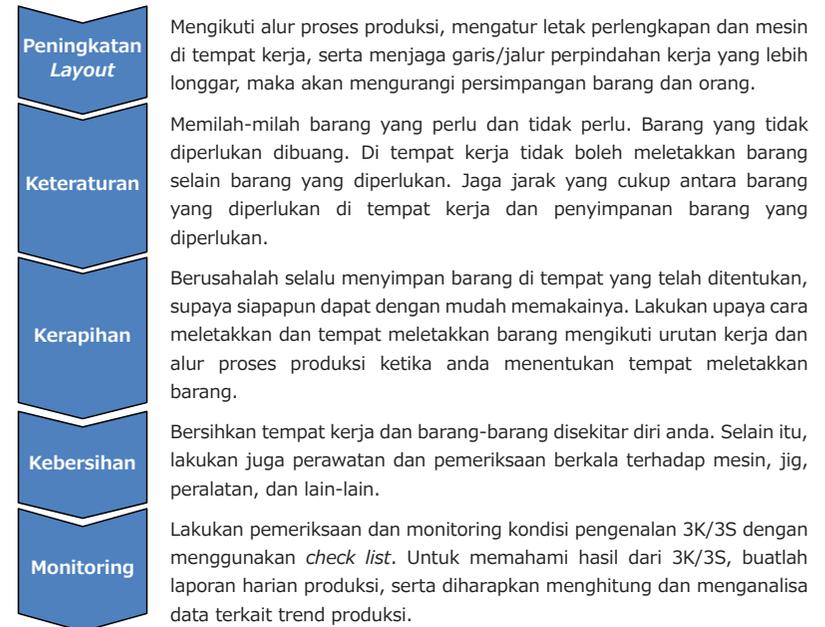
Meningkatkan efisiensi kerja	Barang tidak perlu yang diletakkan di tempat yang tidak teratur akan mengganggu proses kerja sehingga akan menurunkan efisiensi. Dengan penekanan 3K/3S, dapat menciptakan alur kerja yang lebih efisien. Dan juga dapat segera mengetahui dengan sekali lihat barang yang ada di dalam pabrik. Mudah dipakai dan mudah dikembalikan sehingga dapat menghemat waktu.
Meningkatkan perputaran stok barang	Dengan pembagian yang jelas antara barang yang perlu dan tidak perlu, menghilangkan kelebihan stock dan menghilangkan tempat meletakkan barang yang tidak diperlukan, maka akan memunculkan permasalahan yang tidak terlihat selama ini. Dengan berusaha

¹ 3S lebih dikenal sebagai 5S (3S+ Kelestarian [Seiketsu] dan kedisiplinan [Seiso]). Tapi buku ini berfokus pada 3S sehingga memiliki efek jangka pendek pada peningkatan workshop industri skala kecil. Hal ini karena praktek Kelestarian dan Kedisiplinan memerlukan waktu yang relatif lama untuk mengakar serta tertanam.

	meletakkan barang di tempat yang telah ditentukan, serta menjaga dalam keadaan dapat cepat digunakan oleh siapa saja, maka akan dapat menghilangkan kesia-siaan.
Meningkatkan motivasi dan citra perusahaan	Jika tempat kerja dibersihkan, maka akan tumbuh perasaan untuk selalu berkata "Marilah kita jaga tempat kerja yang bersih", sehingga membuat orang selalu optimis terhadap pekerjaannya. Selain itu akan muncul reputasi dari pelanggan yang secara alami menyebar dengan mengatakan "Pabrik itu selalu bersih".

Langkah apa yang mengikuti 3K/3S?

Sebagai alur dalam pengenalan 3K/3S ini, terdiri dari 5 langkah mulai dari "Peningkatan Layout (Pengaturan tata letak)" sampai "Monitoring", sesuai dengan gambar berikut ini:



Sebelum melakukan peningkatan Layout workshop/ pabrik, harus dimulai dengan:

- i) Mendengarkan pihak manajemen/pengelola,
- ii) Memberi penjelasan kepada pekerja (di bawah instruksi pengelola, dan menunjuk penanggungjawab yang mendapat tugas mengenalkan 3K/3S),
- iii) Mempersiapkan material yang diperlukan dalam pengenalan 3K/3S.

Termasuk dalam persiapan-persiapan ini, kira-kira dilakukan dalam waktu satu bulan untuk pengenalan Keteraturan-Kerapihan-Kebersihan dan mengulas layout. Setelah itu, sambil selalu menjaga kondisi untuk tetap bersih, lakukan monitoring, kemudian berpindah ke perbaikan yang berkelanjutan dalam metode kebersihan.

Apa saja yang harus dipersiapkan untuk pengenalan 3K/3S?

Sebelum memulai pengenalan 3K/3S, perlu untuk mempersiapkan hal-hal berikut ini:

Mendengarkan pihak manajemen/ pengelola	<p>Pastikan hal-hal terkait “mendengarkan”, minimal seperti di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target manajemen (dari segi nilai produksi, pasar, teknik), - Produk yang sedang diproduksi (bertanya dari produk umum ke tiap-tiap produk di bawahnya) - Proses kerja, - Jig, perlengkapan, mesin, dan pekerja yang diperlukan, - Kendala, batasan terkait proses kerja, penilaian pelanggan.
Penjelasan kepada pekerja	<p>Pihak manajemen harus memberi penjelasan kepada para pekerja mengenai garis besar kegiatan dan target pengenalan 3K/3S. Dalam acara penjelasan tersebut, perlu disiapkan poster yang bertuliskan slogan 3K/3S agar lebih efektif.</p> <p>Pihak manajemen sebaiknya menunjuk penanggung jawab yang mendapat tugas mengenalkan 3K/3S. Pihak manajemen bisa juga menjadi penanggung jawab untuk mengenalkan 3K/3S, tetapi sebaiknya menunjuk penanggung jawab seperti di bawah ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab Keteraturan/ Kerapihan, - Penanggungjawab Kebersihan (kebersihan tempat kerja dan perawatan alat-alat, jig), - Penanggungjawab monitoring.
Persiapan barang yang dibutuhkan dalam pengenalan 3K/3S	<p>Rak penyimpanan (untuk penyimpanan produk setengah jadi, barang habis pakai, jig), papan gantung (untuk menyimpan barang habis pakai, jig, dan lain-lain), cat (untuk menunjukkan aliran ketika mengulas layout), Isolasi warna (merah, hijau, kuning, biru, dan lain-lain).</p>



Situasi mendengarkan pihak manajemen (kiri)



Situasi penjelasan poster 3K/3S kepada pekerja

LANGKAH 1: PENINGKATAN *LAYOUT* WORKSHOP

Definisi dan Output

Meletakkan dengan tepat perlengkapan, mesin dan lain-lain dalam tempat kerja harus mengikuti aliran proses produksi, dan menjaga garis/ jalur kerja yang lebih longgar. Dengan mengusahakan perbaikan *layout* tempat kerja, kegiatan Keteraturan, Kerapian, Kebersihan setelahnya akan dapat dijalankan dengan mudah. Menjaga jarak yang diperlukan pada penyimpanan barang dan kegiatan produksi-kerja, mempersingkat garis/ jalur kerja (waktu-jarak perpindahan) dapat diharapkan.

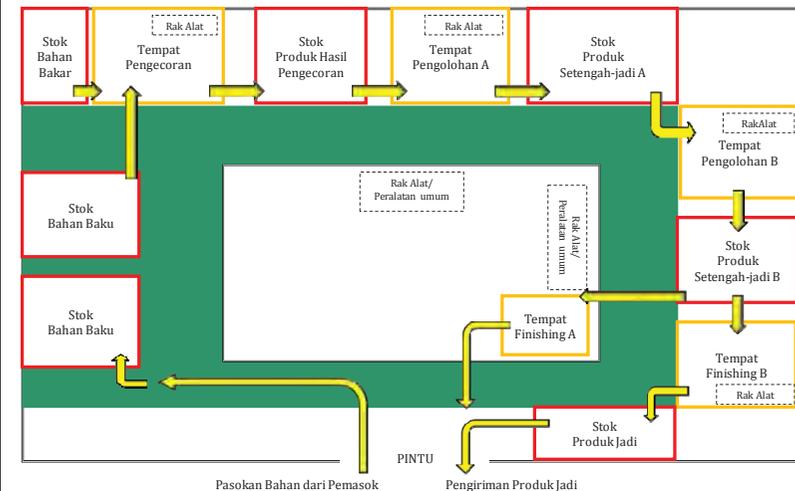
Hal-hal yang Harus Dilakukan

- 1) Memastikan kondisi *layout* tempat kerja.
 - Pastikan apakah kondisi lantai, dinding, dan atap cukup terlihat, apakah sirkulasi dan pencahayaannya cukup. Diharapkan lantai dalam kondisi rata dan tidak ada trap.
 - Apakah mesin, perlengkapan, bahan baku, barang setengah jadi, stok, barang rusak, macam-macam jig, sampah dan lain-lain diletakkan secara tidak rapi/ berantakan. Cara meletakkan dan tempat meletakkan semua ini harus dipastikan/ dicek.
 - Pastikan hasil dari mendengarkan pihak manajemen dan tempat kerja yang sebenarnya, kemudian apakah sudah menjadi *layout* tempat kerja yang sesuai dengan proses produksi. Dengan kata lain harus dilihat apakah tempat/ posisi pengaturan mesin dan perlengkapan cocok dengan prosesnya.
- 2) Melakukan kegiatan bersih-bersih di tempat kerja, membereskan barang yang tidak perlu seperti sampah yang mengendap/ dibiarkan terlalu lama, atap/ langit-langit, dinding, dan lantai harus dalam keadaan bisa dilihat dengan jelas.
- 3) Mengulas *layout* tempat kerja.
 - Membuat gambar *layout* supaya alurnya sesuai dengan proses produksi, misalnya dari penyimpanan bahan baku menuju proses/ treatment berikutnya, dari finishing produk sampai pemeriksaan terakhir sebelum pengiriman barang. Terutama untuk pengaturan tempat barang-barang besar seperti mesin, perlengkapan, perlu untuk diulas lagi. Dan juga, setelah diulas, dipastikan juga apakah cukup mendapat pencahayaan dan sirkulasi yang baik.
 - Di dalam *layout* tersedia blok kerja (misalnya, blok barang cetakan, blok mesin, blok *finishing*, dan lain-lain) dan tempat untuk meletakkan bahan baku dan produk sesuai alur proses produksi. Perlu untuk membedakan dengan jelas garis/ jalur kerja (bagian jalan) yang dibuat untuk perpindahan barang dan orang.

- Kalau *layout* yang diulas sudah dibuat, buatlah tanda dengan menggunakan isolasi warna atau cat (hijau, kuning, merah) di lantai sesuai dengan gambar. Setelah itu, dipindahkan di tempat meletakkan produk-bahan, barang besar seperti mesin dan perlengkapan sesuai dengan blok kerja, dan bahan baku.
 - Dengan menggunakan papan (peletakan) peralatan yang digantungkan di langit-langit atau di dinding di tiap-tiap blok kerja akan dapat menunjukkan proses kerja apa yang sedang dilakukan di area tersebut.
- 4) Jika proses kerja yang tertulis di atas selesai, lakukan lagi pemeriksaan sirkulasi dan pencahayaan, kemudian diperiksa yang terakhir kalinya mulai dari kesesuaian dengan gambar.

Tips dan Petunjuk

Gambar ulasan *layout* tempat kerja: *Layout* yang dimaksud terdiri dari: setelah bahan baku dibawa masuk, kemudian melewati proses pertama dan kedua (blok kerja produk setengah jadi), sampai proses pengiriman barang jadi. Bagian yang berwarna hijau adalah garis kerja, warna kuning adalah blok kerja, dan warna merah menunjukkan tempat meletakkan produk dan bahan baku.



Tanda di lantai mengikuti gambar: Tempat kerja terbagi dengan jelas atas blok kerja, tempat meletakkan barang yang diproduksi dan bahan baku. Misalnya, garis kerja diberi warna hijau, blok kerja diberi warna kuning, tempat meletakkan barang yang diproduksi dan bahan-bahan diberi warna merah.



Penunjuk isi kerja: Mengenai blok kerja, isi kerjanya ditunjukkan seperti pada contoh di bawah ini.



LANGKAH 2: KETERATURAN (SEIRI)

Definisi dan Output

Memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan, barang yang tidak diperlukan dibuang. Karena banyak barang yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang sedang dilakukan di tempat kerja dibiarkan begitu saja, barang-barang seperti ini tanpa disadari akan dapat mengundang masalah dan kesia-siaan.

Dengan tidak meletakkan barang selain barang yang dibutuhkan, i) jarak yang cukup yang dibutuhkan untuk kerja dan menyimpan barang yang diperlukan akan terjaga, ii) stok akan berkurang, waktu yang diperlukan untuk inventarisasi (pengambilan stok) akan bisa ditekan, yang secara hasil bisa diharapkan efektifitas seperti berkurangnya barang setengah jadi yang berlebihan.

Hal-hal yang Harus Dilakukan

- 1) Memahami dengan baik terlebih dahulu ada apa di tempat kerja tersebut.
 - Di dalam pabrik pada umumnya terdapat bahan baku, bahan bakar, barang yang diproduksi (barang setengah jadi, barang jadi, barang yang tidak sesuai, barang yang dikembalikan), mesin, perlengkapan, jig, pakaian kerja, sampah, dan lain-lain (kecuali dokumen).
- 2) Tentukan standar barang yang diperlukan untuk kerja saat ini. Lalu siapkan label identifikasi.
 - Pisahkan dengan jelas barang yang diperlukan dan barang yang tidak diperlukan. Untuk barang yang diperlukan, penanganannya dilakukan setelah dipastikan frekuensi pemakaiannya (misalnya, dipakai setiap hari, seminggu sekali dipakai, dipakai setiap satu bulan sekali, dsb).
 - Dan juga dipastikan apakah barang yang diperlukan ada dalam kondisi baik dan bisa dipakai.
 - Siapkan label identifikasi yang bisa dilihat dengan sekejap sesuai dengan yang tertulis di atas.
- 3) Sambil menempel label identifikasi, pilah-pilahkan barang sesuai dengan standar yang tertulis di atas setelah dilakukan pengecekan sekali lagi untuk pemberian nama barang.
- 4) Barang yang tidak diperlukan disingkirkan, barang yang diperlukan diringkas lagi lebih rinci.
 - Kumpulkan barang yang tidak diperlukan, lalu pikirkan cara pengolahan atau pembuangannya. Buanglah sesuai dengan cara pembuangannya.
 - Barang yang diperlukan ditentukan frekuensinya, kemudian dipilah berdasarkan frekuensi pemakaiannya.

- Meskipun barang tersebut diperlukan, kalau ternyata kondisinya tidak bisa dipakai, lakukan perbaikan atau dipertimbangkan lagi pembeliannya, kemudian dikembalikan dalam kondisi bisa dipakai.

Tips dan Petunjuk

Label identifikasi: Ketika memilah barang yang ada di tempat kerja, pada umumnya menggunakan kartu klasifikasi (ditunjukkan pada contoh di lampiran terpisah). Label identifikasi langsung ditempel di barang setelah dipilih dan diisi hal-hal yang diperlukan.

Barang yang tidak dipakai segera: Biasanya diklasifikasikan sebagai barang yang diperlukan. Misalnya barang yang hanya dipakai 1 bulan sekali disimpan di gudang. Sedangkan barang yang masa pemakaiannya sudah lewat, atau barang yang lebih dari 1 tahun tidak digunakan akan dianggap sebagai barang yang tidak diperlukan.



Penanganan barang yang tidak jelas: Di tempat kerja juga ada barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya atau penanggung jawabnya, serta barang yang tidak diketahui alasannya mengapa diletakkan di tempat tersebut. Untuk hal-hal seperti ini, kumpulkan jadi satu, tentukan batas waktunya, lalu letakkan di tempat yang mudah dilihat oleh siapa saja seperti pada gambar. Untuk barang-barang kecil, siapkan sebuah "kotak kehilangan", kemudian tanyakan/ jelaskan kepemilikan dan alasannya.

LANGKAH 3: KERAPIHAN (*SEITON*)

Definisi dan Output

Barang yang diperlukan diusahakan disimpan di tempat yang telah ditentukan supaya mudah dipakai oleh siapa saja. Di tempat kerja, sering dikatakan bahwa kegiatan "mencari" itu memerlukan waktu yang sangat lama. Kerapihan adalah suatu pekerjaan berusaha menstandarisasi cara meletakkan atau menyimpan barang yang diperlukan, serta kegiatan membuat mekanisme supaya "bisa cepat ditemukan", "bisa cepat digunakan", dan "bisa cepat dikembalikan". Sehingga diharapkan terjadi efektifitas dengan i) pengurangan waktu persiapan dalam menggunakan dan waktu mencari dan, ii) menurunnya pembelian yang sia-sia karena kehilangan, dan lebih-lebih lagi adalah pengurangan perubahan rencana atau penghentian proses produksi.

Hal-hal yang Harus Dilakukan

- 1) Barang yang diperlukan ditempatkan setelah ditentukan cara meletakkan dan tempat meletakkan yang sesuai dengan urutan kerja atau alur proses produksi:
 - Barang-barang yang diklasifikasikan sebagai barang yang diperlukan seperti bahan baku, bahan bakar, barang yang diproduksi (barang setengah jadi, barang jadi, barang yang tidak sesuai, barang yang dikembalikan) jig, alat ukur, diperiksa tempat penggunaannya dan asalnya (barang yang diproduksi), kemudian simpanlah dalam lingkup yang dekat dengan digunakannya barang-barang tersebut supaya tidak terjadi gangguan pengangkutan dari tempat asalnya.
 - Pikirkan tempat meletakkan barang sesuai dengan frekuensi pemakaian barang yang diperlukan. Barang yang frekuensi pemakaiannya tinggi, disimpan di lokasi yang lebih dekat lagi dengan pekerja.
- 2) Mengupayakan cara meletakkan dan penyimpanan yang cocok dengan frekuensi dan cara penggunaan, kemudian setelah ditunjukkan nama barangnya, barulah diletakkan.
 - Mengenai cara penggunaan, telaah terlebih dahulu cara penggunaan, cara membawanya, dan frekuensinya. Supaya tidak diperlukan kegiatan yang berulang-ulang dan rumit dalam mengeluarkan barang, maka perlu kerapian dengan cara yang mudah dipahami oleh siapa saja. Mengenai cara mengembalikannya juga sama.
 - Untuk barang yang perlu dibuang setelah digunakan (seperti, tabung gas kecil, bahan baku sisa), tolong dipertimbangkan segi keamanannya, perlu ditelaah cara dan tempat penyimpanan sampai ke pembuangannya.

Tips and Petunjuk

Contoh Kerapihan pada berbagai macam jenis jig/ peralatan:

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pemakaian dan kemudahan dalam melihat, pada umumnya penyimpanan jig menggunakan papan penyimpanan peralatan. Papan peralatan tidak terbatas di satu tempat saja, boleh juga diletakkan beberapa di tiap-tiap blok kerja.



Pada akhirnya, penting sekali untuk menjaga kerapihan supaya “bisa diketahui dengan sekali lihat”. Perlu diperhatikan bahwa kerapihan itu bukanlah hanya menyusun berderet (merubah deretan barang, atau menumpuk ulang) atau memperlihatkan (mengatur barang) dengan indah.



Mengenai penunjuk: Kerapihan yang tampak pada tempat meletakkan barang merupakan hal yang efektif. Meskipun sudah berusaha menyimpan dengan baik, jika informasi terkait barang (misalnya, nama, ukuran, kegunaan, cara menggunakan, dan lain-lain) kurang, ada kemungkinan akan berakhir dengan suatu deretan belaka. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai mekanisasi yang disebut dengan “bisa cepat ditemukan”, “bisa cepat digunakan”.

LANGKAH 4: KEBERSIHAN (*SEISO*)

Definisi dan Output

Membersihkan barang-barang di sekitar diri dan tempat kerja. Kemudian, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan mesin, perlengkapan, macam-macam jig secara berkala. Dengan melakukan *kebersihan*, diharapkan hasil sebagai berikut; i) kesan yang diberikan kepada pelanggan menjadi baik, ii) mudah diketahui jika ada ketidakberesan terkait kondisi keselamatan-kebersihan dan pengontrolan, iii) mudah dicegah jika ada masalah seperti kerusakan mesin-perengkapan sebelum terjadi.

Hal-hal yang Harus Dilakukan

- 1) Menetapkan jadwal dan penanggung jawab masing-masing tempat berikut ini termasuk spasi/ ruang untuk blok tempat kerja, bahan baku, tempat meletakkan produk yang diproduksi, garis/ jalur kerja, toilet dan kantor.
 - Tentukan apa dan dengan frekuensi yang bagaimana membersihkan kotoran-kotoran seperti sampah, puing-limbah (*cutting*), noda air, kotoran minyak, jamur, barang-barang yang tidak diperlukan, dan lain-lain. Buatlah rencana dalam membagi isi dan obyek kebersihan berdasarkan frekuensinya misalnya dibersihkan setiap hari, dibersihkan secara berkala, dan dibersihkan sekaligus (hal yang sama juga dilakukan untuk *maintenance*).
 - Untuk blok kerja, perlu dibersihkan sesering mungkin, misalnya jika seluruh pekerjaan sudah selesai harus langsung dibersihkan. Penting untuk dibiasakan melakukan bersih-bersih jika ada yang kotor. Disarankan setiap hari mengalokasikan waktu sekitar 5 menit untuk bersih-bersih.
- 2) Untuk mesin, perlengkapan, dan macam-macam jig/ peralatan bantu, tentukanlah jadwal dan tugaskan penanggungjawabnya.
 - Tentukan apa dan dengan frekuensi yang bagaimana membersihkan kotoran-kotoran seperti sampah, limbah potongan (*cutting*), noda air, kotoran minyak, karat, barang-barang yang tidak diperlukan dan lain-lain.
 - Mula-mula tentukan terlebih dahulu hal-hal yang diperiksa secara spesifik pada mesin, perlengkapan, macam-macam jig/ peralatan bantu seperti alat menuang minyak, mesin polishing, alat kalibrasi, dan lain-lain. Baru kemudian tetapkan frekuensinya bagaimana.

- 3) Pastikan penggunaan, ada tidaknya peralatan untuk kebersihan yang digunakan untuk bersih-bersih.
- 4) Lakukan *kebersihan* sesuai dengan rencana kebersihan yang telah ditentukan sebelumnya seperti pada point di atas.

Tips dan Petunjuk

Ide untuk mempermudah kebersihan: Untuk mencegah debu dan serpihan-serpihan sisa potongan/ *cutting* berhamburan, bisa menggunakan *cover sheet* atau partisi. Seperti halnya macam-macam jig, peralatan kebersihan penting untuk menyimpannya ditempat yang mudah ketika akan dipakai, dan mudah ketika mengembalikannya lagi.



Mengumumkan/ memberitahukan jadwal kebersihan: Lakukan dengan menyiapkan daftar piket/ giliran seperti contoh di bawah ini, hal ini merupakan upaya umum dalam pemberitahuan jadwal *kebersihan* kepada para pekerja.

Penanggung Jawab	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Rizky	Tempat Permesinan	Jalur kerja	Kamar kecil	Tempat Pengecoran	-
Wawan	Tempat Pengecoran	Tempat Produk	Kantor	Tempat Permesinan	-
Sulaiman	Tempat Pematangan	Tempat produk	Ruang Istirahat	Tempat Pematangan	-

LANGKAH 5: MONITORING

Dalam kerjasama teknis antara JICA dan Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah, khususnya dalam industri komponen kapal di kabupaten Tegal yang telah melaksanakan pengenalan 3K/3S, telah muncul contoh-contoh hasil yang sangat baik dari upaya yang telah dilakukan. Seperti bisa terlihat dari gambar dibawah ini:



Situasi sebelum 3K/3S (contoh usaha A)



Situasi setelah 3K/3S (contoh usaha A)



Situasi sebelum 3K/3S (contoh usaha B)



Situasi setelah 3K/3S (contoh usaha B)

Tetapi, hal ini pasti tidak boleh hanya berhenti pada bimbingan ketika pengenalan saja. Setelah pengenalan pun, perlu untuk melakukan bimbingan monitoring melalui kunjungan berkala. Hal ini penting dalam meletakkan kegiatan 3K/3S sebagai tugas sehari-hari pengelolaan workshop, menjaga tempat kerja yang telah diperbaiki secara berkelanjutan, serta terus melakukan perbaikan sebagai suatu keharusan. Dengan menggunakan referensi seperti di bawah ini, disarankan untuk melakukan bimbingan monitoring kondisi pengenalan 3K/3S.

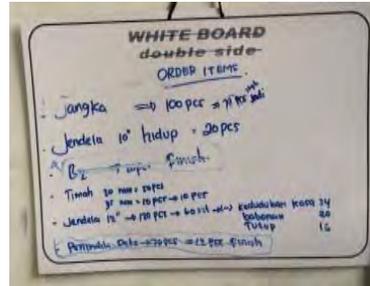
Check list 3K/3S untuk monitoring berkala

Keterangan	
- Apakah tidak ada barang yang tidak perlu atau tidak jelas di masing-masing blok kerja?	
- Apakah tidak ada barang yang tidak perlu atau tidak jelas pada tempat meletakkan bahan baku, produk yang diproduksi (barang setengah jadi, stock, barang rusak, barang yang dikembalikan)?	
- Apakah tidak ada barang yang tidak perlu atau tidak jelas di jalur kerja?	
- Apakah tidak ada barang yang tertempel label Identifikasi?	
Kerapihan	
- Apakah pada masing-masing blok kerja dan jalur kerja barang yang perlu (barang yang dipakai) tidak terbelengkalai?	
- Apakah macam-macam jig/ alat pengukur terletak sesuai dengan urutan kerja?	
- Apakah macam-macam jig dan alat pengukur yang frekuensi pemakaiannya tinggi diletakkan di dekat tempat kerja?	
- Apakah macam-macam jig/ alat ukur tersimpan dalam kondisi sudah diberi nama?	
- Apakah alat ukur disimpan di tempat yang stabil (tidak mudah goncang)? Apakah sudah dipertimbangkan untuk pencegahan berubah bentuk?	
- Pada tempat meletakkan bahan baku dan produk yang diproduksi, apakah barang yang diperlukan telah disimpan dengan cara dan tempat yang telah ditentukan?	
- Pada tempat meletakkan bahan baku dan produk yang diproduksi, apakah barang yang diperlukan disimpan dalam keadaan sudah diberi nama?	
- Apakah tidak ada keluhan atau keinginan dari para pekerja mengenai tempat meletakkan barang pada tempat kerja, cara meletakkan, cara mengembalikan?	
- Apakah produk yang diproduksi, bahan baku sudah dalam posisi <i>First-in First Out</i> (pertama masuk pertama keluar)?	
- Apakah barang rusak-barang yang dikembalikan, barang setengah jadi dan stock disimpan di tempat yang terjangkau dengan nama yang lain?	
- Apakah bahan baku yang panjang tidak diletakkan berdiri? Apakah ada penyangga untuk barang yang mudah jatuh?	
- Apakah barang-barang tidak menumpuk dan mudah roboh? Apakah tidak ditumpuk secara berlebihan?	
- Apakah ada penunjuk khusus dan pagar/ pengaman untuk tempat meletakkan barang yang perlu penanganan khusus (bahan bakar atau tabung gas),?	

Kebersihan	
Rencana kebersihan dan alat-alat yang digunakan	
- Apakah rencana kebersihan sudah ditetapkan (objek, isi, kewajiban, frekuensi)?	
- Apakah cara membersihkan sudah ditetapkan?	
- Apakah alat-alat kebersihan sudah dicek/ teratur (mudah dipakai/ dikembalikan)?	
Pemeriksaan dan pengecekan kebersihan	
- Apakah sudah dibersihkan sesuai dengan rencana kebersihan?	
- Apakah cara dan poin pemeriksaan-pengecekan sudah ditetapkan?	
- Mengenai bagian-bagian yang belum dibersihkan yang ditemukan ketika memeriksa-mengecek, apakah langsung segera dibersihkan?	
Produk yang diproduksi, bahan baku	
- Apakah sampah, puing-puing, kotoran, debu, noda air, karat yang berasal dari barang setengah jadi, stok dan bahan baku sudah dibersihkan?	
- Apakah dipasang bantalan dan pembatas untuk mencegah benturan sesama bahan baku atau produk yang diproduksi?	
- Apakah kotoran pada kontainer, troli, palet yang digunakan untuk memindah barang sudah dibersihkan?	
Mesin, perlengkapan, macam-macam jig	
- Apakah sampah, puing-puing, kotoran, debu, noda air, karat yang berasal dari mesin, perlengkapan sudah dibersihkan?	
- Apakah mesin dan perlengkapan sudah dirawat secara tepat supaya bisa langsung digunakan?	
- Apakah sampah, puing-puing, kotoran, debu, noda air, karat yang berasal dari macam-macam jig (termasuk cetakan) sudah dibersihkan?	
- Apakah macam-macam jig sudah dirawat secara tepat supaya bisa langsung digunakan?	
- Apakah sampah, puing-puing, kotoran, debu, noda air, karat yang berasal dari alat-alat pengukur sudah dibersihkan?	
- Apakah alat-alat ukur sudah dirawat secara tepat supaya bisa langsung digunakan? Apakah sudah paham masa berlakunya?	
- Apakah sampah, puing-puing, kotoran, debu, noda air, karat yang berasal dari meja kerja, rak, dan alat ukur lainnya sudah dibersihkan?	
- Apakah sampah, puing-potongan, kotoran, debu, noda air, karat yang berasal dari pipa, kabel listrik, dan <i>exhaust fan</i> sudah dibersihkan?	
- Apakah sampah, puing-puing, kotoran, debu, noda air, karat yang berasal dari penerangan, lampu neon sudah dibersihkan?	

Pencatatan dan analisa kinerja produksi

Untuk memahami efektifitas kegiatan 3K/3S, tidak hanya berhenti pada monitoring yang menggunakan *check list*, tetapi perlu juga memastikan nilai produksi yaitu peningkatan volume produksi, peningkatan efisiensi produksi, pengurangan stok, penurunan barang rusak dan barang yang dikembalikan, dengan cara mencatat tren produksi dan menganalisa transisinya.



Setelah membuat laporan produksi seperti pada lampiran (laporan produksi yang memuat volume produksi, jumlah barang setengah jadi, jumlah stok, jumlah barang rusak), diharapkan untuk berupaya menganalisa dan menghitung data tren produksi.

Selanjutnya, mengenai kemajuan kondisi maupun sasaran produksi, pasanglah *whiteboard* (papan putih) di tempat yang mudah terlihat di dalam workshop seperti pada contoh gambar di sebelah kanan. Papan ini sebaiknya juga diketahui oleh semua pekerja.

Lampiran 1: Contoh label identifikasi

Label Identifikasi		No.
Kategori	<input type="checkbox"/> Mesin <input type="checkbox"/> Jig dan alat-alat <input type="checkbox"/> Alat ukur <input type="checkbox"/> Produk jadi <input type="checkbox"/> Product reject <input type="checkbox"/> Produk kembali <input type="checkbox"/> Materi (bahan) <input type="checkbox"/> Parts/ komponen <input type="checkbox"/> Produk dalam proses <input type="checkbox"/> Bahan bakar <input type="checkbox"/> Mebel/ <i>fitting</i> <input type="checkbox"/> Limbah/ sampah <input type="checkbox"/> Lain-lain _____	
Nama barang		
Jumlah barang		
Penaksiran	<input type="checkbox"/> Tidak perlu => Alasan _____ Cara pembuangan: _____ <input type="checkbox"/> Perlu => <input type="checkbox"/> Digunakan <input type="checkbox"/> Tidak digunakan Jika 'Digunakan' <input type="checkbox"/> Sering digunakan <input type="checkbox"/> Kadang kadang digunakan <input type="checkbox"/> Jarang digunakan Dalam proses apa/ untuk tujuan apa? _____	
Penaksir		
Tgl. penaksiran		

Lampiran 2: Contoh lembar catatan produksi

Catatan Produksi Bulanan : UD. AAA

Bulan: Januari, Tahun: 2014

Minggu	Barang pesanan	Rencana produksi	Hasil produksi	Barang reject		Barang siap kirim	Sisa barang	Keterangan
				Perbaiki	Scrap			
Ke-1	Produk A	13	13	0	0	13	0	Sasaran terpenuhi
	Produk B	25	25	1	0	25	0	Sasaran terpenuhi
	Produk C	100	102	0	1	101	1	Sasaran terpenuhi
	Produk D	18	18	0	1	17	0	(-) Bahan baku
	Produk E	3	3	0	0	3	0	Sasaran terpenuhi
	Produk F	30	30	0	0	30	0	Sasaran terpenuhi
	Produk G	30	27	0	4	23	0	(-) Bahan baku → minggu depan
Ke-2	Produk G	7	8	0	0	8	0	Sasaran sejak minggu ke-2 terpenuhi
	Produk H	6	6	0	0	6	0	Sasaran terpenuhi
	Produk I	6	6	0	0	6	0	Sasaran terpenuhi
	Produk J	30	30	0	1	29	0	(-) Bahan baku
	Produk K	30	63	0	0	0	0	Akan dimachining dan finishing minggu depan
	Produk L	50	50	0	2	48	0	Parts X utk produk B
Ke-3	Produk M	6	4	0	0	0	0	(-) Bahan baku → minggu depan
	Produk K	72	76	0	1	75	0	Sasaran sejak minggu ke-3 terpenuhi
	Produk L	50	50	12	18	0	32	Parts Y utk produk B
Ke-4	Produk M	6	6	0	0	0	0	Mesin rusak, akan di finishing minggu depan
	Produk O	4	4	0	0	4	0	Sasaran terpenuhi
	Produk P	26	26	0	0	26	0	Sasaran terpenuhi
	Produk Q	50	50	0	0	0	42	Parts Z utk produk B

Lampiran 3: Contoh poster slogan 3S

PELAKSANAAN 3S

~ menuju lompatan produktivitas ~

SEIRI = Keteraturan

✦ Memilah barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan pada proses produksi.

Barang yang diperlukan:

Bahan baku, Barang setengah jadi, Barang jadi, Mesin/alat.

Barang yang tidak diperlukan:

Barang yang dirijek, Sampah/ Limbah/ Rongsok

SEITON = Kerapihan

✦ Meletakan barang yang diperlukan di tempat yang ditentukan sesuai klasifikasi agar mudah ditemukan dan digunakan sesuai dalam alur kerja produksi.

✦ Membebaskan lajur pejalan kaki dari barang apapun.

SEISOU = Kebersihan

✦ Membersihkan lingkungan pekerjaan (lantai, dinding, ventilasi, termasuk kamar mandi) dan memelihara mesin/ alat secara baik.

Daerah Mana dan Industri Apa yang Menjadi Sasaran?

Proyek menargetkan daerah dan industri berikut sebagai sasaran platform. Industri sasaran dipilih dari Industri Klaster/ OVOP yang telah ditetapkan oleh Kemenperin atau Industri Unggulan Propinsi/ Kompetensi Inti Industri Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui konsultasi dengan Ditjen IKM.



Wilayah I: Fesyen Ulos di Samosir (SUMUT)

Ulos adalah kain dengan motif unik daerah lokal yang ditunen secara tradisional, digunakan terutama dalam upacara tradisional seperti pernikahan & ritual keagamaan. Samosir (terkenal dengan Danau Toba-nya) adalah salah satu sentra produksi ulos. Proyek ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar lokal dan turis melalui pengembangan dan diversifikasi produk fashion ulos, dan membentuk Kelompok Usaha Bersama dari pengrajin kerajinan ulos.



Wilayah I: Pengolahan Aloe Vera di Pontianak (KALBAR)

Kota Pontianak yang terkenal sebagai kota budidaya aloe vera memiliki 16 industri pengolahan aloe vera untuk makanan minuman (mamin) dan kosmetik. Proyek ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi IKM dalam menembus pasar mamin nasional dan regional, serta memperbaiki produk mamin olahan aloe vera agar memenuhi persyaratan keamanan dan kebutuhan dari pasar sasaran.



Wilayah II: Komponen Logam di Tegal (JATENG)

Tegal terkenal dengan produksi penuangan dan pencetakan logam dengan lebih dari 2.500 IKM memproduksi komponen logam untuk mesin pertanian, perkapalan, mesin berat, otomotif, dan lain-lain. Proyek ini berfokus pada komponen kapal dan memfasilitasi IKM dalam meningkatkan keterampilan/ pengetahuan guna memperoleh sertifikasi sesuai dengan standar BKI (PT. Biro Klasifikasi Indonesia), serta mampu memasok komponen logam kepada perusahaan pembangunan kapal yang besar.



Wilayah II: Sepatu/ Alas Kaki di Mojokerto (JATIM)

Jawa Timur merupakan salah satu wilayah produsen alas kaki utama, yang termasuk didalamnya Kota Mojokerto yang mengakomodasi hampir 273 IKM. Proyek ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi IKM dalam memproduksi sepatu/ alas kaki yang kuat dan menciptakan branding (merek daerah) sepatu/ alas kaki Mojokerto.



Wilayah III: Pengolahan Kakao (SULTENG)

Pemerintah provinsi membangun pabrik pengolahan kakao sebagai pusat pasokan bahan cokelat dan pusat pengolahan aneka produk cokelat. Proyek ini memfasilitasi pabrik untuk beroperasi secara komersil, sebagaimana juga memfasilitasi IKM cokelat/ kue untuk memanfaatkan cokelat buatan dari biji kakao lokal dan membangun jaringan pasar modern regional dan lokal di Palu.



Wilayah III: Mebel Rotan (SULTENG)

Saat ini ada sekitar 20 IKM mebel rotan beroperasi di Kota Palu dengan jumlah pengrajin terampil yang terbatas. Proyek ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan memperluas akses pasar modern lokal (hotel, restoran, kantor, dan lain-lain), dan membentuk sistem pembinaan IKM melalui sistem yang memastikan cara pembuatan mebel rotan dengan mutu yang baik.



Proyek Pengembangan IKM
Melalui Peningkatan Penyediaan Layanan di Indonesia



Penyediaan dukungan yang lebih baik untuk pengembangan industri lokal

Kantor Proyek JICA

Alamat : Direktorat Jenderal IKM, Lt. 14, Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12950
Telp/ Fax : 021 5253782
Situs Web : <http://www.jica.go.jp/project/english/indonesia/012/index.html>



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



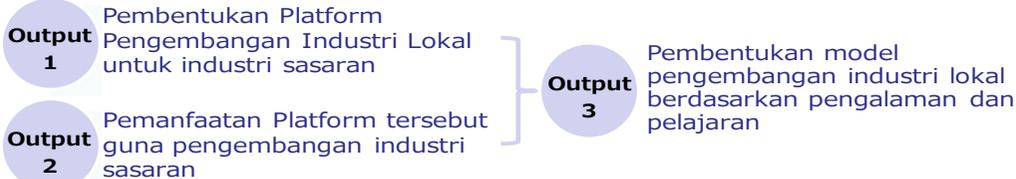
Japan International Cooperation Agency

Proyek SMIDeP Melakukan Apa?

Kegiatan/ layanan dukungan untuk industri kecil dan menengah (IKM) pada umumnya direncanakan dan dilaksanakan melalui pemikiran dan prosedur dari pihak penyedia layanan. Artinya, dukungan yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan dan kebutuhan industri. Oleh karena itu, pihak industri mengharapkan kepada pemangku kepentingan terkait persiapan dan penyediaan kegiatan/ layanan dukungan yang lebih baik melalui diskusi maupun kerjasama dengan pelaku industri.

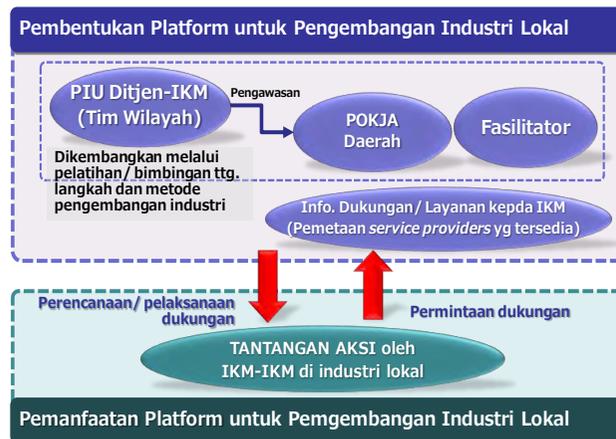
Proyek ini akan memfasilitasi pengembangan/ peningkatan dan promosi pemasaran produk oleh industri sasaran di ketiga wilayah sasaran dengan tujuan mengkreasikan kasus sukses dari IKM melalui pembentukan dan pemanfaatan "service delivery platform" (platform pengembangan industri lokal) selama tiga (3) tahun (2013-2015). Selanjutnya, pengembangan industri lokal melalui platform tersebut akan dibentuk sebagai "model kerja" bagi wilayah lain, berdasarkan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman Proyek ini.

Tujuan Proyek
Model untuk pengembangan industri lokal berbasis platform tersebut akan diterapkan ke wilayah-wilayah di Indonesia oleh Kemenperin.



Bagaimana Caranya Mengembangkan Platform?

Platform Pengembangan Industri Lokal yang akan dibentuk dalam kegiatan Proyek terdiri dari Unit Implementasi Proyek (PIU) di Ditjen-IKM, Kelompok Kerja (POKJA) dan fasilitator di masing-masing daerah, serta dikembangkan melalui pelatihan/ bimbingan tentang langkah dan metode fasilitasi bagi pengembangan industri dan pemetaan *service providers* yang tersedia.



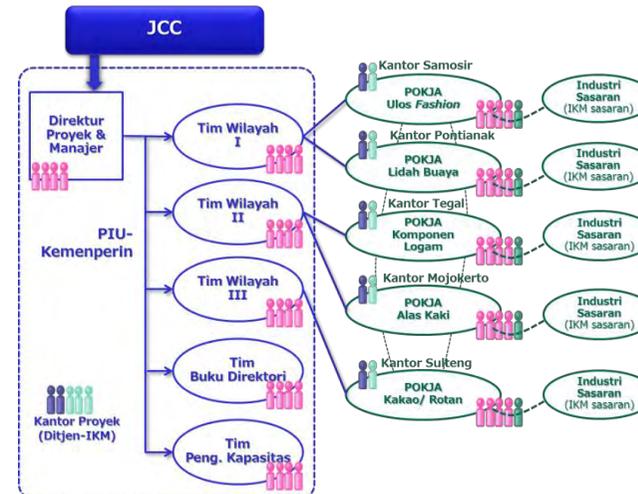
Bagaimana Alur Pemanfaatan Platform?



Kegiatan pengembangan industri lokal melalui platform tersebut dilaksanakan sesuai dengan tahapan berikut : Setelah pembentukan struktur platform dan pelatihan fasilitasi pengembangan industri, POKJA dan fasilitator memasuki tahap diagnosis industri, kemudian melakukan identifikasi IKM-IKM sasaran dan tantangan aksi mereka, penyusunan rencana dukungan, serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan/ layanan dukungan serta monitoring dan evaluasi. Kemudian kegiatan kembali ke tahap awal secara periodik untuk merevisi isi rencana dukungan sesuai dengan kemajuan dan hasil pelaksanaan.

Bagaimana Cara Mengelola Proyek?

Kantor utama proyek berada di Ditjen IKM, Kemenperin Jakarta, dan kantor daerah ada di setiap daerah sasaran yang dialokasikan oleh setiap Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Di setiap kantor daerah, staf *counterpart* (C/P) dari anggota POKJA/ fasilitator ditempatkan guna melaksanakan tugas mereka didalam Proyek sesuai dengan tahapan pengembangan industri (terlihat diatas).



Dalam rangka mewujudkan pemberian bimbingan yang memadai kepada staf C/P, tenaga ahli dan konsultan nasional ditempatkan di setiap lokasi kerja. Berdasarkan struktur operasional tersebut, Tim Ahli memastikan kelancaran dan keseragaman pelaksanaan kegiatan Proyek di setiap wilayah kerja.